



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN LKPJ

KOTA MADIUN
TAHUN 2024



KOTA MADIUN





KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024 menguraikan capaian kinerja, implementasi program dan kegiatan, serta pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2024 secara komprehensif dan transparan, yang dapat digunakan sebagai media evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai tanggung jawab Pemerintah Kota Madiun dalam menjalankan amanah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ucapan terima kasih yang tulus, kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, saran dan pemikiran selama penyusunan laporan ini. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan guna perumusan kebijakan dalam pembangunan di masa yang akan datang.

Sekian terima kasih.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Madiun, 24 Maret 2025
WALI KOTA MADIUN

Dr. Disy H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Dasar Hukum.....	I-3
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-4
1.2.1. Visi	I-4
1.2.2. Misi	I-5
1.2.3. Strategi dan arah kebijakan Daerah	I-7
1.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah	I-16
1.3. Data Umum Daerah	
1.3.1. Data Geografis Daerah	I-20
1.3.2. Jumlah Penduduk	I-22
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk	I-27
1.3.4. Jumlah ASN	I-27
1.3.5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	I-30
1.3.6. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja	I-38
1.3.7. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan	I-46
1.4. Sistematika	I-49
BAB II : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
2.1 Pendapatan Daerah.....	II-1
2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	II-2
2.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah 2024.....	II-5
2.2 Belanja Daerah.....	II-6
2.3 Pembiayaan Daerah.....	II-11
2.3.1 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	II-11



2.4.	Perubahan Penjabaran APBD.....	II-13
2.4.1.	Perubahan Penjabaran APBD 2024.....	II-13
2.5	Perubahan APBD.....	II-15
2.5.1	Perubahan Pendapatan Daerah.....	II-16
2.5.2	Perubahan Belanja Daerah.....	II-17
2.5.3	Perubahan Pembiayaan Daerah.....	II-18

BAB III: HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1	CAPAIAN KINERJA MAKRO KOTA MADIUN TAHUN 2024	III-1
3.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	III-2
3.1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	III-6
3.1.3	Inflasi	III-10
3.1.4	Ketenagakerjaan.....	III-12
3.1.5	Kemiskinan	III-17
3.2	CAPAIAN KINERJA TUJUAN SASARAN KOTA MADIUN TAHUN 2024.....	III-24
3.3	CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	III-120
3.3.1	Pelaksanaan Urusan Wajib, Pilihan dan Fungsi Penunjang.....	III-120
3.3.2	Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.....	III-371
3.4	KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN	III-376
3.5	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	III-390
3.6	PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN	III-415
3.7	INOVASI YANG DILAKUKAN.....	III-441
3.8	PENGHARGAAN YANG DITERIMA	III-456

BAB IV: CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

BAB V : PENUTUP.....	V-1



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kota Madiun 2019-2024.....	I-6
Tabel I.2	: Strategi, Arah Kebijakan Kota Madiun	I-8
Tabel I.3	: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Kota Madiun Tahun 2024	I-16
Tabel I.4	: Jumlah RT dan RW di Kota Madiun	I-22
Tabel I.5	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2024	I-23
Tabel I.6	: Jumlah Kepala Keluarga (KK) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2024... ..	I-23
Tabel I.7	: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024	I-24
Tabel I.8	: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	I-25
Tabel I.9	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2024	I-26
Tabel I.10	: Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	I-28
Tabel I.11	: Persebaran Jumlah ASN Perangkat Daerah.....	I-29
Tabel I.12	: Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Jabatan Tahun 2024	I-30
Tabel I.13	: Ringkasan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 Kota Madiun	I-33
Tabel I.14	: Ringkasan Realisasi Pajak Tahun Anggaran 2024 Kota Madiun... ..	I-34
Tabel I.15	: Ringkasan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 Kota Madiun	I-31
Tabel I.16	: Ringkasan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 Kota Madiun	I-35
Tabel I.17	: Ringkasan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024.....	I-36
Tabel I.18	: Ringkasan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 Kota Madiun.....	I-37



Tabel I.19	: Ringkasan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 Kota Madiun.....	I-37
Tabel I.20	: Ringkasan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 Kota Madiun.....	I-38
Tabel I.21	: Ringkasan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024	I-39
Tabel I.22	: Ringkasan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024	I-40
Tabel I.23	: Ringkasan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024.....	I-41
Tabel I.24	: Ringkasan Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024	I-41
Tabel I.25	: Ringkasan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024	I-42
Tabel I.26	: Ringkasan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024.....	I-42
Tabel I.27	: Ringkasan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	I-46
Tabel I.28	: Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Tahun 2023 s.d. 2024	I-48
Tabel II.1	: Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2024	II-6
Tabel II.2	: Target Belanja Kota Madiun Tahun 2024	II-11
Tabel II.3	: Target Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2024	II-13
Tabel II.4	: Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024....	II-14
Tabel II.5	: Ringkasan Perubahan Pendapatan Tahun 2024	II-16
Tabel II.6	: Perubahan Belanja Tahun 2024	II-17
Tabel II.7	: Perubahan Pembiayaan Tahun 2024.....	II-18
Tabel III.1	: Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2024	III-2
Tabel III.2	: Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)	III-7
Tabel III.3	: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2023-2024 (%).....	III-9
Tabel III.4	: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2019-2024	III-10
Tabel III.5	: Penduduk Usia Kerja dan angkatan Kerja, Agustus 2023 – Agustus 2024	III-13



Tabel III.6	: Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Madiun, 2014-2024	III-20
Tabel III.7	: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Madiun, Maret 2014-Maret 2024.....	III-22
Tabel III.8	: Metode Penyimpulan Capaian Sasaran	III-26
Tabel III.9	: Pengukuran Realisasi Kinerja Misi 2024	III-27
Tabel III.10	: Pengukuran Realisasi Kinerja 2024.....	III-29
Tabel III.11	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	III-31
Tabel III.12	: Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD.....	III-31
Tabel III.13	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional	III-32
Tabel III.14	: Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024	III-33
Tabel III.15	: Rincian Hasil Indikator Penilaian dari Kementerian/Lembaga.....	III-34
Tabel III.16	: Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 1 Tahun 2024.....	III-38
Tabel III.17	: Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	III-39
Tabel III.18	: Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024	III-41
Tabel III.19	: Pembobotan Indikator Kinerja Makro Penyelenggaraan Pemerintahan.....	III-44
Tabel III.20	: Indikator Kinerja Kunci.....	III-45
Tabel III.21	: Nilai LPPD Tahun 2019-2023.....	III-45
Tabel III.22	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022	III-56
Tabel III.23	: Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD.....	III-57
Tabel III.24	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional	III-57
Tabel III.25	: Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 2 Tahun 2024.....	III-62
Tabel III.26	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024 dengan Target Akhir RPJMD	III-67



Tabel III.27 : Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	III-68
Tabel III.28 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional	III-68
Tabel III.29 : IPM Kota Madiun Menurut Komponen	III-69
Tabel III.30 : Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 3 Tahun 2024.....	III-74
Tabel III.31 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024	III-84
Tabel III.32 : Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	III-84
Tabel III.33 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional	III-85
Tabel III.34 : Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 4 Tahun 2024.....	III-89
Tabel III.35 : Status Keadaan Ketenagakerjaan.....	III-92
Tabel III.36 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	III-104
Tabel III.37 : Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	III-104
Tabel III.38 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional	III-105
Tabel III.39 : Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 5 Tahun 2024.....	III-114



DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	: Laju Pertumbuhan Penduduk	I-27
Grafik I.2	: Persebaran Jumlah PNS Perangkat Daerah	I-32
Grafik III.1	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun.....	III-3
Grafik III.2	: Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kota Madiun, 2020-2024	III-4
Grafik III.3	: Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Madiun Tahun 2020-2024	III-5
Grafik III.4	: Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (PPP), 2020-2024 (ribu rupiah).....	III-6
Grafik III.5	: Perkembangan Tingkat Inflasi YoY Kota Madiun tahun 2019-2024.....	III-12
Grafik III.6	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).	III-15
Grafik III.7	: TPT menurut Jenis Kelamin, Agustus 2023-Agustus 2024	III-16
Grafik III.8	: TPT menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen), Agustus 2023-2024.....	III-17
Grafik III.9	: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Madiun, Maret 2014-Maret 2024.....	III-19
Grafik III.10	: Persentase Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2024	III-23
Grafik III.11	: Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024	III-33
Grafik III.12	: Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024	III-41
Grafik III.13	: Indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun.....	III-48
Grafik III.14	: Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun.....	III-53
Grafik III.15	: Trend Kenaikan Livable City (Indeks Kenyamanan Kota) Tahun 2020-2024	III-61
Grafik III.16	: Trend Kenaikan Indeks Infrastruktur Tahun 2020-2024	III-63
Grafik III.17	: Trend Kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	III-65
Grafik III.18	: Perkembangan IPM Kota Madiun 2019-2024.....	III-71



Grafik III.19	: Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 5 (Lima) Besar Kabupaten/Kota se Jawa timur.....	III-72
Grafik III.20	: Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	III-73
Grafik III.21	: Angka Harapan Lama Sekolah Kota Madiun Tahun 2019-2024.....	III-75
Grafik III.22	: Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun, 2019-2024	III-76
Grafik III.23	: Trend Angka Harapan Hidup Kota Madiun 2020-2024...	III-78
Grafik III.24	: Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2023	III-82
Grafik III.25	: Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2019 s.d. 2021.....	III-89
Grafik III.26	: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2020-2024.....	III-91
Grafik III.27	: PDRB Sektor Perdagangan di Kota Madiun Tahun 2020-2024.....	III-97
Grafik III.28	: PDRB Sektor Jasa di Kota Madiun Tahun 2020-2024	III-101
Grafik III.29	: Indeks Ketentraman Kota Madiun Tahun 2020-2024	III-106
Grafik III.30	: Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2020-2024.....	III-110
Grafik III.31	: Proporsi Pengeluaran Penduduk Kota Madiun menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Masyarakat Berdasarkan Pengeluarannya.....	III-111
Grafik III.32	: Persentase Angka Kemiskinan Periode 2020-2024	III-115
Grafik III.33	: Data Series Capaian Indeks Kerukunan Kota Madiun Tahun 2020-2024	III-117
Grafik III.34	: Indeks Rasa Aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024.....	III-118



BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksanaan dalam roda birokrasi mengemban tujuan pelayanan yang memuaskan bagi publik. Penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, akurasi, dan obyektif serta memiliki komitmen pada kepentingan publik. Setiap pejabat publik dituntut untuk dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan.

Salah satu wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah di dalam menjalankan roda pemerintahannya yaitu berupa kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggung-jawaban (LKPJ) kepada DPRD. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkenaan dengan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 14 bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud berkenaan dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun



anggaran sebelumnya. Adapun hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan berupa capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan di atasnya serta capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya. Sebagai bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penyusunan LKPJ merujuk pada kebijakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Selain itu, penyusunan LKPJ didasarkan pula pada kebijakan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Kebijakan-kebijakan yang dipedomani sebagaimana dimaksud, pada hakikatnya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Wali Kota Madiun dan DPRD Kota Madiun.

LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD dan penerbitan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian rekomendasi DPRD tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan strategis, perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya serta dalam penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Hal ini penting, mengingat dengan mengacu pada hasil tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk :

1. Mengetahui dan memastikan, bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai sesuai dengan target tiap tahun anggaran, serta mewujudkan visi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah;



2. Mengetahui berbagai kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan yang lalu sekaligus merumuskan berbagai alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan tahun-tahun mendatang.

1.1. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



11. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2024;
12. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 ;
14. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 ;

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1. Visi

Visi merupakan arah Pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh aparatur serta Masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan misi tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka rumusan Visi Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah **"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"**.

Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kota Madiun 2019-2024, antara lain sebagai berikut:

- a. Pilar pertama dengan pokok visi Bersih, terkait penyelenggaraan pemerintahan yang bersih terhindar dari KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
- b. Pilar kedua dengan pokok visi Berwibawa, menyangkut penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.



- c. Pilar ketiga dengan pokok visi Sejahtera, adalah kondisi masyarakat sejahtera yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketentraman lahir batin serta tidak diliputi rasa takut.

Dalam menuju masyarakat Kota Madiun yang sejahtera diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif, sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kota Madiun diatas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Madiun dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkungan regional terkhusus di Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok Visi yang diterjemahkan pengertiannya. Kota Madiun berusaha untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang sejahtera melalui kepemimpinan yang dihormati serta pemerintahan tanpa KKN yang transparan dan akuntabel dengan didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing serta masyarakat yang mandiri, maju, berakhlak mulia yang senantiasa berlandaskan taqwa kepada Allah SWT/Tuhan yang Maha Esa.

1.2.2. Misi

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan mengurai upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi, **terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019–2024 :**

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Selanjutnya berpedoman pada rumusan Visi dan Misi pada P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilaporkan dalam LKPJ tahun 2024, dapat diuraikan pada Tabel I.1 Keterkaitan



Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Kota Madiun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel I.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Kota Madiun 2019 – 2024

VISI : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Indikator
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi
		1.1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)
		1.1.2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
	1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		1.2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun
		1.2.2. Indeks Inovasi Daerah
MISI 2 : Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan		
1. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	2.1. Meningkatnya Kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks Kenyamanan Kota (livable city)
		2.1.1. Indeks Infrastruktur
	2.2. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	2.2.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
MISI 3 : Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota		
1. Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	3.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia
		Indeks Pembangunan Gender
		3.1.1. Harapan Lama Sekolah
	3.2. Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	3.1.2. Rata-rata Lama Sekolah
		3.2.1. Angka Harapa Hidup



	3.3. Meningkatnya pemberdayaan Gender	3.3.1. Indeks Pemberdayaan Gender
MISI 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun		
1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi inklusif		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
	4.1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	4.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka
	4.2. Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	4.2.1. Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan 4.2.2. Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Jasa
2. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat		Indeks Ketentraman
		Indeks Gini
	5.1. Pengurangan kemiskinan	5.1.1. Angka Kemiskinan
	5.2. Meningkatnya Stabilitas kehidupan sosial masyarakat	5.2.1. Indeks Kerukunan 5.2.2. Indeks Rasa Aman

Sumber: P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024

1.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan Kota Madiun sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dalam konteks ini melingkupi perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan perencanaan operasional berupa perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap



strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun arah kebijakan merupakan acuan untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap periode waktunya. Penetapan arah kebijakan menjadi fokus yang sesuai dengan pengaturan pada level pelaksanaannya. Secara lebih detil strategi dan arah kebijakan Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2
Strategi, dan Arah Kebijakan Kota Madiun

Misi/Tujuan/Sasaran		Sasaran		Strategi	
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)					
T.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	S.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran
				2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah
		S.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan					
T2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	S.3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	4	Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota dan Permukiman
				5	Peningkatan kualitas penataan ruang
		S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun					



Misi/Tujuan/Sasaran		Sasaran		Strategi	
T.3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	S.5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	7	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
		S.6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	8	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
		S.7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	9	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender
Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun					
T.4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	S.8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	10	Perluasan kesempatan kerja
				11	Peningkatan kondusifitas iklim berinvestasi
		S.9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	12	Pengembangan kebudayaan yang berbasis kearifan lokal untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
				13	Peningkatan kontribusi sector unggulan dalam perekonomian
				14	Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi
T.5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan	S.10	Pengurangan Kemiskinan	15	Peningkatan kualitas dan kuantitas



Misi/Tujuan/Sasaran		Sasaran		Strategi	
	Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat				ketersediaan pangan
				16	Penurunan tingkat kemiskinan
				17	Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
		S.11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	18	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban
				19	Peningkatan mitigasi resiko dan ketangguhan bencana

Sumber: P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel diatas maka perumusan strategi pembangunan dan arah kebijakan pada tahun 2019 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Strategi 1:** Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran.

Strategi percepatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu cara untuk memperkuat daerah dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan dan fungsinya. Lebih lanjut, pemerintah Daerah Kota Madiun sebagai daerah otonom, diberikan hak untuk mengurus proses bisnis pemerintahan dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan, dan pembangunan daerah, berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. Untuk itu, daerah perlu menggali sumber daya yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan, meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi daerah serta dikelola secara demokratis dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal Kota Madiun melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*good*



Governance). Untuk mewujudkannya, dibutuhkan komitmen yang konsistendi dari semua pihak baik aparatur pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Dalam strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran juga diperlukan perubahan perilaku terkait etika pemerintahan penegak hukum yang efektif serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab.

2. **Strategi 2** : Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah.

Pada era otonomi daerah, pemerintah mendapatkan kewenangan yang luas untuk mengatur, mengurus, mengembangkan dan memajukan daerah yang dikelola. Oleh karena itu keutamaan pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat. Tantangan yang dihadapi Kota madiun saat ini adalah potensi ekonomi daerah yang masih perlu dioptimalkan dan *uncenrtainty* yang tinggi akibat pandemic covid-19. Daerah yang kurang potensinya akan menghadapi kesulitan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga menimbulkan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pembiayaan di daerah. Oleh karea itu untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, upaya optimalisasi potensi PAD dan upaya lainnya diperlukan dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

3. **Strategi 3**: Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dengan cara pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat terkait kepentingan tertentu sesuai dengan regulasi dan tata cara yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan terhadap publik merupakan persoalan penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan program pemerintahan di mana fungsi utama dari pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya adalah pemberian pelayanan publik yang optimal agar kepentingan masyarakat umum dapat terpenuhi. Untuk mencapai pelayanan yang berkualitas, perlu disusun suatu aturan ataupun ketentuan mengenai pelayanan kepada masyarakat yang efisien Hal ini



dilakukan agar pelayanan yang diberikan lebih terarah dan memiliki proses yang terukur. Dalam perkembangannya, isu permasalahan kualitas layanan muncul dari masih lemahnya proses pelayanan publik yang diberikan pemerintah sehingga belum dapat memenuhi ekspektasi yang diharapkan masyarakat. Lebih jauh hal tersebut dapat ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat ataupun opini publik yang buruk, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah daerah.

4. **Strategi 4:** Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota dan Permukiman.

Upaya meningkatkan sistem penyediaan dan pengelolaan infrastruktur, sarana prasarana dan pemukiman kota yang berkualitas dilakukan melalui beberapa pendekatan diantaranya seperti pembenahan sistem jaringan drainase perkotaan; pengembangan sistem jaringan jalan yang terpadu dan kualitas prima; peningkatan kualitas manajemen dan rekayasa transportasi; akses perumahan dan pemukiman; serta upaya – upaya penciptaan lingkungan perumahan yang sehat.

5. **Strategi 5:** Peningkatan kualitas penataan ruang.

Perkembangan membawa konsekuensi pada pemanfaatan pola tata ruang kota untuk berbagai kegiatan usaha maupun permukiman. Peningkatan pengelolaan ruang kota merupakan upaya mengendalikan ruang kota agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu, peningkatan pengelolaan ruang kota diarahkan pada peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

6. **Strategi 6:** Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Pada dasarnya, peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan dengan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan penerapan siklus perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum terkait lingkungan hidup. Selain itu, strategi ini dilakukan mengoptimalkan ruang terbuka hijau agar dimanfaatkan secara berkesinambungan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan saat ini tetapi juga kebutuhan sumber daya di masa yang akan datang.



7. **Strategi 7:** Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

Pendidikan merupakan aspek fundamental pembentukan pola pikir dan kepribadian manusia. Oleh karena itu keberadaan sistem pendidikan yang baik sangat krusial sehingga diharap dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, terampil dan berdaya saing. Arah upaya – upaya yang dilakukan diantaranya adalah terkait peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, seperti pengembangan layanan pendidikan anak usia dini, balai masyarakat, Lembaga pendidikan non-formal hingga optimalisasi pelaksanaan wajib belajar serta upaya pencapaian SPM bidang pendidikan.

8. **Strategi 8:** Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Kesehatan juga berpengaruh pada kualitas pembangunan manusia di mana masyarakat yang sehat mampu beraktivitas secara produktif dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk itu strategi peningkatan kualitas kesehatan perlu didukung oleh upaya penyediaan layanan kesehatan berkualitas bagi semua kalangan baik dari sisi infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan, sampai dengan penyediaan informasi kesehatan terpadu.

9. **Strategi 9:** Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender.

Pengarus utamaan gender menjadi salah satu strategi pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan yang berkualitas. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender, salah satunya dapat dilakukan melalui Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender.

10. **Strategi 10:** Perluasan kesempatan kerja.

Strategi peningkatan kesempatan kerja dilakukan dengan intervensi pasar kerja baik pada unsur tenaga kerja maupun industri yang memberi pekerjaan. Kesempatan kerja yang luas dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Adanya kesempatan kerja melalui industri ditunjukan dari peningkatan penyerapan tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui peningkatan jaringan tenaga kerja, serta peningkatan keterampilan masyarakat agar siap kerja.

11. **Strategi 11:** Peningkatan kondusifitas iklim berinvestasi.



Kondusifitas iklim berinvestasi adalah upaya yang dalam rangka perbaikan pelayanan investasi kepada investor agar mendapat kemudahan dalam meraih peluang investasi di berbagai sektor ekonomi daerah. Cakupan peningkatan kemudahan berinvestasi dilakukan melalui upaya-upaya penyederhanaan prosedur berinvestasi, promosi investasi, dan penataan jaringan usaha investasi. Adapun peningkatan kemudahan berinvestasi diarahkan pada penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi dengan prosedur yang pendek dan efisien.

12. **Strategi 12:** Pengembangan kebudayaan yang berbasis kearifan lokal untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat pada dasarnya merupakan strategi yang megupayakan penciptaan kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya. Upaya itu dilakukan dengan memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal yang ada di wilayah Kota Madiun dan wilayah sekitarnya agar tetap lestari. Kemudian budaya lokal dijadikan *branding* daerah agar warisan dari leluhur dieksplorasi secara optimal.

13. **Strategi 13:** Peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian.

Pembangunan perekonomian melalui penguatan sektor unggulan merupakan strategi yang bertujuan untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk dapat berkembang sehingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Pengembangan produk ekonomi unggulan diarahkan pada pengembangan sentra-sentra usaha serta produk ekonomi dari sisi perdagangan dan jasa berbasis keunggulan lokal, ekonomi kreatif, pariwisata, sarana prasarana perdagangan hingga upaya menuju masyarakat ekonomi digital.

14. **Strategi 14:** Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi.

Industri kecil menengah, Usaha Mikro dan koperasi merupakan penyangga ketahanan perekonomian masyarakat dan sumber pendapatan rumah tangga mikro. Kebijakan penguatan dan pengembangan IKM, Usaha Mikro, dan koperasi diarahkan pada peningkatan produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro. Adapun arah strategi pembangunan koperasi adalah



pada dasarnya peningkatan kelembagaan koperasi yang berkelanjutan sehingga mampu bernilai ekonomi tinggi dan mensejahterakan anggotanya

15. **Strategi 15:** Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan.

Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan merupakan faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Lebih lanjut, penyediaan pangan diperlukan dalam lingkup untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga hingga individu secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan ketersediaan pangan dilakukan melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

16. **Strategi 16 :** Penurunan Tingkat kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu krusial di Kota Madiun. Sebelum pandemic Covid19 kemiskinan di Kota Madiun telah mengalami penurunan yang relative baik sekitar 4 persen. Namun Covid 19 berdampak pada peningkatan kemiskinan dengan besaran mendekati 5 persen. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya penurunan kemiskinan khususnya tipe kemiskinan yang sangat miskin.

17. **Strategi 17:** Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial.

Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang berkaitan dengan upaya mengurangi keterlantaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kelompok PMKS yang tidak direhabilitasi secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta meningkatnya penduduk yang rentan (*vulnerable*). Ole karena itu, perlindungan sosial diarahkan pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS, termasuk bagi penduduk lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar.

18. **Strategi 18:** Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.

Ketenteraman dan ketertiban merupakan wujud dari masyarakat yang modern dan maju di mana hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi seluruh pihak di Kota Madiun. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban diantaranya pemberdayaan



masyarakat serta peningkatan masyarakat agar senantiasa tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut dapat diarahkan pada penegakan peraturan perundang-undangan daerah, peningkatan cakupan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan umum. Selain itu, peningkatan ketentraman dan ketertiban diarahkan keberadaan petugas perlindungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang menjalankan fungsi penjagaan kenyamanan lingkungan.

19. **Strategi 19:** Peningkatan mitigasi resiko dan ketangguhan bencana

Pada dasarnya strategi ini berupaya mempersiapkan kejadian bencana yang tidak dapat diperkirakan. Dengan upaya kesiapsiagaan masyarakat baik fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana maka dampak negative dari bencana dapat meminimalisasi berdasarkan resiko di setiap area lokasi rawan bencana. Upaya peningkatan ketangguhan bencana dilakukan melalui kebijakan peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana.

1.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2024 didasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan nasional di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mangacu pada strategi dan arah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2019–2024. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Telaah terhadap Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019–2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.3
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Kota Madiun

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) • Program Pemberdayaan



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	digital, dan ekonomi kreatif	Masyarakat Desa Dan Kelurahan • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian • Program Pengembangan Umkm • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Hubungan Industrial • Program Pengembangan Umkm • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan lingkungan, dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	• Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan) • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Dan Kb) • Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
		• Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan • Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan • Program Pengembangan Kesenian Tradisional • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat) • Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	• Program Kepegawaian Daerah • Pendidikan Dan Pelatihan • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah)



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
		• Program Aplikasi Informatika • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum Sekretariat Daerah) • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah • Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pengendalian Dan Evaluasi • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan • Program Informasi Dan Komunikasi Publik • Program Aplikasi Informatika

Sumber : RKPD Perubahan Kota Madiun Tahun 2024



1.3. Data Umum Daerah

1.3.1. Data Geografis Daerah

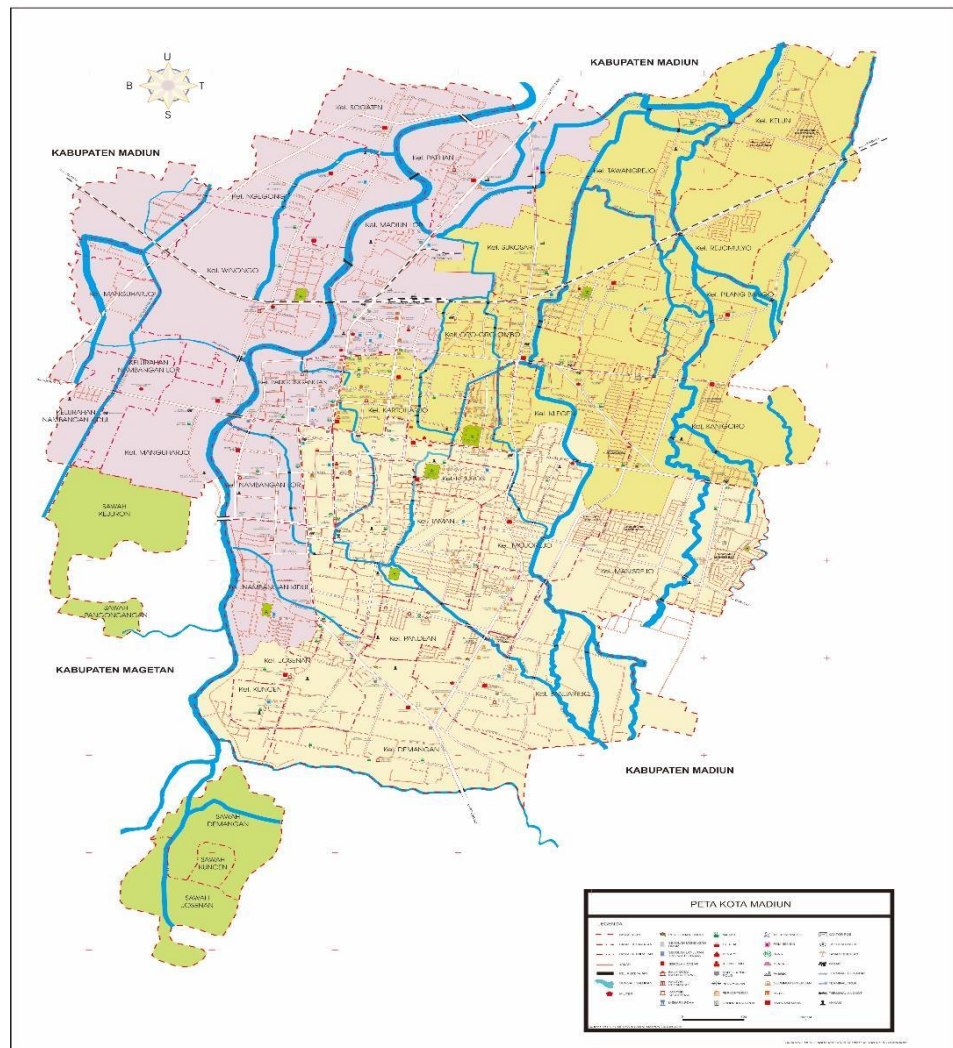
Secara geografis, Kota Madiun memiliki luas wilayah seluas 33,23 km². Kecamatan Taman dengan luas wilayah sebesar 12,46 km² (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km² (32,29%), dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,04 km² (30,21%). Kota Madiun terletak pada koordinat 111⁰ BT – 112⁰ BT dan 7⁰ LS – 8⁰ LS. Kota Madiun memiliki sungai yang merupakan salah satu anak sungai Bengawan Solo. Secara topografi, Kota Madiun berada pada ketinggian ± 63 meter di atas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 meter dpl dan selanjutnya menurun hingga 63 meter dpl, sedang di bagian utara kota, ketinggian rata-rata mencapai 64 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Wilayah Kota Madiun hampir sepenuhnya berbatasan/dikelilingi oleh Kabupaten Madiun dan sebagian kecil oleh Kabupaten Magetan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun meliputi :

- Sebelah utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- Sebelah selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Sebelah timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Sebelah barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.



Gambar I.1
Peta Administrasi Kota Madiun



Sumber: RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024

Secara administratif, Kota Madiun terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo terdiri dari 9 kelurahan, Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan, dan Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan. Berikut ditampilkan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tiap kecamatan di Kota Madiun, yaitu :

- Kecamatan Manguharjo terdiri dari 329 RT dan 88 RW ;
- Kecamatan Taman terdiri dari 399 RT dan 107 RW ;
- Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 309 RT dan 74 RW.

Secara rinci jumlah RT dan RW di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel I.4
Jumlah RT dan RW di Kota Madiun

No.	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah	
		RW	RT
I.	Manguharjo	88	329
1.	Manguharjo	8	36
2.	Sogaten	9	29
3.	Patihan	6	22
4.	Ngegong	5	22
5.	Winongo	11	37
6.	Madiun Lor	9	41
7.	Pangongangan	9	26
8.	Nambangan Lor	16	70
9.	Nambangan Kidul	15	46
II.	Taman	107	399
1.	Mojorejo	14	65
2.	Pandean	18	61
3.	Banjarejo	9	35
4.	Kuncen	4	9
5.	Manisrejo	12	60
6.	Kejuron	15	50
7.	Josenan	9	31
8.	Demangan	11	36
9.	Taman	15	52
III.	Kartoharjo	74	309
1.	Kartoharjo	9	38
2.	Oro-Oro Ombo	9	43
3.	Klegen	10	48
4.	Kanigoro	12	52
5.	Pilangbango	5	22
6.	Rejomulyo	11	38
7.	Sukosari	6	18
8.	Tawangrejo	6	24
9.	Kelun	6	26
Jumlah		269	1.037

Sumber : Bagian Pemerintahan

1.3.2. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih. Penduduk juga merupakan salah satu syarat bagi pendirian negara, selain memiliki wilayah yang berdaulat dan pemerintahan. Oleh karena itu, penduduk menjadi faktor



yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan. Penduduk termasuk elemen penting yang mendukung pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Secara umum jumlah penduduk dalam suatu wilayah dapat berdampak positif pada usia produktif sehingga mampu berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi. Semakin banyak penduduk, berarti semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dapat menggerakkan pembangunan wilayah. Namun demikian, penambahan penduduk yang berlebihan tanpa perencanaan bisa juga menjadi permasalahan dalam pembangunan. Pembangunan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan tanpa melihat potensi penduduk tidak akan berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, penduduk merupakan modal dalam pembangunan di Kota Madiun.

Jumlah penduduk Kota Madiun Tahun 2024 menurut jenis kelamin dan kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.5
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	29.736	30.601	60.337
2.	Taman	41.945	43.496	85.441
3.	Kartoharjo	27.396	28.559	55.955
Jumlah		99.077	102.656	201.733

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Tabel I.6
Jumlah Kepala Keluarga (KK) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	16.513	6.163	22.676
2.	Taman	22.796	8.054	30.850
3.	Kartoharjo	15.114	5.327	20.441
Jumlah		54.423	19.544	73.967

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2024 adalah sebanyak 201.733 jiwa. Rasio jenis kelamin tercatat jumlah penduduk laki-laki di Kota Madiun sebanyak 99.077



orang, atau 49,11 persen dari penduduk Kota Madiun. Sementara, jumlah penduduk perempuan sebanyak 102.656 orang, atau 50,89 persen dari penduduk Kota Madiun. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Kota Madiun sebanyak 73.967 KK tersebar di tiga wilayah kecamatan.

Tabel I.7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024

No	Kelompok Umur (Tahun)	Uraian		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	5.525	5.168	10.693
2.	5 – 9	6.850	6.447	13.297
3.	10 – 14	7.551	7.357	14.908
4.	15 – 19	7.883	7.578	15.461
5.	20 – 24	8.164	7.594	15.758
6.	25 – 29	7.678	7.359	15.037
7.	30 – 34	6.979	6.956	13.935
8.	35 – 39	6.801	6.802	13.603
9.	40 – 44	7.958	7.999	15.957
10.	45 – 49	7.540	7.595	15.135
11.	50 – 54	6.832	7.039	13.871
12.	55 – 59	5.906	6.777	12.683
13.	60 – 64	4.763	5.844	10.607
14.	≥65	8.647	12.141	20.788
Jumlah		99.077	102.656	201.733

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Komposisi penduduk tahun 2024 menunjukkan mayoritas penduduk Kota Madiun didominasi oleh generasi Z dan milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 22,92% (46.256 orang) dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 29,06% (58.630 orang) dari total populasi Kota Madiun. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar dibawah :



Gambar I.2
Komposisi Penduduk Berdasarkan Generasi

Rayuan Gombal 	Generasi Baby Boomer 1946-1964	Berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja, anti pemerintah
Kopi Darat 	Generasi X 1965-1976	Individualis, luwes, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan
CLBK 	Generasi Milenial 1977-1995	PD, berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif, haus perhatian
Lit AF 	Generasi Z 1996-2010	Menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi target
Tayo 	Generasi Alpha 2010-sekarang	Belum terdeteksi

Sumber : Tim Riset Tirto Id

Tabel I.8
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/ Belum Sekolah	16.109	15.653	31.762
2.	Belum Tamat SD/ Sederajat	8.729	8.547	17.276
3.	Tamat SD/ Sederajat	9.650	13.452	23.102
4.	SLTP/ Sederajat	12.020	12.548	24.568
5.	SLTA/ Sederajat	37.921	34.972	72.893
6.	D-I/ II	248	370	618
7.	Akademi/ D-III/ Sarjana Muda	2.588	3.953	6.541
8.	D-IV/ Strata-I	10.823	12.441	23.264
9.	Strata-II	953	697	1.650
10.	Strata-III	36	23	59
Jumlah		99.077	102.656	201.733

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun



Tabel I.9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/ Tidak Bekerja	18.233	16.826	35.059
2.	Mengurus Rumah Tangga	3	32.553	32.556
3.	Pelajar/ Mahasiswa	20.663	19.134	39.797
4.	Pensiunan	3.423	2.559	5.982
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.758	2.956	5.714
6.	TNI - POLRI	2.494	116	2.610
7.	Karyawan BUMN	1.125	404	1.529
8.	Karyawan BUMD	116	76	192
9.	Karyawan Swasta	30.520	16.065	46.585
10.	Buruh/ Tukang	4.213	1.568	5.781
11.	KDH, WKDH, DPR, DPRD	8	3	11
12.	Guru/ Dosen	733	1.519	2.252
13.	Agamawan	61	39	100
14.	Kesehatan	236	593	829
15.	Pedagang/ Perdagangan	1.304	1.251	2.555
16.	Pekerjaan Lainnya	13.187	6.994	20.181
Jumlah		99.077	102.656	201.733

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

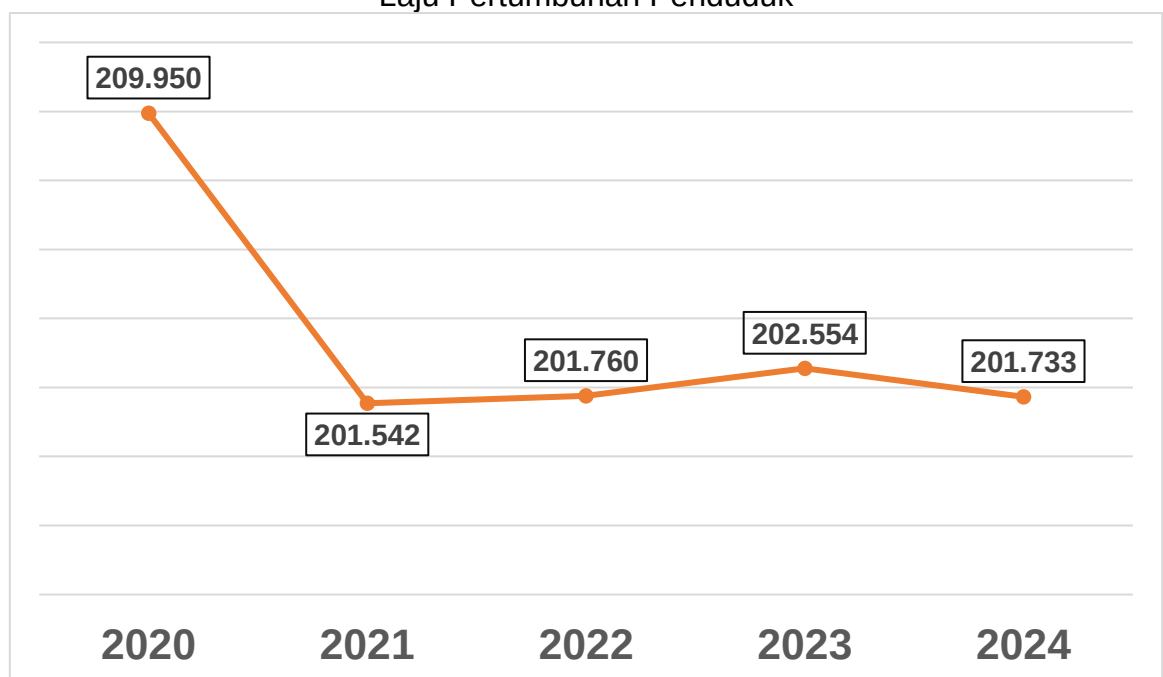
Berdasarkan jenis pekerjaannya, terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada sektor swasta. Jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2024 yang bekerja menjadi karyawan swasta adalah sebanyak 46.585 orang, dan pelajar/mahasiswa sebanyak 39.797 orang. Dengan posisi Kota Madiun sebagai kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur, maka penduduk yang bekerja di sektor perdagangan sebanyak 2.555 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor publik secara keseluruhan adalah sebanyak 10.576 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 5.174 orang, anggota TNI dan Polri sebanyak 2.610 orang dan Guru/Dosen sebanyak 2.252 orang.



1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Madiun selama periode 2020-2024 mengalami kenaikan dan penurunan. Selama periode tersebut, persentase laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,39%. Pada tahun 2023 pertumbuhan penduduk di Kota Madiun mengalami kenaikan sebesar 794 penduduk dari tahun 2022. Sedangkan penurunan penduduk terjadi kembali pada Tahun 2024 setelah adanya kenaikan jumlah penduduk sejak Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan penurunan sebesar 0,40% atau sebesar 821 penduduk.

Grafik I.1
Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Persebaran penduduk di Kota Madiun pada tahun 2024 cukup merata pada setiap kecamatan. Jumlah penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman yaitu sebanyak 85.441 jiwa (42,35%), disusul Kecamatan Manguharjo sebanyak 60.337 jiwa (29,90%), dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 55.955 jiwa (27,73%).

1.3.4. Jumlah ASN

Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam Pemerintahan, sumber daya manusia lebih dikenal dengan Aparatur Sipil Negara



(ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas diri yang lebih inovatif, kreatif dan visioner dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong birokrasi yang ada menjadi birokrasi yang lebih responsif dan adaptif (*agile*) sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta dapat melayani masyarakat Kota Madiun.

Jumlah ASN berstatus aktif sampai dengan triwulan III Tahun 2024 adalah 3.307 yang terdiri dari PNS sejumlah 2.588 (78,26%%) dan PPPK 719 (21,74%). Berdasarkan jumlah tersebut berikut uraian kondisi yang lebih rinci ASN Pemerintah Kota Madiun berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan sebaran PNS di Perangkat Daerah.

Tabel I.10
Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	10
2.	SMP/ sederajat	26
3.	SMA/ sederajat	298
4.	Diploma I, II dan III	650
5.	Diploma IV/S1	2.059
6.	Pasca Sarjana/S2	263
7.	Doktor/S3	1
Jumlah		3.307

Sumber : BKPSDM Kota Madiun

Berdasarkan Tabel I.10 Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024, sebagian besar tingkat pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun berpendidikan Diplomas IV/Sarjana (S1) yaitu sebanyak 2.059 orang dan



ASN berpendidikan Magister/Pascasarjana (S2) sebanyak 263 orang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Madiun didominasi pada ASN dengan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang sangat potensial untuk memenuhi kinerja yang ditargetkan.

Tabel I.11
Persebaran Jumlah ASN Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	PNS		PPPK		Jumlah
		P	L	P	L	
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17	22	0	0	39
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	15	0	0	20
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	18	15	0	0	33
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	0	0	10
5.	Badan Pendapatan Daerah	10	15	0	0	25
6.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9	16	0	0	25
7.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	9	15	0	0	24
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	9	0	0	28
9.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	448	117	248	58	871
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17	10	0	0	27
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	22	0	0	31
12.	Dinas Lingkungan Hidup	15	47	0	0	62
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	29	0	0	43
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	10	0	0	23
15.	Dinas Pendidikan	752	275	283	129	1439
16.	Dinas Perdagangan	7	55	0	0	62
17.	Dinas Perhubungan	9	38	0	0	47
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13	10	0	0	23
19.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12	22	0	0	34
20.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18	8	0	0	26
21.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	14	12	1	0	27



No	Perangkat Daerah	PNS		PPPK		Jumlah
		P	L	P	L	
22.	Inspektorat Daerah	17	25	0	0	42
23.	Kecamatan Kartoharjo	29	34	0	0	63
24.	Kecamatan Manguharjo	28	34	0	0	45
25.	Kecamatan Taman	34	31	0	0	62
26.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13	32	0	0	45
27.	Sekretariat Daerah	38	57	0	0	95
28.	Sekretariat DPRD	9	7	0	0	16

Sumber : BKPSDM Kota Madiun

Distribusi pegawai antar golongan secara proporsional dapat menunjang peningkatan profesionalisme ASN. Komposisi ASN Pemerintah Kota Madiun berdasarkan jenis jabatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.12
Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Jabatan
Tahun 2024

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	JPT	27
2.	Administrator	97
3.	Pengawas	218
4.	Fungsional Guru	1.316
5.	Fungsional Kesehatan	746
6.	Fungsional Teknis	361
7.	Pelaksana	542
Jumlah		3.307

Sumber : BKPSDM Kota Madiun

1.3.5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah untuk optimalisasi perekonomian. Realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 mulai memberikan tren positif setelah beberapa tahun ini mengalami tekanan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak



daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri atas :

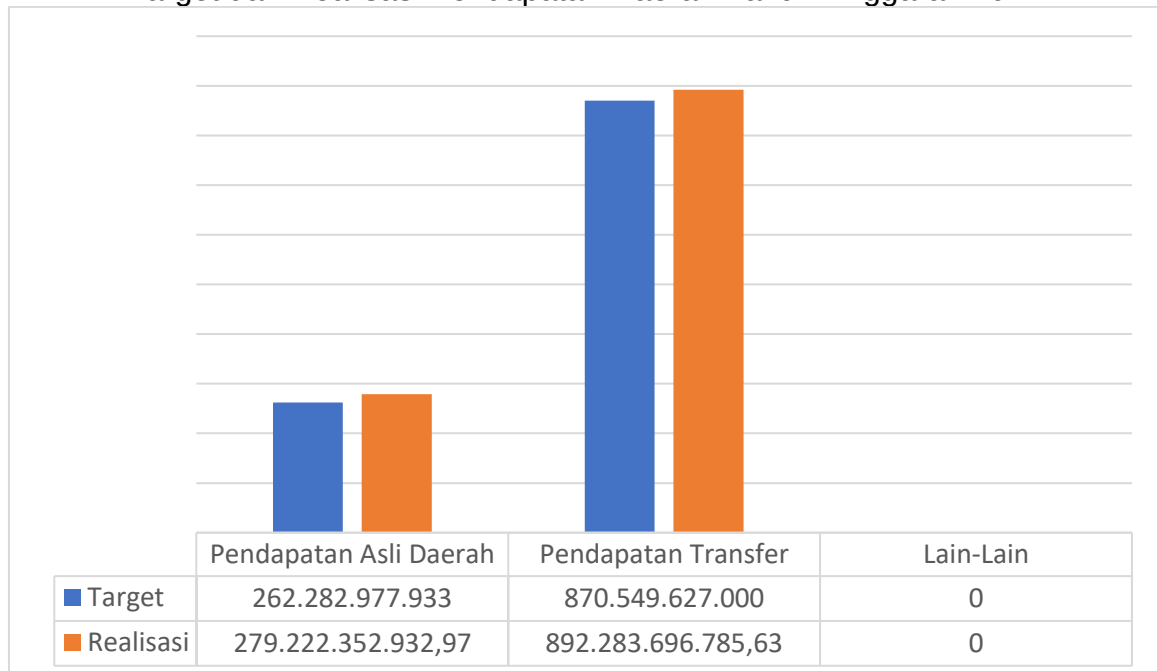
1. Pendapatan asli daerah :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah pusat terdiri atas :
 - Dana Perimbangan (Dana Transfer umum : DBH, DAU dan Dana Transfer khusus : DAK Fisik dan DAK non fisik)
 - Insentif Fiskal
 - Dana otonomi khusus
 - Dana keistimewaan
 - Dana desa
 - b. Transfer antar Daerah terdiri atas :
 - Pendapatan bagi hasil
 - Bantuan keuangan
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah meliputi :
 - a. Hibah
 - b. Dana darurat
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah),



Pendapatan Transfer (pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah), dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Grafik I.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024



Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun

Berdasarkan Grafik I.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp. 262.282.977.933,00 terealisasi sejumlah Rp. 279.222.352.932,97 atau 106,46% selisih sebesar Rp.16.939.374.999,97 atau 6,46% dari target, dan Pendapatan Transfer ditargetkan Rp. 870.549.627.000,00 terealisasi sejumlah Rp. 892.283.696.785,63 atau 102,50% lebih tinggi sebesar 21.734.069.785,63 atau 2,50% dari target.

Pendapatan Daerah (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah) digunakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan skala prioritas. Pendapatan Daerah merupakan komponen penting untuk membantu pemenuhan kebutuhan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Besarnya kontribusi Pendapatan Daerah otomatis sangat membantu dalam keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut ringkasan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 yang disajikan pada Tabel dibawah ini :



Tabel I.13
Ringkasan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2024 Kota Madiun

No	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
I	Pendapatan	1.132.832.604.933,00	1.171.506.049.718,60	103,41%
1	Pendapatan Asli Daerah	262.282.977.933,00	279.222.352.932,97	106,46%
	1) Pajak Daerah	109.603.926.000,00	121.651.792.796,00	110,99%
	2) Retribusi Daerah	136.312.408.000,00	138.895.835.650,97	101,90%
	3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	14.127.425.900,00	13.456.071.814,53	95,25%
	4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.239.218.033,00	5.218.652.671,47	233,06%
2	Pendapatan Transfer	870.549.627.000,00	892.283.696.785,63	102,50%
	1) Pendapatan Transfer Pusat	762.805.557.000,00	774.640.399.685,63	101,55%
	2) Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.744.070.000,00	117.643.297.100,00	109,19%
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-
	1) Pendapatan Hibah	-	-	-
	2) Dana Darurat	-	-	-
	3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	-	-	-
	Hibah Dana BOS	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	-	-	-



No	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Dana Penyesuaian	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi/ Pemda Lainnya	-	-	-

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kota Madiun juga mampu secara bertahap mengoptimalkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari PAD sesuai dengan potensi riil yang ada, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang diberlakukan, serta tidak menjadi beban berat bagi wajib pajak ataupun wajib retribusi di Daerah.

Tabel I.14
Ringkasan Realisasi Pajak
Tahun Anggaran 2024 Kota Madiun

No	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Pajak Daerah	109.603.926.000,00	121.651.792.796,00	110,99%
1	Pajak Reklame	2.372.500.000,00	2.867.767.796,00	120,88%
2	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	450.821.413,00	128,81%
3	PBBP2	22.360.000.000,00	22.998.810.935,00	102,86%



No	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
4	BPHTB	26.675.000.000,00	30.575.437.417,00	114,62%
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	57.846.426.000,00	64.758.955.235,00	111,95%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun

Tabel I.15
Ringkasan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024 Kota Madiun

No	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Retribusi Daerah	136.312.408.000,00	138.902.841.650,97	101,90%
1	Retribusi Jasa Umum	121.043.487.400,00	119.867.357.621,97	99,03%
2	Retribusi Jasa Usaha	14.518.920.600,00	18.308.759.781,00	126,11%
3	Retribusi Perijinan Tertentu	750.000.000,00	719.718.248,00	95,96%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun

Tabel I.16
Ringkasan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024 Kota Madiun

No	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.127.425.900,00	13.456.071.814,53	95,25%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.986.097.200,00	7.291.764.184,53	104,38%
2	Bagian Laba Penyertaan Modal pada Perush. Milik Daerah/ BUMD (Bidang Air Minum)	7.141.328.700,00	6.164.307.630,00	86,32%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun



Tabel I.17
Ringkasan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.239.218.033,00	5.218.652.671,47	233,06%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	32.000.000,00	416.855.980,00	1302,67%
2	Jasa Giro	80.000.000,00	810.070.401,32	1012,59%
3	Pendapatan Bunga	992.335.233,00	1.267.092.988,64	127,69%
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	220.591.369,81	100%
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	658.795.250,00	100%
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	142.852.500,00	44.610.000,00	31,23%
7	Pendapatan dari Pengembalian	-	509.412.385,09	100%
8	Pendapatan BLUD	863.740.000,00	1.220.236.904,36	141,27%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun

B. Dana Transfer

Dana Transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Transfer ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah yang dialokasikan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah).



Jumlah Pendapatan dana transfer yang dialokasikan untuk Kota Madiun adalah sebesar Rp. 870.549.627.000 yang terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp. 730.207.858.000,00 dan Insentif Fiskal sebesar Rp. 32.597.699.000,00. Sedang Jumlah pendapatan transfer antar daerah adalah sebesar Rp. 107.744.070.000,00 yang terdiri dari pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 107.074.020.000,00 dan bantuan keuangan sebesar Rp. 670.050.000,00. Target dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel I.18
Ringkasan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2024 Kota Madiun

No	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	762.805.557.000,00	774.640.399.685,63	101,55%
1	Dana Perimbangan	730.207.858.000,00	725.271.874.685,63	99,32%
2	Insentif Fiskal	32.597.699.000,00	49.368.525.000,00	151,45%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun

Tabel I.19
Ringkasan Pendapatan Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2024 Kota Madiun

No	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.744.070.000,00	117.643.297.100,00	109,19%
1	Pendapatan Bagi Hasil	107.074.020.000,00	116.973.247.100,00	109,25%
2	Bantuan Keuangan	670.050.000,00	670.050.000,00	100,00%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun



C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan kelompok pendapatan yang menampung pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Tabel I.20
Ringkasan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2024 Kota Madiun

No	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
1	Lain-lain Pendapatan	-	-	-

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun

1.3.6. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Belanja Daerah terdiri dari:

- Belanja Modal, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya meliputi: Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya; Belanja Aset Lainnya.
- Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi : Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.



- c. Belanja Tidak Terduga adalah benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force mayor*, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerinah daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Tabel I.21
Ringkasan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
	Belanja Daerah	1.246.786.210.085,00	1.172.147.787.554,86	94,01%
1	Belanja Operasi	1.075.729.133.941,00	1.012.707.390.997,13	94,14%
	Belanja Pegawai	470.001.490.757,00	438.170.995.927,75	93,23%
	Belanja Barang dan Jasa	526.647.293.235,00	497.881.778.674,38	94,54%
	Belanja Subsidi	50.000.000,00	49.955.750,00	99,91%
	Belanja Hibah	45.969.265.421,00	45.722.874.645,00	99,46%
	Belanja Bantuan Sosial	33.061.084.528,00	30.881.786.000,00	93,41%
2	Belanja Modal	168.557.076.144,00	159.166.507.474,73	94,43%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.303.310.160,00	24.597.646.021,00	93,52%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.581.145.997,00	41.774.680.516,62	91,65%
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	93.594.443.387,00	90.028.130.537,11	96,19%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.213.911.600,00	2.015.705.050,00	91,05%
	Belanja Modal Aset Lainnya	864.265.000,00	750.345.350,00	86,82%
3	Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	273.889.083,00	10,96%
	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	273.889.083,00	10,96%
4	Surplus/ Defisit	(113.953.605.152,00)	(641.737.836,26)	0,56%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun



A. Belanja Operasi

Gambaran realisasi pengelolaan belanja operasi pada tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.22
Ringkasan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Belanja Pegawai	470.001.490.757,00	438.170.995.927,75	93,23%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	245.186.069.483,00	231.278.137.979,00	94,33%
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	145.205.369.961,00	131.866.176.802,00	90,81%
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	60.564.755.418,00	57.630.417.107,45	95,16%
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.789.368.665,00	15.039.533.046,00	95,25%
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	964.144.614,00	678.832.513,30	70,41%
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	778.180.000,00	744.580.000,00	95,68%
7	Belanja Pegawai BOS	642.065.200,00	0,00	00,00%
8	Belanja Pegawai BLUD	871.537.416,00	933.318.480,00	107,09%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun



Tabel I.23
Ringkasan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Belanja Barang dan Jasa	526.647.293.235,00	497.881.778.674,38	94,54%
1	Belanja Barang	106.450.429.863,00	101.817.737.067,00	95,65%
2	Belanja Jasa	193.352.998.427,00	180.028.727.090,23	93,11%
3	Belanja Pemeliharaan	49.280.670.242,00	46.845.075.390,15	95,06%
4	Belanja Perjalanan Dinas	51.743.814.851,00	43.762.654.322,00	84,58%
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.866.752.260,00	4.689.132.680,00	96,35%
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.753.081.390,00	17.571.294.042,00	104,88%
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.317.316.000,00	3.284.767.700,00	99,02%
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	100.882.230.202,00	99.882.390.383,00	99,01%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun

Tabel I.24
Ringkasan Realisasi Belanja Subsidi
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Belanja Subsidi	50.000.000,00	49.955.750,00	99,91%
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	50.000.000,00	49.955.750,00	99,91%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun



Tabel I.25
Ringkasan Realisasi Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Belanja Hibah	45.969.265.421,00	45.722.874.645,00	99,46%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.044.575.904,00	6.713.335.400,00	95,30%
2	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.856.306.017,00	28.748.938.733,00	99,63%
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.410.910.000,00	4.466.649.784,00	101,26%
4	Belanja Hibah Dana BOSP	4.706.910.000,00	4.844.056.128,00	102,91%
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	950.563.500,00	949.894.600,00	99,93%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun

Tabel I.26
Ringkasan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Belanja Bantuan Sosial	33.061.084.528,00	30.881.786.000,00	93,41%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	30.200.519.528,00	28.093.111.000,00	93,02%
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.860.565.000,00	2.788.675.000,00	97,49%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun



B. Belanja Modal

Gambaran realisasi pengelolaan belanja modal pada tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.303.310.160,00	24.597.646.021,00	93,52%
1	Belanja Modal Alat Besar	2.285.538.613,00	2.188.901.500,00	95,77%
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.916.671.838,00	4.336.308.440,00	88,20%
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	93.600.000,00	92.950.000,00	99,31%
4	Belanja Modal Alat Pertanian	92.050.000,00	79.620.000,00	86,50%
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.855.527.750,00	9.470.132.350,00	96,09%
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	173.931.970,00	158.652.090,00	91,22%
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.403.521.196,00	2.086.508.700,00	86,81%
8	Belanja Modal Komputer	1.509.275.670,00	1.494.054.680,00	98,99%
9	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	20.360.000,00	19.931.715,00	97,90%
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja			
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	932.212.263,00	931.449.500,00	99,92%
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	100.000.000,00	99.459.330,00	99,46%
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	750.236.610,00	896.262.344,00	119,46%
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.170.384.250,00	2.743.415.372,00	86,53%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun



2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.581.145.997,00	41.774.680.516,62	91,65%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	45.453.496.197,00	41.657.671.173,10	91,65
2	Belanja Modal Monumen	6.000.000,00	5.943.000,00	99,05%
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	121.649.800,00	111.066.343,52	91,30%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun

3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	93.594.443.387,00	90.028.130.537,11	96,16%
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	51.620.771.048,00	49.602.699.428,14	96,09%
2	Belanja Modal Bangunan Air	37.765.672.339,00	36.268.625.734,11	96,04%
3	Belanja Modal Instalasi			
4	Belanja Modal Jaringan	4.208.000.000,00	4.156.805.374,86	98,78%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun



4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	2.213.911.600,00	2.015.705.050,00	91,05%
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	79.365.000,00	78.000.000,00	98,28%
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.134.546.600,00	1.937.705.050,00	90,78%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun

5. Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Belanja Modal Aset lainnya	864.265.000,00	750.345.350,00	86,82%
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	864.265.000,00	750.345.350,00	86,82%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun



C. Belanja Tidak Terduga

Gambaran realisasi pengelolaan belanja tidak terduga pada tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut.

1. Belanja Tidak terduga

No	Uraian	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	273.889.083,00	10,96%
1	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	273.889.083,00	10,96%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun

1.3.7. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Guna menjaga stabilitas dan keseimbangan Keuangan daerah yang tertuang dalam APBD beserta perubahannya, maka dari sisi Kebijakan Pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran antara Pendapatan dan Belanja Daerah, penyertaan modal serta pembayaran hutang. Dari sisi Penerimaan Pembiayaan, diarahkan untuk mendayagunakan sepenuhnya SILPA Tahun Anggaran 2023 untuk menutup defisit anggaran.

Tabel I.27
Ringkasan Realisasi Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
III	Pembiayaan	113.953.605.152,00	113.953.605.152,46	100,00%
1	Penerimaan Pembiayaan	113.953.605.152,00	113.953.605.152,46	100,00%

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 *Audited*, BKAD Kota Madiun



Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Uraian	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	113.953.605.152,00	113.953.605.152,46	100,00%
1	Penghematan Belanja	113.953.605.152,00	113.953.605.152,46	100,00%

Re I.28
Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD
Tahun 2023 s.d 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024*	% Tahun 2024
I	Pendapatan	1.117.612.130.232,42	1.132.832.604.933,00	1.171.506.049.718,60	103,41%
1	PAD	255.554.493.407,62	262.282.977.933,00	279.222.352.932,97	106,46%
2	Pendapatan Transfer	862.057.636.824,80	870.549.627.000,00	892.283.696.785,63	102,50%
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-
II.	Belanja	1.194.903.395.527,39	1.246.786.210.085,00	1.172.147.787.554,86	94,01%
1	Belanja Operasi	975.874.375.042,70	1.075.729.133.941,00	1.012.707.390.997,13	94,14%
2	Belanja Modal	217.790.302.662,69	168.557.076.144,00	159.166.507.474,73	94,43%
3	Belanja Tidak Terduga	1.238.717.822,00	2.500.000.000,00	273.889.083,00	10,96%
4	Surplus/ (defisit)	(77.291.265.294,97)	(113.953.605.152,00)	(641.737.836,26)	0,56%
III	Pembiayaan	191.244.870.447,43	113.953.605.152,00	113.953.605.152,46	100,00%
1	Penerimaan Pembiayaan	191.244.870.447,43	113.953.605.152,00	113.953.605.152,46	100,00%
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
Sisa Lebih Anggaran (SILPA)		113.953.605.152,46	-	113.311.867.316,20	

Sumber : BKAD Kota Madiun

*Audited 31 Desember 2024



1.4. Sistematika

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Madiun Tahun 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta ditambahkan dengan menampilkan capaian kinerja makro Kota Madiun Tahun 2024 untuk dapat menjadi rekomendasi perumusan kebijakan tahun selanjutnya, sehingga menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Daerah Hukum (diuraikan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1.3 Data Umum Daerah

Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi :

1. Data Geografis Wilayah;
2. Jumlah Penduduk;
3. Pertumbuhan Penduduk;
4. Jumlah PNS;
5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan;
6. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja;
7. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan;

BAB II : PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Uraian tentang perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran.

BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

3.1. Capaian Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2024

3.2. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Kota Madiun Tahun 2024

3.3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan



Uraian memuat Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja; Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang /urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya; serta Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

3.3.1. Pelaksanaan Urusan Wajib, Pilihan, dan Fngsi Penunjang

3.3.2. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

3.4. Kebijakan Strategis yang Diterapkan

3.5. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

3.6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

3.7. Inovasi Yang Dilakukan

3.8. Penghargaan Yang Diterima

BAB IV : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan

4.1.1. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

4.1.2. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya

4.2. Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), Pemerintah melakukan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas utamanya pada sektor Keuangan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu system yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. APBD juga merupakan keputusan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan Transfer, meliputi: Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Provinsi).
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.



2. Belanja Daerah, terdiri dari:

- a. Belanja Operasi, meliputi: Belanja Pegawai (termasuk Tambahan penghasilan); Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial.
- b. Belanja Modal, meliputi: Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.
- c. Belanja Transfer, meliputi : Belanja Bagi hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.
- d. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

3. Pembiayaan, terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari: Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Pertauran Perundang-Undangan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup: Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Daerah; Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2.1. Pendapatan Daerah

2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2024, terdapat beberapa perubahan arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan target pendapatan daerah dilakukan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian;



2. Penguatan kondisi ekonomi daerah dalam upaya akselearsi ekonomi pasca COVID19, sehingga membutuhkan berbagai insentif fiskal baik dari sisi pendapatan maupun belanja;
3. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah;
4. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
5. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Optimaliasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
7. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
8. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
10. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
 - b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan dan memperluas penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran.



- 2) Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja PD penghasil.
 - 3) Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.
 - c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
 - d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah
2. Pendapatan Transfer

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas.
 3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah, bagi hasil pajak dari provinsi maupun bantuan keuangan.

Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;



- b. Meningkatkan kualitas SDM (aparatur daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;
 - c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta;
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK dan DBH;
3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat; dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi, yang diperoleh Kota Madiun;
 - b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

2.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah 2024

Perencanaan merupakan unsur penting dalam organisasi. Perencanaan menentukan semua aktivitas yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran utamanya dalam bidang pengelolaan keuangan. Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah karena kebijakan pembangunan harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Perencanaan anggaran pendapatan daerah Kota Madiun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2024 ini meliputi berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Salah satu cara yang ditempuh adalah penguatan *Local Taxing Power* dengan strategi memperluas basis pungutan dan diskresi penetapan tarif (Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU).



2. Pendapatan Transfer yaitu Pendapatan Transfer Pusat berdasarkan informasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tentang Penyampaian Dana Transfer Pusat Tahun Anggaran 2024 di APBN dan Pendapatan Transfer antar berdasarkan informasi dari Provinsi berkaitan dengan Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Tabel II.1
Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
		ANGGARAN 2024
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	254.141.714.400
4.1.01	Pajak Daerah	102.506.770.000
4.1.02	Retribusi Daerah	18.012.701.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.029.310.600
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	117.592.932.800
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	843.825.317.600
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747.542.927.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.282.390.600
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pendapatan	1.097.967.032.000

Sumber : BKAD Kota Madiun 2024

2.2. Belanja Daerah

2.2.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Rumusan tujuan/sasaran strategis tersebut diturunkan dan dirumuskan dalam kebijakan umum APBD. Penetapan kebijakan umum APBD meliputi penetapan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengacu pada upaya pencapaian sasaran pembangunan yang ingin dicapai dengan asumsi-asumsi perkembangan kondisi makro ekonomi daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari beberapa jenis belanja yaitu belanja operasi, belanja Modal, Belanja



Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja modal jalan, isirigasi dan jaringan, belanja modal asset tetap lainnya dan belanja modal asset alinnya. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer adalah belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Kebijakan pengalokasian anggaran di program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD Tahun 2024 adalah dalam berpedoman pada RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 serta sesuai dengan skala prioritas daerah.

Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja.

Penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik orientasi *output* maupun *outcomenya*. Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2024 disusun untuk mendukung tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2024 didasarkan pada tujuh kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
2. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program* prioritas);
3. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kota Madiun pada Tahun 2024
4. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah.



6. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja-belanja yang sudah di-*earmark*, seperti pendidikan 20% dan kesehatan 10%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
7. Belanja daerah lainnya dalam rangka recovery dan penanganan dampak atas pandemi COVID-19 pada semua bidang. Dalam kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir di tahun 2020, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas tahunan maupun program non prioritas yang telah direncanakan, dapat direfocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi COVID 19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Adapun arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sesuai dengan arah kebijakan nasional, regional, dan mengacu pada RPJMD 2019–2024, maka perlu dirumuskan arah kebijakan keuangan Kota Madiun. Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD. Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah diuraikan pada masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
 - a. Alokasi Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar lebih dari 45,7 persen dari Belanja operasi, dengan mempertimbangkan penerimaan tenaga P3K dan pemberian TPP bagi ASN sesuai dengan kemampuan daerah;
 - b. belanja Barang dan Jasa yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan pelayanan publik.
 - c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Namun pada RKPD Kota Madiun 2024, belanja subsidi tidak dianggarkan.



- d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja Modal
- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Namun dalam RKPD 2024, kebutuhan belanja ini tidak dianggarkan;
 - b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - e. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;



-
- f. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan dipos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 3. Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force major*, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
 4. Belanja Tranfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.

 - a. Belanja Bantuan Keuangan adalah diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 - b. Belanja Hibah adalah belanja Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Tabel II.2
Target Belanja Kota Madiun Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
		ANGGARAN 2024
5.1	BELANJA OPERASI	1.057.523.335.128
5.1.01	Belanja Pegawai	498.361.265.622
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.250.751.989
5.1.04	Belanja Subsidi	50.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	34.955.559.517
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	27.905.758.000
5.2	BELANJA MODAL	173.443.696.872
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.310.214.640
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.725.560.446
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.508.030.586
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.210.626.200
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	689.265.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
	Jumlah Belanja	1.232.967.032.000
	Total Surplus/(Defisit)	-135.000.000.000

Sumber : BKAD Kota Madiun 2024

2.3. Pembiayaan Daerah

2.3.1 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil



Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan modal daerah; Pemberian pinjaman daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Madiun Tahun 2024 terdiri atas empat kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan
4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah yang diambil yaitu dengan Peningkatan pembiayaan kreatif, melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pentingnya pembiayaan non-APBD disebabkan karena terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan pemerintah daerah. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah dalam penyediaan sarana publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat beragam. Sehingga, hanya kebutuhan prioritas yang dibiayai oleh pemerintah. Melalui kerjasama dengan pihak swasta, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa ter-cover oleh pemerintah daerah.



Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2024 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II.3
Target Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
		ANGGARAN 2024
3.1	Penerimaan Pembiayaan	135.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	135.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	135.000.000.000,00
	SILPA	0,00

Sumber : BKAD Kota Madiun 2024

2.4 Perubahan Penjabaran APBD

Dalam Perjalanannya Tahun 2024, karena terjadi beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah pusat baik dari sisi pendapatan maupun belanja serta perubahan regulasi. Oleh karena itu, Kota Madiun melakukan Perubahan Penjabaran APBD, baik yang terjadi karena kebijakan pusat maupun kebijakan daerah.

2.4.1. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024

Pemerintah Kota Madiun melakukan perubahan penjabaran APBD dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan penjabaran ini



menyesuaikan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu melakukan penyesuaian pada Program dan Kegiatan dalam rangka penyesuaian Petunjuk Teknis dimaksud, ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu disesuaikan besaran jumlah anggarannya, ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Dana Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, perlu disesuaikan besaran jumlah anggarannya.

Atas dasar tersebut Pemerintah Kota Madiun perlu melakukan perubahan Penjabaran APBD, karena harus melakukan penyesuaian pada pendapatan, belanja dan pembiayaan. Ringkasan perubahan struktur APBD menjadi sebagai berikut :

Tabel II.4
Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	254.582.494.700
4.1.01	Pajak Daerah	104.610.950.000
4.1.02	Retribusi Daerah	130.961.431.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.127.425.900
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.883.142.800
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	870.549.627.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	762.805.557.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.744.070.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pendapatan	1.125.132.576.700
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.068.143.452.061
5.1.01	Belanja Pegawai	498.820.604.622
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.888.513.394
5.1.04	Belanja Subsidi	50.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	34.955.559.517
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.428.774.528
5.2	BELANJA MODAL	168.035.591.558
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.916.137.326
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.774.428.446



KODE	URAIAN	ANGGARAN 2024
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.445.134.586
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.210.626.200
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	689.265.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.907.138.233
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.907.138.233
	Jumlah Belanja	1.239.086.181.852
	Total Surplus/(Defisit)	(113.953.605.152)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	113.953.605.152
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	113.953.605.152
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	113.953.605.152
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	113.953.605.152
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
	TOTAL APBD	1.239.086.181.852

Sumber : BKAD Kota Madiun 2024

2.5 Perubahan APBD

Adanya dinamika kondisi pemerintahan, sosial dan kemasyarakatan sehingga dalam upaya untuk melakukan sinkronisasi terhadap perkembangan yang terjadi maka dalam dokumen perencanaan penganggaran dimungkinkan untuk dilakukannya perubahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan penjelasan bahwa Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD untuk menjaga konsistensi maka RKPD juga perlu dilakukan perubahan. sinkronisasi program kegiatan, dan sub kegiatan mulai RKPD, KUA dan PPAS serta APBD harus sesuai pada Perubahan APBD tersebut dengan mengacu pada perubahan asumsi seperti pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam RKPD.

Perubahan APBD merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk menekankan agar kualitas realisasi terus terjaga bahkan ditingkatkan. Perkembangan dinamika permasalahan dan tantangan dalam pembangunan yang disertai dengan



kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah menuntut daerah untuk lebih dapat mengimplementasikan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan lebih efektif dan efisien. Untuk menyikapi hal tersebut maka diperlukan perubahan-perubahan asumsi-asumsi Perubahan KUA Kota Madiun Tahun 2024 didasarkan pada beberapa perkembangan kondisi nasional, regional maupun kondisi daerah. Pada Tahun 2024, tantangan pengembangan ekonomi pasca berakhirnya Pandemi Covid-19 untuk segera diselaraskan agar tujuan Pemerintahan Daerah dapat segera tercapai.

2.5.1 Perubahan Pendapatan Daerah

Perubahan pendapatan terjadi baik pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai mana berikut :

Tabel II.5
Ringkasan Perubahan Pendapatan Tahun 2024

KODE	URAIAN	2024 (Murni)	2024 Perubahan	SELISIH
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	254.141.714.400	262.282.977.933	8.141.263.533
4.1.01	Pajak Daerah	102.506.770.000	109.603.926.000	7.097.156.000
4.1.02	Retribusi Daerah	18.012.701.000	136.312.408.000	118.299.707.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.029.310.600	14.127.425.900	-1.901.884.700
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	117.592.932.800	2.239.218.033	-115.353.714.767
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	843.825.317.600	870.549.627.000	26.724.309.400
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747.542.927.000	762.805.557.000	15.262.630.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.282.390.600	107.744.070.000	11.461.679.400
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	1.097.967.032.000	1.132.832.604.933	34.865.572.933

Sumber : BKAD Kota Madiun 2024



2.5.2 Perubahan Belanja Daerah

Perubahan Belanja Daerah terjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, perubahan yang cukup signifikan adalah di Belanja Langsung sebagai mana berikut :

Tabel II.6
Perubahan Belanja Tahun 2024

KODE	URAIAN	2024 (Murni)	2024 Perubahan	SELISIH
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.057.523.335.128	1.075.729.133.941	18.205.798.813
5.1.01	Belanja Pegawai	498.361.265.622	470.001.490.757	-28.359.774.865
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.250.751.989	500.888.513.394	4.637.761.405
5.1.04	Belanja Subsidi	50.000.000	50.000.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	34.955.559.517	45.969.265.421	11.013.705.904
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	27.905.758.000	33.061.084.528	5.155.326.528
5.2	BELANJA MODAL	173.443.696.872	168.557.076.144	-4.886.620.728
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000	0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.310.214.640	26.303.310.160	12.993.095.520
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.725.560.446	45.581.145.997	-6.144.414.449
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.508.030.586	93.594.443.387	-9.913.587.199
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.210.626.200	2.213.911.600	3.285.400
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	689.265.000	864.265.000	175.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000
	Jumlah Belanja	1.232.967.032.000	1.246.786.210.085	13.819.178.085
	Total Surplus/(Defisit)	-135.000.000.000	-113.953.605.152	21.046.394.848

Sumber : BKAD Kota Madiun 2024



2.5.3 Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan Pembiayaan Daerah terjadi Penerimaan Pembiayaan dimana setelah dilakukan audit BPK terjadi penambahan SiLPA jika dibandingkan pada saat penyusunan APBD Murni sebagai mana berikut :

Tabel II.7
Perubahan Pembiayaan Tahun 2024

KODE	URAIAN	2024 (Murni)	2024 Perubahan	SELISIH
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	135.000.000.000	113.953.605.152	-21.046.394.848
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	135.000.000.000	113.953.605.152	-21.046.394.848
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	135.000.000.000	113.953.605.152	-21.046.394.848
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Pembiayaan Netto	135.000.000.000	113.953.605.152	-21.046.394.848
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	1.232.967.032.000	1.239.086.181.852	6.119.149.852

Sumber : BKAD Kota Madiun 2024



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO KOTA MADIUN TAHUN 2024

Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah sejatinya menyangkut terkait pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan. Keberhasilan pembangunan itu sendiri dapat dilihat dari berbagai perspektif multidimensi, baik dari aspek sosial, budaya, hukum, keamanan dan ekonomi. Aspek ekonomi sering kali digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan capaian pembangunan karena memiliki banyak indikator penilaian yang dapat berpengaruh pada seluruh aspek pembangunan. Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang umum bagi masyarakat karena dapat mudah diukur secara kuantitatif dan menstimulus aspek pembangunan lainnya.

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Hal ini dikarenakan semua kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan berujung pada pencatatan indikator makro tersebut. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Kota Madiun pada Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini :



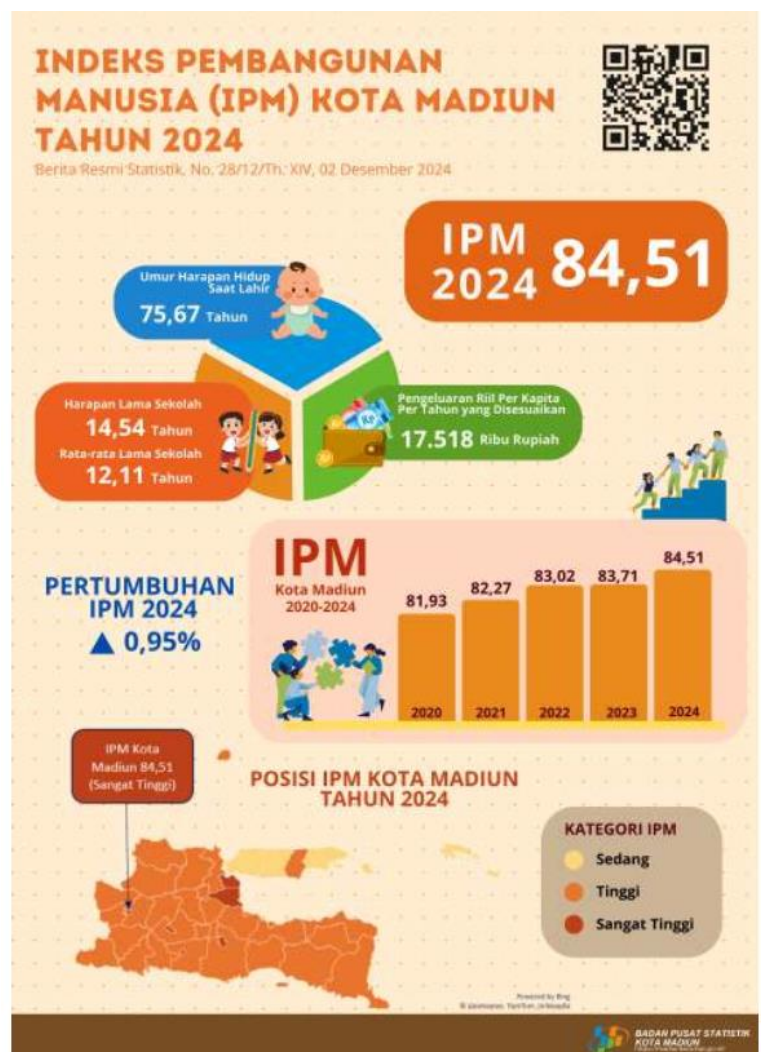
Tabel III.1
Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	83,71	84,51
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,80	5,73
3	Inflasi (yoy)	Persen	2,35	1,31
4	Angka Pengangguran / Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,85	4,30
5	Angka Kemiskinan	Persen	4,74	4,38

Sumber : BPS Kota Madiun.

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah/ Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing power parity*). Dalam kurun empat tahun terakhir ini pembangunan manusia di Kota Madiun terus mengalami kemajuan. IPM Kota madiun meningkat dari 81,93 pada tahun 2020



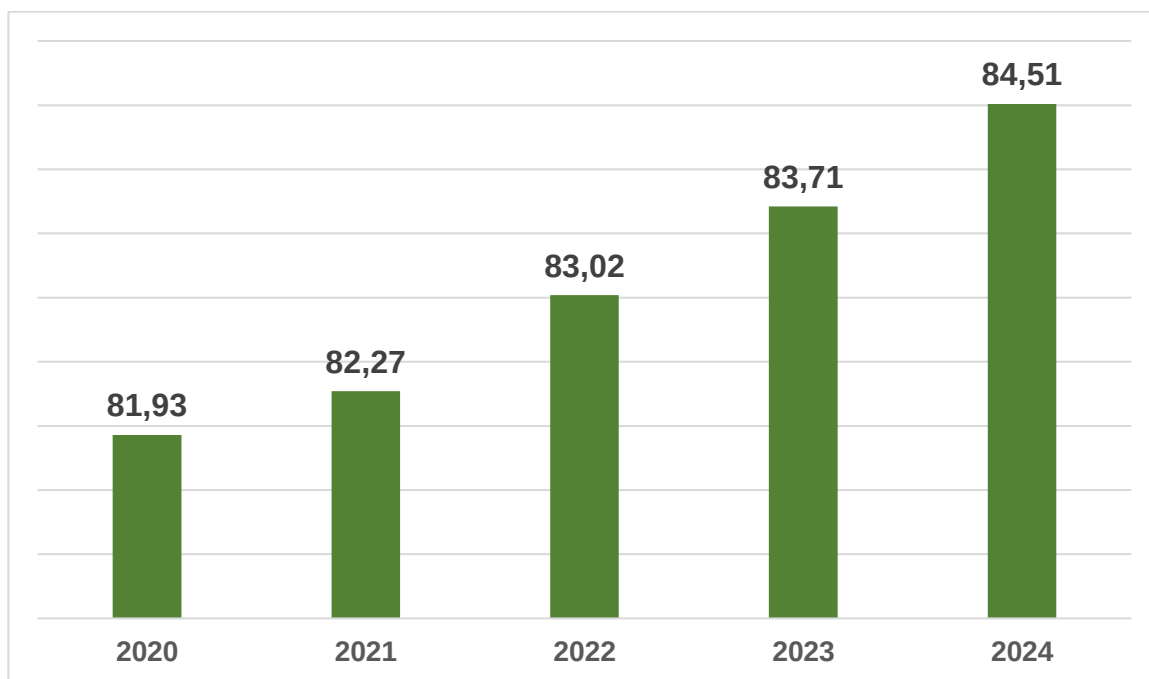


menjadi 84,51 pada tahun 2024. Selama Periode tersebut IPM Kota Madiun rata-rata tumbuh sebesar 0,78 persen per tahun. Tahun 2020 hingga 2024 IPM Kota Madiun berada pada level “sangat tinggi”. IPM Kota Madiun tahun 2024 tumbuh sebesar 0,95 persen terhadap tahun 2023 yang menempatkan IPM Kota Madiun pada peringkat ketiga se-Jawa Timur.

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh kenaikan semua dimensi penyusunnya. Pertumbuhan pengeluaran riil per kapita tumbuh sebesar 2,35 persen; rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 2,45 persen, harapan lama sekolah tumbuh sebesar 0,69 persen dan umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,36 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusun IPM selama tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik III.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

3.1.1.1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

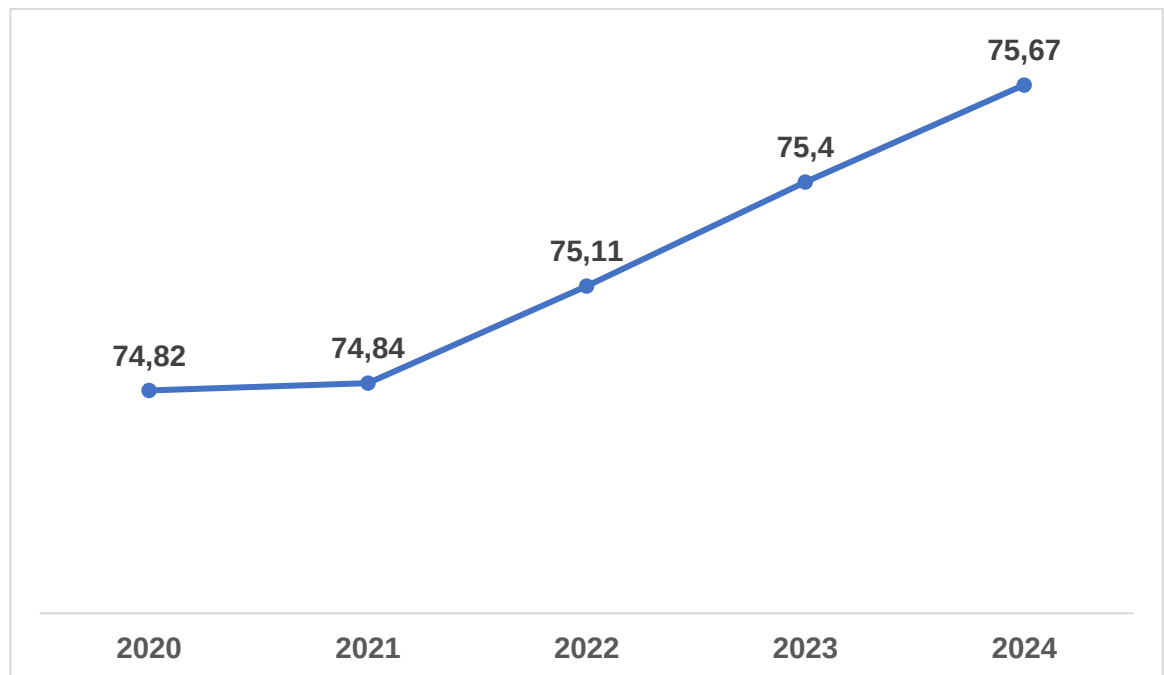
Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 74,82 tahun 2020 menjadi 75,67 tahun 2023 atau naik sebesar 0,85 tahun. Dengan demikian bayi yang lahir tahun 2024 di Kota Madiun diperkirakan mampu



bertahan hidup hingga usia 75,67 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, UHH Kota Madiun tahun 2024 mencapai 75,67 tahun meningkat sebesar 0,27 tahun atau tumbuh sebesar 0,36 persen. Dimana pertumbuhan ini lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan UHH Kota Madun Tahun 2020-2024.

Grafik III.2

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun, 2020-2024



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

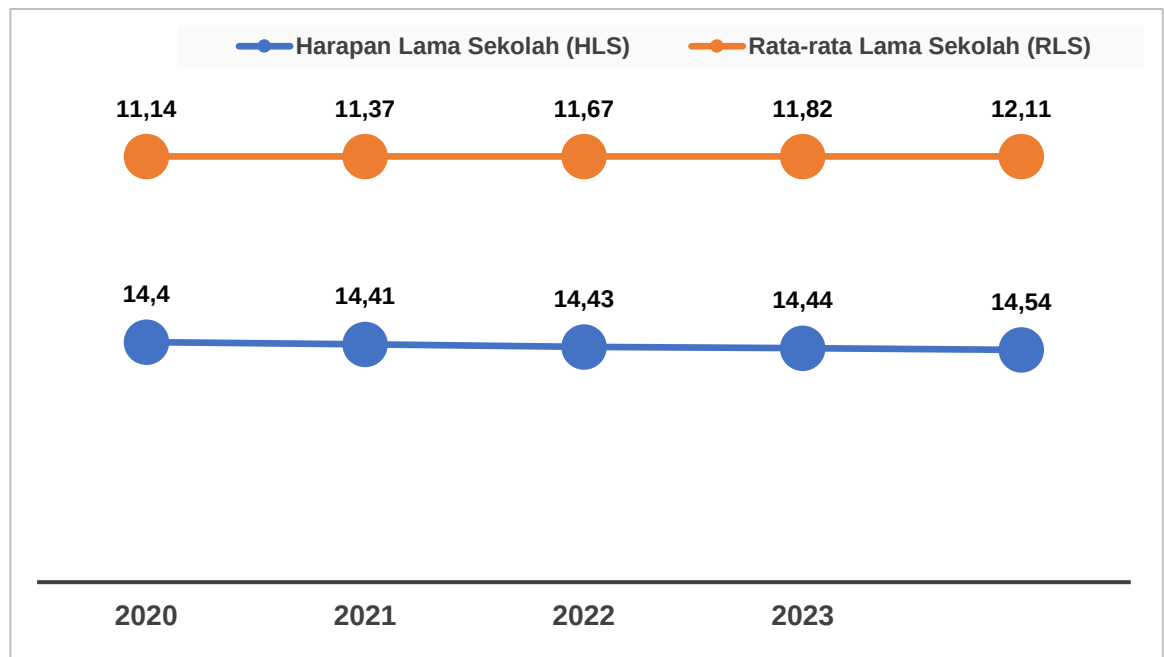
3.1.1.2. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Kota Madiun meningkat rata-rata sebesar 0,24 persen per tahun, sementara RLS meningkat 2,11 persen per tahun. HLS Tahun 2024 meningkat 0,10 tahun atau 0,69 persen dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,09 persen. Sementara itu, RLS Tahun 2024 meningkat 0,29 tahun atau 2,45 persen dibandingkan tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 1,99 persen.



Grafik III.3

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Madiun (tahun), Tahun 2020-2024



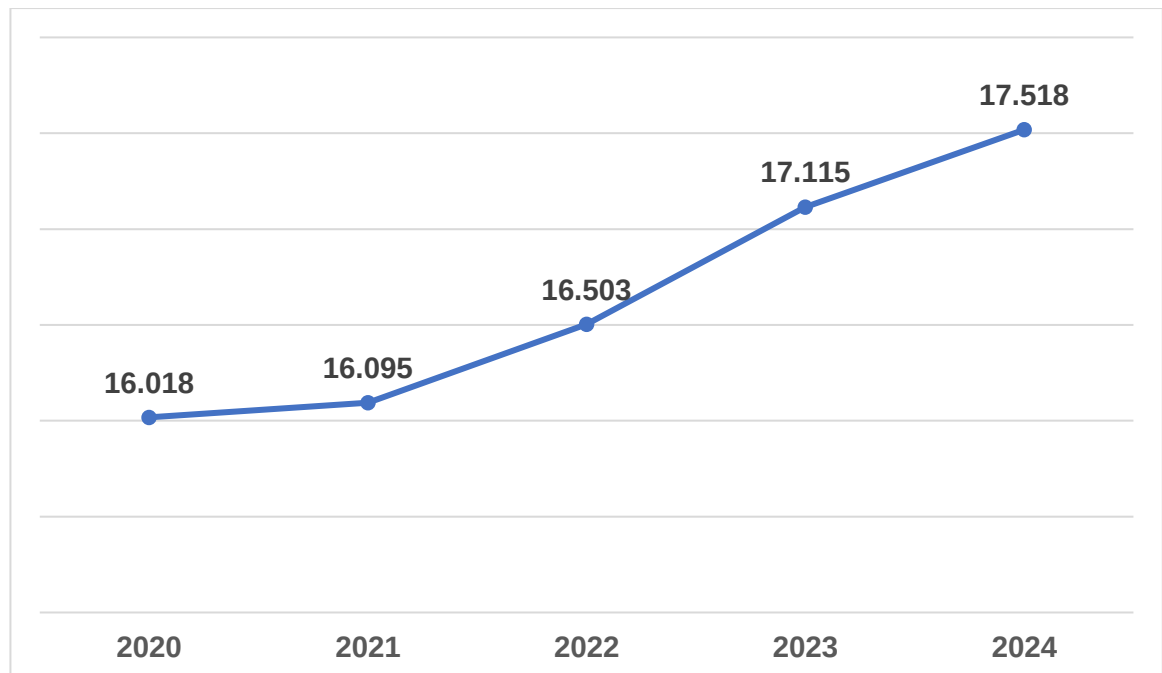
Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

3.1.1.3. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2020 pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Kota Madiun mencapai Rp. 17,12 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 403 ribu rupiah atau 2,35 persen yang dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,23 persen per tahun.

**Grafik III.4**

Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (PPP), 2020-2024 (ribu rupiah)



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut pun meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Terdapat dua jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat data tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu



tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Tabel III.2
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Tahun	PDRB (Rp)	
	ADHB	ADHK
2024**	18.653,2	12.438,9
2023*	17.256,2	11.764,4
2022	15.818,6	11.119,5
2021	14.435,4	10.537,7
2020	13.519,9	10.055,9
2019	14.107,3	10.623,1

Sumber : BPS Kota Madiun

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB Kota Madiun selama periode 2019-2024 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2024 mencapai 18.653,2 milyar rupiah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) mencapai 12.438,9 milyar rupiah. Ekonomi Kota Madiun Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,73% sedikit melambat bila dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,80%. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun tahun 2024, dari sisi produksi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 10,95 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 13,34 persen. Struktur ekonomi kota Madiun tahun 2024, dari sisi produksi didominasi Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 26,37 persen. Dari sisi pengeluaran, didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 72,41 persen.



PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MADIUN TAHUN 2024

Berita Resmi Statistik Tahun 2024 No. 06/03/3577/Th. IX Maret 2025

**LAJU PERTUMBUHAN
EKONOMI**

5,73 %

NILAI PDRB ADHB

Rp. 18.653,20

Miliar

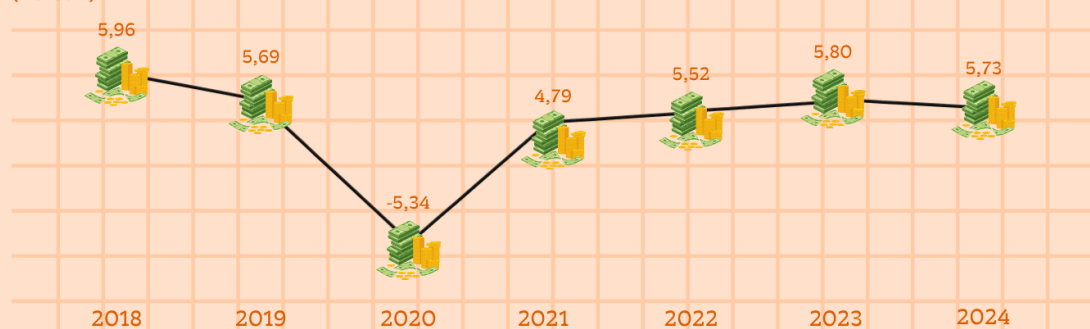
NILAI PDRB ADHK

Rp. 12.438,92

Miliar

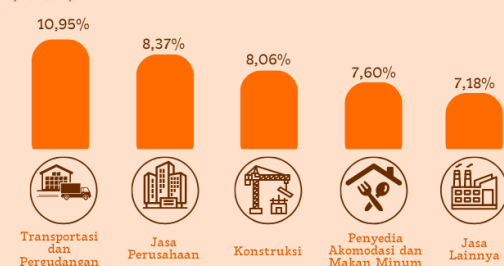
LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TAHUN 2018 - 2024

(Persen)



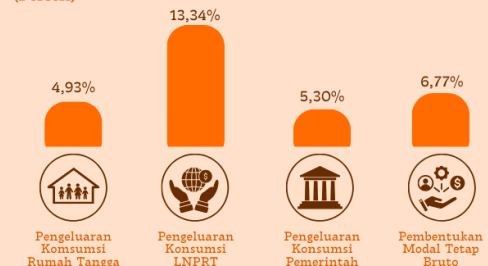
PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA 2024

(Persen)



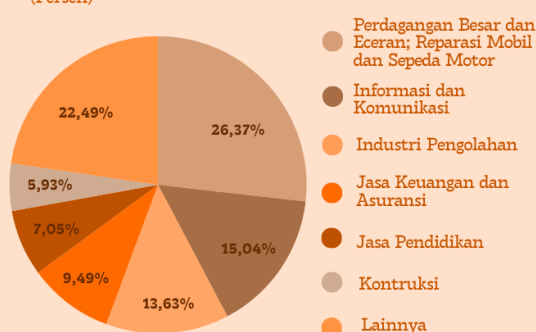
PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN 2024

(Persen)



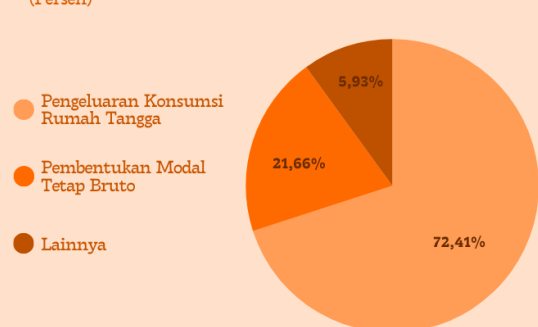
DISTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA 2024

(Persen)



DISTRIBUSI PDRB MENURUT PENGELUARAN 2024

(Persen)



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MADIUN**



bpskotamadiun



BPS Kota Madiun



madiunkota.bps.go.id

Secara terperinci pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor ditunjukkan pada tabel berikut:



Tabel III.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun
Tahun 2023-2024 (%)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan		Distribusi	
		2023	2024	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,79	5,04	0,71	0,71
B	Pertambangan dan Penggalian	(5,53)	-29,43	0,02	0,01
C	Industri Pengolahan	7,98	6,36	13,56	13,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,38	6,39	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,21	4,81	0,21	0,21
F	Konstruksi	4,83	8,06	5,83	5,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,60	4,59	26,71	26,37
H	Transportasi dan Pergudangan	11,64	10,95	4,52	4,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,93	7,60	5,22	5,40
J	Informasi dan Komunikasi	6,17	4,93	15,25	15,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,82	3,87	9,67	9,49
L	Real Estate	4,35	3,91	2,54	2,46
M,N	Jasa Perusahaan	6,12	8,37	0,68	0,69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,51	7,10	2,70	2,82
P	Jasa Pendidikan	3,17	5,96	6,97	7,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,20	5,10	1,49	1,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,39	7,18	3,85	3,92
Produk Domestik Regional Bruto		5,80	5,73	100	100
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		5,80	5,73	100	100

Sumber : BPS Kota Madiun

Untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu 2019-2024 mendominasi lebih tinggi dari daerah sekitar. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 adalah masih tetap Kota Madiun



dengan 5,73%. Data mengenai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel III.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Madiun	5,69	-5,34	4,79	5,52	5,80	5,73
Madiun	5,42	-0,12	3,32	4,32	5,12	4,68
Magetan	5,04	-1,64	3,04	3,89	4,47	4,79
Ngawi	5,05	-1,69	2,55	3,19	4,49	4,64
Pacitan	5,08	-1,84	2,49	5,54	4,46	4,34
Ponorogo	5,01	-0,90	3,19	3,24	5,14	4,74

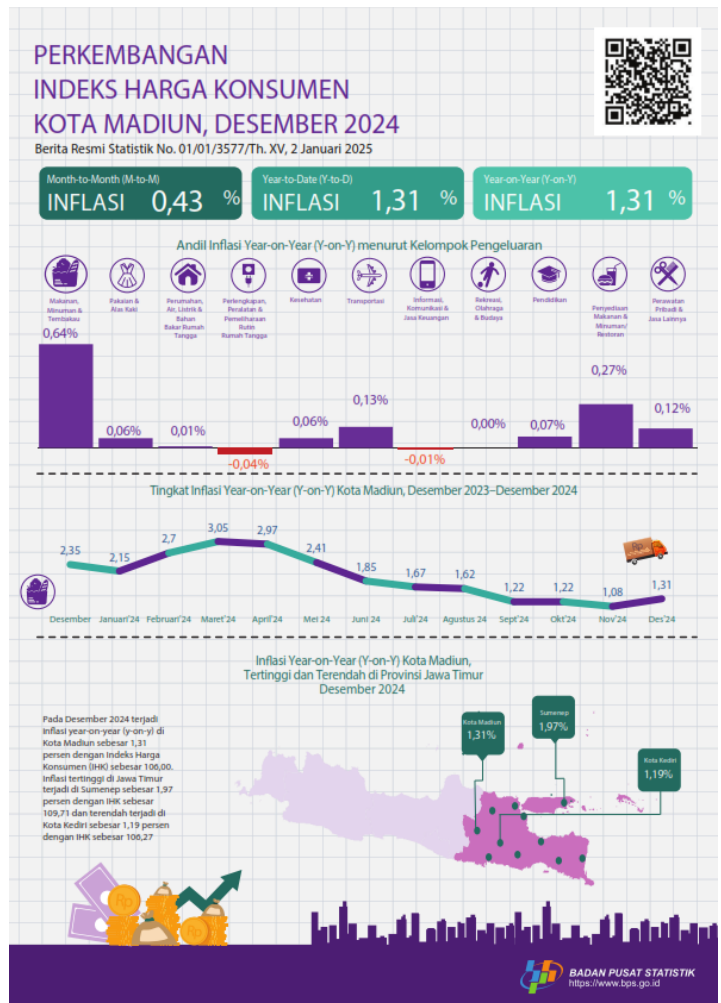
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

3.1.3. Inflasi

Stabilitas Harga atau pengendalian inflasi merupakan salah satu isu utama ekonomi makro. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi stimulator bagi pertumbuhan ekonomi, Sebaliknya tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak negatif pada perekonomian yang selanjutnya dapat mengganggu kestabilan sosial dan politik. Menurut pandangan beberapa kalangan penyebab utama inflasi adalah kelebihan penawaran uang dibandingkan yang diminta oleh masyarakat. Inflasi yang terkendali akan menciptakan kestabilan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, walaupun kadang-kadang terjadi trade off antara pengendalian inflasi dengan beberapa variabel ekonomi lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

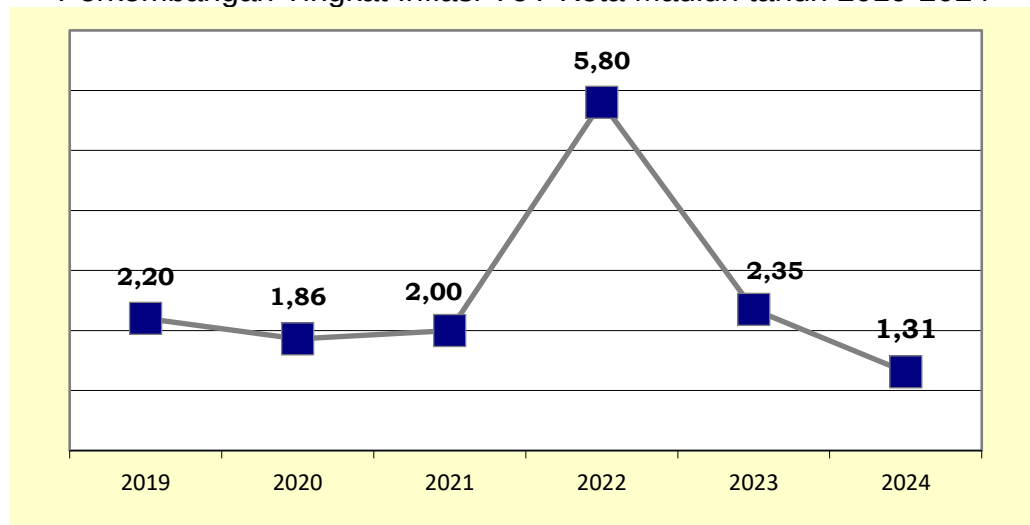


Kota Madiun pada tahun 2024 inflasi *year on year* (yoy) sebesar 1,31 persen, terendah ke tiga se Provinsi Jawa Timur, dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 106,00. Dari 8 Kabupaten/Kota penghitung inflasi di Jawa Timur seluruhnya mengalami inflasi yoy. Inflasi yoy 2024 dipicu karena adanya kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran antara lain kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,31 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,45 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,72 persen; kelompok transportasi sebesar 1,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,32 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,98 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,53 persen. Sementara terdapat tiga kelompok yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,81 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,02 persen.





Grafik III.5
Perkembangan Tingkat Inflasi YoY Kota Madiun tahun 2019-2024



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa inflasi Kota Madiun yoy tahun 2024 terjaga cukup stabil dan terkendali pada rentang target sasaran $2,5\% \pm 1$ yakni mencapai 1,31% (yoy) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2023 yakni sebesar 2,35%. Sepanjang tahun 2024, Pemerintah Kota Madiun terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga stabilitas harga. Kebijakan tersebut antara lain melalui program Warung Tekan inflasi (WARTEK), Program Toko Acuan, pemantauan ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas, Operasi Pasar, rapat koordinasi antar stakeholder dan Gerakan Pangan Murah, Berbagai program kebijakan yang disinergikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mampu menjaga stabilitas harga pangan. Kedepan, Pemerintah Kota Madiun akan terus mewaspadaikan dan memonitor fenomena domestik maupun global yang dapat berdampak terhadap inflasi.

3.1.4. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Madiun. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 163.080 orang, naik sebanyak 1.652 orang dibanding Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 115.142 orang (70,60 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja (29,40). Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 110.196 orang penduduk



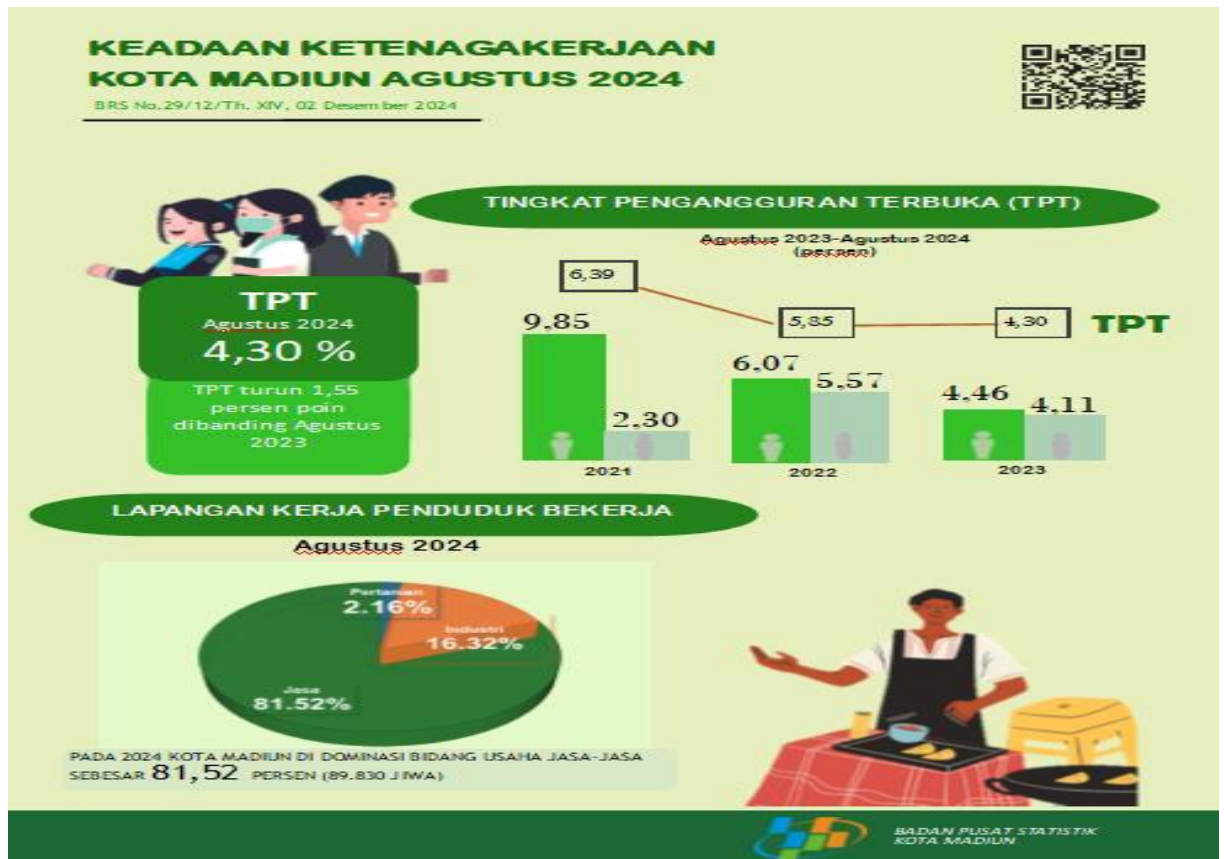
yang bekerja dan 4.946 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 3.290 orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 4.883 orang dan pengangguran turun sebanyak 1.593 orang.

Tabel III.5

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2023 – Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Agustus (2023-2024)	
	Orang	Orang	Orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	161.428	163.080	1.652	1,02
Angkatan Kerja	111.852	115.142	3.290	2,94
-Bekerja	105.313	110.196	4.883	4,64
-Pengangguran	6.539	4.946	-1.593	-24,36
Bukan Angkatan Kerja	49.576	47.938	-1.638	-3,30
	Persen	Persen	Persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,85	4,30	-1,55	
- Laki-laki	6,07	4,46	-1,61	
- Perempuan	5,57	4,11	-1,46	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,29	70,60	1,31	
- Laki-laki	78,69	78,87	0,18	
- Perempuan	60,42	62,81	2,39	

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun.

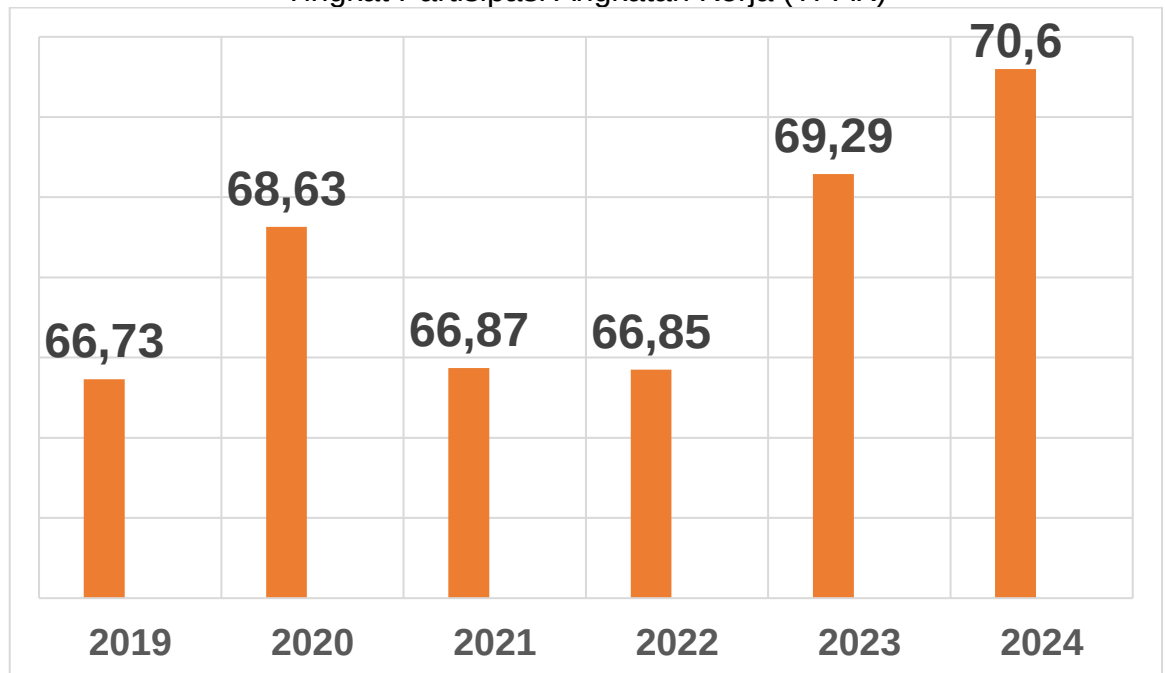


3.1.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 70,60 persen, naik 1,31 persen poin dibanding Agustus 2023. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK Agustus 2024 laki-laki sebesar 78,87 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 62,81 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen poin dan TPAK perempuan juga mengalami kenaikan sebesar 2,39 persen poin.



Grafik III.6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah.

3.1.4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

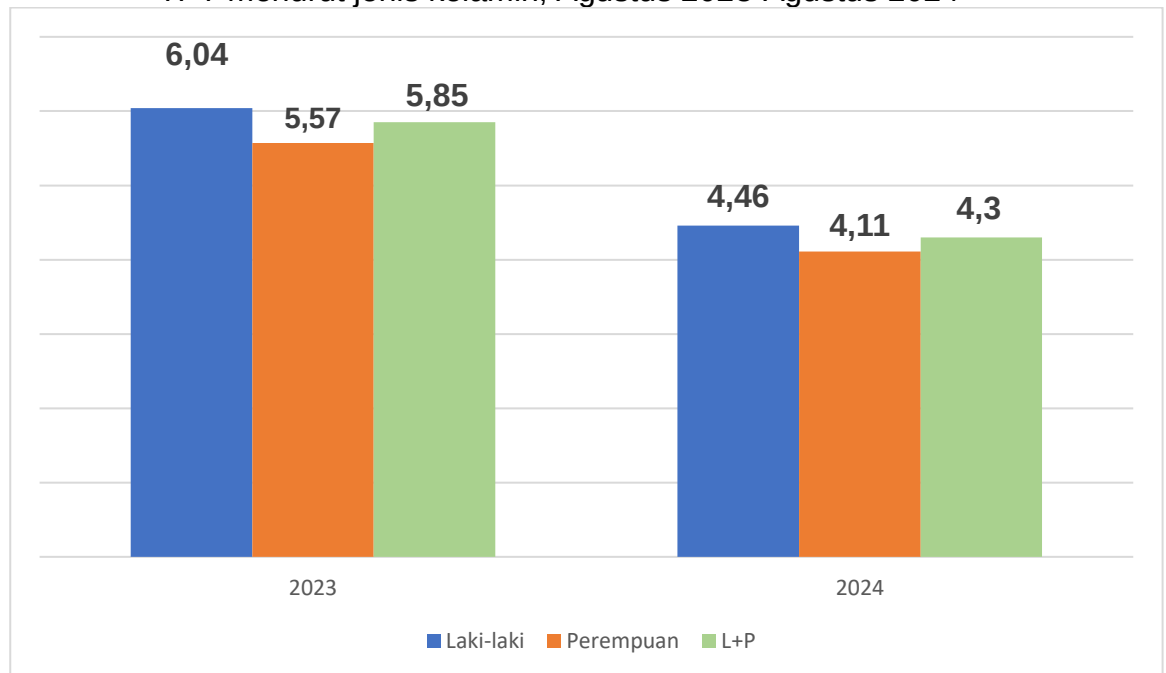
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 4,30 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 1,55 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

1) TPT menurut jenis kelamin

Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 4,46 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang hanya sebesar 4,11 persen. TPT Agustus 2024 menurut jenis kelamin memiliki pola yang sama dengan TPT Agustus 2023, dimana TPT laki-laki lebih besar dari TPT perempuan, namun TPT Agustus 2024 antara TPT Laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan yang lebih kecil dibandingkan dengan TPT tahun 2023.



Grafik III.7
TPT menurut jenis kelamin, Agustus 2023-Agustus 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

2) TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan

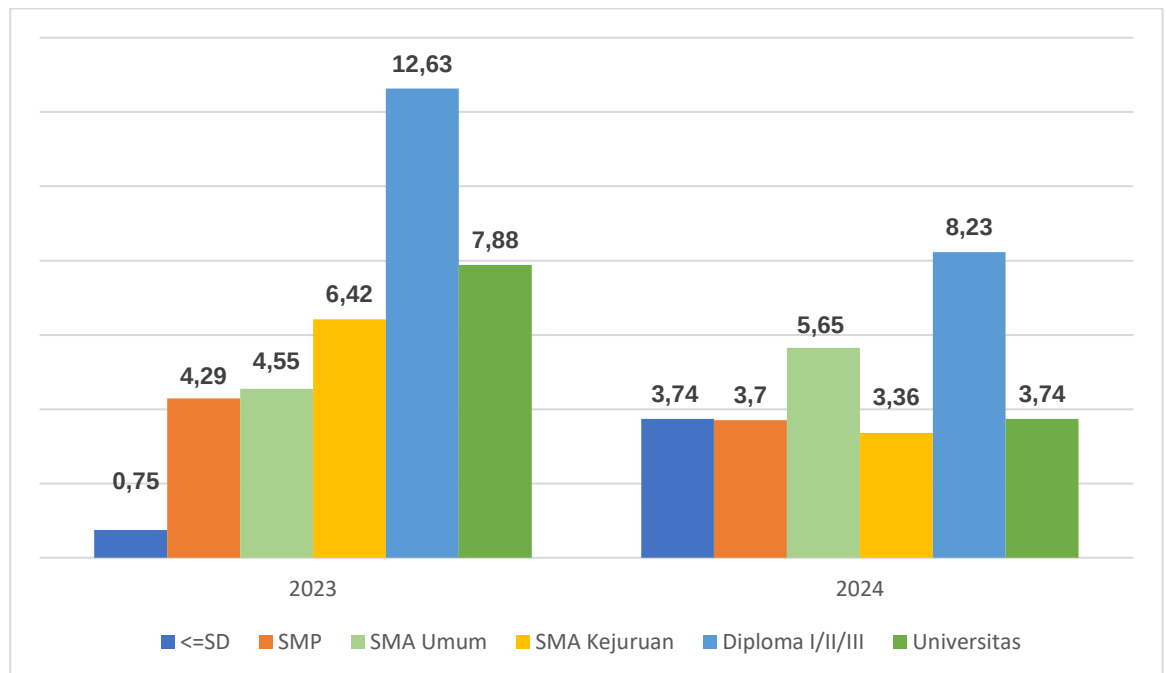
TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang sedikit berbeda antara Agustus 2023 dan Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT dari tamatan Diploma mempunyai TPT paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 8,23 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SMA Kejuruan yaitu sebesar 3,36 persen. Sedangkan pada tahun 2023 TPT paling tinggi juga didominasi tamatan Diploma I/II/III sebesar 12,63 dan TPT terendah adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) kebawah yaitu sebesar 0,75 persen.

Dibandingkan Agustus 2023, hanya TPT dengan tingkat pendidikan SD kebawah saja yang mengalami peningkatan yaitu dari 0,75 persen pada tahun 2023 menjadi 3,74 persen pada tahun 2024. Sedangkan TPT dengan tingkat pendidikan SMP Sederajat, SMA umum, SMA Kejuruan, Diploma I/II/III dan Universitas saja yang mengalami penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.



Grafik III.8

TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen),
Agustus 2023-Agustus 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun.

3.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Garis kemiskinan merupakan suatu representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan (setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari) dan non makanan esensial. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Dalam proses berjalannya pemerintahan, pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Upaya nyata di berbagai bidang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun demi tercapainya pengentasan kemiskinan, mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

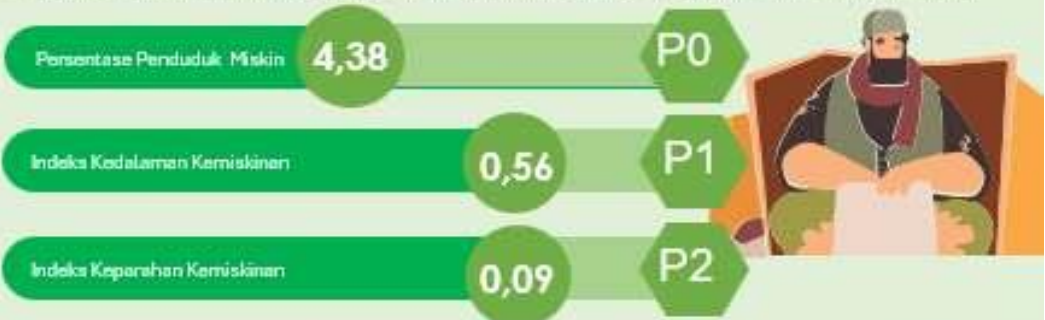


PROFIL KEMISKINAN DI KOTA MADIUN MARET 2024

Berita Resmi Statistik No. 17/06/ Th. XIV, 01 Agustus 2024



Presentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Madiun



Jumlah Penduduk Miskin
Kota Madiun pada Maret 2024
Sebesar **7,84** ribu jiwa

Garis Kemiskinan (GK)

Rp.637,838.- /kapita/bulan

7,84 ribu jiwa

atau **4,38** persen berada
dibawah garis kemiskinan



Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MADIUN
<https://madiunkota.bps.go.id>

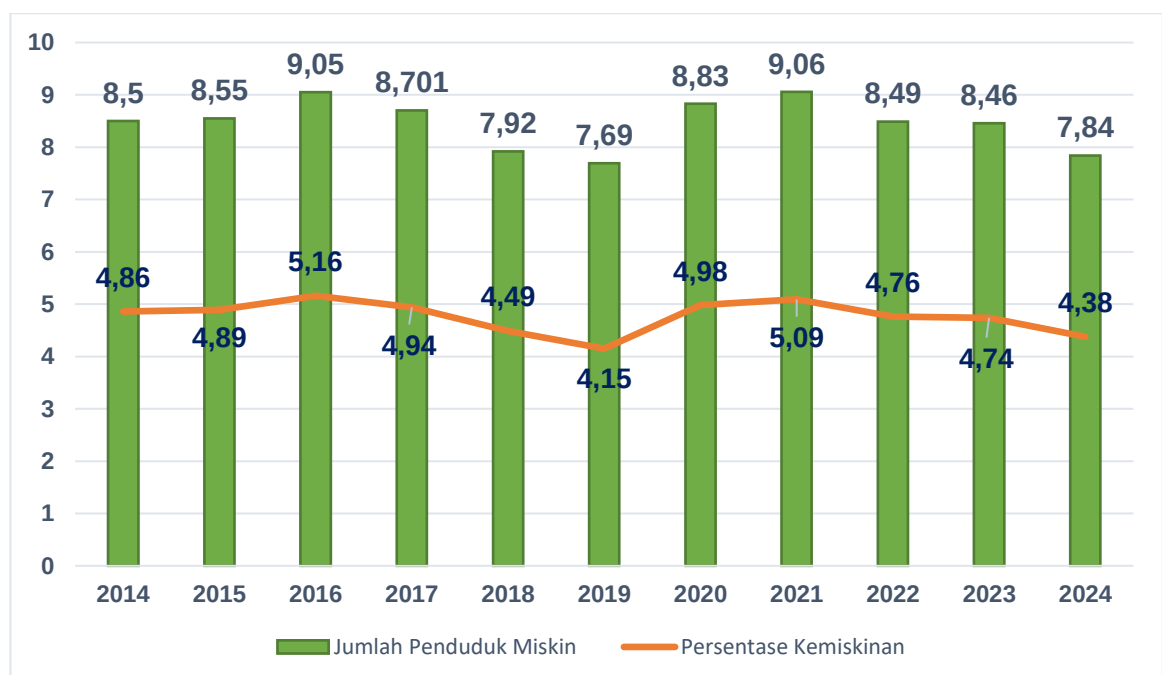
Berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Madiun, Profil Kemiskinan di Jawa Timur, Maret 2024 Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kota Madiun pada bulan Maret 2024 mencapai 7,84 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 0,62 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 8,46 ribu jiwa. Persentase



penduduk miskin di Kota Madiun juga mengalami penurunan dari 4,74 persen pada bulan Maret 2023 menjadi sebesar 4,38 persen pada bulan Maret 2024. Garis Kemiskinan di Kota Madiun pada bulan Maret 2024 sebesar Rp 637.838,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 32.707,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 5,4 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2023 yang sebesar Rp 605.131,00.

Grafik III.9

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Madiun, Maret 2014-Maret 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

Secara umum, dalam periode 2014-2024 tingkat kemiskinan di Kota Madiun cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 8,50 ribu jiwa, berkurang sebesar 0,66 ribu jiwa menjadi 7,84 ribu jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kota Madiun pada tahun 2014 sebesar 4,86 persen, berkurang sebesar 0,48 poin atau menjadi 4,38 persen pada tahun 2024.

3.1.5.1. Perkembangan Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita



per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Madiun pada Maret 2024 adalah sebesar Rp. 637.838,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023 yang memiliki Garis Kemiskinan sebesar Rp. 605.131,00, dengan kata lain Garis Kemiskinan bertambah sebesar 32.707,00 per kapita per bulan. Apabila dibandingkan sepuluh tahun yang lalu garis kemiskinan Kota Madiun naik sebanyak Rp. 299.229,00 ribu rupiah atau naik sebesar 88 persen.

Tabel III.6
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Madiun, 2014-2024

Tahun	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	338.609,00	8,50	4,86
2015	359.771,00	8,55	4,89
2016	376.956,00	9,05	5,16
2017	404.959,00	8,70	4,94
2018	446.525,00	7,92	4,49
2019	478.304,00	7,69	4,35
2020	497.628,00	8,83	4,98
2021	514.409,00	9,06	5,09
2022	551.620,00	8,49	4,76
2023	605.131,00	8,46	4,74
2024	637.838,00	7.84	4.38

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

3.1.5.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Akan tetapi dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk



miskin, diharapkan juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode 2023-2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 0,56, mengalami penurunan 0,09 poin dibandingkan 2023 yang sebesar 0,65. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,16 menjadi 0,09 atau turun sebesar 0,07 poin.

Selama periode 2014-2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Madiun memiliki kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kota Madiun semakin mendekati Garis Kemiskinan. Hal serupa untuk Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), yang memiliki kecenderungan menurun dalam rentang 2014-2024 di Kota Madiun. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kota Madiun, tidak terlalu besar.

Berdasarkan hal ini dapat diperoleh dua informasi. Pertama, biaya yang diperlukan dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama yang bersifat cash transfer agar penduduk keluar dari Garis Kemiskinan tidak sebesar di tahun 2014 (berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan/ P1) dan kedua tidak memerlukan beragam program dikarenakan tingkat kemiskinan di Kota Madiun relative homogen dibandingkan kondisi tahun 2014 (berdasarkan Indeks Keparahannya Kemiskinan/ P2).



Tabel III.7

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Madiun, Maret 2014-Maret 2024

Tahun	Kedalaman Kemiskinan (P1)	Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)
2014	0,660	0,160
2015	0,560	0,100
2016	0,940	0,260
2017	0,610	0,130
2018	0,310	0,040
2019	0,500	0,080
2020	0,770	0,180
2021	0,670	0,150
2022	0,400	0,060
2023	0,650	0,160
2024	0,560	0,090

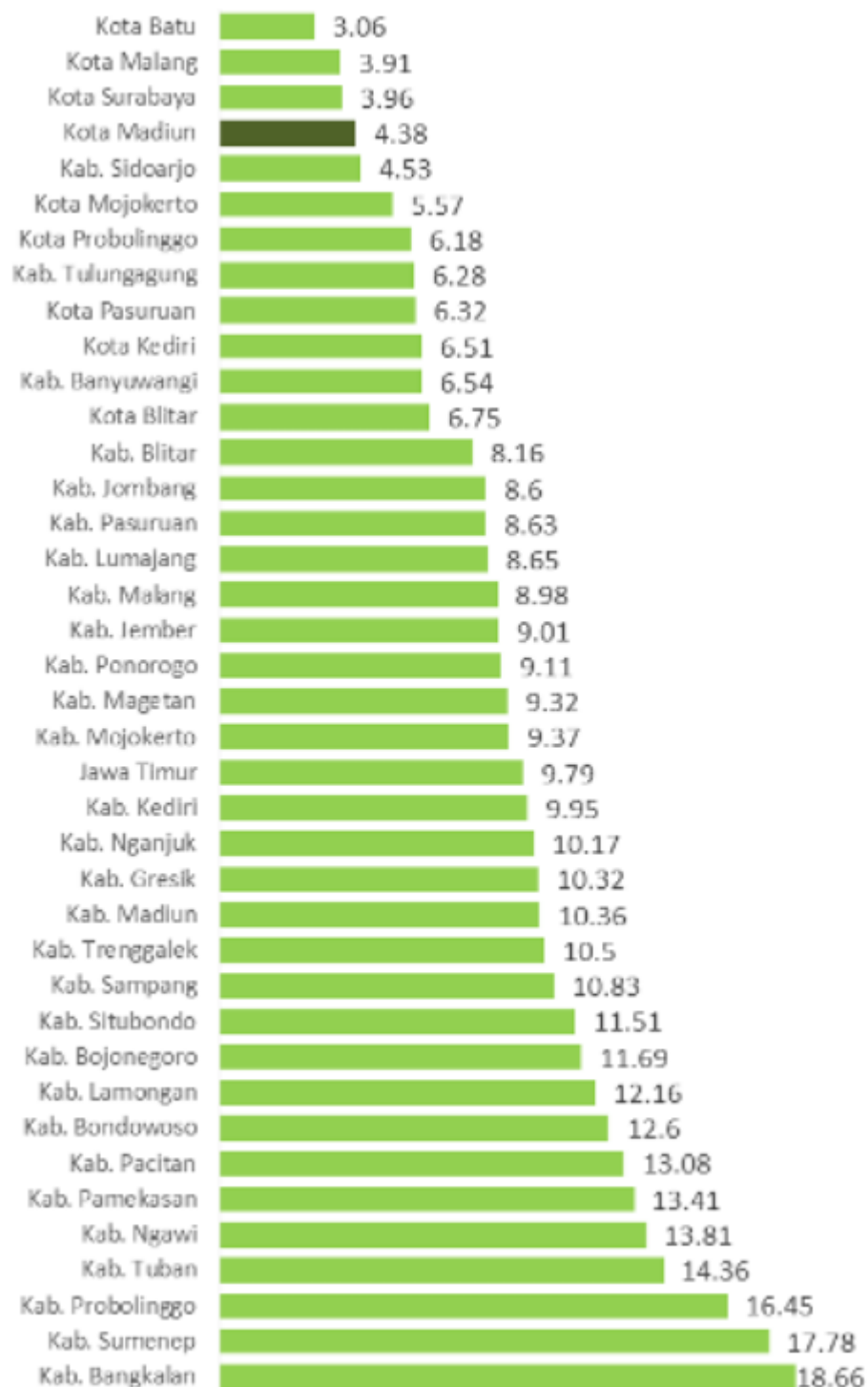
Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

3.1.5.3. Persentase Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2023

Data kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2024 adalah Kabupaten Bangkalan yaitu sebesar 18,66 persen dan persentase penduduk miskin terendah adalah Kota Batu sebesar 3,06 persen. Sedangkan Kota Madiun berada pada persentase penduduk miskin keempat terendah setelah Kota Batu, Kota Malang dan Kota Surabaya dengan besaran tingkat kemiskinan sebesar 4,38 persen. Sedangkan wilayah karesidenan Madiun yang terdiri dari Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan dan Ponorogo menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin terendah adalah Kota Madiun yaitu sebesar 4,38 persen dan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Ngawi yaitu 13,81 persen.

**Grafik III.10**

Persentase Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun



3.2. CAPAIAN KINERJA TUJUAN SASARAN KOTA MADIUN TAHUN 2024

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Wali Kota Terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan capaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini :

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2023)	Tahun 2024		% Capaian
						Target	Realisasi	
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)								
T.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	IT1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,95 (A-)	(A-) 87,95	91,02 (A-)	103,49%
S.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	Skor	A (80,08)	A (80,08) Skor	A (81,03)	101,19%
		IS1.2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	3,217	3,01 (sedang)	3,2179	106,91%
		IS1.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,45	4,45 (memuaskan)	4,57 (Memuaskan)	102,70%
S.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	88,028 (sangat baik)	88,028 (baik)	88,74 (sangat baik)	100,81%
		IS2.2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,62	53,96	67,09	124,33%
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan								
T.2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	IT2.1	Indeks Kenyamanan Kota (Liveable City)	Indeks	91,93	91,93	93,933	101,52%



Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2023)	Tahun 2024		% Capaian
						Target	Realisasi	
S.3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1	Indeks infrastruktur	Indeks	98,44	98,59	98,59	100%
S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,32	57,93	62,21	107,39%
Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun								
T.3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT.3.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,71	83,71	84,51	100,96%
		IT.3.2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,57*	95,18	95,18*	100%*
S.5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,44	14,43	14,54	100,76%
		IS5.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,82	11,67	12,11	103,77%
S.6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	IS6.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,44	73,13	75,67	103,47%
S.7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	78,03*	77,22	78.94*	102,23%*
Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun								
T.4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	IT4.1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,87**	6,40	6,87**	107,34%**
S.8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	IS8.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,85	5,00	4,30	114%
S.9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS9.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,60	7,98	4,59	57,51%
		IS9.2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	24,7	21,57	30,48	141,30%
T.5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT5.1	Indeks Ketentraman	Indeks	82,88	82,88	84,23	101,63%
		IT5.2	Indek Gini	Indeks	0,416	0,39	0,435	88,46%
S.10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1	Angka Kemiskinan	%	4,74	4,45%	4,38%	101,57%
S.11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1	Indeks Kerukunan	Indeks	77,80 (harmonis)	B skor 77,8 (harmonis)	78,04 (harmonis)	100,31%
		IS11.2	Indeks rasa aman	Indeks	82,47	83,31	84,16	101,02%

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

IT : Indikator Tujuan

IS : Indikator Sasaran

Sumber Data : Tim Penyusun LKPJ Kota Madiun, data diolah



1) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 bahwa kategori capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III.8
Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

No	Capaian Realisasi	Kategori Capaian Kinerja	Bobot	Kategori Capaian Kinerja
1	> 100 %	Sangat Baik/Istimewa	5	Di atas ekspektasi
2	100 %	Baik	4	Sesuai ekspektasi
3	80 % ≤ 99 %	Cukup	3	Di bawah ekspektasi
4	60 % ≤ 79 %	Kurang	2	
5	0 % ≤ 59 %	Sangat Kurang	1	

Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

- (1) **Tingkat Realisasi Positif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- (2) **Tingkat Realisasi Negatif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:



$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2) Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Realisasi capaian kinerja Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikaitkan dengan Misi Walikota dan Tujuan pendukung Misi Walikota adalah sebagai berikut :

Tabel III.9
Pengukuran Realisasi Kinerja Misi 2024

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance)				
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	(A-) 87,95	91,02 (A-)	103,49


Misi 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Liveable City	91,93	93,933	101,52

Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	83,71	84,51	100,96
	Indeks Pembangunan Gender	95,18	95,18*	100*

Misi 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,40	6,87**	107,34
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	82,88	84,23	101,63
	Indek Gini	0,39	0,435	88,46

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun, KEMENPANRB dan BPS

*Angka 2023 dikarenakan angka 2024 belum rilis

** Angka 2022 dikarenakan angka 2023 dan 2024 belum rilis



Tabel III.10
Pengukuran Realisasi Kinerja 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	A (80,08) Skor	A (81,03)	101,19
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,01 (sedang)	3,2179	106,91
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,45 (memuaskan)	4,57 (Memuaskan) indeks	102,70
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	88,028 (baik)	88,74 (sangat baik)	100,81
		Indeks Inovasi Daerah	53,96 indeks	67,09 indeks	124,33
3.	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur	98,59 indeks	98,59 indeks	100,00
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,93 indeks	62,21 indeks	107,39
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,43 tahun	14,54 tahun	100,76
		Rata-rata Lama Sekolah	11,67 tahun	12,11 tahun	103,77
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,13 tahun	75,67 tahun	103,47
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,22 indeks	78.94*	102,23*
8.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,00%	4,30%	114



No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
9.	Meningkatnya pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	7,98%	4,59	57,51
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	21,57%	30,48	141,30
10.	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,45%	4,38%	101,57
11.	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Angka Kerukunan	B skor 77,8 (harmonis)	78,04 (harmonis)	100,31
		Indeks Rasa Aman	83,31 indeks	84,16 indeks	101,02

*Angka Sementara

Sumber Data : Tim Penyusun LKPJ Kota Madiun, data diolah

3) Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) didukung oleh 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran

Pada Misi 1 Tujuan 1 terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :



Tabel III.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2023 (n-1)	2024 (n)
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	70,01 (BB)	87,95 (A)	91,02 (A-)

Sumber : KEMENPANRB 2024

Tabel III.12
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	70,01 (BB)	91,02 (A-)	130

Sumber : KEMENPANRB 2024



Tabel III.13

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi 2024	Realisasi Nasional 2024
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	91,02 (A-)	A-	N/A

Sumber : KEMENPANRB 2024

Indeks RB Kota Madiun

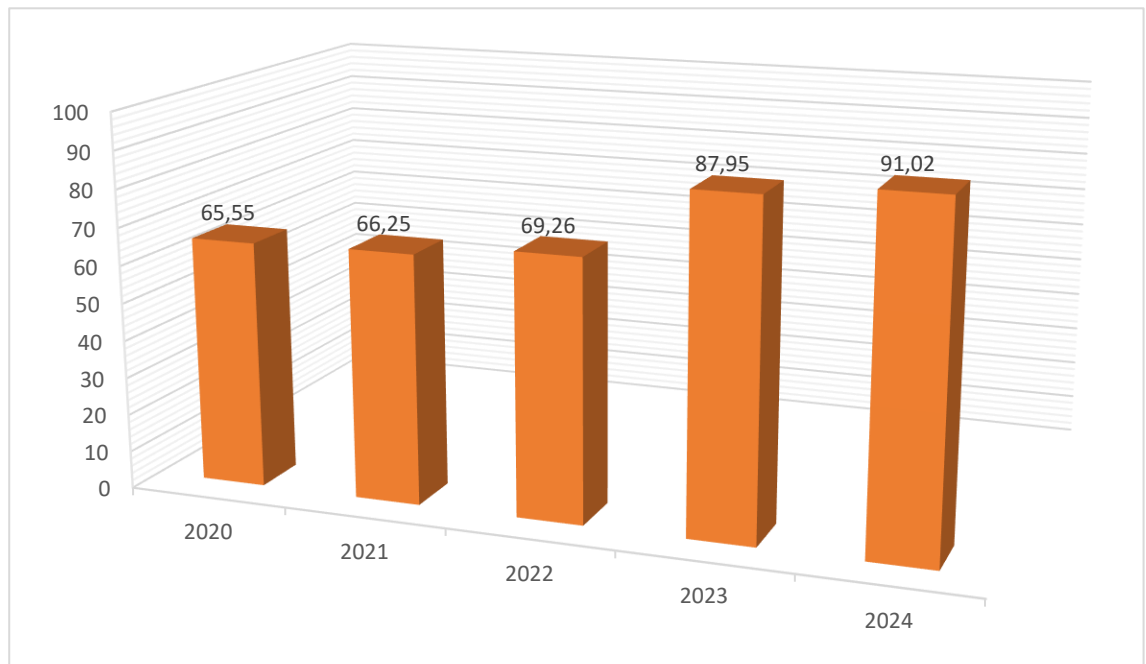
Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut dari pedoman evaluasi tahun sebelumnya adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis holistik.

Evaluasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Perkembangan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Grafik III.11
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024



Sumber : Kementerian PANRB 2024

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan, Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun adalah 91,02 kategori “A-” dengan capaian kinerja sebesar 130,00%.

Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.14
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A.	RB General	100	80,60
B.	RB Tematik	20	10,42
C.	Indeks RB	120	91,02
			A-

Sumber : Kementerian PANRB 2024



Sedangkan untuk rincian hasil dari masing-masing indikator penilaian adalah sebagai berikut :

Tabel III.15
Rincian Hasil Indikator Penilaian dari Kementerian/Lembaga

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Sumber Data
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,42	2,42	Tim Penilai Nasional
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100	5,65	Tim Penilai Nasional
3.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	4	2,4	KEMENPAN RB
4.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3,29	2,63	BPKP
5.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	0,75	0,75	KEMENPAN RB
6.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	81,03	3,24	KEMENPAN RB
7.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	98,09	2,45	KEMENPAN RB
8.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2,5	5	2,5	KEMENPAN RB
9.	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	68,67	1,72	LAN
10.	Indeks Reformasi Hukum	2,5	97,72	2,44	KEMENKUM HAM
11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	2,18	1,09	BPS
12.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	78,01	1,95	LKPP
13.	Indeks Sistem Merit	4	295	2,88	KASN
14.	Indeks Pelayanan Publik	2	4,47	1,87	KEMENPAN RB
15.	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	95,5	1,91	Ombudsman RI
16.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	4,57	8,23	KEMENPAN RB



No.	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Sumber Data
17.	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	4	99,15	3,97	Tim Penilai Nasional
18.	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	94,12	4,57	Tim Penilai Nasional
19.	Opini BPK	5	5	5	BPK
20.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	90,97	3,64	BPK
21.	Indeks BerAKHLAK	4	74,47	2,98	KEMENPAN RB
22.	Survei Penilaian Integritas	10	77,07	7,71	KPK
23.	Survei Kepuasan Masyarakat	8	88,74	7,1	KEMENPAN RB
24.	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1	0,63	0,63	Tim Penilai Nasional
25.	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0,58	0,58	Tim Penilai Nasional
26.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0,54	0,54	Tim Penilai Nasional
27.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	0,79	0,79	Tim Penilai Nasional
28.	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	0	0	0	Tim Penilai Nasional
29.	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	2	2	Tim Penilai Nasional
30.	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,53	1,53	Tim Penilai Nasional
31.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	1,5	1,5	Tim Penilai Nasional
32.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,85	2,85	Tim Penilai Nasional
33.	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	0	0	Tim Penilai Nasional
34.	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	2,5	3	1,5	Tim Penilai Nasional

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2024



Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map RB 2020-2024 yang memberikan konsep yang jelas terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun
2. Penyusunan rencana aksi yang lebih terarah dan berorientasi pada prioritas penyelesaian permasalahan utama
3. Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan daerah yang memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk mendorong perubahan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4. Kesamaan persepsi dan tujuan mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah yang didukung budaya kerja berorientasi hasil
5. Konsistensi dan keberlanjutan, karena reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berkelanjutan
6. Pemanfaatan aplikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik
7. Ketersediaan dana/anggaran yang cukup, untuk melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai
8. Dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai
9. Dukungan masyarakat, berupa partisipasi masyarakat dan sistem kontrol dari berbagai unsur Masyarakat serta memberikan masukan yang membangun terhadap kebijakan dan pelaksanaan reformasi
10. Adanya regulasi yang jelas dan konsisten yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dapat mempercepat proses perubahan
11. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah :

1. Masih terdapat penetapan target atas Kegiatan Utama belum didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpan RB nomor 182 Tahun 2024)



2. Belum adanya perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan system kerja dan penyederhanaan birokrasi
3. Pengelolaan komunikasi kebijakan kepada seluruh stakeholder sasaran pada seluruh proses kebijakan yang belum optimal
4. Belum terdapat kebijakan atau kaidah baku terkait aspek data statistik yang berlaku untuk seluruh produsen data di Kota Madiun
5. Belum optimalnya kerja sama antara lima elemen masyarakat, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media dalam pengendalian inflasi
6. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE dengan menerapkan mekanisme Evaluasi/Clearance Belanja SPBE di perangkat daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Madiun melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melaksanakan bimtek mengenai pohon kinerja/cascading pada bulan Juni 2024 dalam rangka peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah
2. Melaksanakan bimtek mengenai SPIP pada bulan Juni 2024
3. Melaksanakan upaya-upaya perbaikan manajemen risiko yaitu:
 - bimtek mengenai MRI pada bulan Februari 2024
 - menyusun rancangan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah pada bulan Januari 2024
 - menyusun revisi pedoman pengelolaan risiko pada bulan April 2024
4. Melaksanakan bimtek mengenai MRI Fraud dan kegiatan pencegahan, deteksi dan pemeriksaan pada bulan Februari 2024
5. Melakukan asistensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada
6. Melakukan fasilitasi dan harmonisasi Raperda dan Raperkada
7. Melakukan review, dan evaluasi dilaksanakan tiap semester terkait penyelenggaraan statistik sektoral



8. Mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional Pengelola PBJ ke BKPSDM Kota Madiun: Usulan kebutuhan fungsional Pengelola PBJ tahun 2024 sebanyak 2 orang. ABK 8 orang, dan keterisian PNS eksisting 6 orang. Hal ini dalam rangka upaya peningkatan indeks tata kelola pengadaan
9. Pemetaan kompetensi (Assessment) telah dilaksanakan bertahap untuk pegawai mulai dari jenjang JPT, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana. Dan diperbarui secara berkala apabila telah melebihi masa 3 tahun hasil Assessment nya.
10. Pemetaan talenta saat ini telah dalam proses penyusunan bagi pegawai yang telah memiliki hasil Assessment
11. Melakukan pengawasan atas kejelasan informasi terkait SOP pelaksanaan tugas dan Kemudahan untuk mengikuti SOP pada OPD Pelayanan
12. Melaksanakan pengawasan thd obyektifitas Kebijakan Manajemen SDM
13. Mengoptimalkan sosialisasi pencegahan korupsi (gratifikasi, benturan kepentingan dsb)
14. Melaksanakan pengawasan ketaatan dan kinerja
15. Melaksanakan Reviu Pengelolaan UKPB dan Probity Audit
16. Maksimalan perbaikan/revisi peraturan dan aplikasi WBS
17. Melakukan evaluasi hasil SKM secara konsisten dan memberikan feed back terhadap hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan

Tujuan “Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel. III.16
Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 1 Tahun 2024

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	A (80,08) skor	A (81,03)	101,18
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,01 (sedang)	3,2179 (sedang)	106,91



Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,45 (memuaskan) n) indeks	4,57 (memuaskan) indeks	102,70
1.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	88,028 (baik)	88,74 (sangat baik)	100,81
		Indeks Inovasi Daerah	53,96	67,09	124,33

Sumber Data : Kementerian PAN RB, Dinas terkait pengampu indikator dan BPS

A. Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori hasil penilaian SAKIP adalah sebagai berikut :

Tabel III.17
Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal



No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
4.	B	>60 -70	Baik, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja
5.	CC	>50 -60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>50 -60	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	>50 -60	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Sebagaimana ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2024 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

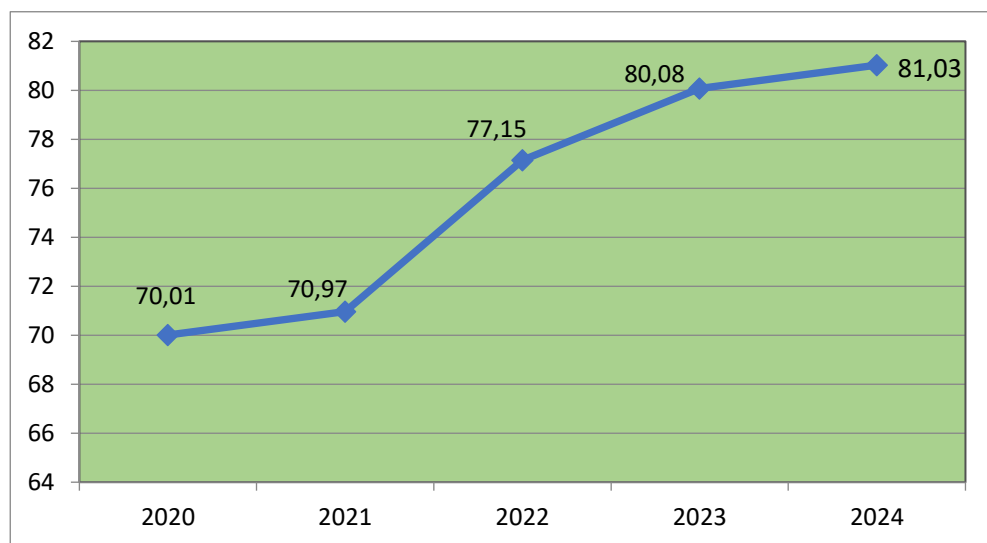
Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel III.18
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,00
2	Pengukuran Kinerja	30	24,37
3	Pelaporan Kinerja	15	12,45
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,21
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,03
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Grafik III.12
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024



Sumber : Kemenpan RB

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 3 November 2024 Nomor : B/314/AA.05/2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, hasil evaluasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai 81,03 dengan dengan Predikat A tercapai 101,18% dari target sebesar 80,08. Secara umum perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.



"Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Namun hasil evaluasi mulai tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun pohon kinerja 2024 berdasarkan isu strategis oleh perangkat daerah melalui aplikasi E-KAK yang nantinya akan ditarik menjadi Perjanjian Kinerja dan SKP pada aplikasi M-SKP. Pohon kinerja ini kemudian sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan melalui berita acara penyesuaian dokumen perencanaan dengan pohon kinerja
2. Melakukan collaborative working yang digambarkan dalam pohon kinerja tingkat Kota Madiun
3. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja pada Perangkat Daerah mulai dari Kepala Perangkat Daerah sampai dengan Pelaksana yang selaras dengan pohon kinerja dan penandatanganan Perjanjian Kinerja
4. Menyusun manual sistematika penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah yang menjelaskan perencanaan berdasarkan laporan kinerja tahun N-1 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya
5. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dilaporkan Tahun 2024, dengan penekanan pada analisis terhadap capaian kinerja serta rencana aksi/tindak lanjut tahun berikutnya, cascading dan peta proses bisnis Perangkat daerah
6. Pemanfaatan informasi kinerja melalui aplikasi yang terintegrasi dengan kualitas pengukuran kinerja yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yaitu melalui dashboard manajemen kinerja



7. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan akan dilakukannya BIMTEK bagi evaluator, melakukan pendampingan dengan Inspektorat Provinsi/Biro Organisasi, dan study banding
8. Melakukan monitoring terhadap pengisian realisasi pada penetapan kinerja triwulanan yang ditetapkan pada rencana aksi dan rencana kerja masing-masing ASN pada setiap perangkat daerah melalui aplikasi e-sakip terintegrasi.
9. Melakukan pengembangan aplikasi dengan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi. Untuk tahun 2024 ini telah direalisasikan dashboard Manekin yaitu dashboard yang berisikan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari aplikasi e-kak, sipd, mskp dan e-sakip. MSKP juga merupakan aplikasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menarik menjadi kewenangan daerah dengan basis data yang berdasarkan dari LPPD sebagai sumber informasi utama. Dalam hal pelaksanaan EPPD tingkat Kota Madiun, Gubernur Jawa Timur sebagai wakil pemerintah pusat



melaksanakan EPPD berdasarkan LPPD Kota Madiun dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Madiun. Sasaran penilaian dari EPPD adalah untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Evaluasi Kinerja Makro dilaksanakan dengan menilai capaian kinerja dan perubahan capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD, sedangkan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD.

Adapun untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja indikator makro sebagai berikut :

Tabel III.19
Pembobotan Indikator Kinerja Makro Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	BOBOT INDIKATOR
1	Indeks Pembangunan Manusia	20%
2	Angka Kemiskinan	20%
3	Angka Pengangguran	15%
4	Pertumbuhan Ekonomi	10%
5	Pendapatan Perkapita	15%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20%

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi :



Tabel III.20
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH INDIKATOR
1	IKK Outcome	106
3	IKK Fungsi Penunjang	19

Dalam pengisian LPPD Tahun 2024, IKK Output tidak dimasukkan dalam pelaporan sehingga hanya mengisi 125 IKK saja yang terbagi dalam 106 IKK Outcome dan 19 IKK Fungsi Penunjang.

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 meraih nilai 3,2179 dengan predikat Sedang. jika dibandingkan, nilai Tahun 2024 terpantau lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang memperoleh nilai 3,385. Sedangkan di Tahun 2021 dan 2022 tidak dikeluarkan nilai LPPD dari Kementerian Dalam Negeri karena perubahan sistem dari penilaian secara manual menjadi penilaian melalui aplikasi serta masih adanya pandemi COVID-19, di mana di seluruh wilayah Indonesia juga tidak keluar nilai LPPD.

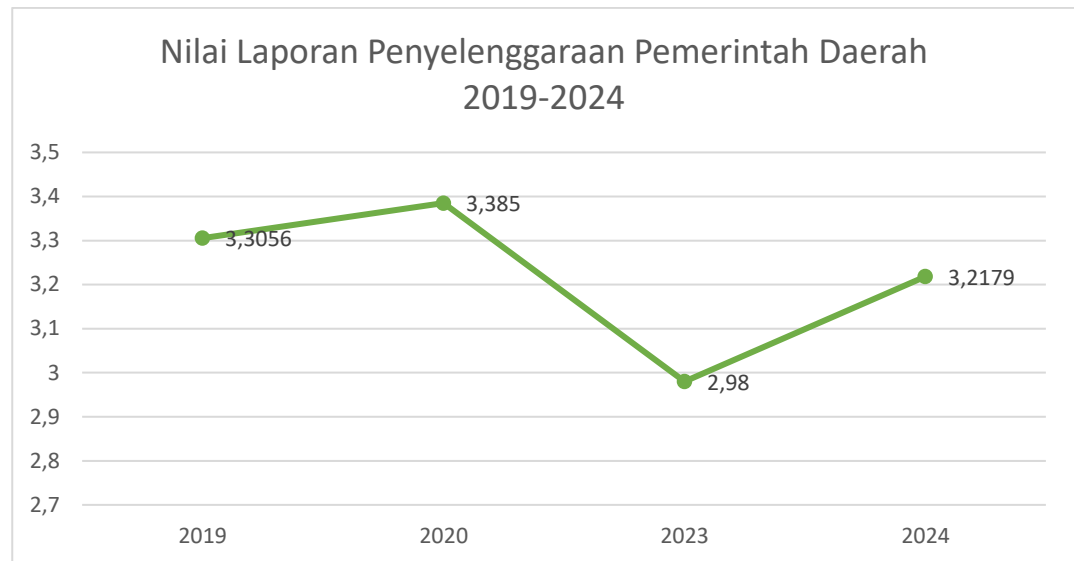
Adapun Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Madiun periode 2019 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III.21
Nilai LPPD Tahun 2019-2024

Tahun	Nilai (Status Kinerja)
2019	3,3056 (sangat tinggi)
2020	3,385
2021	Tidak keluar nilai
2022	Tidak keluar nilai
2023	2,98 (sedang)
2024	3,2179 (sedang)

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun

*Data Tahun 2021 dan 2022 data tidak dikeluarkan



Faktor Penghambat pencapaian realisasi indikator LPPD yaitu adanya perbedaan persepsi dan pemahaman antara penyusun LPPD dengan Tim APIP Inspektorat menyebabkan progres penyusunan LPPD belum secepat yang diharapkan. Selain itu, penilaian LPPD didasarkan pada tren kondisi daerah, sehingga jika suatu indikator di daerah tertentu mencapai capaian yang paling tinggi, maka capaian itu yang akan dipakai untuk tolok ukur indikator seluruh Indonesia. Sehingga peluang untuk mencapai nilai tertinggi semakin kecil ketika bersaing dengan kota seluruh Indonesia. Faktor penghambat terakhir yaitu Ditjen Otda Kemendagri memiliki rumus tersendiri dalam perhitungan nilai LPPD, walaupun daerah mencoba untuk menghitung nilai secara mandiri untukantisipasi maka nilai yang keluar tidak akurat.

Sedangkan faktor pendorong pencapaian realisasi indikator LPPD yaitu kemudahan dan kecepatan setiap perangkat daerah penyusun LPPD untuk mengumpulkan data dukung melalui fasilitas Google Drive serta koordinasi yang intens dengan perangkat daerah penyusun LPPD dapat meminimalisir kesalahan input data.

Rencana tindak lanjut atas capaian realisasi indikator LPPD:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi antara perangkat daerah penyusun LPPD, APIP Inspektorat dan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Menyebarluaskan juknis dan definisi operasional setiap IKK LPPD kepada Perangkat Daerah APIP Inspektorat



3. Melaksanakan Bimtek/Desk Pendalaman dan Pemahaman IKK dengan narasumber dari Ditjen Otda Kemendagri yang melibatkan Perangkat Daerah penyusun LPPD dan APIP Inspektorat untuk penyamaan persepsi tentang IKK LPPD.

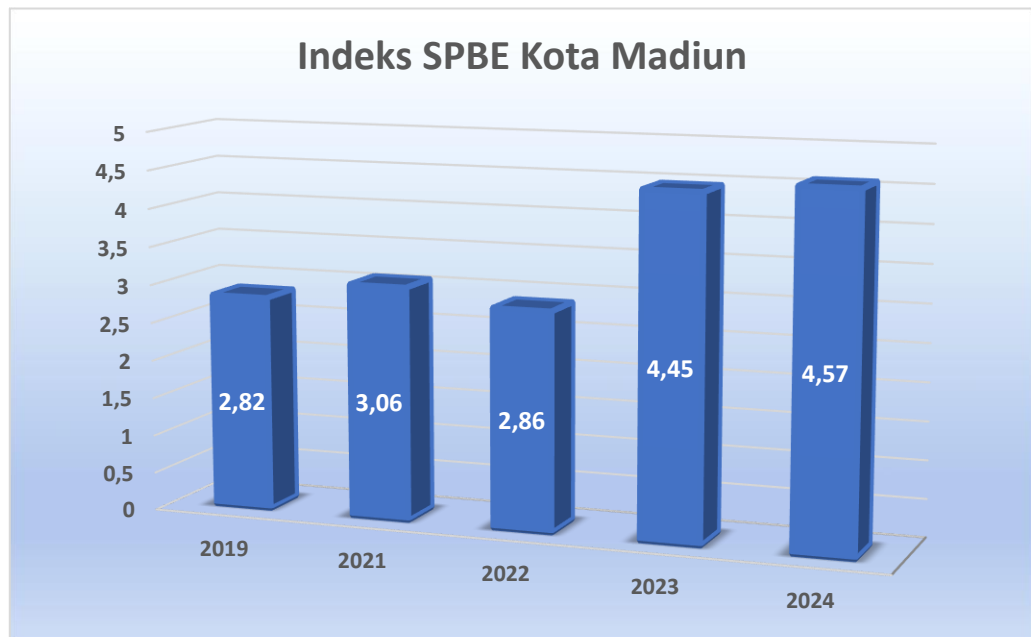
3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sedangkan pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.



Grafik III.13
Indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun



Sumber : Kemenpan RB

Proses Evaluasi Indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Republik Indonesia telah dilaksanakan dan Pemerintah Kota Madiun meraih nilai 4,57 dengan predikat Memuaskan. Nilai ini naik jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang memperoleh nilai 4,45 (Baik). Sedangkan di Tahun 2022 yang memperoleh nilai 2,86 (baik) dan Tahun 2021 memperoleh nilai 3,06 (Baik).

Untuk penilaian Indeks SPBE Tahun 2020 dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 diutamakan untuk Daerah atau Kabupaten/Kota yang Indeks SPBE nya masih bernilai rendah, sehingga untuk tahun 2020 Pemerintah Kota Madiun tidak dilakukan evaluasi SPBE.

Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) suatu daerah dapat mengalami fluktuasi, terkadang naik dan di lain waktu turun, tergantung pada berbagai faktor yang memengaruhi implementasi dan pengelolaan teknologi informasi dalam pemerintahan.

Peningkatan nilai indeks SPBE biasanya mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola teknologi, peningkatan layanan publik berbasis elektronik, serta penguatan komitmen dan koordinasi antara pimpinan daerah



dan instansi terkait. Di sisi lain, penurunan nilai indeks sering kali disebabkan oleh kendala teknis dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi.

Fluktuasi ini juga dapat terjadi karena perubahan kebijakan atau evaluasi yang lebih ketat terhadap indikator-indikator yang diukur, seperti kebijakan SPBE, tata kelola, manajemen layanan, dan penerapan sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, konsistensi dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi menjadi kunci untuk menjaga tren peningkatan indeks SPBE secara berkelanjutan.

Faktor pendorong :

1. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE
2. Dukungan kepala daerah dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun
3. Keberadaan regulasi dan kebijakan yang mendukung digitalisasi pemerintahan, seperti kebijakan terkait standar data, pengelolaan informasi publik, dan keamanan informasi, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik
4. Tersedianya layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saling terintegrasi
5. Tersedianya layanan Publik Berbasis Elektronik dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya
6. Tersedianya infrastruktur dan jaringan TIK yang memadai.

Faktor Penghambat :

1. Keterbatasan infrastruktur TIK yang memadai, seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah usang atau tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan teknologi terkini.
2. Banyak pegawai pemerintahan yang belum memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam mengoperasikan atau mengelola sistem berbasis elektronik
3. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK



4. Kurangnya Integrasi Sistem yang menyebabkan kesulitan dalam berbagi data dan informasi antar instansi, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik berbasis elektronik
5. Ancaman siber dan kekhawatiran terhadap kebocoran data pribadi dapat menghambat adopsi teknologi digital dalam pemerintahan, mengingat pentingnya perlindungan data yang dikelola oleh instansi pemerintah
6. Perubahan budaya kerja yang terbiasa dengan sistem manual menjadi salah satu hambatan besar dalam implementasi SPBE.

Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai tingkat kematangan (maturity level) penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan perbaikan/tindak lanjut dokumen evaluasi SPBE sesuai rekomendasi dan hasil evaluasi SPBE tahun sebelumnya
2. Melaksanakan kegiatan Review Proses Bisnis pada Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
3. Melaksanakan proses input data ke dalam aplikasi SIA SPBE (Sistem Informasi Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
4. Melaksanakan tugas sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses pengelolaan anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di perangkat daerah.

Analisis terhadap ketercapaian dan ketidaktercapaian:

Disamping faktor pendorong dan faktor penghambat dari ketercapaian dan tidak ketercapaian di atas, dari hasil evaluasi SPBE 5 tahun terakhir, ada juga faktor perubahan kebijakan atau evaluasi yang lebih ketat terhadap indikator-indikator yang diukur, seperti kebijakan SPBE, tata kelola, manajemen layanan, dan penerapan sistem yang terintegrasi yang menyebabkan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) suatu daerah dapat mengalami fluktuasi, terkadang naik dan di lain waktu turun.

Pemerintah daerah perlu terus berinovasi dan memastikan bahwa berbagai upaya transformasi digital dilakukan secara menyeluruh dan



berkesinambungan agar nilai indeks SPBE dapat menunjukkan tren yang positif di masa mendatang.

B. Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun

Dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat akan dibuat suatu penelitian dengan menggunakan analisis statistik atau metode tertentu. Dari hasil penelitian ini diperoleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehingga dapat diketahui kekurangan dari masing-masing unit tersebut yang kemudian dapat diperoleh saran perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Pada tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 bahwa terjadi penyesuaian target indikator yang mana pada RPJMD sebesar 85 disesuaikan menjadi 88,028. Hal ini dilakukan karena berdasarkan kebutuhan atas Indeks Kepuasan Masyarakat maka terjadi penambahan lokus untuk pelaksanaan survey sehingga penyesuaian berdasarkan proyeksi dengan memperhitungkan realisasi capaian kinerja Tahun 2023.



Berdasarkan hasil survey tahun 2024 pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 88,74 dengan kategori nilai Sangat Baik, hal ini menunjukkan kenaikan nilai dibandingkan dengan nilai tahun 2023 dengan nilai sebesar 88,028 dengan capaian kinerja atas target di tahun 2024 sebesar 100,80%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 88,028 dan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun ke tahun.

Kenaikan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Madiun didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan public
2. Kolaborasi kinerja antar perangkat daerah di Pemerintah Kota Madiun
3. Pelayanan online
4. Inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan kepada penerima layanan
5. Sistem dan prosedur kerja yang memadai

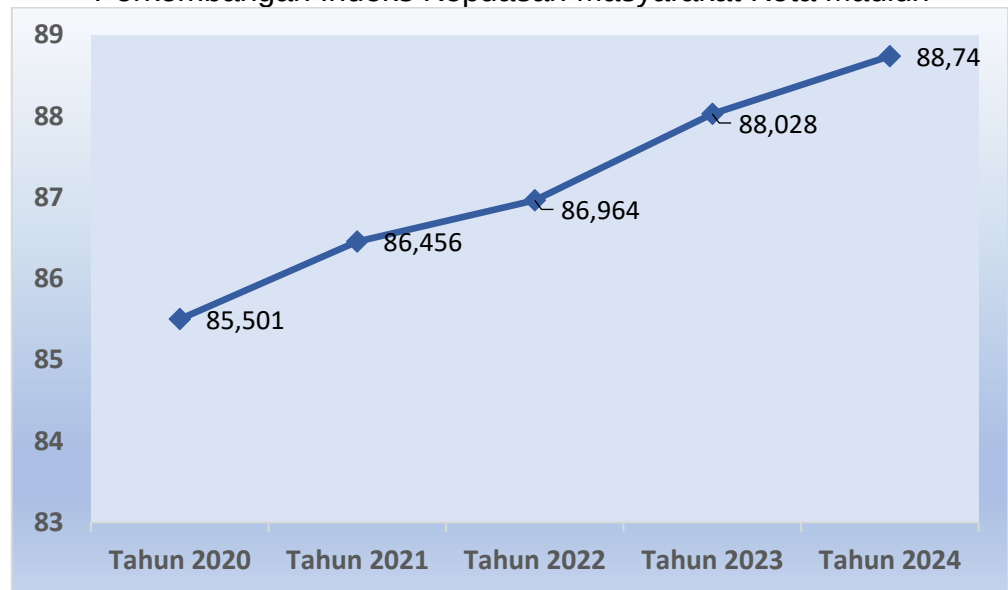
Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya :

1. Terdapat beberapa penyelenggara pelayanan dengan sarana dan prasaranya yang belum memadai
2. Masih terdapat oknum petugas berperilaku kurang baik dalam memberikan pelayanan
3. Masih terdapat beberapa penyelenggara pelayanan yang belum menerapkan standar pelayanan secara optimal

Perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Grafik III.14
Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kota Madiun (2024)

Trend Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 sampai dengan 2024 terjadi kenaikan nilai yang dipengaruhi oleh pembiasaan atas pemberlakuan new normal pasca pandemi covid-19 sehingga pemberian pelayanan ke Masyarakat bisa dilakukan secara optimal.

Pemerintah Kota Madiun selalu berupaya untuk melaksanakan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama di bidang pelayanan meningkat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur maupun Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
2. Melakukan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
3. Melaksanakan dan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Madiun, Tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional
4. Pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berprestasi
5. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Pelayanan Publik secara berkala dan berkelanjutan



6. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasilnya lebih akurat
7. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Evaluasi Pelayanan Publik sehingga hasilnya lebih akurat
8. Melaksanakan Sertifikasi ISO/SNI bagi Unit Pelayanan Publik (tahun 2024 dilaksanakan pada satu Unit Pelayanan Publik yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

2. Indeks Inovasi Daerah

Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau disebut *Innovative Government Award* merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat yakni Menteri Dalam Negeri untuk menghargai dan mendukung usaha Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam melakukan Inovasi Daerah. *Innovative Government Award* (IGA) bertujuan untuk memotivasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota guna meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat. Penilaian tersebut berdasarkan kategorinya terdiri dari:

- Sangat Inovatif;
- Inovatif;
- Kurang Inovatif; serta
- Tidak Dapat Dinilai.

IGA (*Innovative Government Award*) Kemendagri dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan kegiatan *Innovative Government Award*/IGA Kemendagri adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai.
2. Mendorong penerapan *good governance*.

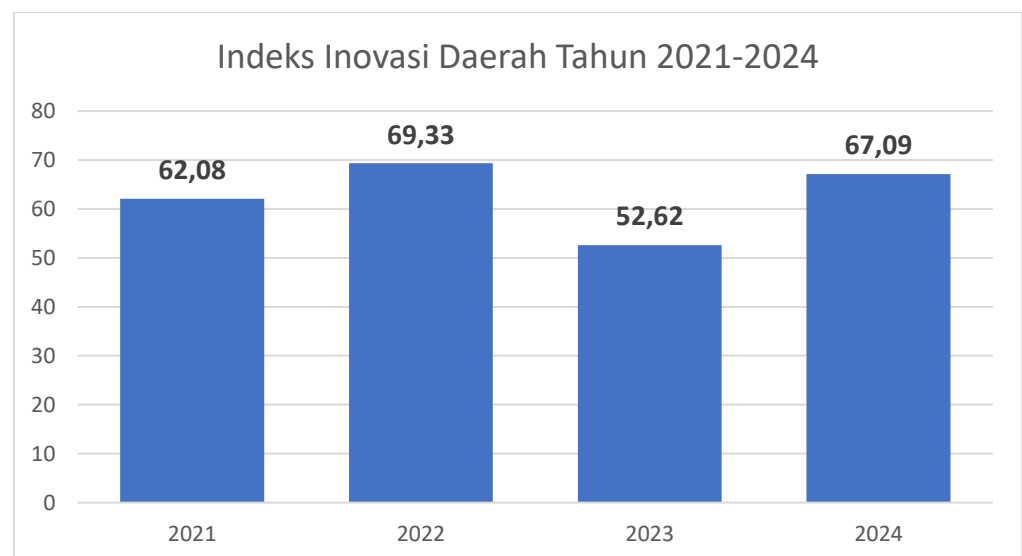


3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Pada tahun 2024 proposal inovasi yang diinput dan dilaporkan melalui <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> adalah sebanyak 131 proposal. Adapun rinciannya adalah:

1. 61 adalah inovasi yang telah diterapkan
2. 67 inovasi yang masuk tahap uji coba
3. 3 proposal inovasi baru

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024 mendapatkan indeks 67,09 dengan predikat Kota Sangat Inovatif.



Sumber: BAPPEDA Kota Madiun 2024

Adapun faktor pendorong yang membuat realisasi indeks inovasi daerah melebihi dari target yang ditentukan adalah :

- a. Mendatangkan narasumber Kemendagri maupun pihak lain dari Pusat (BRIN) yang betul- betul memahami substansi dan cara penyusunan proposal inovasi dan data dukung indikatornya untuk melakukan pendampingan kepada inovator daerah



- b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kemendagri selaku penilai dan para inovator di Perangkat Daerah sehingga didapatkan kesepahaman dan pemahaman akan proposal inovasi yang dilaporkan
- c. Meningkatkan semangat berinovasi Perangkat Daerah melalui fasilitasi Kompetisi Inovasi Kota Madiun dan fasilitasi lomba Inovasi Teknologi Provinsi Jawa Timur
- d. Melakukan desk dan pendampingan intensif kepada OPD pada saat proses penyusunan hingga pelaporan inovasi ke dalam sistem IGA

2. Misi Kedua : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan didukung oleh 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran

Pada Misi 2 Tujuan 1 terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2023 (n-1)	2024 (n)
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Liveable City	89,01	91,93	93,933

Sumber : BAPPEDA 2024



Tabel III.23
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Livable City	89,01	93,933	105,53

Sumber : BAPPPEDA 2024

Tabel III.24
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi 2024	Realisasi Nasional 2024
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Liveable City	93,933	N/A	N/A

Sumber : BAPPPEDA 2024

Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)

Dalam pembangunan dan perkembangan perkotaan, akan ada perubahan dari waktu ke waktu. Akibatnya muncul isu perkotaan baik yang positif maupun yang negatif. Dampak positif yang muncul akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sedangkan dampak negatif akan menimbulkan permasalahan pada suatu kota. Masalah yang muncul cukup beragam seperti kemacetan,



polusi lingkungan, tata kota yang tidak beraturan, maupun masalah sosial dan ekonomi. Banyaknya isu permasalahan akan menyebabkan daya hidup suatu kota berubah.

Perubahan yang terjadi cenderung berakibat pada daya hidup kota yang menurun. Tidak terkecuali pada kota-kota di Indonesia juga Kota Madiun. Kota Madiun memiliki sejarah perencanaan wilayah yang baik dan memiliki letak yang strategis. Kondisi ini menjadi alasan penelitian tentang konsep *livable city* terhadap karakteristik ruang Kota Madiun, yang bertujuan untuk mengidentifikasi variabel, indikator, dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kota Madiun yang *livable*.

Untuk menghasilkan kota yang layak huni, maka karakteristik ruang perkotaan yang berlaku harus memiliki standar daya hidup yang baik, dinamis, saling berpengaruh, berintegrasi dan ramah bagi lingkungan serta penghuninya. Konsep *livable city* bertujuan untuk menciptakan kondisi kota yang seimbang dalam interaksi antara manusia dan lingkungannya. Berdasarkan hasil analisis melalui penentuan kriteria dan tolok ukur tingkat *livability* di Kota Madiun, ditemukan bahwa kawasan Kota Madiun masih memiliki tingkat daya hidup yang baik, tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi. Kondisi ini masih dikategorikan *livable* dikarenakan perencanaan awal kawasan yang baik sehingga daya hidup Kota Madiun masih dapat dipertahankan dan diharapkan berkelanjutan.

Kota yang *livable* membutuhkan indikator-indikator yang dapat menjadi suatu ukuran dalam mencapai kota yang layak huni. Indikator diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu indikator umum dan khusus. Indikator yang bersifat umum karena juga diterapkan di kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia. Sementara itu, indikator tambahan lebih bersifat khusus pada Kota Madiun mengacu pada karakteristik kota.

Prinsip-prinsip dasar *liveable city* :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik),
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah),
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi,
4. Keamanan, Bebas dari rasa takut,



5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya,
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

Indikator Umum

I. Sarana Prasarana

1. Ketersediaan Angkutan/ Transportasi
2. Kualitas Angkutan/ Transportasi
3. Kondisi Jalan
4. Pedestrian
5. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
6. Kualitas Fasilitas Kesehatan
7. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan
8. Kualitas Fasilitas Pendidikan
9. Listrik
10. Ketersediaan Air Bersih
11. Kualitas Air Bersih
12. Telekomunikasi

II. Ekonomi

1. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan
2. Biaya Hidup

III. Penataan Kota dan Pengelolaan Lingkungan

1. Tata Kota
2. RTH
3. Kebersihan
4. Persampahan
5. Pencemaran/ Polusi Udara dan Air

IV. Kehidupan Sosial

1. Kriminalitas
2. Ketersediaan Fasilitas Rekreasi
3. Kualitas Fasilitas Rekreasi
4. Akses Informasi Pelayanan Publik
5. Keamanan

Indikator Khusus

I. Sarana Prasarana



1. Kantong Parkir
 2. Permukiman/ hunian/ tempat tinggal (kondisi sanitasi, indikator kumuh, drainase, penerangan, ciri khas)
 3. Ketersediaan Fasilitas Difabel dan Lansia
 4. Desain fasilitas umum yang ramah anak, lansia, dan difabel
 5. Jaringan Internet (WIFI)
- II. Ekonomi
1. Iklim usaha/investasi dalam perekonomian skala kecil dan menengah
- III. Kehidupan Sosial
1. Interaksi Sosial bera toleransi/ kerukunan antar penduduk/agama
 2. Ketersediaan *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial
 3. Kualitas *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial
 4. Komponen Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan (keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan dan lansia)
 5. Event-event yang melibatkan dan menggerakkan masyarakat untuk aktif
- IV. Pengembangan warisan budaya sebagai pemicu dalam pengembangan variasi rekreasi, fasilitas sosial, tempat kuliner khas, dan museum
- V. Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai daya dukung lingkungan
- VI. Kondisi Politik
- VII. Smart City
- VIII. Kualitas Hidup Penduduk

Indeks Kenyamanan Kota (*Livable City*) adalah indikator untuk mengukur seberapa nyaman Kota Madiun dilihat dari:

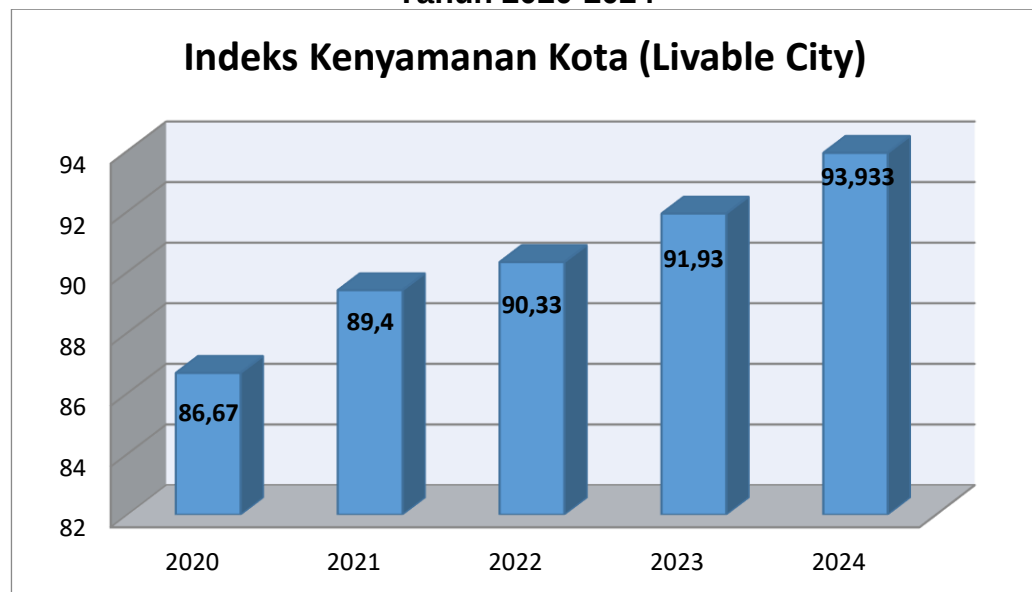
1. Infrastruktur pendukung meliputi: akses jalan, akses air minum dan akses sanitasi perumahan
2. Sarana prasarana pemukiman meliputi: rumah layak huni, rumah tinggal bersanitasi, cakupan lingkungan yang sehat yang didukung dengan PSU, ruang terbuka hijau, penerangan jalan dan fasilitas permakaman
3. Keamanan meliputi: persepsi keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan dan keamanan dari kekerasan.

Dari perhitungan indeks kenyamanan kota diperoleh dari masing-masing indikator pada tahun 2024 sebagai berikut:



1. Indeks infrastruktur diperoleh nilai (98,59)
2. Indeks sarana dan prasarana permukiman diperoleh nilai (99,05)
3. Indeks rasa aman diperoleh nilai (84,16)

Grafik III.15
Trend Kenaikan Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)
Tahun 2020-2024



Sumber : BAPPPEDA Kota Madiun

Realisasi kinerja Indeks Livable City Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 sebesar 93,933 dengan target 91,93. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,52%. Sedangkan tahun 2023 sebesar 91,653 dengan target 90,33. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tujuan “Terwujudnya pembangunan infrastruktur kota yang maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator dengan capaian sebagai berikut :



Tabel. III.25
Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 2 Tahun 2024

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
2.1.1	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Kota	Indeks Infrastruktur	98,59	98,59	100
2.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	57,93	62,21	107,39

Sumber Data : BAPPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

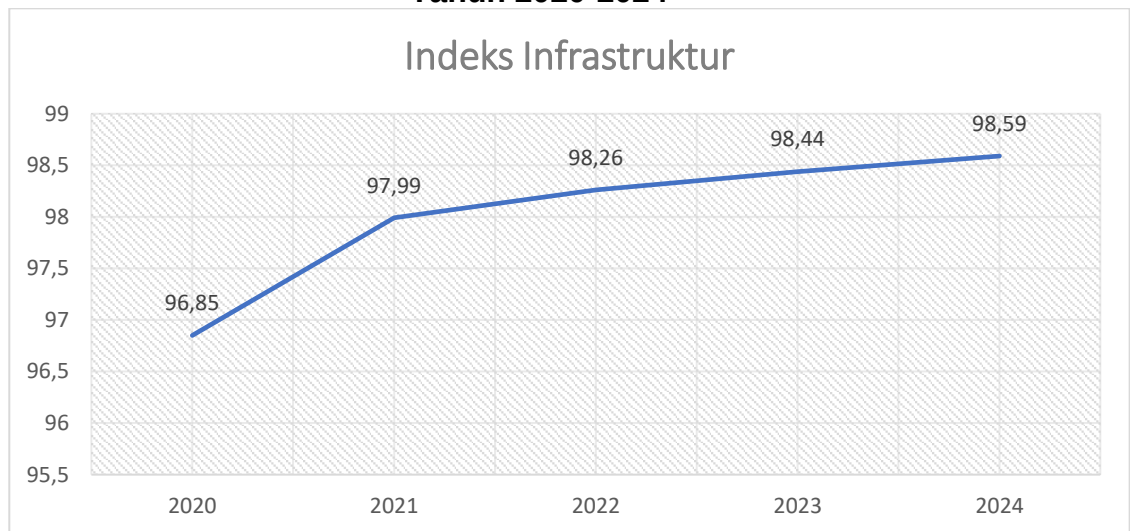
A. Sasaran 1 Meningkatkan kualitas layanan Infrastruktur Kota :

Kota yang baik adalah kota yang mempunyai infrastruktur yang memadai dari segi jalan, akses air minum, sanitasi layak, ketersediaan listrik dan kualitas akses internet dan telepon. Perhitungan Indeks infrastruktur dapat memberikan gambaran sejauh mana infrastruktur di suatu daerah dapat dikatakan baik, indeks infrastruktur dibentuk dari berbagai indikator yang diantaranya indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak (limbah domestik dan sampah), persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah

Salah satu aset paling penting dalam pembangunan daerah adalah infrastruktur. Secara umum kondisi infrastruktur di Kota Madiun cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh capaian indeks infrastruktur Kota Madiun yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2023 realisasinya adalah 98,44 dengan capaian kinerja sebesar 100,02%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2023 yaitu 98,40. Sedangkan untuk tahun 2024 ini realisasi kinerjanya sebesar 98,59 dengan capaian kinerja sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan yaitu 98,59.



Grafik III.16
Trend Kenaikan Indeks Infrastruktur
Tahun 2020-2024



Sumber Data : BAPPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong sebagai berikut:

- 1) Adanya keinginan masyarakat Kota Madiun agar sarana dan prasana perkotaan representatif
- 2) Adanya aplikasi yang memudahkan pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditindaklanjuti
- 3) Adanya pembangunan berkelanjutan sehingga pembangunan merata dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat;
- 4) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan konstruksi selesai tepat waktu sesuai kontrak yang ditentukan;
- 5) Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan jasa konstruksi yang tepat, berkualitas dan kompeten sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan;
- 6) Adanya anggaran yang mencukupi sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain:

- 1) Kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur
- 2) Kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak



- 3) Anggaran yang terbatas menyebabkan pelaksanaan pembangunan hanya dapat dilakukan secara bertahap dan yang dilaksanakan adalah prioritas top down dari visi misi kepala daerah

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan Indeks Infrastruktur :

- 1) Melaksanakan seleksi terhadap mitra DPUPR/ stakeholder pelaku jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia telah dipersyaratkan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi tertentu, sehingga tenaga yang berada di lapangan harus sesuai dengan dokumen pemilihan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana yang akan dibangun dan yang telah terbangun untuk melakukan pemeliharaan secara berkala;
- 3) Merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran sesuai prioritas.
- 4) Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana dan infrastruktur perkotaan agar tetap representative
- 5) Optimalisasi pengawasan/pengendalian secara rutin dari kerusakan atas sarana prasarana dan infrastruktur kota

B. Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup yang didasarkan pada data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Tutupan lahan. Adapun pembobotan untuk setiap indikator terdiri dari 30 % untuk pencemaran air, 30 % untuk pencemaran udara, dan 40 % untuk tutupan hutan lahan yang diinput dalam aplikasi <https://ppkl.menlhk.go.id/>.

Berdasarkan pengukuran IKLH Kota Madiun menunjukkan perbaikan dengan terus meningkatnya nilai indeks setiap tahun hingga pada tahun 2024



sebesar 62,21. Indeks Lingkungan Hidup terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Capaian IKA Tahun 2024 yaitu 52,43, IKU Tahun 2024 yaitu 92,12 sedangkan IKL Tahun 2024 yaitu 24,18.

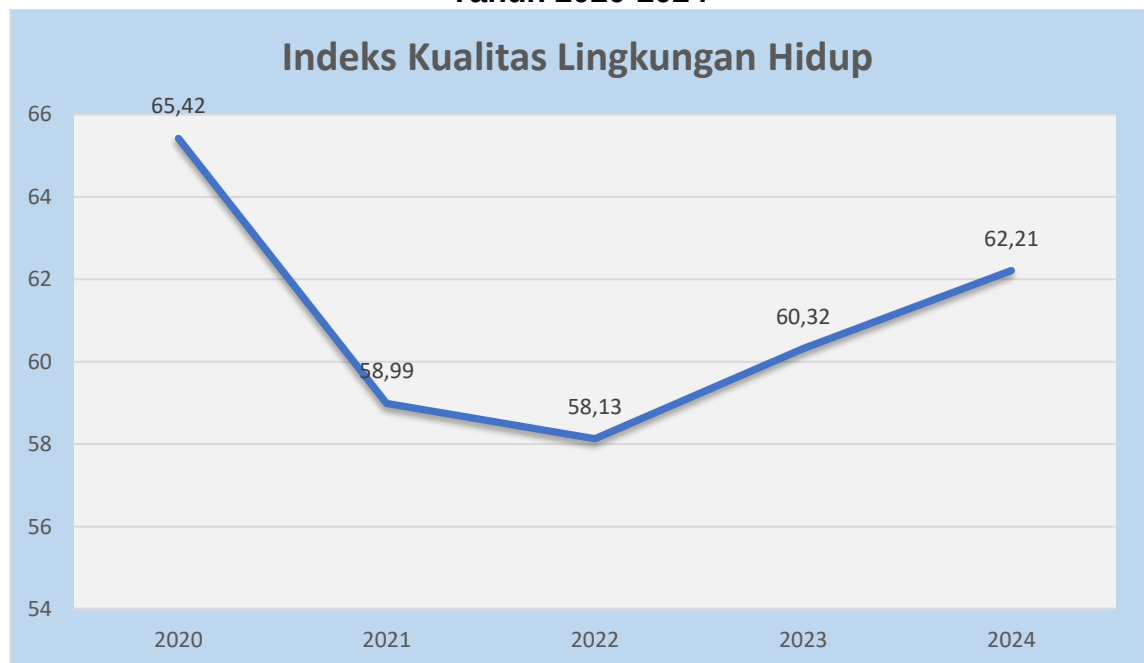
Adapun kriteria dalam penilaian IKLH adalah sebagai berikut :

SKOR	KRITERIA
$90 \leq x \leq 90$	SANGAT BAIK
$70 \leq x < 90$	BAIK
$50 \leq x < 70$	SEDANG
$25 \leq x < 50$	KURANG
$0 \leq x < 25$	SANGAT KURANG

Sumber : Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021

Berikut adalah data realisasi IKLH dalam 5 tahun terakhir:

Grafik III.17
Trend Kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Madiun Tahun 2023 yaitu 60,32 sedangkan nilai IKLH Kota Madiun di Tahun 2024 adalah 62,21 sehingga



apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Angka indeks ini menyimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kota Madiun pada Tahun 2024 berada dalam posisi “sedang”. Diharapkan setiap tahun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selalu mengalami peningkatan karena sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun. Faktor pendorong tercapainya IKLH Kota Madiun yaitu :

1. Adanya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas air dan udara
2. Pemasangan ONLIMO atau online monitoring di ngebrak adalah sistem pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinu, otomatis, dan online melalui aplikasi yang terhubung dengan sistem server KLHK
3. Memperluas kampung iklim di Kota Madiun sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Faktor penghambat yang mempengaruhi yaitu :

1. Semakin Kota Madiun menjadi Kota Wisata Iconik, semakin banyak jumlah kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas udara
2. 2024 menjadi tahun usaha bagi Kota Madiun, banyak lahan lahan terbuka di jadikan bangunan tempat usaha, sehingga ruang terbuka prifat sangat banyak berkurang, sehingga menyebabkan nilai indeks kualitas lahan tidak bisa optimal
3. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan volume sampah meningkat, kondisi TPA Winongo sudah di ambang batas.
4. Kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang berdampak pada lingkungan
5. Kurang optimalnya peran serta masyarakat dan stakeholder dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kota Madiun yaitu :

- a. Optimalisasi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Optimalisasi penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup
- c. Optimalisasi penambahan RTH dan Penghijauan Kota oleh Perangkat Daerah terkait



- d. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah B3
 - e. Optimalisasi pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dan tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup
 - f. Optimalisasi peningkatan kapasitas lingkungan hidup
 - g. Optimalisasi peran serta masyarakat dan stakeholder dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun didukung oleh 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran

Pada Misi 3 Tujuan 1 terdapat 2 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III.26
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2023 (n-1)	2024 (n)
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	82,35	83,71	84,51
	Indeks Pembangunan Gender	94,51	95,18	95,18*

Sumber : BPS Kota Madiun



Tabel III.27
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	82,35	84,51	102,62
	Indeks Pembangunan Gender	94,51	95,18*	100,71*

Sumber : BPS Kota Madiun

Tabel III.28
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi 2024	Realisasi Nasional 2024
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	84,51	74,65*	N/A
	Indeks Pembangunan Gender	95,18*	91,67**	N/A

Sumber : BPS Kota Madiun

Angka tahun 2024 belum rilis*

1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). Keteny merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.



IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

Tabel III.29
IPM Kota Madiun Menurut Komponen

TAHUN	AHH	AHLS	ARLS	PENGELUARAN PER KAPITA
2019	72,75	14,39	11,13	16.040
2020	72,81	14,40	11,14	16.018
2021	72,83	14,41	11,37	16.095
2022	73,13	14,43	11,67	16.503
2023	75,40	14,44	11,82	17.115
2024	75,67	14,54	12,11	17.518

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun 2024

Selama 2019 hingga 2024, IPM Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Hanya saja, peningkatan IPM terkecil terjadi di tahun 2021 disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan. Setelah intensitas Pandemi COVID-19 berangsur menurun, geliat ekonomi memulih yang berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM Tahun 2022 dan 2023.



Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2024, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,75 tahun (2019) menjadi 75,67 tahun (2024). Dengan demikian, bayi yang lahir tahun 2024 di Kota Madiun diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 75,67 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2019 hingga 2024, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,39 tahun (2019) menjadi 14,54 tahun (2024) atau naik sebesar 0,15 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,13 tahun (2019) menjadi 12,11 tahun (2024) atau naik 0,98 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMA kelas XII. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2024, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,54 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2. Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun HLS, menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

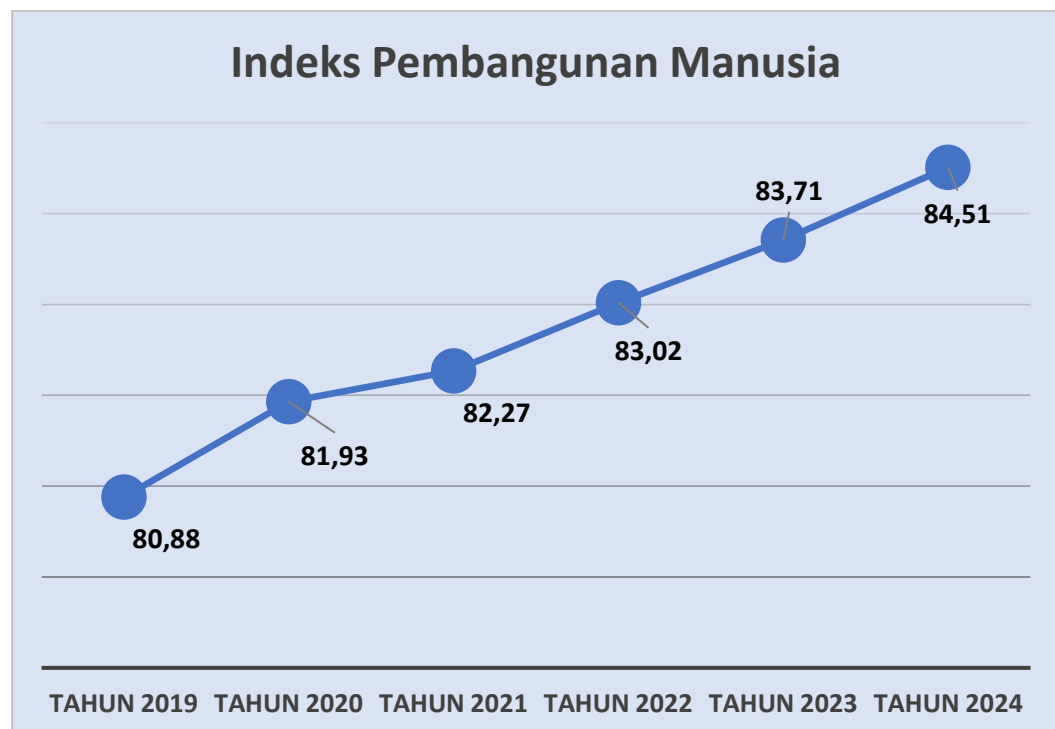
Selanjutnya dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024 pengeluaran per kapita masyarakat Kota Madiun yang disesuaikan mencapai 17,518 juta rupiah per tahun, naik sekitar 2,35 persen dibanding tahun 2023 lalu yang tercatat Rp. 17.115.000,00.

Pemulihan ekonomi sosial di tengah Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kota Madiun. Hal ini terlihat dari



peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Kota Madiun tahun 2024 sebesar 84,51 atau tumbuh 0,95 persen (meningkat 0,8 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Grafik III.18
Perkembangan IPM Kota Madiun 2019-2024

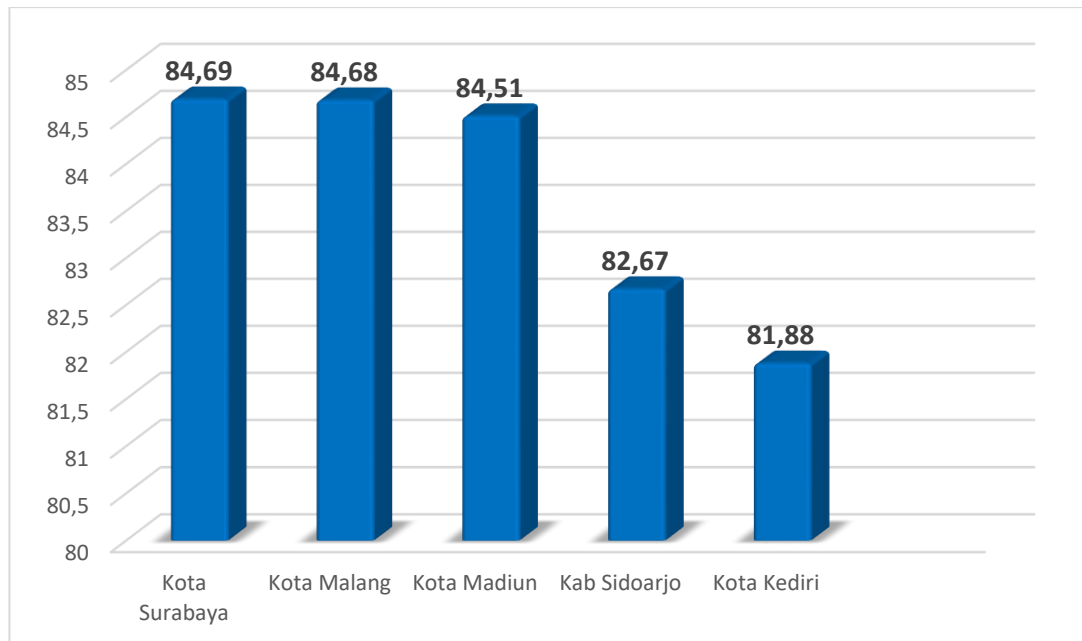


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun 2024

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun pada tahun 2024 Kota Madiun menduduki peringkat ketiga dari 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dengan angka 84,51. Ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi ini ditunjukkan dari predikat IPM Kota Madiun pada Tahun 2024 masih bertahan menjadi IPM berkategori “sangat tinggi”. Walaupun demikian, Pemerintah Kota Madiun tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya.



Grafik III.19
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024
5 (lima) besar Kab/Kota se Jawa Timur



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2024

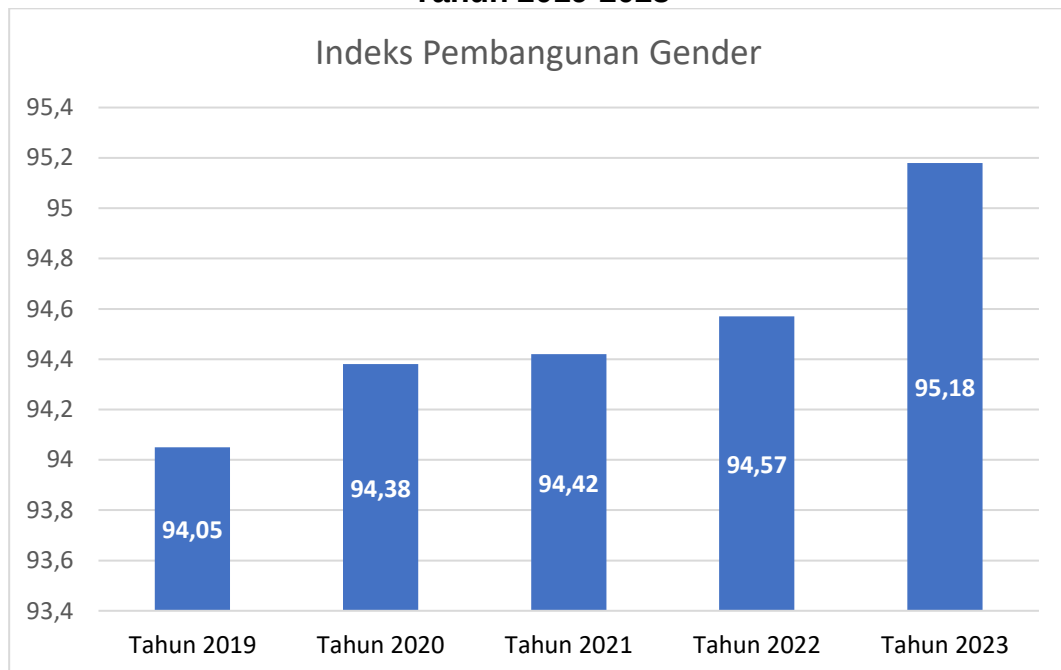
2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki. Semakin kecil jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG), karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :



Grafik III.20
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Madiun 2023*

Angka 2024 belum rilis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir IPG Kota Madiun mengalami tren kenaikan. Indeks terendah ada pada tahun 2019 sebesar 94,05 dan yang tertinggi ada pada tahun 2023 sebesar 95,18. Sedangkan untuk 2024 belum rilis dari BPS. Secara umum IPG Kota Madiun mengalami peningkatan, menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
3. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA



Tujuan “Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing” didukung oleh 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel III.30
Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 3 Tahun 2024

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
3.1.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,43	14,54	100,76
		Rata-rata Lama Sekolah	11,67	12,11	103,77
3.1.2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,13	75,67	103,47
3.1.3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,22	78,94*	102,23*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

*Angka 2023 dikarenakan angka 2024 belum rilis

A. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat :

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2019 hingga 2024, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,39 tahun (2019) menjadi 14,54 tahun (2024) atau naik sebesar 1,15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator Harapan Lama Sekolah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 14,43 dengan capaian kinerja sebesar 100,76%. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2024, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,54 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2. Pertumbuhan yang positif tersebut menjadi modal manusia penting untuk mendukung



pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

Grafik III.21
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Madiun Tahun 2019-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun 2024

Faktor pendorong meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu:

1. Sekolah gratis di Kota Madiun
2. Adanya program Bantuan Beasiswa Pendidikan
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang pendidikan
4. Belanja pemerintah di bidang pendidikan

Faktor penghambat meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu, masih adanya anak tidak sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan melainkan disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu:

1. Dilakukan pendataan terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS)
2. Telah dibentuk tim untuk pendataan untuk anak tidak sekolah
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan gedung bangunan sekolah, pemberian bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP,



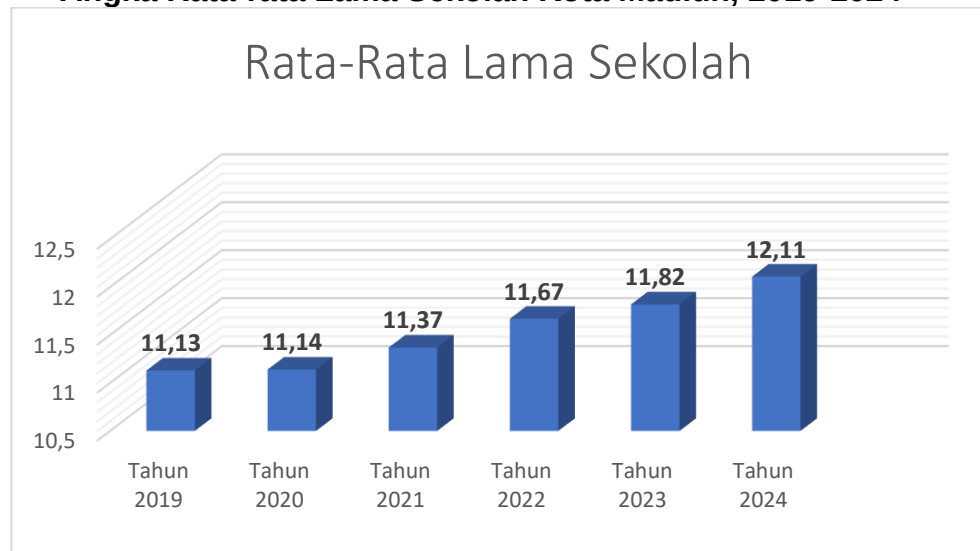
laptop gratis siswa SD dan SMP serta sarana dan prasarana belajar mengajar

4. Meningkatkan kualitas pendidikan kejar paket

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Grafik III.22
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun, 2019-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2024

Dari grafik tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Realisasi kinerja Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar 11,13, kemudian meningkat di tahun 2020 yaitu 11,14, naik lagi di tahun 2021 sebesar 11,37. Pada tahun 2024 realisasi indikator ini sebesar 12,11 atau naik 0,29 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 11,82, sehingga capaian kinerjanya adalah 103,77% dari target yang telah ditetapkan 11,67.

Kenaikan trend realisasi Indikator RLS disebabkan oleh adanya faktor-faktor pendorong yaitu:

1. Sekolah gratis di Kota Madiun
2. Adanya bantuan laptop, seragam, ongkos jahit serta akses internet gratis



3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
4. Akses sekolah yang mudah dan terjangkau

Faktor penghambat meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu, masih adanya anak tidak sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan melainkan disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan dimensi pengetahuan pada IPM adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyediaan gedung sekolah yang representatif, bantuan laptop gratis, serta sarana dan prasarana belajar mengajar
2. Meningkatkan kualitas pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar dengan pengembangan kurikulum dan melakukan pengelolaan pendidikan
4. Meningkatkan pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan calon guru yang mengikuti seleksi Pendidikan Profesi guru

B. Sasaran 2 “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”:

Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka menunjukkan semakin panjang pula tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang lahir di daerah itu pada kurun waktu tersebut. Angka Harapan Hidup (AHH) juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

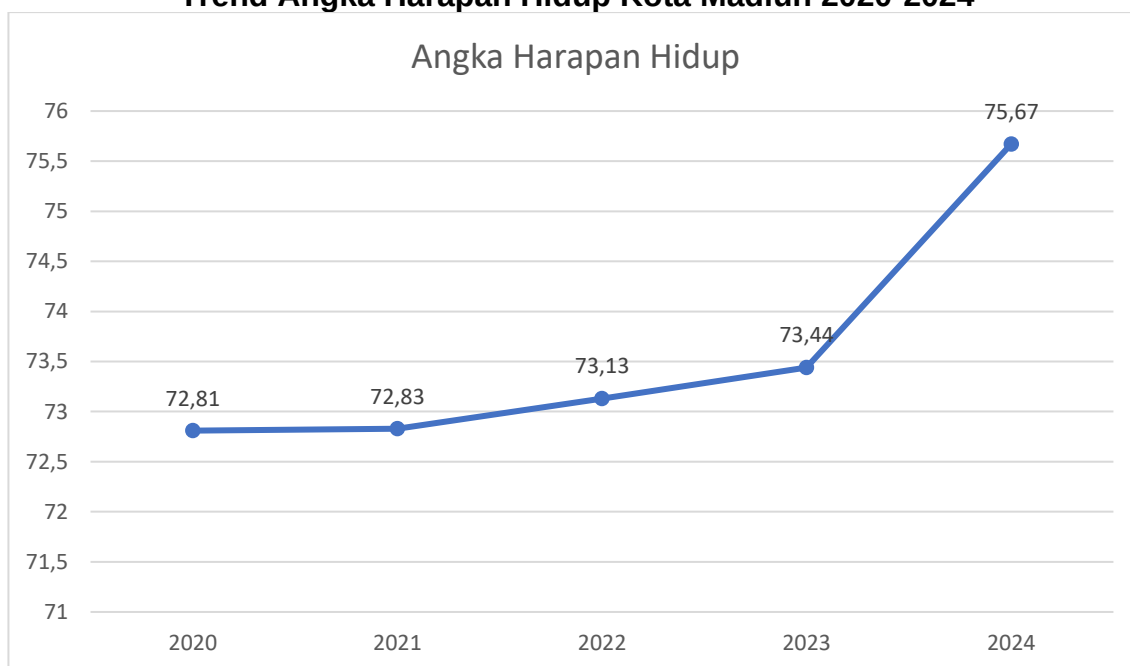
Perhitungan Angka Harapan Hidup sebelum tahun 2024 masih menggunakan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010). Namun pada laporan kinerja tahun 2024, metode perhitungan AHH sudah menggunakan hasil



Long Form SP2020 (SP2020-LF), sehingga akan terdapat perbedaan data series AHH pada laporan kinerja tahun 2023 dan laporan kinerja tahun 2024.

Angka Harapan Hidup warga Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahun, dan hal tersebut didukung oleh perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan sudah cukup baik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Selama periode Tahun 2020 hingga 2024, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 74,82 tahun (2020) menjadi 75,67 tahun (2024) atau naik sebesar 0,85 tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

Grafik III.23
Trend Angka Harapan Hidup Kota Madiun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, Hasil Long Form SP 2020

Dari grafik tersebut dapat dilihat adanya tren kenaikan yang signifikan dari AHH di Kota Madiun dari Tahun 2020 ke Tahun 2024. Selain itu, indikator AHH tahun 2024 di Kota Madiun sudah melampaui target yang ditetapkan yang mencapai 103,47%. Walaupun AHH sudah melampaui target yang ditetapkan, namun masih diperlukan upaya yang mendukung peningkatan AHH agar tren AHH di Kota Madiun selalu meningkat setiap tahunnya.



Kenaikan tren AHH dan tercapainya target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 ini karena adanya dukungan faktor kesehatan berupa:

- a. Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.
- b. Adanya skrining faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lansia. Hal tersebut dikarenakan adanya fenomena transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin penderita PTM.
- c. Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit tidak menular
- d. Kota Madiun sudah mendeklarasikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sehingga sanitasi lingkungan sudah lebih baik.

Meskipun kondisi kesehatan di Kota Madiun sudah baik, namun masih ada isu yang menjadi perhatian, yaitu stunting, tuberkulosis dan demam berdarah. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023, prevalensi stunting di Kota Madiun sebesar 12,8%, dan berada di bawah prevalensi Provinsi Jawa Timur (17,7%) dan nasional (21,5%). Meskipun masih di bawah prevalensi provinsi dan nasional, masih diperlukan intervensi lebih lanjut agar prevalensi stunting dapat terus ditekan dan menurun angkanya. Indonesia juga menempati peringkat kedua terbanyak di dunia untuk penyakit tuberkulosis menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sehingga perlu adanya peningkatan angka penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan tuberkulosis. Hal tersebut bertujuan agar penularan bakteri tuberkulosis tidak semakin meluas dan dapat mencapai eliminasi tuberkulosis di tahun 2030. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Madiun pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan 4 kali lipat dibanding tahun 2023. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk pada tahun 2023 sebesar 80,75 dan meningkat menjadi



328,09 pada tahun 2024. Hal tersebut memerlukan intervensi yang lebih inovatif agar tidak menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD.

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan AHH pada tahun 2025 yaitu:

1. Mempertahankan agar tidak ada kematian pada ibu dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan ibu bersalin
2. Menurunkan kematian bayi dan balita dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita
3. Menurunkan kematian karena penyakit menular dan tidak menular dengan meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular, antara lain:
 - a. Melaksanakan program Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sehingga angka penemuan kasus tuberkulosis dan angka kesembuhan tuberkulosis juga meningkat
 - b. Meningkatkan pelaksanaan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat, melakukan fogging untuk daerah yang memenuhi syarat fogging, serta mengimplementasikan nyamuk ber-Wolbachia yang didukung oleh Kementerian Kesehatan agar kasus DBD di Kota Madiun dapat menurun
 - c. Meningkatkan cakupan skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) agar dapat dideteksi lebih dini sehingga penderita segera mendapatkan pengobatan yang tepat agar tidak terjadi komplikasi
4. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat, baik itu untuk masalah gizi kurang maupun gizi lebih
5. Meningkatkan upaya penurunan prevelensi stunting baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif termasuk koordinasi dengan lintas sektor dan audit kasus stunting dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting
6. Meningkatkan layanan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di semua kelurahan di Kota Madiun sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.



C. Sasaran 7 Meningkatnya Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender

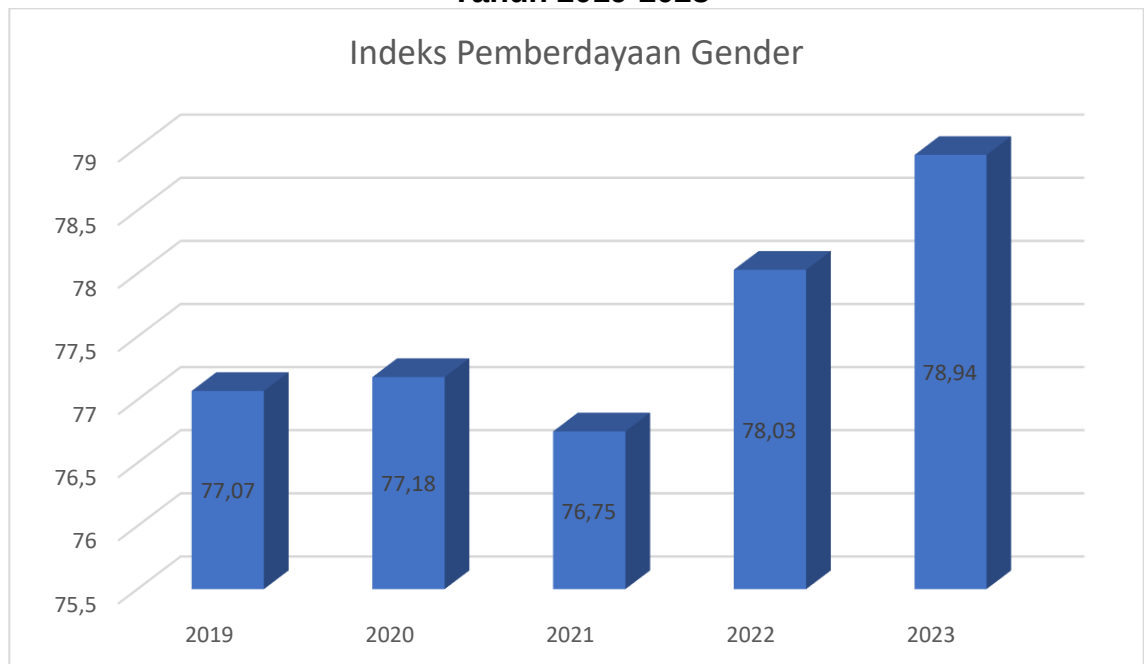
IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender, menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

IDG di Kota Madiun pada tahun 2019 sebesar 77,07. IDG Kota Madiun pada Tahun 2019 yang menurun dari tahun sebelumnya tersebut dipengaruhi oleh persentase keterwakilan anggota perempuan di DPRD Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota DPRD Kota Madiun. Pada Tahun 2020, IDG mengalami kenaikan menjadi 77,18 yang menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Tahun 2021 terjadi penurunan kembali menjadi 76,75, hal ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid 19 dimana peranan perempuan dalam pengambilan keputusan sangat dimungkinkan berkurang, selain itu juga kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menurun sehingga Distribusi Pendapatan antara laki-laki dan perempuan terjadi ketimpangan. IDG Tahun 2022 naik kembali menjadi 78,03, hal ini disebabkan oleh perekonomian yang mulai membaik, Perdagangan online yang makin marak mendesak posisi perempuan terbiasa bekerja di wilayah UMKM sehingga dapat meningkatkan kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga. IDG Tahun 2023, IDG Kota Madiun mengalami kenaikan. IDG Kota Madiun tahun 2023 sebesar 78,94. Untuk tahun 2024 belum ada rilis resmi dari Badan Pusat Statistik baik dari Badan Pusat Statistik Pusat maupun Daerah.

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Madiun dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :



Grafik III.24
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Pemerintah Kota Madiun
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Madiun 2023 (Angka 2024 belum rilis)

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan capaian kinerja IDG Kota Madiun adalah sebagai berikut: *Pertama*, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi :

- Lebih mengintensifkan sosialisasi secara berkelanjutan kepada perempuan agar lebih berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik
- Dilakukannya pelatihan kepada perempuan agar lebih mandiri sehingga dapat membantu perekonomian keluarga sehingga terjadi keseimbangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki
- Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan melalui sosialisasi maupun pembinaan
- Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun



- e. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat maupun dunia usaha

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan pemahaman tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui sosialisasi maupun pembinaan
- b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan;
- c. Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk :

- a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
- b. Pelaksanaan review dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender;
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanganan tindak kekerasan
- d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG;
- e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
- f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah;
- g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.



4. Misi Keempat : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun didukung oleh 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran

Pada Misi 4 Tujuan 1 terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III.31
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2023 (n-1)	2024 (n)
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,40	6,87**	6,87**

Tabel III.32
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,40	6,87**	106,68%**



Tabel III.33
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi 2024	Realisasi Nasional 2024
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,87**	6,00**	6,31**

Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun, Bappelitbangda Provinsi Jawa Timur

**Angka 2021 dikarenakan angka 2022 dan seterusnya belum rilis

1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

Pilar-pilar tersebut antara lain:

1) PILAR 1 : Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

a. Sub-Pilar 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Dengan indikator :

- Pertumbuhan PDRB rill per kapita.
- Share manufaktur terhadap PDRB.



- Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal.

b. Sub-Pilar 1.2 : Kesempatan Kerja

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. Dengan indikator :

- Tingkat kesempatan kerja.
- Persentase Penduduk Bekerja Penuh.
- Persentase tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan menengah ke atas.

c. Sub-Pilar 1.3 : Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator :

- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN.
- Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam.
- Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang.

2) PILAR 2 : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan.

Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

a. Sub-Pilar 2.1 : Ketimpangan

Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

Dengan indikator :



- Rasio Pendapatan Gini.
- Sumbangan Pendapatan Perempuan.
- Rasio Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota.

b. Sub-Pilar 2.2 : Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Dengan indikator :

- Persentase penduduk miskin.
- Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari.

3) PILAR 3 : Perluasan Akses dan Kesempatan

Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas.

a. Sub-Pilar 3.1 : Kapabilitas Manusia

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Dengan indikator :

- Angka Harapan Lama Sekolah.
- Persentase Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
- Persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan.

b. Sub-Pilar 3.2 : Infrastruktur Dasar

Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan. Dengan Indikator :

- Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak.
- Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri.

c. Sub-Pilar 3.3 : Keuangan Inklusif



Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan Indikator :

- Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif
- Rasio kredit perbankan UMKM

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di RPJMD Kota Madiun ditargetkan di tahun 2024 sebesar 6,87, realisasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan indikator yang dihitung oleh BAPPENAS dan terakhir mengeluarkan angka penghitungan di tahun 2021. Pada Tahun 2022 dan 2023 BAPPENAS belum mengeluarkan nilai lagi sehingga angka IPEI Kota Madiun belum bisa diukur mengalami kenaikan atau penurunan. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota Madiun tahun 2021 sebesar 6,87 yang tergolong kategori memuaskan.

Untuk tahun 2021 Kota Madiun mendapat nilai untuk tiga pilar yaitu:

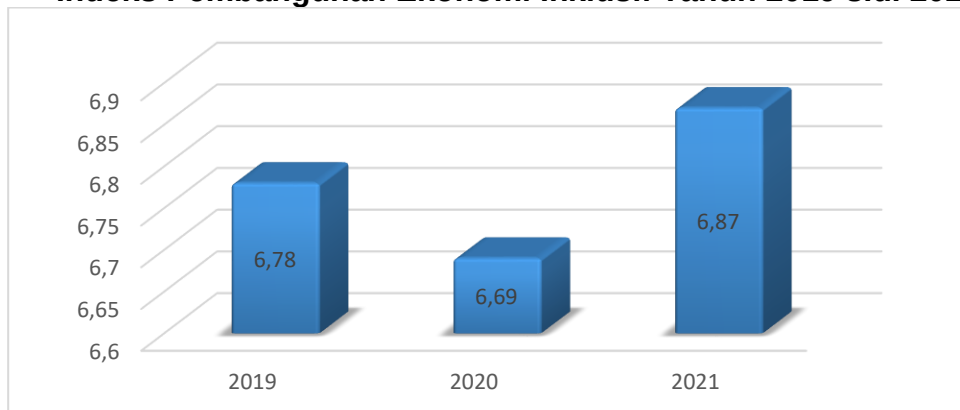
1. Pilar 1 pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah mendapat nilai poin 6,16 (tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kota Kediri)
2. Pilar 2 pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di daerah mendapatkan nilai poin 6,79 (tertinggi ketiga setelah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Mojokerto)
3. Pilar 3 perluasan akses dan kesempatan di daerah (tertinggi kedua setelah Kota Blitar)

Meskipun demikian Pemerintah Kota Madiun tetap melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian di tiga pilar tersebut, yaitu :

1. Dengan menciptakan lapangan kerja produktif dan menguntungkan dengan kegiatan-kegiatan padat karya di kelurahan-kelurahan
2. Penyediaan jejaring pengaman sosial
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Menetapkan kebijakan publik yang memadai



Grafik III.25
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2019 s.d. 2021



Sumber : BAPPENAS

Tujuan “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel III. 34
Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 4 Tahun 2024

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
4.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran terbuka	5,00%	4,30%	114
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	7,98%	4,59%	57,51
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor Jasa	21,57%	24,7%*	114,51*

Sumber Data : Badan Pusat Statistik



A. Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka

Pengangguran Terbuka atau sering juga disebut pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran.

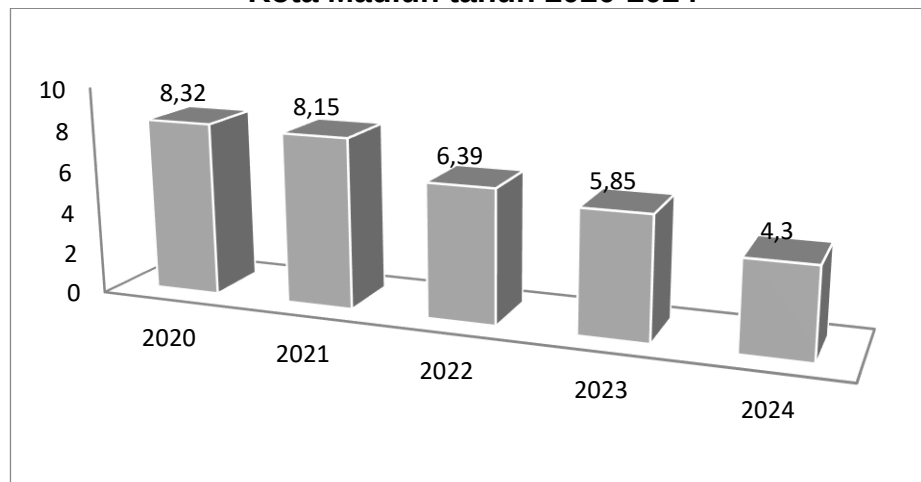
Target Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 dalam Perubahan RPJMD Kota Madiun tahun 2019 – 2024 sebesar 5,00%. Berdasarkan hasil Sakernas oleh Badan Pusat Statistik Kota Madiun menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2024 sebesar 4,30%, dengan demikian Angka TPT tahun 2024 sudah memenuhi target TPT tahun 2024, dengan capaian kinerja sebesar 114%.

Pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun berdasarkan hasil dari Sakernas oleh Badan Pusat Statistik Kota Madiun sebesar 4,30% dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 sebesar 5,85% sehingga mengalami penurunan sebesar 1,55%

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Grafik III.26
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Madiun tahun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota Madiun tahun 2023 sebesar 5,85% dan TPT tahun 2024 sebesar 4,30%, turun sebesar 1,55 poin persen. Penurunan TPT ini menggambarkan keberhasilan program kerja dan kegiatan bidang ketenagakerjaan di tahun 2023 dan 2024.

Penduduk usia kerja di Kota Madiun tahun 2024 tercatat mencapai 163.08 ribu jiwa yang mengalami kenaikan sebesar 1,65 ribu jiwa apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Apabila dilihat dari pola usia kerja dalam rentang tiga tahun terakhir ini, usia kerja di Kota Madiun menunjukkan pola yang hampir sama dimana jumlah angkatan kerja lebih banyak dibanding jumlah bukan angkatan kerja.



Tabel III. 35
Status Keadaan Ketenagakerjaan

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan	
	orang	orang	Agustus 2023) orang	(2024- persen
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	161.428	163.080	1.652	1,02
Angkatan Kerja	111.852	115.142	3.290	2,94
- Bekerja	105.313	110.196	4.883	4,64
- Pengangguran	6.539	4.946	-1.593	-24,36
Bukan Angkatan Kerja	49.576	47.938	-1.638	-3,30
	persen	persen	persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,85	4,30	-1,55	
- Laki-laki	6,07	4,46	-1,61	
- Perempuan	5,57	4,11	-1,46	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,29	70,60	1,31	
- Laki-Laki	78,69	78,87	0,18	
- Perempuan	60,42	62,81	2,39	

Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ada pergeseran dari tahun 2023 ke tahun 2024, dimana jumlah angkatan kerja di Kota Madiun mengalami kenaikan sebesar 2,94 persen poin dan bukan angkatan kerja mengalami penurunan 3,30 persen poin.

Lebih detailnya, penduduk usia kerja di Kota Madiun tahun 2023 penduduk bekerja sebanyak 105.313 jiwa, pengangguran 6.539 jiwa, dan bukan angkatan kerja sebanyak 49.576 jiwa. Sedangkan untuk kondisi tahun 2024 sebagian besar adalah penduduk yang bekerja dengan jumlah mencapai 110.196 jiwa, pengangguran sebanyak 4.946 jiwa, dan bukan angkatan kerja sebanyak 47.938 jiwa.



Berdasarkan data di atas, dari tahun 2023 ke 2024 terdapat kenaikan jumlah angkatan kerja yang disertai dengan jumlah penduduk bekerja yang meningkat, dan penurunan jumlah bukan Angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran menurun. Pada tahun 2024 jumlah penduduk bekerja naik sebanyak 4.883 jiwa atau naik sebesar 4,64 persen. Sedangkan pengangguran turun dari 6.539 menjadi 4.946 jiwa, dengan jumlah penurunan sebanyak 1.593 jiwa atau 24,36 persen. Penurunan terjadi pada kelompok bukan angkatan kerja dari 49.576 menjadi 47.938 jiwa, dengan jumlah penurunan sebanyak 1.638 jiwa atau 3,30 persen. Jadi, Jumlah Penduduk Usia Kerja secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebanyak 161.428 jiwa menjadi 163.080 jiwa di tahun 2024, dengan persentase kenaikan sebesar 1,02%.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebesar 4,30 %, yaitu perbandingan antara pengangguran sebesar 4.946 orang dengan angkatan kerja sebesar 110.196 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,55 % dari TPT tahun 2023 yaitu sebesar 5,85 %, dengan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 1.593 orang. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 ini diakibatkan oleh banyaknya formasi lowongan kerja yg tersedia dan wirausaha baru selain itu masyarakat lebih siap dan kompeten menghadapi pasar kerja sehingga menyebabkan jumlah pengangguran semakin menurun, dan ada rekrutmen calon tenaga kerja baru oleh pemberi kerja. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) sebesar 1,02 persen poin dari tahun sebelumnya atau naik sebanyak 1.652 orang. Peningkatan jumlah usia kerja di Kota Madiun ini dibarengi dengan peningkatan angkatan kerja sebanyak 3.290 orang. Apabila di bandingkan dengan target TPT tahun 2024 sebesar 5,00 %, realisasi TPT tahun 2024 sebesar 4,30 %. Untuk TPT apabila Capaian Kinerja lebih kecil dari target maka Capaian kinerja semakin baik, karena angka pengangguran lebih kecil dari target.

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka menurun tetapi didominasi oleh sektor jasa sedangkan pada sektor ini tidak terlalu besar penyerapan tenaga kerjanya.



A. Faktor Pendorong

1. Pertumbuhan ekonomi sudah mulai berkembang setelah selesainya pandemi COVID-19.
2. Sudah mulai dibukanya sejumlah lowongan pekerjaan oleh para pelaku usaha/pemberi kerja dari dalam dan luar negeri.
3. Industri kreatif yang semakin berkembang didukung perkembangan teknologi digital yang berkembang pesat.
4. Terjalannya kerja sama dengan lembaga maupun perusahaan dalam peningkatan Soft Skill dan Hard Skill serta penempatan para pencari kerja.
5. Program kegiatan Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sangat mendukung dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, diantaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pencari Kerja, Job Fair dan Aplikasi SICAKER.

B. Faktor Penghambat

1. Penyebab pengangguran di Kota Madiun adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan magister pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut.
2. Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Hal tersebut menjadi penyebab pengangguran dengan banyaknya lulusan muda yang menganggur untuk menunggu pekerjaan.
3. Sebuah perusahaan yang memiliki lowongan pekerjaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria sesuai dengan jabatan yang akan ditempati oleh calon karyawan tersebut. Namun menjadi kendala ketika sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan dengan skill yang tinggi. Secara otomatis, hanya akan ada



beberapa pelamar yang memiliki kesempatan. Hal ini disebabkan karena jaranganya pelamar yang memiliki banyak keterampilan untuk menunjang posisi di suatu perusahaan.

4. Kemajuan teknologi yang semakin pesat kini membebani para angkatan kerja untuk mampu beradaptasi. Sayangnya, jika para angkatan kerja tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka mereka akan mudah ter-PHK dari kesempatan kerja mengingat teknologi kini sudah memasuki seluruh lini kehidupan manusia.

C. Upaya yang dilaksanakan dan Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan kondisi tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi
- b. Menyelenggarakan kegiatan job fair/bursa kerja untuk mempermudah pemberi kerja mendapatkan calon tenaga kerja, dan pencari kerja bisa dipertemukan langsung dengan pemberi kerja.
- c. Melakukan pembinaan dan monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah, Lembaga Swasta dan atau Perguruan Tinggi guna terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk dapat menempatkan alumni atau calon pencari kerja baru dengan pemberi kerja sesuai kompetensi masing-masing.
- d. Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)
- e. Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
- f. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan
- g. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- h. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
- i. Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan



- j. Updating data pengangguran tenaga kerja sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Kota Madiun.

B. Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi”

Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha terdiri atas 17 kategori dan 52 sub kategori dan dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air pengelolaan sampah; limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan. Dan pada kategori perdagangan, terdiri atas 2 (dua) sub kategori yaitu Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya serta Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

PDRB sektor perdagangan berdasarkan realisasi data BPS sebesar 5,60 (data tahun 2023) untuk tahun 2024 sebesar 4,59. Hal tersebut terjadi bukan karena menurunnya aktivitas perdagangan namun karena perbandingan meningkatnya PDRB pada kategori lainnya sangat tinggi sehingga kategori pada sektor perdagangan terlihat menurun. Hal ini dibuktikan dengan total peningkatan pada secara keseluruhan tingkat perekonomian Kota Madiun



tahun 2023 sebesar 5,80% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,52% (Data Tahun 2023). Selain itu, seiring dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi, masyarakat cenderung untuk berbelanja kebutuhan non makanan selain membeli mobil dan sepeda motor, sehingga memberikan pengaruh terhadap PDRB sektor perdagangan yang salah satu sub kategorinya adalah Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Adapun perkembangan PDRB Sektor Perdagangan di Kota Madiun mulai tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Grafik III.27
PDRB Sektor Perdagangan di Kota Madiun Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kota Madiun

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk peningkatan capaian PDRB sektor perdagangan, yaitu:

1. Pengendalian Harga dan Inflasi dengan Operasi Pasar dan kegiatan Tekan Inflasi melalui Subsidi Bahan Pokok Kepada masyarakat (WARTEK Inflasi).
2. Meningkatkan akses jalan, transportasi publik, dan sistem distribusi barang untuk memudahkan perdagangan. Ini akan mempercepat perputaran barang dan meningkatkan efisiensi
3. Revitalisasi dan memperbaiki fasilitas pasar tradisional serta mendorong pembangunan pasar modern yang lebih nyaman bagi konsumen dan pedagang



4. Pemberdayaan UMKM dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang manajemen usaha, pemasaran, serta penggunaan teknologi untuk memperluas pasar, baik secara offline maupun online
5. Merintis jalur sistem distribusi perdagangan
6. Menggalakkan Promosi Produk Perdagangan melalui Pameran produk dan Event-event perdagangan serta pelatihan-pelatihan pada pedagang.
7. Mengembangkan kawasan wisata yang memiliki nilai tambah dari sektor perdagangan, seperti pusat oleh-oleh khas Madiun, galeri seni, atau pasar wisata yang dapat menarik lebih banyak pengunjung
8. Memperkuat kolaborasi antara sektor pariwisata dengan sektor perdagangan untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung

Kontribusi Perangkat Daerah dalam indikator PDRB sektor perdagangan:

1. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi daerah
2. Revitalisasi Pasar Rakyat sebagai salah satu pusat perdagangan daerah
3. Penyusunan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur perdagangan, seperti pasar, jalan, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang memperlancar distribusi barang dan jasa
4. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM mengenai pengelolaan usaha, pemasaran, dan teknologi, termasuk pelatihan untuk memanfaatkan platform digital dalam menjangkau pasar yang lebih luas
5. Mempromosikan produk perdagangan/produk unggulan daerah dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, perangkat daerah bisa membantu pelaku usaha memperkenalkan produk lokal kepada pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional, maupun event-event
6. Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan partisipasi dalam sektor perdagangan



Persentase pertumbuhan PDRB sektor Jasa

Pertumbuhan PDRB sektor jasa meliputi Jasa Keuangan, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Jasa Lainnya. Jasa Keuangan mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Pendidikan/Education Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini. Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan Pendekatan Produksi. Untuk



NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan Pendekatan Deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi. Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

Jasa Kesehatan cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Jasa Lainnya/Other Services Activitie Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.



Grafik III.28
PDRB Sektor Jasa di Kota Madiun Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kota Madiun

Untuk data capaian tahun 2024 sebesar 30,48% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 21,57%. Untuk data Tahun 2023 capaian PDRB sektor jasa Tahun 2023 mencapai 24,7% jauh berada diatas target sebesar 11,32%. Untuk data series pertumbuhan PDRB sektor jasa atas dasar harga konstan menurut BPS pada tahun 2022 adalah sebesar 21,57 dengan capaian 190,54%. Pada tahun 2021 adalah sebesar 11,32 dengan capaian sebesar 195,17% jika dibandingkan dengan target tahun 2021. Pertumbuhan PDRB di sektor jasa juga mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar -0,93 atau mengalami kenaikan sebesar 12,25 poin.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan capaian PDRB di sektor jasa yaitu::

1. Revitalisasi pasar – pasar yang ada di Kota Madiun.
2. Mengembangkan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata, seperti pembangunan fasilitas publik, destinasi wisata, dan aksesibilitas menuju tempat-tempat wisata yaitu dengan pembangunan dan pengembangan Pahlawan Street Center (PSC) sebagai pusat wisata baru di Kota Madiun, lapak-lapak di Kelurahan, Pahlawan Bisnis Center (PBC).



3. Menyelenggarakan berbagai event dan festival, seperti Festival Budaya Madiun, yang tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mendongkrak sektor jasa di bidang kuliner, akomodasi, dan transportasi
4. Pembangunan jalur sepeda wisata penghubung lapak.
5. Pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha jasa untuk memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk dan layanan mereka secara online
6. Pembangunan infrastruktur pendukung selain transportasi, perbaikan fasilitas umum seperti jalan, area parkir, dan aksesibilitas ke kawasan industri dan perdagangan juga menjadi prioritas untuk mendukung sektor jasa
7. Pengawasan dan kalibrasi berbagai macam alat ukur yang digunakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya
8. Pemberian kemudahan bagi pelaku usaha sektor jasa dengan penyederhanaan prosedur perizinan dan regulasi yang mendukung. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor, terutama di sektor perhotelan, restoran, dan jasa lainnya yang dapat berkontribusi pada peningkatan PDRB
9. Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan di Kota Madiun, baik rumah sakit, klinik, serta pusat layanan kesehatan lainnya, sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB sektor jasa. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan berkontribusi pada pengembangan sektor kesehatan sebagai bagian dari sektor jasa

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya promosi yang efektif dan pemasaran yang efisien dapat membatasi perkembangan sektor jasa di Kota Madiun. Jika potensi wisata atau produk jasa yang ada tidak dipromosikan dengan baik, hal ini akan menghambat masuknya pengunjung atau konsumen yang potensial
2. Persaingan antar penyedia jasa yang semakin ketat, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi dan layanan berbasis digital, dapat menghambat pertumbuhan sektor jasa. Pengusaha jasa yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar yang berubah dapat tertinggal



3. Sektor jasa di Kota Madiun terlalu bergantung pada satu atau beberapa jenis layanan
4. Sektor jasa yang kurang berinovasi atau lambat dalam mengadopsi teknologi baru dapat terhambat dalam menghadapi tren global seperti e-commerce, digitalisasi, dan otomatisasi.

Faktor Pendorong:

1. Tingkat inflasi daerah yang terkendali.
2. Tersedianya jaminan sosial melalui asuransi tenaga kerja, kesehatan dan kematian bagi pekerja.
3. Menurunnya angka kemiskinan.
4. Sarana prasarana umum atau fasilitas publik yang memadai seperti jalan, jembatan, sanitasi, dan lain-lain sehingga memudahkan aksesibilitas di Kota Madiun
5. Perkembangan teknologi informasi yang pesat juga mendorong sektor jasa seperti e-commerce, layanan digital, dan jasa berbasis teknologi lainnya yang menjadi lebih penting di kehidupan sehari-hari
6. Meningkatnya fasilitas layanan kesehatan di Kota Madiun, baik rumah sakit, klinik, serta pusat layanan kesehatan lainnya
7. Kemudahan bagi pelaku usaha sektor jasa dengan penyederhanaan prosedur perizinan dan regulasi yang mendukung investasi di sektor perhotelan, restoran, dan jasa lainnya
8. Pertumbuhan perdagangan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, mendorong sektor jasa seperti distribusi, pengepakan, dan layanan terkait lainnya



Pada Misi 4 Tujuan 2 terdapat 2 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel III.36
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2023 (n-1)	2024 (n)
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	77,2	82,88	84,23
	Indek Gini	0,35	0,416	0,435

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik

Tabel III.37
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	77,2	84,23	109,11
	Indek Gini	0,35	0,435	75,71

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik



Tabel III.38
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi 2024	Realisasi Nasional 2024
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	82,88	N/A	N/A
	Indek Gini	0,435	0,372	0,381

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik

Keterangan : * data sementara (2024)

1. Indeks Ketentraman

Indeks Ketentraman sebagai salah satu alat pengukuran tingkat ketentraman dan ketertiban yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan tingkat ketentraman dan ketertiban. Penyusunan Survei Indeks Ketentraman dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang nilai Indeks Ketentraman dari masyarakat di Kota Madiun. Berdasarkan hal tersebut diharapkan juga mampu menjadi bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

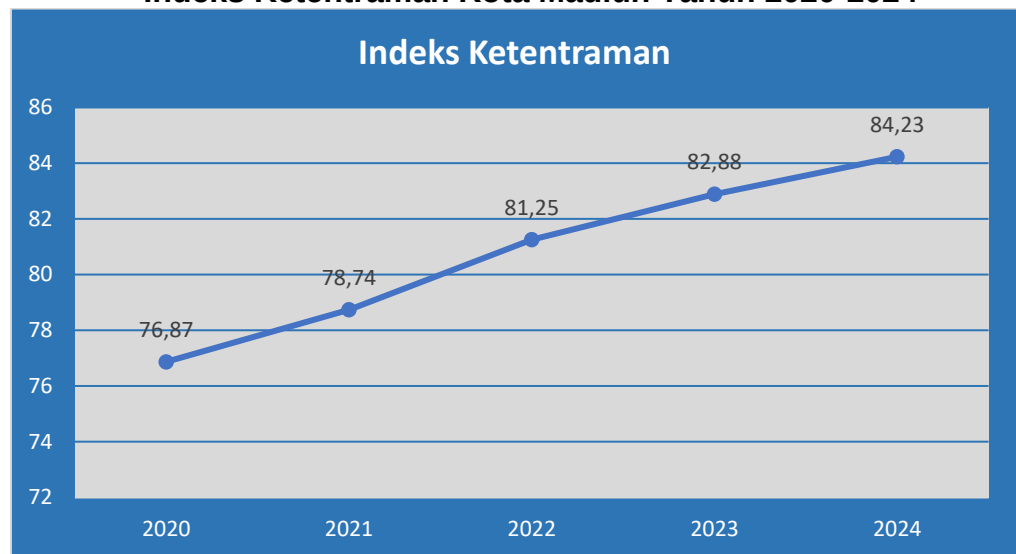
Capaian indeks ketentraman Kota Madiun tahun 2024 adalah 84,23 dan ditargetkan pada akhir periode RPJMD 2019-2024. Peningkatan keamanan dan ketentraman akan meningkatkan toleransi dalam bermasyarakat. Disisi lain, toleransi masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat akan memicu terjadinya konflik sosial. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis, berkesinambungan, konsisten untuk meningkatkan toleransi dan peran/partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta mengurangi angka kriminalitas dan penggunaan NAPZA.



Terdapat empat dimensi pengukuran indeks ketentraman:

1. Dimensi Pada Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada (Ketertiban Umum)
2. Dimensi Pada Persepsi Suasana Tenang
3. Dimensi Pada Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan
4. Dimensi Pada Persepsi Aman

Grafik III.29
Indeks Ketentraman Kota Madiun Tahun 2020-2024



Sumber : Satpol Kota Madiun

Survei Indeks Ketentraman mulai dilaksanakan tahun 2020 dengan hasil nilai 76,87 kemudian tahun 2021 mendapatkan nilai 78,74 naik 1,87 poin dibanding tahun sebelumnya, tahun 2022 didapatkan nilai 81,25 naik 2,51 poin dibanding tahun 2021, kemudian tahun 2023 didapatkan nilai 82,88 naik 1,63 poin dibanding tahun 2022. Dan tahun 2024 ini mendapatkan nilai 84,23 dengan peringkat “B” berpredikat “Kondusif” naik 1,35 poin dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa tren setiap tahun selalu positif (naik) untuk hasil nilai survei indeks ketentraman. Hasil nilai indeks dipengaruhi beberapa faktor yang mendorong kenaikan nilai survei setiap tahun.

Dari sisi Variabel, V-4 Keagamaan peringkat pertama/perolehan nilai tertinggi dengan Nilai Interval 3,56 setara dengan Nilai Konversi 88,89. Ada dua variabel dengan peringkat paling rendah/perolehan nilai paling rendah yakni V-16 Bebas Dari Resiko Bencana Alam maupun Non Alam perolehan Nilai Interval



3,29 setara dengan Nilai Konversi 82,35 dan V-14 Bebas Dari Ketimpangan Ekonomi perolehan Nilai Interval 3,28 setara dengan Nilai Konversi 82,32.

Sedangkan dari empat dimensi, diketahui D-2 Dimensi pada Persepsi Suasana Tenang mendapatkan nilai peringkat tertinggi yakni Nilai Interval 3,44 atau Nilai Konversi 85,96 sedangkan D-4 Dimensi pada Persepsi Persepsi Keteraturan Sesuai Hukum yang Berlaku dan Norma-Norma yang Ada (Ketertiban Umum) menjadi dimensi dengan nilai paling rendah yakni Nilai Interval 3,33 atau Nilai Konversi 83,36.

Faktor pendorong yaitu kesadaran aparaturnya dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri. Masyarakat juga memiliki peran dalam meningkatkan ketentraman, oleh karena itu penting dilakukan sosialisasi sistem ketentraman dan ketertiban serta keamanan lingkungan, diantaranya dengan mengedukasi dan menyadarkan untuk ikut peduli terhadap ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan. Hal ini sekaligus mengingatkan, bahwa setiap masyarakat /komunitas membutuhkan ketentraman dan ketertiban untuk mendukung berbagai aktivitas.

Terkait dimensi bebas dari ketimpangan ekonomi, untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah yang strategis dan berkualitas, bertujuan meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat.
2. meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, yang tidak cuma spesifik di satu sektor, melainkan menyeluruh, seperti industri kecil dan jasa yang bisa tumbuh di mana saja. Juga, agar lebih memfokuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi padat karya atau pembangunan yang lebih mengarah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.



Terkait dengan nilai variabel bebas dari resiko bencana alam maupun non alam, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana
3. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal

Terkait dengan Dimensi Persepsi Keteraturan Sesuai Hukum yang Berlaku dan Norma-Norma yang Ada, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Lebih meningkatkan tugas dan tanggung jawab Satpol PP, khususnya dalam hal: a. menegakkan Perda dan Perkada; b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat
2. Melaksanakan program penegakan Perda/Peraturan Walikota, yakni dengan melakukan inventarisasi keteraturan sesuai hukum yang berlaku dan norma-norma yang ada, monitoring pelaksanaan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota secara lebih humanis.
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan secara konsisten dan berkesinambungan, khususnya pembinaan dan pengembangan kapasitas anggota LINMAS sekaligus melakukan pendataan anggota LINMAS

5. Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang



paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu.

Penghitungan Indeks Gini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$$

dimana,

GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)

P_i : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_i : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{i-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

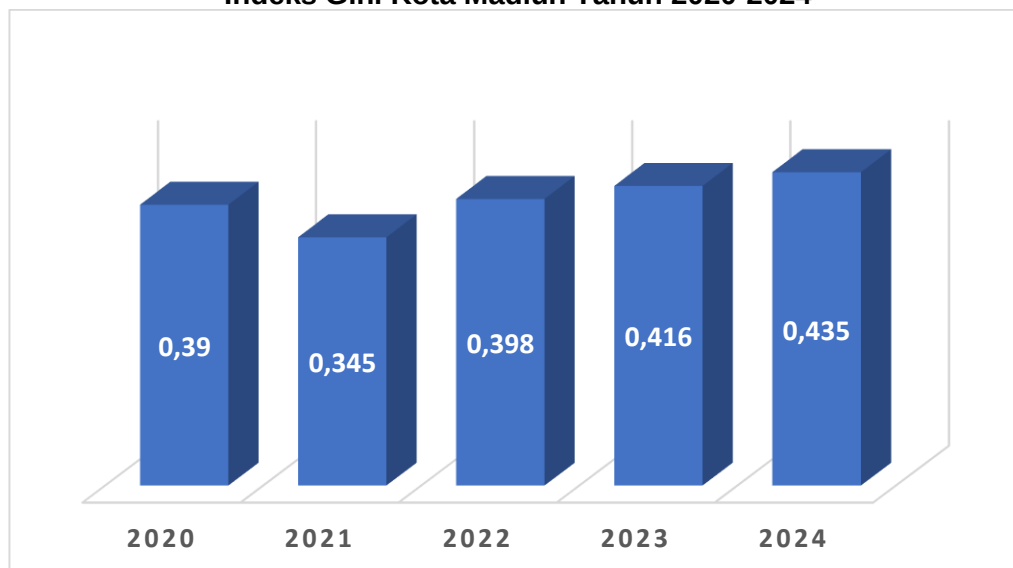
Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini adalah sebagai berikut :

Nilai Koefisien (x)	Distribusi Pendapatan
$x = 0$	Merata sempurna
$0 < x < 0,4$	Tingkat ketimpangan rendah
$0,4 < x < 0,5$	Tingkat ketimpangan sedang
$0,5 < x < 1$	Tingkat ketimpangan tinggi
$x = 1$	Tidak merata sempurna (dikuasai oleh satu pihak)



Adapun data series Indeks Gini Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana berikut :

Grafik III.30
Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Indeks Gini Kota Madiun pada Tahun 2020 mengalami kenaikan ketimpangan dari Tahun 2019 menjadi sebesar 0,39, kenaikan ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid 19 dimana kondisi pada saat itu perekonomian secara keseluruhan menurun sehingga terjadi kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam satu wilayah. Untuk Tahun 2021 mengalami kenaikan angka yang artinya membaik dari Tahun 2020 menjadi sebesar 0,345, hal ini menandakan mulai membaiknya tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam satu wilayah, akan tetapi Indeks Gini pada Tahun 2022 mengalami penurunan angka kembali menjadi sebesar 0,398, hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 terjadi inflasi yang tinggi hampir di semua daerah bahkan di sebagian besar negara terjadi kenaikan inflasi yang tinggi. Indeks Gini tahun 2023 di angka 0,416 dan di tahun 2024 mengalami kenaikan ketimpangan dengan indeks gini sebesar 0,435.

Berdasarkan data SUSENAS tahun 2024, secara rata-rata, penduduk Kota Madiun mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.043.730 per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Jika dikonversi secara harian, maka rata-rata penduduk Kota Madiun

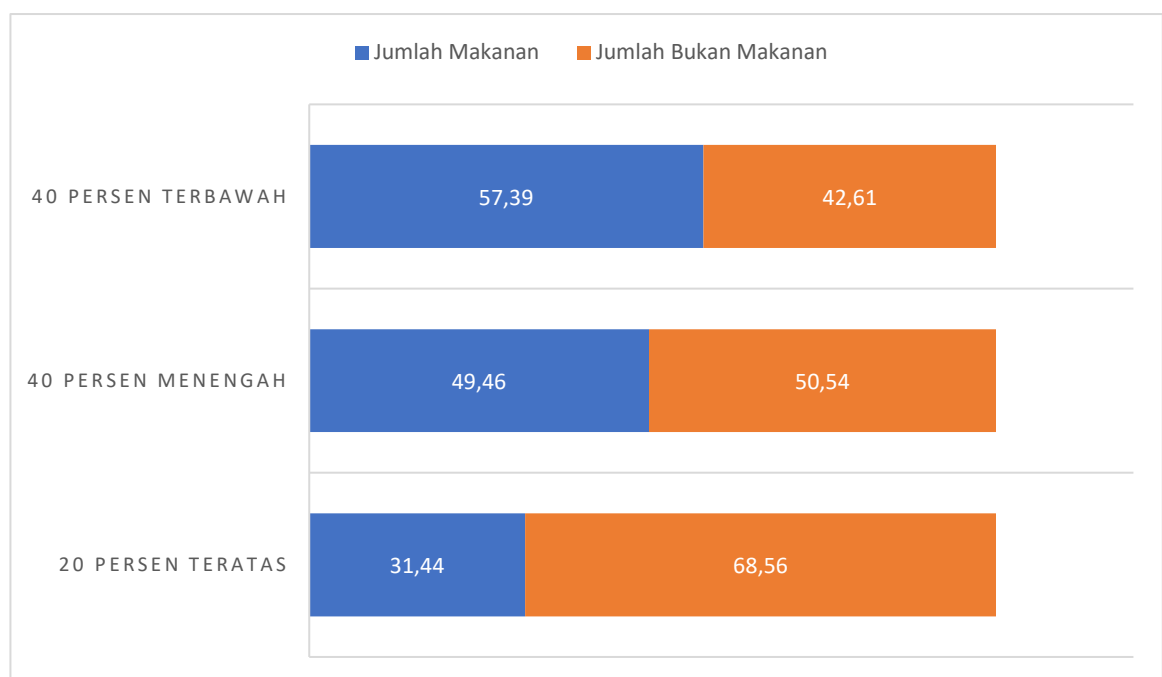


mengeluarkan Rp. 68.124,00 per orang per hari. Selanjutnya, jika dalam satu rumah tangga terdapat 4 anggota rumah tangga, maka secara rata-rata rumah tangga tersebut memiliki pengeluaran sebesar Rp 8.174.730,00 dalam sebulan.

Pada data Susenas, pengeluaran penduduk diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya data terurut tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yakni 40% penduduk dengan pengeluaran terendah, 40% penduduk dengan pengeluaran menengah, dan 20% penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Jika dilihat menurut kelompok penduduk berdasarkan pengeluarannya, semakin tinggi kelompok pengeluaran rumah tangga, maka proporsi pengeluaran makanannya akan semakin kecil.

Grafik III.31

Proporsi Pengeluaran Penduduk Kota Madiun Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Masyarakat Berdasarkan Pengeluarannya



Sumber: BPS Kota Madiun, 2024

Berdasarkan grafik diatas, pada kelompok 40% penduduk berpengeluaran terbawah, proporsi pengeluaran untuk makanan sebesar 57,39 persen dari total pengeluaran penduduk, lebih besar dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan.

Pada kelompok 40% penduduk berpengeluaran menengah dan kelompok 20% teratas, proporsi pengeluaran lebih besar teralokasi untuk kebutuhan non makanan dibandingkan untuk makanan, bahkan pada kelompok



20% penduduk berpengeluaran teratas, proporsi pengeluaran untuk makanan hanya 31,44 persen dari total pengeluaran mereka.

Sehingga, walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, bagi kelompok pengeluaran menengah bawah menahan pengeluaran non makanan dan lebih memprioritaskan pengeluaran makanan. Akan tetapi, bagi kelompok dengan pengeluaran tinggi, alokasi pengeluaran atas kebutuhan non makanan semakin meningkat terutama pada beberapa jenis pengeluaran berbiaya tinggi seperti pembayaran/pelunasan umroh dan haji furoda, dan pembelian kendaraan bermotor baru. Pada akhirnya, jarak pengeluaran antara kelompok pengeluaran tinggi dengan kelompok pengeluaran menengah bawah semakin jauh dan mengakibatkan naiknya angka indeks gini. Meskipun angkanya naik tetapi kondisi ketimpangan di Kota Madiun masuk dalam kategori ketimpangan moderat atau sedang yang di antara angka $0,4 < x < 0,5$. Hal ini karena kenaikan harga kebutuhan bahan pokok yang signifikan yang juga berlaku secara nasional.

Kebijakan membuka peluang investasi secara luas dan kemudahan akses melalui kemajuan teknologi tentunya membawa dampak positif dan negatif ke masyarakat. Adanya pergeseran kultur di masyarakat yang menyebabkan perubahan gaya hidup juga berpengaruh pada ketimpangan ini.

Dengan masuknya investasi di bidang jasa dan perdagangan yang menawarkan konsep “One stop shooping” , serta kemajuan teknologi dengan berbagai aplikasi online, menyebabkan “kue ekonomi” yang ada di Kota Madiun lebih banyak dinikmati oleh kelompok atas, dibandingkan kelompok menengah dan kelompok terbawah yang kemampuannya terbatas.

Oleh karena itu untuk mengatasi persoalan indeks gini, maka:

1. perlu dukungan untuk meningkatkan kegiatan padat karya, sehingga membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan.
2. Diperlukan juga kebijakan serta komitmen yang jelas dalam pengaturan investasi di Kota Madiun, sehingga investasi tidak hanya memberikan keuntungan pada kelompok atas (pemilik modal), tetapi kelompok menengah kebawah juga merasakan manfaat dari investasi



3. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu agar ekonominya tetap stabil
4. Peningkatan softskill pada siswa sekolah menengah untuk dapat meningkatkan kualitas SDM
5. Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur sarana prasarana umum dan kesehatan sehingga seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses fasilitas umum dan kesehatan yang merata.
6. Memberikan bantuan akses perbankan kepada para UMKM sehingga dapat meningkatkan skala usaha yang nantinya juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah.
- 2) Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah DBHCHT.
- 3) Bantuan Sosial Air Bersih
- 4) Bantuan Sosial Lansia Non Potensial
- 5) Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar
- 6) Santunan Kematian
- 7) Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya)
- 8) Bantuan Sosial untuk Janda Perintis
- 9) Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
- 10) Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
- 11) Melakukan pemberdayaan UMKM dan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya
- 12) Mengintensifkan warung tekan inflasi dalam upaya penyetabilan harga
- 13) Pemberian/bantuan premi JKK-JKM
- 14) Bantuan biaya sekolah (SPP, laptop, seragam) gratis



Tujuan “Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel III.39
Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 5 Tahun 2024

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
4.2.1	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,45	4,38	101,57
4.2.2	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	77,8	78,04	100,31
		Indeks Rasa Aman	83,31	84,16	101,02

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Bakesbangpol, Satpol PP, Bakesbangpol Kota Madiun

A. Sasaran “Pengurangan Kemiskinan”

Angka Kemiskinan

Sebagaimana tertuang pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2024 bahwa indikator sasaran pengurangan kemiskinan sebesar 4,45. Hal ini juga mengalami penyesuaian target sebagaimana tertuang pada RPJMD Perubahan sebesar 4,43. Hal ini berdasarkan proyeksi penghitungan angka kemiskinan di Kota Madiun.

Tahun 2022 angka kemiskinan turun seiring dengan meningkatnya perekonomian secara global dari 5,09 (9.060 jumlah penduduk miskin) menjadi 4,76 (8.490 jumlah penduduk miskin) dengan garis kemiskinan naik dari Rp 514.409,00 menjadi Rp 551.620,00 atau naik sebesar Rp 37.211,00.

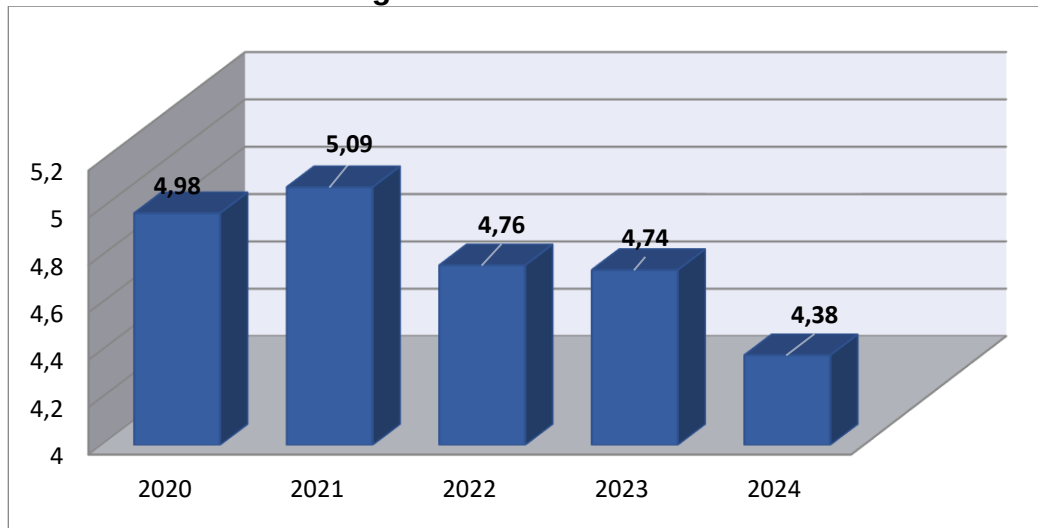
Tahun 2023 angka kemiskinan kembali turun dari 4,76 (8.490 jumlah penduduk miskin) menjadi 4,74 (8.460 jumlah penduduk miskin) dengan garis kemiskinan naik dari Rp 551.620,00 menjadi Rp 605.131,00 atau naik sebesar Rp 53.511,00.

Tahun 2024 angka kemiskinan kembali turun dari 4,74 (8.460 jumlah penduduk miskin) menjadi 4,38 (7.840 jumlah penduduk miskin) dengan garis



kemiskinan naik dari Rp 605.131,00 menjadi Rp 637.838,00 atau naik sebesar Rp 32.707,00.

Grafik III.32
Persentase Angka Kemiskinan Periode 2020-2024



Sumber : BPS Kota Madiun 2024

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah.
2. Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah DBHCHT.
3. Bantuan Sosial Air Bersih.
4. Bantuan Sosial Lansia Non Potensial.
5. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar.
6. Santunan Kematian.
7. Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
8. Bantuan Sosial untuk Janda Perintis.
9. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
10. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA.



B. Sasaran 11 Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat

1. Indeks Kerukunan

Capaian Indikator Indeks Kerukunan untuk Tahun 2024 adalah 78,04 dengan kategori sangat tinggi (Harmonis) sehingga melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 77,80 dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,69%. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 77,80 dengan kenaikan persentase capaian kinerja sebesar 0,31%.

Indikator tersebut diukur berdasarkan beberapa dimensi :

- a. Menghormati
- b. Menerima
- c. Jujur
- d. Teladan
- e. Kesetaraan

Sedangkan faktor pendorong peningkatan capaian kinerja :

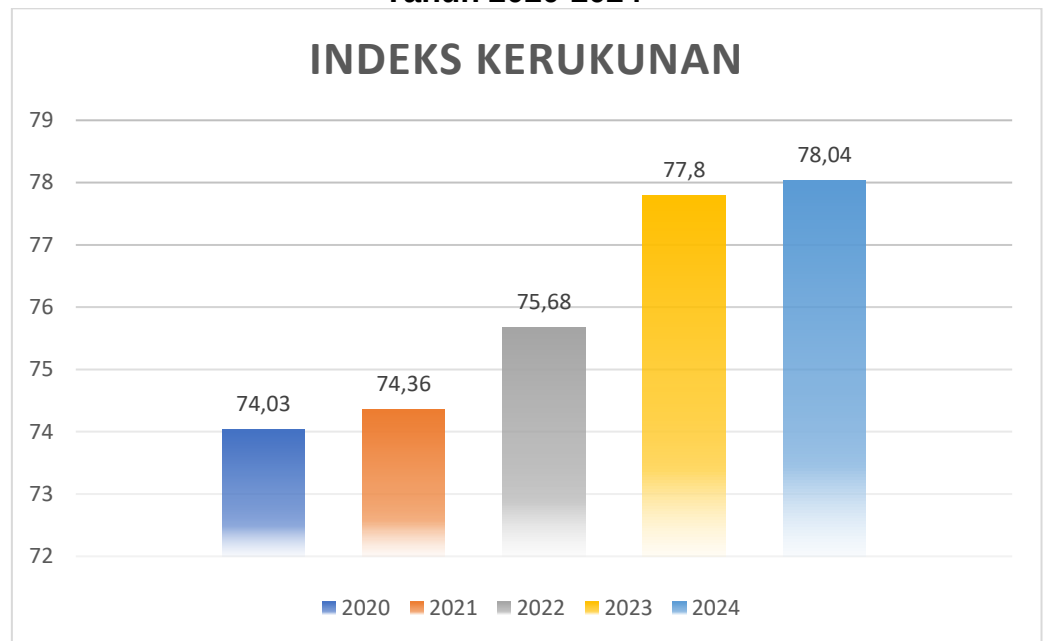
1. Kerukunan antar umat beragama
2. Toleransi dalam menjalankan ibadah
3. Kerukunan antar suku yang ada di Kota Madiun
4. Saling menghargai dan menghormati dengan perbedaan
5. Deteksi dini akan timbulnya konflik sosial

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Kerukunan adalah :

1. Rapat koordinasi Forkopimda untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat
2. Sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat dan generasi muda tentang ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
3. Sosialisasi Jejaring Panca Mandala (JPM)
4. Sarasehan Bela Negara
5. Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama
6. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan
7. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini
8. Fasilitasi/audiensi apabila timbul konflik sosial di masyarakat



Grafik III.33
Data Series Capaian Indeks Kerukunan Kota Madiun
Tahun 2020-2024



NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI KINERJA
1.	2020	2,77	3,7015 atau 74,0306
2.	2021	74,30	74,36
3.	2022	74,40	75,68
4.	2023	74,46	77,80
5.	2024	77,80	78.04

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2024

2. Indeks Rasa Aman

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta dan kehormatan. Indeks keamanan sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan.



Indeks Rasa Aman Kota Madiun mengadopsi metodologi penyusunan dan pengembangan Indeks Rasa Keamanan Manusia Indonesia yang merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia dengan mempertimbangkan konteks ke Indonesiaan yang terdiri dari 4 dimensi.

Adapun empat dimensi dalam yang digunakan dalam pengukuran Indeks Rasa Aman yaitu :

- Dimensi Keamanan dari Bencana (Kebencanaan)
- Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial)
- Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan (Kebhinnekaan)
- Dimensi Keamanan dari Kekerasan (Kekerasan)

Grafik III.34
Indeks Rasa Aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024



Sumber : Satpol PP Kota Madiun

Capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2024 adalah sebesar 84,16 dengan peringkat “A” dengan predikat “AMAN TERKENDALI”, dilihat dari grafik diatas mulai tahun 2020-2024 nilai indeks mengalami kenaikan tiap tahun. Mulai tahun 2020 mendapatkan nilai 77,02 kemudian tahun 2021 mendapatkan nilai 81 naik 3,98 poin dibanding tahun sebelumnya, untuk tahun 2022 mendapatkan nilai 82,18 dan tahun 2023 mendapatkan nilai



82,47 naik 0,29 poin dari tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2024 ini mendapatkan nilai 84,16 naik 1,69 poin dibanding tahun 2023.

Faktor pendorong hasil nilai Indeks rasa aman dipengaruhi oleh rutin nya patroli dari petugas Satpol PP yang berkoordinasi dengan Polri serta didukung oleh peran serta masyarakat dengan dilakukannya sistem ronda malam di masing-masing RT/RW di lingkungan Kota Madiun yang turut menjaga keamanan dilingkungan masing-masing.

Rencana tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan atau peningkatan indeks rasa aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023:

1. Pemerintah Kota Madiun mengambil langkah cepat dalam pemulihan ekonomi dengan menitikberatkan masalah infrastruktur dan peningkatan dukungan ekonomi arus bawah yakni, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
2. Untuk mewujudkan rasa aman masyarakat memberdayakan 3 pilar; Babinsa, Lurah dan Masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan, karena kejahatan itu ada ditengahnya masyarakat, kemudian masyarakat tersebar dimana-mana, sehingga untuk mendapatkan informasi sangat mudah. Bahkan negara maju juga sedang mengembangkan perpolisian komunitas atau "community policing." Kehadiran Polisi, Tentara dan Lurah sebagai mediator, Fasilitator dan jembatan antara Masyarakat dengan Pemerintah atau sebaliknya.

3.3. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib, Pilihan dan Fungsi Penunjang

3.3.1.1. Kebijakan Level Perangkat Daerah

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas SDM Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas ASN	35%	41.77%	119.4%
2	Meningkatkan kualitas manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	287 Skor	295	102.7%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik	4.49 Skor	4.69	104.4%
4	Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian	IKM	87.2 Skor	87.22	100.02%

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,43	3,60	104%
2	Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam nilai - nilai persatuan dan kesatuan	Persentase pembinaan terhadap ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%
		Persentase penanganan konflik sosial	100%	100%	100%
3	Meningkatnya partisipasi partai politik dan Orkemas dalam pembangunan daerah	Persentase partai politik pemenang Pemilu yang lolos Verifikasi	100%	100%	100%
		Jumlah Orkemas baru yang berbadan hukum	100%	100%	100%
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kerukunan beragama, kehidupan sosial dan budaya	Persentase pencegahan konflik keagamaan, kehidupan sosial dan budaya	100%	100%	100%

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Optimal	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi asersi audit	100%	100%	100%
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,78	109%

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.75 Indeks	85.87 Indeks	100.14%
2	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.20 Indeks	92.31 Indeks	102.34%
3	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indkes Ketahanan Daerah	0.40 Indkes	0,51 Indeks	127,5%

5. Badan Pendapatan Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak	2%	11,59%	579,5%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.5 Indeks	4.5 Indeks	100%

6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai Pelayanan Publik	3.6 Skor	3.6 Skor	100%
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	3.6 Skor	3.6 Skor	100%
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan	Persentase Kinerja Program yang Mencapai Target	58 Skor	58 Skor	100%

7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.19 Indeks	3.19 Indeks	100%
2	Meningkatnya pelestarian kekayaan serta keragaman nilai budaya	Persentase seni budaya tradisional yang dilestarikan	100%	100%	100%
		Prosentase Cagar Budaya dan WBTB yang dilestarikan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan	Prosentase pemuda yang mendapatkan penghargaan	100%	100%	100%
4	Meningkatnya wisatawan Kota Madiun	Lama tinggal hunian hotel	1,1 hari	1,4 hari	127.27%

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96.50%	99,13%	102,73%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Pelayanan Publik	4.94 Indeks	5,00 Pelayanan Prima	101,22%

9. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Persentase rumah tangga sehat	71%	72.14%	101.61%
2	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan	persentase rumah sehat	90%	90.02%	100.02%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat	persentase rata-rata upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) berstrata PURI	86.43%	88.20%	102.05%
4	Meningkatnya Pelayanan Lesehatan masyarakat dan kemandirian mensyarakat untuk hidup sehat	indeks keluarga sehat	0.57 Indeks	0.59 Indeks	103.51%
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	92%	92%	100.00%
6	Menengkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan	persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan (ASPAK) Puskesmas	85%	88%	103.53%
7	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan kefarmasian	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standar	78%	79%	101.28%
8	Meningkatnya resposibilitas pelayanan kesehatan	Rata-rata nilai penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	88.11%	97.84%	111.04%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
9	Meningkatnya responsivitas pelayanan kesehatan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun	86.6 Indeks	87.10 Indeks	100.57%
10	Terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat Kota Madiun	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan Kesehatan	100%	101.02%	101.02%
11	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan PP dan KB	4.39 Indeks	4.58 Indeks	104.33%
12	Meningkatnya pengendalian jumlah Penduduk	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	68%	71.0%	104.41%

10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.48 Skor	4.68 Skor	104.4 %
2	Meningkatnya Akses pangan dan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Skor Pola pangan Harapan	95.8 Skor	95 Skor	99.1 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Rasio Pendapatan Pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	1.35 Rasio	1.35 Rasio	100 %
4	Meningkatnya kesejahteraan petani	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	1.16 Rasio	1.2 Rasio	103.4 %
5	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku usaha peternakan	Rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	1.221 Rasio	1.26 Rasio	103.2 %

11. Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	93 Nilai	97.42 Nilai	104.75%
2	Meningkatnya keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	555 Nilai	625 Nilai	112,61%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Tingkat Kematangan statistik sektoral	2.18 Nilai	2.18 Nilai	100%
4	Meingkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.65 Nilai	4.83 Nilai	103.87%
5	Meningkatnya Kualitas Penerapan e-government	Persenttase layanan e-gov yang sudah terintregasi	68.5 %	71.79%	104.80%

12. Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Peningkatan Kualitas Pelayan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.25 Indeks	4.43	136.31 %
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RUmah Tangga	99 %	99.069 %	100.069 %
3		Indeks Kualitas Air (IKA)	51.32 Indeks	52.14	101.59 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83.26 Indeks	92.12	110,64 %
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	22.42 Indeks	24.18	107,85 %

13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.94 Indeks	4.20 indeks	106,5%
2.	Meningkatkan Ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase Ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai RTRW	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatkan kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100 %	100 %
4.	Meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	80.12 %	81.03 %	101.1%
		persentase kawasan rawan banjir/genangan	17.34 %	17.17 %	100.9 %
5.	Meningkatkan aksesibilitas kota dalam kondisi mantab	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	95.70 %	96.01 %	100.3 %

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Skor	92,66 Skor	104%
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik	4.50 Skor	4,92 Skor	109%
3	Meningkatnya iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	40 Persen	42.86 Persen	107%

15. Dinas Pendidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.85 Indeks	4.85 indeks	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	Persentase APM Paud, SD dan SMP	100 %	107,28%	107,28%

16. Dinas Perdagangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya standarisasi dan Perlindungan konsumen	Persentase takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	100 %	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	Persentase pasar rakyat yang berfungsi dengan baik	100 %	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.96 Indeks	4,5 Indeks	113,6%
4	Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	4.23 %	4,36%	103,07%

17. Dinas Perhubungan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.59 Indeks	4.78 Indeks	104%
2	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Kinerja Angkutan Umum	70 %	70%	100%
		Kecapatan Lalu Lintas	41 km/jam	41 km/jam	100%

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.00 Indeks	4.68 Indeks	117%
2.	Terwujudnya Peningkatan Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	9.10 Indeks	18.67 Indeks	205%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3.	Terwujudnya Peningkatan Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Persentase Perangkat Daerah yang tertib Arsip	9 %	18%	200%

19.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.15 Indeks	4.31 Indeks	103,86%
2	Meningkatnya lingkungan Permukiman yang sehat	Indeks Perumahan Permukiman	99,90 %	99.90 %	100%
		Indeks Pengelolaan PSU RTH, PJU dan Pemakaman	82.76 %	98 %	118,41%

20. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.82 Indeks	4.92 Indeks	102,7%
2	Meningkatnya tata Kelola Pengarusutamaan Gender	Persentase Keluarga yang Berkualitas	80 %	86,67%	108,3%
		Persentase Perempuan sebagai Pengambil Keputusan	25.01 %	31,27%	125,02%
3	Meningkatnya Penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak	Prevelensi kekerasan terhadap anak	0.002 Skor/Nilai	0.002 Skor/Nilai	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5	Meningkatnya Perlindungan dan jaminan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	95 %	96,21%	101,2%
6	Meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi Sosial	100 %	100 %	100 %
7	Meningkatnya Pemeberdayaan Sosial PSKS	Persentase PSKS yang diberdayakan	92 %	100 %	108,69%

21. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.11	4.75	115.57%
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Prosentase penyerapan Tenaga Kerja	50 %	91.90%	183.80%
3	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Prosentase koperasi berkualitas	71 %	88.57%	124.75%
4	Meningkatnya kapasitas Produksi IKM	Prosentase IKM yang bertambah Kapasitas Produksinya	8 %	22.02%	275.23%
5	Meningkatnya Omzet usaha mikro	Prosentase usaha mikro yang beromzet naik	3 %	5.92%	197.25%
6	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja	Prosentase tenaga kerja yang terlindungi	75 %	84.45%	112.60%

22. Inspektorat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	3 Level	3 Level	100%
2.	Meningkatkan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3 Level	3 Level	100%

23. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.25 % Nilai	4,60	108%
2	Meningkatnya penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan peraturan Perundang-undangan daerah dan Peraturan Walikota serta Peraturan Perundang-undangan lainnya	Persentase Masyarakat yang taat perda dan perwal	98 %	99%	101%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3	Meningkatnya Kesiagaan pengendalian bahaya kebakaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat	Persentase tingkat penanganan kejadian kebakaran	100 %	100%	100%

24. Sekretariat DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks	90,93 Indeks	105,73%

25. Kecamatan Kartoharjo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82.77 Nilai	82,84 Nilai	100,08%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kartoharjo	88.67 Indeks	92,62 Indeks	104,45%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100%	100%	100%

26. Kecamatan Manguharjo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kelurahan dan Kecamatan	Nilai SAKIP OPD	83.35 Nilai	83,66 Nilai	100,37%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	92.45 Nilai	92,71 Nilai	100,28%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Manguharjo	Persentase jumlah kelurahan yang terklasifikasi swasembada	100 %	100%	100%

27. Kecamatan Taman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan Taman	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	82.90 Nilai	83.82 Nilai	101.1 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.70 Nilai	89.72 Nilai	100.02 %
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Taman	Prosentase jumlah Kelurahan yang Terklasifikasi Swasembada	100 %	100 %	100 %

28. Bagian Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya kepuasan pelayanan publik Bagian Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Hukum	85.75 Indeks	87,44	101,97%
2.	Meningkatnya kualitas koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	Nilai variabel tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	22.5 Nilai	22,6	104,45%
3.	Meningkatnya kualitas penataan database peraturan perundang-undangan	Nilai variabel penataan database peraturan perundang-undangan	17 Nilai	17	100%
4.	Meningkatnya kualitas evaluasi kemanfaatan kebijakan	Nilai instrumen evaluasi kemanfaatan kebijakan	22.5 %	22,45	99,78%
5.	Meningkatnya kualitas perencanaan kebijakan	Nilai instrumen perencanaan kebijakan	27.5 %	27,55	100,18%

29. Bagian Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya budaya kerja ASN	Hasil survei internalisasi budaya ASN BerAKHLAK	70.8 Indeks	79.0 Indeks	111,58%
2.	Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan	Nilai Rata-Rata Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	85 Nilai	85.88 Nilai	101%
3.	Meningkatnya kepuasan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Organisasi	87.4 Indeks	91.20 Indeks	104.34%
		Persentase perangkat daerah yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya minimal 85	83 %	85.71%	103%
4.	Meningkatnya kinerja penyelenggara pelayanan publik	Persentase perangkat daerah yang Indeks Pelayanan Publik minimal baik	90 %	95.16%	106%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5.	Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan	Persentase Hasil evaluasi kelembagaan yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%
6.	Terlaksananya restrukturisasi organisasi	Persentase kelembagaan berbasis ABK	100 %	100%	100%
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Organisasi	Nilai SAKIP Bagian Organisasi	88.01 Skor	88.08 Skor	100.07%
8.	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP komponen pengukurannya meningkat	30 %	33.33%	111%
9.	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP komponen pelaporannya meningkat	36.36 %	39.39%	108%

30. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	86 Indeks	89,35 Indeks	103,89%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Terfasilitasinya Laporan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa	100 persen	100 persen	100%
		Terfasilitasinya Laporan Pengembangan Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	100 persen	100 persen	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	85,01 Nilai	85,69 Nilai	100,79%

31. Bagian Pemerintahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Rerata Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rerata Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	115,06 Persen	121,11%
2	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat Bagian Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Pemerintahan	85,50 skor	91,53 skor	107,05%
		Persentase Kecamatan Yang Tertib Administrasi	100 persen	100 persen	100%
		Persentase Kerja Sama Daerah yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan	100 persen	100 persen	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Pemerintahan	Nilai SAKIP Bagian Pemerintahan	84 skor	84,52 skor	100,61%

32. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Perekokesra	Nilai SAKIP Bagian Perekokesra	83.00 Skor	83,74	100,89%
2	Meningkatnya kepuasan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat Bagian prekokesra	86.00 Indeks	83,73	97,37%

33. Bagian Umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan publik bagian umum	Nilai IKM Bagian Umum	88.05 Indeks	86,55 indeks	98,3%
2	Meningkatnya kinerja penyelenggara pelayanan publik sekretariat daerah	Nilai IPP Sekretariat Daerah	4.74 Skor	4,79 skor	101,1%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja bagian Umum	Nilai SAKIP Bagian Umum	85.50 Skor	85,69 skor	100,2%

3.3.1.2. Capaian Kinerja Program Kegiatan

1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	KEPEGAWAIAN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7.160.067.100	A Skor	6.824.427.339
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen Penganggaran dan Evaluasi	100 persen	9.400.000	100 persen	8.831.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	9.400.000	6 Laporan	8.831.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	5.875.667.000	100 %	5.609.887.086
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5.875.667.000	45 Orang/bulan	5.609.887.086
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	365.000.000	100 %	364.225.127
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	365.000.000	100 Laporan	364.225.127
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD	100 %	165.000.000	100 %	152.582.258
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	165.000.000	12 Unit	152.582.258
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	455.000.100	100 %	423.095.916
5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	455.000.100	12 Laporan	423.095.916

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah	100 %	290.000.000	100 %	265.805.952
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	30.000.000	18 Unit	26.674.316
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	220.000.000	2 Unit	210.457.336
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	40.000.000	8 Unit	28.674.300
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	87,2	2.549.288.376	87,22	2.184.918.667
8	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	100 %	1.056.657.200	100 %	917.052.744
8	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 Laporan	862.297.200	2 Laporan	741.084.550
9	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	160 Dokumen	89.360.000	176 Dokumen	83.320.980
10	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1000 Dokumen	105.000.000	1981 Dokumen	92.647.214
9	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100 %	304.009.176	100 %	190.371.000
11	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	702 Dokumen	211.366.200	547 Dokumen	98.915.000
12	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	455 Dokumen	92.642.976	363 Dokumen	91.456.000
10	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	100 %	850.840.000	100 %	762.839.423

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
13	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	110 Dokumen	850.840.000	605 Dokumen	762.839.423
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Realisasi Evaluasi Kinerja	100 %	337.782.000	100 %	314.655.500
14	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	11.944.000
15	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1429 Orang	22.410.000	1447 Dokumen	19.055.000
16	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang	295.372.000	324 orang	283.656.500
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.729.384.178		1.704.674.463
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	13 %	1.729.384.178	13%	1.704.674.463
12	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi Teknis	85 %	941.446.378	100%	928.893.193
17	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	277 Orang	941.446.378	618 Orang	928.893.193
13	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mengikuti Syarat Kompetensi Jabatannya	80 %	787.937.800	90%	775.781.270
18	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	77 Laporan	787.937.800	113 Laporan	775.781.270

2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	81 nilai	4.963.057.128	81 nilai	4.659.189.986
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	100 %	45.600.000	100 %	45.200.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	0	10 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	45.600.000	1 Laporan	45.200.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.982.644.926	100 %	3.693.612.799
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	3.982.644.926	21 Orang/bulan	3.693.612.799
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0	100 %	0
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	0	28 Orang	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	775.659.436	100 %	768.715.187
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	525.659.436	1 Paket	522.564.327
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	250.000.000	80 Laporan	246.150.860
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	100 %	1.000.000	100 %	0

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	500.000	3 Unit	0
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	500.000	5 Unit	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	158.152.766	100 %	151.662.000
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 mbl, 13 spd motor Unit	40.566.560	1 mbl, 13 spd motor Unit	34.826.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	77.586.206	1 Unit	76.837.000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	40.000.000	14 Unit	39.999.000
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			37.049.289.196		31.189.030.958
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			37.049.289.196		31.189.030.958
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	1.378.091.188	100 %	1.254.009.595
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah jenis kegiatan	7 jenis	1.378.091.188	7 jenis	1.254.009.595
12	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	125 Orang	493.164.890	125 Orang	419.063.695

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
13	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	884.926.298	2 Dokumen	834.945.900
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik kepada partai politik pemenang pemilu	100 %	18.375.563.500	100 %	18.024.000.563
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	80 %	18.375.563.500	80 %	18.024.000.563
14	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33 Orang	955.563.500	33 Orang	949.894.600
15	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	125 Orang	10.000.000	125 Orang	9.924.288

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
16	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	17.410.000.000	1 Laporan	17.064.181.675
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase status kelembagaan Orkemas	68 %	2.809.600.000	68 %	2.808.141.200
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tingkat keaktifan orkemas	75 %	2.809.600.000	75 %	2.808.141.200
17	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 Orang	2.809.600.000	75 Orang	2.808.141.200
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	2.960.086.980	100 %	2.858.409.010
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	4 kali	2.960.086.980	4 kali	2.858.409.010
18	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	100 Orang	45.294.400	100 Orang	41.979.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
19	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	2.914.792.580	400 Orang	2.816.430.010
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang terfasilitasi	100 %	6.562.890.400	100 %	6.244.470.590
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	0 konflik	6.562.890.400	0 konflik	6.244.470.590
20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	6.112.890.400	100 Orang	5.864.032.630
21	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	450.000.000	12 Dokumen	380.437.960

3. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	KEUANGAN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	52.170.437.931	A Skor	41.301.349.325
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.000.000	8 Dokumen	911.800
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.000.000	8 Laporan	911.800
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	29.082.529.931	100 %	20.065.120.547
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	29.082.529.931	36 Orang/bulan	20.065.120.547
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	600.000.000	100 %	559.635.854
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	600.000.000	113 Laporan	559.635.854
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan BMD Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	266.000.000	100 %	263.585.000
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	266.000.000	32 Unit	263.585.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	21.908.158.000	100 %	20.141.311.987
5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.908.158.000	12 Laporan	20.141.311.987

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	100 %	293.000.000	100 %	270.784.137
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	110.000.000	37 Unit	108.514.094
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	1 Unit	72.288.093
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	108.000.000	16 Unit	89.981.950
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	4.844.623.000	100 %	2.507.257.066
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	100 %	1.126.814.000	100 %	1.053.723.483
8	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	83.421.000	2 Dokumen	77.033.800
9	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	56.819.000	2 Dokumen	33.583.300
10	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	16.876.000	28 Dokumen	16.561.844
11	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	23.640.000	28 Dokumen	23.639.165
12	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	113.677.400	2 Dokumen	108.175.010
13	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	195.680.600	2 Dokumen	192.709.400
14	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	636.700.000	4 Dokumen	602.020.964

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	100 %	55.050.000	100 %	49.960.000
15	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	47 Dokumen	49.950.000	47 Dokumen	44.860.000
16	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	3 Dokumen	5.100.000	3 Dokumen	5.100.000
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Permintaan Laporan Keuangan yang Terfasilitasi	100 %	1.162.759.000	100 %	1.129.684.500
17	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	140.000.000	2 Laporan	136.905.000
18	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	66.000.000	2 Dokumen	57.420.000
19	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	90.000.000	4 Dokumen	89.752.000
20	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	866.759.000	732 Orang	845.607.500
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan BTT yang tersusun	100 %	2.500.000.000	100 %	273.889.083
21	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	2.500.000.000	12 Laporan	273.889.083
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang berkategori baik	100%	2.111.148.000	100 %	1.819.125.920
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	22 Laporan	2.111.148.000	22 Laporan	1.819.125.920

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
22	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	405.267.000	2 Laporan	243.695.848
23	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.666.281.000	2 Laporan	1.539.590.072
24	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	18 Laporan	39.600.000	18 Laporan	35.840.000

4. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	1.375.265.000	100 %	1.300.711.093
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	26.948.000	1	26.237.500
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	26.948.000	100 Orang	26.237.500
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.134.461.000	1	1.133.740.593
2	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	9 Kawasan	27.484.000	10 Kawasan	27.474.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
3	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	37 Orang	889.410.000	37 Orang	889.410.000
4	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	48.000.000	1 Dokumen	48.000.000
5	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300 Orang	42.204.000	300 Orang	41.919.500
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	9.542.000	5 Unit	9.542.000
7	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Kawasan	117.821.000	100 Kawasan	117.395.093
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	93.410.000	100 %	93.065.000
8	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 Orang	83.460.000	826 Orang	83.145.000
9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Orang	9.950.000	873 Orang	9.920.000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	120.446.000	100 %	47.668.000
10	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	120.446.000	1 dok	47.668.000
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 Skor	2.820.671.806	85.87	2.766.456.341

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	1.381.000	100 %	1.072.000
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.381.000	6 Laporan	1.072.000
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	1.710.324.806	100 %	1.699.080.829
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.710.324.806	10 Orang/bulan	1.699.080.829
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	200.000.000	100 %	194.746.927
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	194.746.927
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	75.945.000	100 %	65.200.000
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	75.945.000	3 Unit	65.200.000
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	413.773.000	100 %	400.602.275
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	413.773.000	12 Laporan	400.602.275
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	413.773.000	100 %	405.754.310
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	249.868.000	8 Unit	237.789.810
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	152.850.000	1 Unit	151.507.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	16.530.000	5 Unit	16.457.500

5. BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	10.033.832.087	A skor	9.090.371.380
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Bapenda	100 %	2.000.000	100 %	1.943.320
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.000.000	8 Laporan	1.943.320
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	8.808.201.126	100 %	7.931.215.292
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	8.808.201.126	33 Orang/bulan	7.931.215.292
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100.000.000	100 %	99.860.623
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	100.000.000	30 Laporan	99.860.623
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Air Conditioner (AC) Kantor TV Touchsecrin dan Laptop yang disediakan	100 %	223.908.250	100 %	214.171.270
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	91.575.000	4 Unit	83.700.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	132.333.250	13 Unit	130.471.270
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	671.556.211	100 %	624.812.710
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	671.556.211	2 Laporan	624.812.710
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100 %	228.166.500	100 %	218.368.165
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	53.166.500	30 Unit	52.523.100
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.000.000	1 Unit	124.505.065
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	1 Unit	41.340.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	1.565.796.600	10 %	1.518.668.975
7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100 %	1.565.796.600	100 %	1.518.668.975
10	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	69.800.000	2 Dokumen	61.285.900
11	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	475.567.600	4 Laporan	470.239.700
12	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	238.246.000	1 Laporan	232.927.850
13	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	198.241.450

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
14	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	4651 Obyek Pajak	107.583.500	4651 Obyek Pajak	102.375.450
15	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	58615 Dokumen	40.000.000	58615 Dokumen	38.686.225
16	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	18923 Layanan	12.487.500	18923 Layanan	12.450.000
17	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Dokumen	352.100.000	4 Dokumen	332.732.000
18	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	60.012.000	3 Dokumen	59.733.300
19	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	9.997.100

6. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PERENCANAAN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	7.730.776.193	83 Nilai	6.211.322.470
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	173.725.400	100 persen	172.337.921
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	142.489.200	7 Dokumen	141.180.921
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	11.050.600	12 Laporan	11.033.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.185.600	2 Laporan	20.124.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	5.437.886.450	100 persen	4.599.088.416
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	5.395.846.450	27 Orang/bulan	4.557.356.082
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	42.040.000	12 Laporan	41.732.334
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 persen	196.427.692	100 persen	170.826.960
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	105.098.312	31 Orang	100.164.820

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67 Orang	91.329.380	67 Orang	70.662.140
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	455.934.000	100 persen	453.172.139
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	455.934.000	1 Laporan	453.172.139
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 persen	281.289.180	100 persen	280.185.000
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	281.289.180	15 Unit	280.185.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 persen	840.178.546	100 persen	196.978.826
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	840.178.546	1 Laporan	196.978.826
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 persen	345.334.925	100 persen	338.733.208
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	118.769.200	33 Unit	115.585.637
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	151.244.160	1 Unit	148.049.571
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.321.565	1 Unit	75.098.000
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100 %	2.026.300.083	100 %	1.980.820.021
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	100 persen	1.696.601.343	100 persen	1.675.533.171

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
14	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	149.095.000	2 Berita Acara	149.081.000
15	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	152.702.835	1 Berita Acara	152.369.350
16	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	377.743.786	2 Berita Acara	363.655.460
17	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	1.017.059.722	4 Dokumen	1.010.427.361
9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi sesuai ketentuan	100 persen	329.698.740	100 persen	305.286.850
18	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	109.800.240	2 Laporan	105.877.500
19	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	219.898.500	4 Laporan	199.409.350
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100 persen	1.810.266.216	100 persen	1.764.748.432
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	100 persen	1.030.913.400	100 persen	996.623.612
20	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	100.970.000	1 Dokumen	99.815.700
21	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	206.150.000	1 Laporan	195.754.100
22	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1 Dokumen	717.374.900	1 Dokumen	694.689.612

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				
23	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26 Laporan	6.418.500	26 Laporan	6.364.200
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	100 persen	308.115.816	100 persen	306.295.800
24	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	201.750.000	1 Dokumen	201.117.050
25	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	106.365.816	1 Laporan	105.178.750
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	100 persen	471.237.000	100 persen	461.829.020
26	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	350.720.000	4 Dokumen	342.381.100
27	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	82.854.000	1 Laporan	82.080.620
28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir	1 Dokumen	24.034.000	1 Dokumen	24.006.500

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
29	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	13.629.000	6 Laporan	13.360.800
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.681.866.000		
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100 persen	1.681.866.000	100 persen	1.604.308.049
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	100 persen	1.421.122.000	100 persen	1.360.129.866
30	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1.256.883.000	1 Laporan	1.229.694.590
31	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	164.239.000	1 Laporan	130.435.276
14	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah	100 persen	260.744.000	100 persen	244.178.183
32	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	260.744.000	1 Dokumen	244.178.183

7. DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			5.865.938.521		5.819.379.253
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	15 %	100.000.000	72,54%	98.585.100,00
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	31 Orang	100.000.000	176 orang	98.585.100,00
1	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	100 Orang	100.000.000	176 orang	98.585.100,00
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	30 %	5.765.938.521	48,51%	5.720.794.153,11
2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kualitas sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	100 %	3.706.085.000	100,00%	3.688.187.280,11
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	3.706.085.000	3 Unit	3.688.187.280,11
3	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	31 Orang	699.853.521	176 orang	687.556.873,00
3	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	699.853.521	3 Dokumen	687.556.873,00

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	31 Orang	1.000.000.000	176 orang	987.400.000,00
4	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	1.000.000.000	1 Organisasi	987.400.000,00
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	31 Orang	360.000.000	176 orang	357.650.000,00
5	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	360.000.000	3 Dokumen	357.650.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.664.300.000		2.625.192.381,00
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	100 %	2.334.535.000	266 %	2.297.600.290,00
6	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	44 Orang	2.334.535.000	236 orang	2.297.600.290,00
6	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1.912.700.000	10 Objek	1.876.221.860,00
7	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 orang	421.835.000	225 orang	421.378.430,00
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina	100 %	50.000.000	266 %	49.413.000,00
7	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni budaya yang dibina	3 Jenis	50.000.000	8 jenis	49.413.000,00

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
8	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	44 Orang	50.000.000	236 orang	49.413.000,00
V	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda/ bangunan cagar budaya yang dilestarikan	100 %	279.765.000	100 %	278.179.091,00
8	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	20 Obyek	279.765.000	20 Obyek	278.179.091,00
9	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	20 Objek	279.765.000	20 Objek	278.179.091,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.131.500.000		1.125.020.582,00
VI	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	30 %	248.000.000	40 %	247.727.326,00
9	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	25 lokasi	248.000.000	35 Lokasi	247.727.326,00
10	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	12 Lokasi	50.000.000	16 Lokasi	49.930.020,00
11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	198.000.000	16 Laporan	197.797.306,00
VII	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	20 %	605.500.000	40 %	600.563.056,00
10	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	25 Lokasi	605.500.000	35 Lokasi	600.563.056,00

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
12	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 event	605.500.000	13 event	600.563.056,00
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	20 %	278.000.000	66,6 %	276.730.200,00
11	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	20 %	278.000.000	66,6 %	276.730.200,00
13	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	24 Orang	278.000.000	40 orang	276.730.200,00
IX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi implementasi sakip perangkat daerah	A scor	6.928.772.010	A scor	6.552.648.235,00
12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	30.000.000	100 %	29.958.810,00
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	30.000.000	6 Laporan	29.958.810,00
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	4.570.472.907	100 %	4.201.189.804,00
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	4.570.472.907	25 Orang/bulan	4.201.189.804,00
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0		0,00
16	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	1 Paket	0,00
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	199.905.000	100 %	199.904.505,00

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	199.905.000	12 Laporan	199.904.505,00
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	20.000.000	100 %	19.386.000,00
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	1 Unit	19.386.000,00
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	1.965.317.103	100 %	1.960.704.660,00
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.965.317.103	1 Laporan	1.960.704.660,00
18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	143.077.000	100 %	141.504.456,00
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	53.077.000	30 Unit	53.064.456,00
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	1 Unit	49.460.000,00
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	1 Unit	38.980.000,00

8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	85 %	87.604.025	98,10%	87.580.000,00
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	100 %	87.604.025	100%	87.580.000,00
1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	73.068.025	12 Laporan	73.044.000,00
2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Dokumen	14.536.000	12 Dokumen	14.536.000,00
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	12 Laporan	0		
3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	0		
II	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan dokumen akta pencatatan sipil	94,75 %	113.993.195	99,43%	111.889.300,00
3	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	100 %	113.993.195	100%	111.889.300,00
4	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4.200 Dokumen	90.124.100	7.048 Dokumen	89.215.000,00
5	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4 Layanan	23.869.095	4 Layanan	22.674.300,00
4	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	12 laporan	0		
6	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di	12 Laporan	0		

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				
III	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi database kependudukan	99.20 %	133.291.513	99,62%	133.106.000,00
5	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemenuhan permintaan data kependudukan	100 %	133.291.513	100%	133.106.000,00
7	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	97.345.845	2 Dokumen	97.177.000,00
8	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	34 Dokumen	35.945.668	34 Dokumen	35.929.000,00
6	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	0		
9	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	0		
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	84,35 Nilai	7.861.679.054	85,61 A	7.724.979.223,00
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	98.654.773	100%	97.092.800,00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	22.036.100	12 Laporan	21.645.100,00
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	76.618.673	12 Laporan	75.447.700,00
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	4.619.298.114	100%	4.528.698.378,00

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4.619.298.114	29 Orang/bulan	4.450.908.378,00
13	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	77.790.000	12 Dokumen	77.790.000,00
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	0		
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	148 Orang	0		
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	0		
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	1.112.514.045,00	100%	1.106.852.390,00
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	762.020.068	12 Paket	757.385.857,00
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	42.189.350	12 Paket	41.725.500,00
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	36.537.563	12 Paket	36.143.719,00
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	271.767.064	12 Laporan	271.597.314,00
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	771.312.382	100%	770.838.500,00
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	771.312.382	41 unit	770.838.500,00

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	681.815.450	100%	657.224.285,00
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	681.815.450	12 Laporan	657.224.285,00
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	578.084.290	100 %	564.272.870,00
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	39.086.000	18 Unit	36.733.800,00
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	41.753.160	3 Unit	33.793.100,00
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5.115.200	2 Unit	2.425.890,00
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	353.947.530	1 Unit	353.235.280,00
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	138.182.400	75 Unit	138.084.800

9. DINAS KESEHATAN

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			107.440.948.232		101.623.032.613
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan Mencapai Target	83,30%	45.759.962.120	100%	42.634.442.017
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan mencapai Target	90,22%	6.772.574.335	90,32%	6.223.578.470
1	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	240.000.000	6 Unit	186.936.000
2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	15 Unit	220.326.000	15 Unit	213.144.320
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0	0		
4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	1.327.083.000	30 Unit	1.186.809.400
5	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	0	0		
6	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	432 Unit	297.792.042	432 Unit	260.734.638
7	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	20 Paket	4.644.460.593	20 Paket	4.333.042.812

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
8	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	42.912.700	12 Paket	42.911.300
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar mencapai Target	83,30%	38.987.387.785	100%	36.410.863.547
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2430 Orang	301.863.700	2867 Orang	294.949.700
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2319 Orang	13.936.800	2851 Orang	13.648.600
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2209 Orang	109.723.000	2719 Orang	98.411.500
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9023 Orang	535.214.200	10684 Orang	528.658.730
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0		
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88785 Orang	48.466.000	140124 Orang	48.466.000
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0		
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0		
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10755 Orang	196.537.500	11012 Orang	187.647.000
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	383 orang	14.400.000	403 Orang	14.400.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4618 Orang	813.394.600	6684 Orang	803.559.650
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6240 Orang	105.700.000	7482 Orang	99.300.000
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	194.174.800	2 Dokumen	187.680.400
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	139.609.068	3 Dokumen	35.658.000
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	210.075.200	5 Dokumen	210.038.900
24	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	154.252.800	1 Dokumen	145.188.655
25	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	30.083.400	1 Dokumen	30.083.400
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 orang	27.616.200	240 Orang	26.073.800
27	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1.269.019.400	1 Dokumen	1.063.345.059
28	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36 Dokumen	32.495.324.800	36 Dokumen	30.385.679.670
29	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	18 Paket	29.686.000	31 Paket	14.513.100
30	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dokumen	402.506.900	9 Dokumen	341.916.500
31	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Dokumen	1.117.659.017	7 Dokumen	1.107.032.483
32	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0	0		

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
33	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	1.500.000
34	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	670.680.000	1 unit	668.014.000
35	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0		
36	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	500 Orang	14.400.000	536 Orang	14.400.000
37	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	11.402.800	14 Orang	10.930.400
38	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	80.161.600	2 Dokumen	79.768.000
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang Sesuai Standar	92%	442.559.000	96%	422.832.500
3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	69.282.000	100%	68.820.000
39	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6 Dokumen	69.282.000	6 Dokumen	68.820.000
4	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	92%	373.277.000	92%	354.012.500
40	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	50 Orang	373.277.000	50 Orang	354.012.500

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				
III	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	91 %	305.327.000	91%	274.710.600
5	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	89 %	63.786.000	91%	60.488.800
41	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	63.786.000	1 Dokumen	60.488.800
6	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)	89 %	241.541.000	91%	214.221.800
42	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 Dokumen	241.541.000	3 Dokumen	214.221.800
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	86,43%	3.888.168.800	88,20%	3.819.996.329
7	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,	100%	262.749.600	100%	

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor				
43	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	262.749.600	1 Dokumen	244.502.549
8	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri Persentase Posbindu PTM berstrata puri Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri Persentase Poskestren berstrata puri Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri Persentase Posyandu Balita berstrata puri Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	92,59% 63.04% 100% 73,33% 62,5% 100% 100%	3.625.419.200	100% 63.5% 100% 73.33% 68.75% 100% 100%	3.575.493.780
44	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	3.625.419.200	1 Dokumen	3.575.493.780
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85	57.044.931.312	88,57	54.471.051.167
9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	100%	275.390.950	100%	273.254.200
45	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	74.362.600	8 Dokumen	72.788.600
45	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	184.565.600	3 Laporan	184.565.600

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
46	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	16.462.750	5 Laporan	15.900.000
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100%	53.903.223.077	100%	51.644.990.291
47	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	486 Orang/bulan	53.903.223.077	483 Orang/bulan	51.644.990.291
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.830.080.285	115,86%	1.708.359.816
48	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.280.080.285	1 Paket	1.169.263.430
49	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	550.000.000	191 Laporan	539.096.386
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	355.306.000	100%	338.218.500
50	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	126.417.000	15 Unit	112.200.000
51	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	228.889.000	12 Unit	226.018.500
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	680.931.000	100,63%	506.228.360
52	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80 Unit	389.312.000	81 Unit	269.233.536
53	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.745.600	1 Unit	71.908.381
54	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	280 Unit	215.873.400	280 Unit	165.086.443

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Rumah Sakit Umum Daerah			141.623.217.899		139.652.676.446
VI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan Mencapai Target	83,33%	13.953.886.279	100%	13.624.478.288
14	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	90,22%	13.953.886.279	90,32 %	13.624.478.288
55	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	621.878.000	1 Unit	616.806.508
56	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	1.439.374.666	7 Unit	1.257.622.400
57	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	3.767.633.613	1 Unit	3.634.086.240
58	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	8.125.000.000	5 Paket	8.115.963.140
VII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85	127.669.331.620	88,57	126.028.198.158
15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	100%	32.716.129.752	100%	31.550.977.268
59	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	387 Orang/bulan	32.716.129.752	387 Orang/bulan	31.550.977.268

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang	100%	442.400.000	100%	380.800.000
60	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	442.400.000	14 Laporan	380.800.000
17	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%	94.510.801.868	100%	94.096.420.890
61	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	94.510.801.868	1 Unit Kerja	94.096.420.890
	Puskesmas Manguharjo			2.790.584.000		2.677.089.500
VIII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33%	2.790.584.000	100%	2.553.761.500
18	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33%	2.790.553.000	100%	2.553.761.500
62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	10.680.000	506 Orang	10.680.000
63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	412 Orang	51.752.000	505 Orang	50.002.000
64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3298 Orang	20.000.000	1298 Orang	20.000.000
65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang	1.000.000	482 Orang	1.000.000
66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	579.258.000	3 Dokumen	577.896.000
67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.050.000	1 Dokumen	4.050.000
68	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	33.985.000	1 Dokumen	33.636.000
69	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	21.450.000	1 Dokumen	21.450.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
70	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	2.013.055.000	4 Dokumen	1.779.775.100
71	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	7.683.000	1 Dokumen	7.632.400
72	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	2.400.000	12 Laporan	2.400.000
73	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	1.550.000	30 Orang	1.550.000
74	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	250.000	12 Orang	250.000
75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8.160.000	1 Dokumen	8.160.000
76	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	35.280.000	1 Dokumen	35.280.000
19	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	31.000	100%	0
77	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	31.000	1 Dokumen	0
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	86,43%	126.232.000	88,20%	123.328.000
20	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri Persentase Posbindu PTM berstrata puri Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri	92,59% 63,04% 100% 73,33% 62,5%	126.232.000	100% 63,5% 100% 73,33% 68,75%	123.328.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Persentase Poskestren berstrata puri Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri Persentase Posyandu Balita berstrata puri Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	100% 100%		100% 100%	
78	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	126.232.000	1 Dokumen	123.328.000
	Puskesmas Ngegong			2.525.521.000		2.409.233.450
X	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33%	2.394.639.000	100%	2.278.384.350
21	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33%	2.394.629.000	100%	2.255.809.350
79	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang	10.120.000	348 Orang	10.120.000
80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	270 Orang	68.450.000	345 Orang	68.450.000
81	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7905 Orang	20.400.000	7905 Orang	20.400.000
82	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	232 Orang	3.500.000	257 Orang	3.500.000
83	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2135 Orang	5.000.000	2405 Orang	5.000.000
84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	520.433.000	3 Dokumen	512.129.300
85	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
86	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	46.760.000	2 Dokumen	46.310.000
87	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	18.650.000	1 Dokumen	18.600.000
88	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.663.606.000	4 Dokumen	1.556.378.850
89	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	7.675.000	1 Dokumen	7.661.200
90	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	250.000	1 Laporan	100.000
91	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32 Orang	800.000	34 Orang	800.000
92	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	50.000	2 Orang	0
93	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3.360.000	1 Dokumen	3.360.000
94	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	22.575.000	1 Dokumen	22.575.000
22	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	10.000	100%	
95	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	10.000	1 Dokumen	0
XI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	86,43%	130.882.000	88,20%	130.849.100

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
23	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri 63.04% Persentase Posbindu PTM berstrata puri 100% 73,33% Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri 62,5% 100% Persentase Poskestren berstrata puri 100% Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri Persentase Posyandu Balita berstrata puri Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	92,59% 63.04% 100% 73,33% 62,5% 100% 100%	130.882.000	100% 63.5% 100% 73.33% 68.75% 100% 100%	130.849.100
96	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	130.882.000	1 Dokumen	130.849.100
	Puskesmas Sukosari			2.778.153.000		2.633.655.293
XII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33 %	2.647.201.000	100%	2.503.960.093
24	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33 %	2.647.189.000	100%	2.491.160.093
97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	412 orang	13.350.000	484 Orang	13.350.000
98	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	407 orang	66.945.000	481 Orang	66.945.000
99	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2656 orang	8.750.000	2660 Orang	8.750.000
100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 orang	1.200.000	312 Orang	1.200.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
101	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	455 orang	4.000.000	507 Orang	4.000.000
102	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	661.968.600	3 Dokumen	659.211.200
103	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.300.000	1 Dokumen	5.300.000
104	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 dokumen	53.436.200	2 dokumen	53.053.000
105	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	17.900.000	1 Dokumen	17.900.000
106	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.783.593.000	4 Dokumen	1.643.552.993
107	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	7.677.000	1 Dokumen	7.632.400
108	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000
109	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 orang	600.000	33 Orang	600.000
110	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 orang	1.200.000	11 Orang	1.200.000
111	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8.219.200	1 Dokumen	8.215.500
112	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	12.800.000	1 Dokumen	12.800.000
25	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	12.000	100%	0

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
113	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	12.000	1 Dokumen	0
XIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	86,43%	130.952.000	88,20%	129.695.200
26	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri 63,04% Persentase Posbindu PTM berstrata puri 100% 73,33% Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri 62,5% 100% Persentase Poskestren berstrata puri 100% Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri 100% Persentase Posyandu Balita berstrata puri 100% Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	92,59% 63,04% 100% 73,33% 62,5% 100% 100% 100% 100%	130.952.000	100% 63,5% 100% 73,33% 68,75% 100% 100%	129.695.200
114	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	130.952.000	1 Dokumen	129.695.200
	Puskesmas Tawangrejo			2.647.729.000		2.481.697.363
XIV	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33 %	2.520.959.000	100%	2.354.931.363
27	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33 %	2.520.935.000	100%	2.354.931.363
115	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang	35.046.000	348 Orang	34.992.000
116	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286 Orang	36.638.000	346 Orang	36.610.400

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
117	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2049 Orang	13.200.000	2051 Orang	13.200.000
118	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	114 Orang	400.000	172 Orang	400.000
119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	342 Orang	2.000.000	440 Orang	2.000.000
120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	504.863.600	3 Dokumen	504.344.800
121	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.100.000	1 Dokumen	5.100.000
122	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	36.799.000	2 Dokumen	36.272.000
123	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	21.800.000	1 Dokumen	21.050.000
124	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.826.613.000	4 Dokumen	1.662.555.163
125	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	150.000
126	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	400.000	9 Orang	400.000
127	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	400.000	10 Orang	400.000
128	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1.917.400	1 Dokumen	1.899.000
129	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	35.558.000	1 Dokumen	35.558.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
28	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	24.000	100%	0
130	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	24.000	1 Dokumen	0
XV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	86,43%	126.770.000	88,20%	126.766.000
29	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri 63.04% Persentase Posbindu PTM berstrata puri 100% 73,33% Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri 62,5% 100% Persentase Poskestren berstrata puri 100% Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri Persentase Posyandu Balita berstrata puri Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	92.59% 63.04% 100% 73,33% 62,5% 100% 100% 100%	126.770.000	100% 63.5% 100% 73.33% 68.75% 100% 100%	126.766.000
131	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	126.770.000	1 Dokumen	126.766.000
	Puskesmas Banjarejo			3.505.429.000		3.356.290.679
XVI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33 %	3.375.450.000	100%	3.228.340.079
30	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33 %	3.375.390.200	100%	3.210.320.079
132	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	523 Orang	12.240.000	610 Orang	12.240.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
133	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang	29.584.000	608 Orang	28.284.000
134	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7678 Orang	16.000.000	7878 Orang	15.250.000
135	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	266 Orang	5.750.000	366 Orang	5.750.000
136	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	662 Orang	2.000.000	710 Orang	2.000.000
137	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	900.673.200	3 Dokumen	894.345.500
138	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	2.050.000	1 Dokumen	2.050.000
139	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	70.603.800	2 Dokumen	70.278.400
140	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	32.100.000	1 Dokumen	31.550.000
141	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	2.265.412.200	4 Dokumen	2.129.359.579
142	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	8.147.000	1 Dokumen	7.402.600
143	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	600.000	1 Laporan	600.000
144	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	37 Orang	250.000	37 Orang	250.000
145	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang	1.000.000	43 Orang	100.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
146	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10.860.000	1 Dokumen	10.860.000
147	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	18.120.000	1 Dokumen	18.020.000
31	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	59.800	100%	0
148	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	59.800	1 Dokumen	0
XVII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	86,43%	129.979.000	88,20%	127.950.600
32	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri 63.04% Persentase Posbindu PTM berstrata puri 73,33% Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri 100% Persentase Poskestren berstrata puri 100% Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri Persentase Posyandu Balita berstrata puri Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	92,59% 63.04% 100% 73,33% 62,5% 100% 100%	129.979.000	100% 63.5% 100% 73.33% 68.75% 100% 100%	127.950.600
149	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	129.979.000	1 Dokumen	127.950.600
	Puskesmas Demangan			3.215.701.000		3.031.898.648

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
XVIII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33 %	3.090.216.000	100%	2.910.946.348
33	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33 %	3.090.152.600	100%	2.837.006.348
150	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	483 Orang	11.440.000	584 Orang	11.360.000
151	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	451 Orang	18.208.500	566 Orang	17.558.500
152	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7880 Orang	8.000.000	7880 Orang	8.000.000
153	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang	1.500.000	306 Orang	1.500.000
154	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	509 Orang	11.000.000	791 Orang	11.000.000
155	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	825.477.000	3 Dokumen	824.890.800
156	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.050.000	1 Dokumen	5.050.000
157	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	49.682.500	2 Dokumen	48.382.500
158	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	26.250.000	1 Dokumen	25.850.000
159	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	2.040.944.600	4 Dokumen	1.866.420.348
160	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	8.070.000	1 Dokumen	6.712.200
161	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	1 Laporan	300.000	1 Laporan	300.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
162	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22 orang	1.500.000	34 Orang	1.500.000
163	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 orang	200.000	5 Orang	200.000
164	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8.590.000	1 Dokumen	8.282.000
165	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	73.940.000	1 Dokumen	73.940.000
34	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	63.400	100%	0
166	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	63.400	1 Dokumen	0
XIX	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	86,43%	125.485.000	88,20%	120.952.300
35	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri 63.04% Persentase Posbindu PTM berstrata puri 100% Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri 73,33% Persentase Poskestren berstrata puri 62,5% Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri 100% Persentase Posyandu Balita berstrata puri 100%	92,59% 63.04% 100% 73,33% 62,5% 100% 100%	125.485.000	100% 63.5% 100% 73.33% 68.75% 100% 100%	120.952.300

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Persentase Posyandu Lansia berstrata puri				
167	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	125.485.000	1 Dokumen	120.952.300
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.923.247.000		2.864.086.761
XX	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah SSK Meningkatkan Jumlah KB yang berstandar paripurna	13 SSK 7 Kampung KB	213.907.000	13 SSK 7 Kampung KB	212.849.653
36	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK	0			
168	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0			
37	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data keluarga yang diupdating	100 %	213.907.000	100 %	212.849.653
169	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan	165.361.000	27 Laporan	165.160.500
170	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	27 Dokumen	48.546.000	27 Dokumen	47.689.153
XXI	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmet Need	< 6.74%	1.355.866.000	5,58%	1.339.485.658
38	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Persentase pelaksanaan kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	100%	949.314.000	100%	937.733.100

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
171	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	140.000.000	2 Laporan	139.745.900
172	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Unit			
173	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	364.314.000	12 Laporan	362.938.600
174	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	44.725.500
175	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	149.156.900
176	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	0 Dokumen			

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
178	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	27 Organisasi	250.000.000	27 Organisasi	241.166.200
39	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase kader yang melakukan updating data	100%	82.200.000	100%	82.200.000
179	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	0 Unit			
180	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	150 Orang	82.200.000	150 Orang	82.200.000
40	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka Drop Out	<17.5%	253.402.000	10,42%	248.644.358
181	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27 Laporan	15.300.000	27 Laporan	14.950.000
182	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	661 Orang	221.452.000	661 Orang	217.063.358
183	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Unit			
184	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	16.650.000	4 Laporan	16.631.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
41	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan, IMP dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan Kesertaan ber KB	100 %	70.950.000	100 %	70.908.200
185	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	7 Dokumen	3.707.000	7 Dokumen	3.706.600
186	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 Kampung	67.243.000	7 Kampung	67.201.600
XXII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber- KB	86,16%	1.353.474.000	97,10%	1.311.751.450
42	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	32%	408.474.000	32%	401.651.450
187	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8 Laporan / Dokumen	28.800.000	8 Laporan / Dokumen	28.664.500
188	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	79.674.000	12 Laporan	75.066.950
189	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	32 Unit	300.000.000	32 Unit	297.920.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				
190	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0 Orang			
191	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	0 Orang			
43	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase TPK Kelurahan dalam Mendampingi Keluarga Beresiko Stunting	70%	945.000.000	70%	910.100.000
192	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	450.000.000	10 Laporan	415.100.000
193	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan	495.000.000	10 Laporan	495.000.000

10. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7.530.622.937	A Skor (83.77)	7,125,120,543
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	121.747.000	100%	120,499,900
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	121.747.000	8 Laporan	120,499,900
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	4.759.106.937	100%	4,380,481,641
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	4.759.106.937	27 Orang/bulan	4,380,481,641
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	74.985.800	100%	74,491,500
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	74.985.800	5 Dokumen	74,491,500
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	1.119.177.500	100%	1,111,466,764
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	767.156.500	19 Paket	761,257,650
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.953.000	12 Laporan	55,950,200
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	296.068.000	12 Laporan	294,258,914
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	733.081.500	100%	723,459,150

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	275.785.500	1 Unit	273,528,500
8	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	117.060.000	1 Unit	116,379,900
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	340.236.000	78 Unit	333,550,750
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	722.524.200	100%	714,721,588
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	147.411.100	36 Unit	141,532,214
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	36.022.500	15 Unit	35,888,173
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	490.329.600	4 Unit	488,929,701
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	48.761.000	75 Unit	48,371,500
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	391.234.000	101.4%	384,261,800
7	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama	100 %	226.234.000	100%	222,766,400
14	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	175.609.000	1 Laporan	173,811,300
15	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	17.200.000	2 Laporan	15,540,300

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4 Laporan	33.425.000	4 Laporan	33,414,800
8	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka kecukupan Energi	2000 kkal / kapita	165.000.000	2028 kkal / kapita	161,495,400
17	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	43.700.000	1 Dokumen	40,458,250
18	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	121.300.000	2 Laporan	121,037,150
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	22 %	58.200.000	22%	56,927,600
9	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	1 Dokumen	58.200.000	1 Dokumen	56,927,600
19	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	58.200.000	1 Dokumen	56,927,600
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji	80 %	85.631.000	92.32%	79,964,536
10	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	8 Lokasi	85.631.000	11 Lokasi	79,964,536
20	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	60.656.000	1 Dokumen	55,533,836
21	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokuman	24.975.000	1 Dokuman	24,430,700
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	290 Ton	436.605.000	290.1 Ton	431,218,363
11	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	260 RTP	436.605.000	262 RTP	431,218,363

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		(pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)				
22	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	224.955.000	2 Unit	223,255,242
23	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	155.800.000	6 Unit	152,460,521
24	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	120 Orang	55.850.000	120 Orang	55,502,600
VI	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	89 Ton	70.022.000	96.2 Ton	67,230,200
12	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan / kemitraan usaha / kemudahan akses iptek dan informasi / dan penguatan kelembagaan)	435 Orang	70.022.000	440 Orang	67,230,200
25	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	70.022.000	2 Dokumen	67,230,200
VII	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi makan Ikan	16,5 Kg/Kapita/Tahun	466.054.000	20.46 Kg/Kapita/Tahun	454,924,774
13	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	50 orang	75.000.000	110 orang	73,501,403

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
26	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	75.000.000	110 Unit Usaha	73,501,403
14	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	26 Ton	391.054.000	36 ton	381,423,371
27	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	14 Pelaku Usaha	391.054.000	110 Pelaku Usaha	381,423,371
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			8.007.892.367		
VIII	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektifitas Sarana Pertanian	65 %	2.439.213.000	70%	2,419,250,483
15	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	80 %	2.333.639.000	80%	2,316,123,800
28	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	410.800.000	1 Laporan	399,150,000
29	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1.922.839.000	1 Laporan	1,916,973,800
16	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	75 %	105.574.000	75%	103,126,683
30	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	105.574.000	12 Laporan	103,126,683

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
IX	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.459.043.910	100%	
17	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	100 %	115.188.000	100%	92,163,100
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	114.613.000	1 Laporan	92,163,100
32	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 Dokumen	575.000	0 Dokumen	-
18	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terbangun/rehabilitas/dipelihara	25 %	1.343.855.910	25%	1,306,120,125
33	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	1.925.000	0 Unit	-
34	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	1.296.919.910	2 Unit	1,263,494,425
35	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 Unit	1.925.000	0 Unit	-
36	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	43.086.000	1 Unit	42,625,700
X	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	10 %	407.740.090	15%	403,687,255
19	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	80 %	316.000.090	80%	313,006,305
37	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	316.000.090	4 Laporan	313,006,305

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
20	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan jasa medik veteriner	1 Jenis	0	1 Jenis	-
38	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 Laporan	0	1 Laporan	-
21	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	80 %	91.740.000	100%	90,680,950
39	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	10 Laporan	91.740.000	12 Laporan	90,680,950
XI	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan Aman Bencana Pertanian	76 %	109.800.000	85%	103,461,000
22	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	2000 Ha / Tahun	109.800.000	2454.75 Ha / Tahun	103,461,000
40	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	109.800.000	58.9 Ha	103,461,000
XII	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian	15 %	33.600.000	15%	12,069,100
23	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	2 Jenis	33.600.000	2 Jenis	12,069,100
41	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen	33.600.000	2 Dokumen	12,069,100
XIII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	40 %	3.558.495.367	45%	2,931,825,609
24	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM petani terlatih	400 Orang	3.558.495.367	549 Orang	2,931,825,609
42	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	38 Unit	3.558.495.367	38 Unit	2,931,825,609

11. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			28.244.906.935		27.810.440.636
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Nilai	7.948.661.563	A Nilai	7.560.326.934
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	69.763.400	100 %	66.848.500
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	69.763.400	12 Laporan	66.848.500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5.329.306.963	100 %	4.969.697.840
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	5.329.306.963	32 Orang/bulan	4.969.697.840
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	350.000.000	100 %	349.913.203
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	350.000.000	45 Laporan	349.913.203
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	21.150.000	100 %	20.300.000
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	21.150.000	3 Unit	20.300.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	1.181.641.200	100 %	1.164.646.310

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.181.641.200	1 Laporan	1.164.646.310
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	996.800.000	100 %	988.921.081
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	237.650.000	30 Unit	232.615.028
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	610.000.000	3 Unit	608.483.949
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	149.150.000	56 Unit	147.822.104
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	82 %	3.421.850.097	95%	3.408.476.409
7	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100 %	3.421.850.097	100 %	3.408.476.409
9	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	1.255.000.000	12 Dokumen	1.254.523.680
10	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	1.063.362.547	12 Dokumen	1.056.021.880
11	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	703.347.100	1 Dokumen	702.965.464
12	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	232.964.450	12 Dokumen	227.913.385
13	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	45.976.000	12 Dokumen	45.873.500

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
14	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	75 Orang	0	-	0
15	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	121.200.000	12 Dokumen	121.178.500
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	16.874.395.275	100 %	16.841.637.293
8	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100 %	13.112.552.714	100 %	13.108.573.275
16	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	190.716.714	1 Dokumen	186.980.384
17	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3200 Unit	12.921.836.000	3565 Unit	12.921.592.891
9	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100 %	3.761.842.561	100 %	3.733.064.018
18	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.225.000.000	1 Dokumen	2.214.930.029
19	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	321.564.001	1 Dokumen	319.055.125
20	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	680.300.000	5 Unit	664.697.714

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	180.778.560	2 Layanan	180.472.520
22	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	49.984.650
23	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	269.200.000	1 Dokumen	269.033.500
24	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	34.890.480
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			100.000.000		98.591.315
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	98.591.315
10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Survey	100.000.000	1 Survey	98.591.315
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	98.591.315
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			241.752.000		234.918.999
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	241.752.000	100 %	234.918.999
11	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	2 JKS	241.752.000	2 JKS	234.918.999
26	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	1 Laporan	41.752.000	1 Laporan	41.240.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				
27	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	200.000.000	34 Perangkat Daerah	193.678.999

12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			26.915.380.276		25.184.759.633
I	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Data Perencanaan LH yang Tersedia	79,50 %	279.440.000	79,50 %	271.754.880
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	1 Dokumen	119.440.000	1 dokumen	112.619.050
1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	119.440.000	1 Dokumen	112.619.050
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi kajian Lingkungan Hidup yang tersedia	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	159.135.830
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	159.135.830
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50,10 %	1.246.691.086	64,95 %	1.242.891.288

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
3	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	79 kegiatan / usaha	907.691.086	98 kegiatan/usaha	905.586.800
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	279.860.708	1 Dokumen	279.742.200
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	627.830.378	1 Dokumen	625.844.600
4	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/Kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	18 Usaha / Kegiatan	339.000.000	18 usaha / kegiatan	337.304.488
5	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	245.000.000	2 Laporan	243.323.688
6	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 Titik	94.000.000	2 Titik	93.980.800
III	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	100 %	10.000.000	100 %	9.486.950
5	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Spesies KEHATI Lokal Daerah	352 Spesies	10.000.000	352 spesies	9.486.950
7	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	9.486.950
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	78 %	50.000.000	78 %	49.356.500

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
6	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penyimpanan sementara limbah B3 yang memenuhi syarat	17 Lokasi	50.000.000	17 Lokasi	49.356.500
8	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	49.356.500
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	88,20 %	264.150.000	90,05 %	262.247.800
7	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	18 perusahaan	264.150.000	21 perusahaan	262.247.800
9	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 Dokumen	159.150.000	8 dokumen	158.708.500
10	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	105.000.000	12 badan usaha	103.539.300
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	715.786.000	100 %	702.610.150

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
8	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota	15 Kegiatan	715.786.000	15 kegiatan	702.610.150
11	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	715.786.000	4 dokumen	702.610.150
VII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 %	247.000.000	140 %	245.706.300
9	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota yang di selesaikan	5 kasus	247.000.000	7 kasus	245.706.300
12	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	127.000.000	7 pengaduan	126.240.100
13	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	120.000.000	7 perkara	119.466.200
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	71 %	5.557.300.000	70,974 %	5.023.913.153
10	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah Yang Dikelola	43.790 ton	5.452.500.000	40.772,11	4.931.632.503
14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	41 Kelompok	99.000.000	54 kelompok	96.606.150
15	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,	3 Unit	2.547.500.000	3 unit	2.461.024.146

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				
16	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	5 Ton	468.000.000	5 ton	372.963.730
17	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	32.280 Ton	2.338.000.000	37.318,73	2.001.038.477
11	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang di bina dan diawasi	50 Kelompok	104.800.000	60 kelompok	92.280.650
18	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	3 Unit	104.800.000	3 unit	92.280.650
IX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	18.545.013.190	A Skor	17.376.792.612
12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100.000.000	100 %	99.990.100
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	100.000.000	6 laporan	99.990.100
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	9.232.643.666	100 %	8.272.584.099
20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	9.232.643.666	69 orang/bulan	8.272.584.099
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	199.009.240	100%	197.318.150
21	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	144.009.240	3 paket	142.395.550

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
22	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 Orang	55.000.000	250 orang	54.922.600
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	300.000.000	100 %	299.552.550
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000	15 laporan	299.552.550
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	256.976.920	100%	251.774.990
24	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	139.746.920	8 unit	136.990.550
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	117.230.000	2 unit	114.784.440
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	6.321.323.000	100 %	6.153.951.020
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	705.000.000	4 laporan	703.406.450
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.616.323.000	12 laporan	5.450.544.570
18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	2.135.060.364	100%	2.101.621.703
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	1.340.259.420	16 unit	1.333.810.200

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	131.470.944	15 unit	123.911.600
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	663.330.000	3 unit	643.899.903

13. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			128.699.519.939		123.336.341.850
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase rawan banjir/genangan	17,34 %	12.580.676.000	17,17%	11.893.261.130
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rawan Banjir/Genangan	17.34 %	12.580.676.000	17,17%	11.893.261.130
1	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	463.562.000	1 Unit	454.687.000
2	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1.390.980.000	1 Unit	1.176.513.408
3	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.5 KM	7.600.334.000	1,55 km	7.221.438.642
4	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	2 Unit	3.125.800.000	3 unit	3.040.622.080

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Kebutuhan Air Minum	100 %	1.905.323.500	100 %	1.541.603.590
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	100 %	1.905.323.500	100 %	1.541.603.590
5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	786.635.000	1 Dokumen	653.661.082
6	Peluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	1.118.688.500	273 SR	887.942.508
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	80,12 %	12.352.748.400	81,03%	11.410.246.073
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.12 %	12.352.748.400	81,03%	11.410.246.073
7	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	18 Sistem Drainase Perkotaan	8.443.117.000	18 Sistem Drainase Perkotaan	8.001.739.780
8	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	8 Dokumen	937.950.000	12 Dokumen	752.311.050
9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	12 Sistem Drainase Perkotaan	2.971.681.400	12 Sistem Drainase Perkotaan	2.656.195.243
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung sesuai Ketentuan	100 %	23.584.359.814	100 %	22.981.707.842
4	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100 %	23.584.359.814	100 %	22.981.707.842

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
10	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	8 Bangunan Gedung	352.000.000	11 Bangunan Gedung	348.279.200
11	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	22.927.318.500	10 Dokumen	22.367.819.142
12	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	10 Dokumen	305.041.314	36 Dokumen	265.609.500
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	22.045.832.500	100%	21.649.191.104
5	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	17.34 %	22.045.832.500	17,17%	21.649.191.104
13	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	27 Kawasan	22.045.832.500	27 Kawasan	21.649.191.104
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	95.70%	38.554.253.532	96,01%	38.181.409.647
6	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	95.70%	38.554.253.532	96,01%	38.181.409.647

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
14	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	10 Dokumen	502.840.232	10 Dokumen	441.639.100
15	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	1.638.050.000	2 KM	1.589.930.000
16	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	17 KM	17.236.476.200	20,37 km	17.096.583.269
17	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	120 Jembatan	279.150.000	120 Jembatan	275.768.912
18	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	10.207.932.600	2 Jembatan	10.159.300.000
19	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	2 KM	3.005.795.000	2 KM	2.982.668.627
20	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	15 KM	406.100.000	433,485 KM	403.310.000
21	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	17 KM	5.277.909.500	17 KM	5.232.209.739
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100%	1.251.039.058	100%	1.060.251.400
7	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100%	380.352.058	100%	240.168.930
22	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	80 Orang	380.352.058	222 orang	240.168.930
8	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	94.95 %	870.687.000	94.95 %	820.082.470
23	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha	870.687.000	100 Badan Usaha	820.082.470
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100 %	1.596.253.128	100 %	1.510.557.054

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
9	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 Dokumen	800.000.000	1 Dokumen	798.039.652
24	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	800.000.000	1 Dokumen	798.039.652
25	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0
26	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	300 Orang	0	0	0
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	396.480.000	20 Dokumen	367.176.690
27	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	396.480.000	1 Dokumen	367.176.690
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	399.773.128	1 Dokumen	345.340.712
28	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	120 Dokumen	399.773.128	120 Dokumen	345.340.712
IX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	24.31 SKOR	14.829.034.007	26.51 SKOR	13.108.114.010
12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	310.589.784	100 %	295.958.260
29	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	310.589.784	10 dokumen	295.958.260
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	7.270.225.630	100 %	6.376.713.078
30	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	7.270.225.630	44 orang/bulan	6.376.713.078

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	433.550.000	100 %	405.076.702
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	433.550.000	106 laporan	405.076.702
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.026.925.198	100 %	939.543.020
32	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	830.307.838	2 Unit	744.030.000
33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	196.617.360	12 unit	195.513.020
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	100 %	4.563.459.395	100 %	3.897.772.616
34	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	4.563.459.395	11 laporan	3.897.772.616
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	100 %	1.224.284.000	100 %	1.193.050.334
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	59 Unit	512.624.000	64 unit	502.935.379
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	711.660.000	1 unit	690.114.955

14. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	100 persen	109.550.000	100 persen	103.175.000
1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 buah	109.550.000	1 buah	103.175.000
1	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	109.550.000	1 Dokumen	103.175.000
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	40 persen	421.063.000	41,38%	396.011.256
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah investor baru	40 investor	421.063.000	60 investor	396.011.256
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	383.263.000	1 dokumen	358.351.256
3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	37.800.000	1 dokumen	37.660.000
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	95 persen	409.495.000	99.70 persen	404.153.720
3	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Izin	4000 izin	409.495.000	8261 izin	404.153.720
4	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4000 Pelaku Usaha	152.455.000	8238 Pelaku Usaha	152.455.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
5	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	137.000.000	25 Pelaku Usaha	133.918.150
6	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	120.040.000	368 Kegiatan Usaha	117.780.570
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	120 perusahaan	462.000.000	152 perusahaan	442.368.225
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	370 perusahaan	462.000.000	749 Perusahaan	442.368.225
7	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha.	29.491.000	13 kegiatan usaha	24.092.000
8	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	370 Pelaku Usaha	390.107.500	707 pelaku usaha	376.217.725
9	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	42.401.500	35 Kegiatan usaha	42.058.500

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	100 persen	163.272.400	100 persen	155.866.335
5	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	52 jenis izin	163.272.400	52 jenis izin	155.866.335
10	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	163.272.400	16 Dokumen	155.866.335
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.04 skor	5.087.324.175	85.07 skor	4.962.548.009
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	7.461.900	100 persen	7.429.600
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.461.900	6 Dokumen	7.429.600
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	3.928.291.114	100 persen	3.897.658.972
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.928.291.114	26 Orang/bulan	3.897.658.972
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	204.234.000	100 persen	204.038.510
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	204.234.000	50 Laporan	204.038.510

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 persen	20.000.000	100 persen	19.305.000
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	1 Unit	19.305.000
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	773.882.596	100 persen	715.171.385
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	773.882.596	20 Laporan	715.171.385
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	100 persen	153.454.565	100 persen	118.944.542
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	70.490.500	20 Unit	37.380.642
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.280.000	1 Unit	28.072.500
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	53.684.065	5 Unit	53.491.400

15. DINAS PENDIDIKAN

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	85,25 (A Skor)	171.194.443.000	85,27 (A Skor)	168.796.485.052
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	7.203.000.000	100%	6.228.743.550
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	7.203.000.000	6 Laporan	6.228.743.550
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	163.991.443.000	100%	159.105.311.610
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1549 Orang/bulan	163.991.443.000	1552	159.105.311.610
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi	100 %	3.141.415.000	100%	2.959.222.936
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	2.841.415.000	37 Paket	2.660.531.337
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148 Laporan	300.000.000	174 Laporan	298.691.599
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	71.714.500	100%	54.295.000
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48 Unit	71.714.500	48 Unit	54.295.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	581.000.000	100 %	448.911.956
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	237 Unit	150.000.000	237 Unit	136.020.149
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	270.000.000	1 Unit	169.826.807
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	220 Unit	161.000.000	392 unit	143.065.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib belajar 9 tahun	100 %	428.190.000	100 %	
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100 %	14.578.636.514	100 %	11.331.764.962
9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	3.120.100.000	1 Paket	2.142.888.269
10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	14 Bid Kreatifitas Peserta Didik	199.487.733	14 Bidang Kreatifitas Peserta Didik	186.957.200
11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	69 Satuan Pendidikan	283.200.000	69 Satuan Pendidikan	267.736.500
12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Swasta)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	16 satuan pendidikan	2.723.940.000	16 satuan pendidikan	2.807.684.196

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	8.251.908.781	44 unit	5.926.498.797
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100 %	13.966.035.868	100 %	12.757.023.900
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	8.416.967.640	37 Unit	7.690.326.797
15	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5488 Siswa Paket	3.975.043.026	5.840 siswa	3.532.754.950
16	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	14 Bid Kreatifitas Peserta Didik	413.777.202	14 Bid Kreatifitas Peserta Didik	403.542.190
17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	53.278.000	24 Satuan Pendidikan	51.561.000
18	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Swasta)	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	9 satuan pendidikan	1.106.970.000	9 satuan pendidikan	1.078.838.963
8	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD Yang Terakreditasi	100 %	8.627.820.330	100 %	8.121.590.053
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	502.508.160	0	0
20	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1 Lembaga Peserta Didik	403.686.850	1 Lembaga Peserta Didik	389.606.880

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
21	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	987 Orang	3.564.000.000	1.007 Orang	3.486.300.000
22	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	160 Satuan Pendidikan	179.145.320	160 Satuan Pendidikan	116.210.500
23	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	3.978.480.000	1 Satuan Pendidikan	4.129.472.673
9	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Lembaga Non Formal Yang Terakreditasi	100 %	1.564.892.400	100 %	1.410.436.105
24	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	7 Satuan Pendidikan	836.462.400	7 Satuan Pendidikan	695.852.650
25	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 Satuan Pendidikan	728.430.000	6 Satuan Pendidikan	714.583.455
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100 %	1.201.204.299	100 %	1.197.194.376
10	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8 standar pendidikan pada kualitas standard proses dan penilaian pendidikan	100 %	962.963.579	100 %	959.749.476
26	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	207.848.205	1 Dokumen	205.488.026
27	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	100 Orang	163.088.287	180 Orang	162.514.500

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
28	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	592.027.087	1 Dokumen	591.746.950
11	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	238.240.720	100 %	237.444.900
29	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	238.240.720	1 Dokumen	237.444.900
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	67 %	1.053.205.561	72%	1.032.048.760
12	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	67 %	1.053.205.561	72%	1.032.048.760
30	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	532.900.000	1 Dokumen	524.153.360
31	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	520.305.561	1 Laporan	507.895.400

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	SDN 01 Kartoharjo			428.190.000		
V	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	428.190.000	100 %	432.654.397
13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	428.190.000	1 Satuan Pendidikan	432.654.397
32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	317.790.000	1 Satuan Pendidikan	322.254.397
33	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	110.400.000	1 Satuan Pendidikan	110.400.000
	SDN 02 Kartoharjo			181.350.000		
VI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	181.350.000	100 %	194.360.658
14	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	181.350.000	1 Satuan Pendidikan	194.360.658
34	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	44.550.000	1 Satuan Pendidikan	62.354.658
35	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	136.800.000	1 Satuan Pendidikan	132.006.000
	SDN 01 Klegen			484.520.000		

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
VII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	484.520.000	100 %	483.664.700
15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	484.520.000	1 Satuan Pendidikan	483.664.700
36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	359.720.000	1 Satuan Pendidikan	363.679.700
37	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	124.800.000	1 Satuan Pendidikan	119.985.000
	SDN 02 Klegen			250.440.000		
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	250.440.000	100 %	246.374.605
16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	250.440.000	1 Satuan Pendidikan	246.374.605
38	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	147.240.000	1 Satuan Pendidikan	143.190.905
39	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	103.200.000	1 Satuan Pendidikan	103.183.700
	SDN 03 Klegen			456.300.000		
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	456.300.000	100 %	450.288.897
17	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	456.300.000	1 Satuan Pendidikan	450.288.897

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
40	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	326.700.000	1 Satuan Pendidikan	320.759.397
41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	129.600.000	1 Satuan Pendidikan	129.529.500
	SDN 04 Klegen			151.200.000		
X	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	151.200.000	100 %	134.970.000
18	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	151.200.000	1 Satuan Pendidikan	134.970.000
42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	79.200.000	1 Satuan Pendidikan	82.170.000
43	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	72.000.000	1 Satuan Pendidikan	52.800.000
	SDN Oro Oro Ombo			307.470.000		
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	307.470.000	100 %	274.780.000
19	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	307.470.000	1 Satuan Pendidikan	274.780.000
44	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	230.670.000	1 Satuan Pendidikan	197.991.000
45	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	76.800.000	1 Satuan Pendidikan	76.789.000
	SDN 01 Rejomulyo			249.390.000		
XII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	249.390.000	100 %	282.039.953

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
20	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	249.390.000	1 Satuan Pendidikan	282.039.953
46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	112.590.000	1 Satuan Pendidikan	145.259.953
47	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	136.800.000	1 Satuan Pendidikan	136.780.000
	SDN 01 Kanigoro			185.500.000		
XIII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	185.500.000	100 %	177.127.765
21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	185.500.000	1 Satuan Pendidikan	177.127.765
48	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	91.800.000	1 Satuan Pendidikan	94.769.645
49	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	93.700.000	1 Satuan Pendidikan	82.358.120
	SDN 02 Kanigoro			255.720.000		
XIV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	255.720.000	100 %	257.689.815
22	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	255.720.000	1 Satuan Pendidikan	257.689.815
50	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	178.920.000	1 Satuan Pendidikan	180.889.815
51	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	76.800.000	1 Satuan Pendidikan	76.800.000
	SDN 03 Kanigoro			251.430.000		
XV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	251.430.000	100 %	217.151.761

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	251.430.000	1 Satuan Pendidikan	217.151.761
52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	155.430.000	1 Satuan Pendidikan	156.825.761
53	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	96.000.000	1 Satuan Pendidikan	60.326.000
	SDN Sukosari			106.920.000		
XVI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	106.920.000	100 %	112.852.351
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	106.920.000	1 Satuan Pendidikan	112.852.351
54	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	27.720.000	1 Satuan Pendidikan	33.652.351
55	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	79.200.000	1 Satuan Pendidikan	79.200.000
	SDN Pilangbango			348.384.679		
XVII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	348.384.679	100 %	378.416.535
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	348.384.679	1 Satuan Pendidikan	378.416.535
56	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	218.790.000	1 Satuan Pendidikan	249.369.135
57	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	129.594.679	1 Satuan Pendidikan	129.047.400
	SDN 01 Tawangrejo			219.390.000		
XVIII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	219.390.000	100 %	224.321.700

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
26	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	219.390.000	1 Satuan Pendidikan	224.321.700
58	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	159.390.000	1 Satuan Pendidikan	164.340.000
59	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	60.000.000	1 Satuan Pendidikan	59.981.700
	SDN 02 Tawangrejo			126.930.000		
XIX	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	126.930.000	100 %	126.906.500
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	126.930.000	1 Satuan Pendidikan	126.906.500
60	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	86.130.000	1 Satuan Pendidikan	86.130.000
61	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	40.800.000	1 Satuan Pendidikan	40.776.500
	SDN Kelun			291.600.000		
XX	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	291.600.000	100 %	265.535.650
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	291.600.000	1 Satuan Pendidikan	265.535.650
62	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	190.800.000	1 Satuan Pendidikan	167.037.650
63	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	100.800.000	1 Satuan Pendidikan	98.498.000
	SDN 01 Manguharjo			380.910.000		
XXI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	380.910.000	100 %	380.892.320

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	380.910.000	1 Satuan Pendidikan	380.892.320
64	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	246.510.000	1 Satuan Pendidikan	246.509.320
65	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	134.400.000	1 Satuan Pendidikan	134.383.000
	SDN 01 Nambangan Lor			473.620.000		
XXII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	473.620.000	100 %	458.769.620
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	473.620.000	1 Satuan Pendidikan	458.769.620
66	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	320.020.000	1 Satuan Pendidikan	305.169.620
67	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	153.600.000	1 Satuan Pendidikan	153.600.000
	SDN 02 Nambangan Lor			273.780.000		
XXIII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	273.780.000	100 %	263.969.592
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	273.780.000	1 Satuan Pendidikan	263.969.592
68	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	153.180.000	1 Satuan Pendidikan	154.169.592
69	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	120.600.000	1 Satuan Pendidikan	109.800.000
	SDN 01 Madiun Lor			170.280.000		
XXIV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	170.280.000	100 %	166.999.505

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	170.280.000	1 Satuan Pendidikan	166.999.505
70	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	91.080.000	1 Satuan Pendidikan	88.105.505
71	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	79.200.000	1 Satuan Pendidikan	78.894.000
	SDN 02 Madiun Lor			152.070.000		
XXV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	152.070.000	100 %	152.035.945
33	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	152.070.000	1 Satuan Pendidikan	152.035.945
72	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	92.070.000	1 Satuan Pendidikan	92.058.800
73	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	60.000.000	1 Satuan Pendidikan	59.977.145
	SDN 03 Madiun Lor			733.320.000		
XXVI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	733.320.000	100 %	712.710.226
34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	733.320.000	1 Satuan Pendidikan	712.710.226
74	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	502.920.000	1 Satuan Pendidikan	504.761.226
75	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	230.400.000	1 Satuan Pendidikan	207.949.000
	SDN 04 Madiun Lor			374.940.000		
XXVII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	374.940.000	100 %	371.829.195

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
35	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	374.940.000	1 Satuan Pendidikan	371.829.195
76	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	302.940.000	1 Satuan Pendidikan	299.829.195
77	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	72.000.000	1 Satuan Pendidikan	72.000.000
	SDN 05 Madiun Lor			725.630.000		
XXVIII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	725.630.000	100 %	751.078.459
36	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	725.630.000	1 Satuan Pendidikan	751.078.459
78	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	507.230.000	1 Satuan Pendidikan	532.969.959
79	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	218.400.000	1 Satuan Pendidikan	218.108.500
	SDN 01 Nambangan Kidul			194.010.000		
XXIX	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	194.010.000	100 %	251.428.102
37	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	194.010.000	1 Satuan Pendidikan	251.428.102
80	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	98.010.000	1 Satuan Pendidikan	155.428.732
81	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	96.000.000	1 Satuan Pendidikan	95.999.370
	SDN 02 Nambangan Kidul			173.850.000		
XXX	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	173.850.000	100 %	183.674.786

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
38	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	173.850.000	1 Satuan Pendidikan	183.674.786
82	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	113.850.000	1 Satuan Pendidikan	123.693.786
83	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	60.000.000	1 Satuan Pendidikan	59.981.000
	SDN 03 Nambangan Kidul			452.580.000		
XXXI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	452.580.000	100 %	410.663.750
39	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	452.580.000	1 Satuan Pendidikan	410.663.750
84	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	298.980.000	1 Satuan Pendidikan	289.078.650
85	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	153.600.000	1 Satuan Pendidikan	121.585.100
	SDN 01 Winongo			510.610.000		
XXXII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	510.610.000	100 %	512.675.860
40	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	510.610.000	1 Satuan Pendidikan	512.675.860
86	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	305.910.000	1 Satuan Pendidikan	308.879.860
87	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	204.700.000	1 Satuan Pendidikan	203.796.000
	SDN 02 Winongo			137.940.000		
XXXIII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	137.940.000	100 %	132.989.920

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
41	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	137.940.000	1 Satuan Pendidikan	132.989.920
88	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	77.940.000	1 Satuan Pendidikan	72.989.920
89	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	60.000.000	1 Satuan Pendidikan	60.000.000
	SDN Ngegong			226.320.000		
XXXIV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	226.320.000	100 %	241.123.672
42	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	226.320.000	1 Satuan Pendidikan	241.123.672
90	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	166.320.000	1 Satuan Pendidikan	181.169.572
91	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	60.000.000	1 Satuan Pendidikan	59.954.100
	SDN Patihan			355.920.000		
XXXV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	355.920.000	100 %	351.873.400
43	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	355.920.000	1 Satuan Pendidikan	351.873.400
92	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	245.520.000	1 Satuan Pendidikan	241.560.000
93	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	110.400.000	1 Satuan Pendidikan	110.313.400
	SDN 01 Pangongangan			527.630.000		
XXXVI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	527.630.000	100 %	548.557.009

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
44	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	527.630.000	1 Satuan Pendidikan	548.557.009
94	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	309.230.000	1 Satuan Pendidikan	332.987.009
95	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	218.400.000	1 Satuan Pendidikan	215.570.000
	SDN Sogaten			229.290.000		
XXXVII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	229.290.000	100 %	226.296.000
45	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	229.290.000	1 Satuan Pendidikan	226.296.000
96	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	169.290.000	1 Satuan Pendidikan	166.320.000
97	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	60.000.000	1 Satuan Pendidikan	59.976.000
	SDN 01 Taman			701.890.000		
XXXVIII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	701.890.000	100 %	734.167.556
46	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	701.890.000	1 Satuan Pendidikan	734.167.556
98	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	471.490.000	1 Satuan Pendidikan	504.137.556
99	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	230.400.000	1 Satuan Pendidikan	230.030.000
	SDN 02 Taman			169.740.000		
XXXIX	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	169.740.000	100 %	156.869.284

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
47	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	169.740.000	1 Satuan Pendidikan	156.869.284
100	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	97.740.000	1 Satuan Pendidikan	84.869.284
101	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	72.000.000	1 Satuan Pendidikan	72.000.000
	SDN 03 Taman			244.390.000		
XXXX	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	244.390.000	100 %	229.794.765
48	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	244.390.000	1 Satuan Pendidikan	229.794.765
102	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	90.090.000	1 Satuan Pendidikan	76.220.765
103	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	154.300.000	1 Satuan Pendidikan	153.574.000
	SDN 01 Pandean			447.540.000		
XXXXI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	447.540.000	100 %	438.667.500
49	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	447.540.000	1 Satuan Pendidikan	438.667.500
104	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	322.740.000	1 Satuan Pendidikan	318.780.000
105	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	124.800.000	1 Satuan Pendidikan	119.887.500
	SDN 02 Pandean			435.810.000		
XXXXII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	435.810.000	100 %	428.679.288

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
50	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	435.810.000	1 Satuan Pendidikan	428.679.288
106	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	315.810.000	1 Satuan Pendidikan	308.794.128
107	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	120.000.000	1 Satuan Pendidikan	119.885.160
	SDN Banjarejo			564.350.000		
XXXXIII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	564.350.000	100 %	573.221.540
51	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	564.350.000	1 Satuan Pendidikan	573.221.540
108	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	410.850.000	1 Satuan Pendidikan	423.715.360
109	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	153.500.000	1 Satuan Pendidikan	149.506.180
	SDN 01 Mojorejo			206.430.000		
XXXXIV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	206.430.000	100 %	198.485.913
52	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	206.430.000	1 Satuan Pendidikan	198.485.913
110	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	96.030.000	1 Satuan Pendidikan	88.106.913
111	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	110.400.000	1 Satuan Pendidikan	110.379.000
	SDN 02 Mojorejo			672.710.000		
XXXXV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	672.710.000	100 %	656.941.506

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
53	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	672.710.000	1 Satuan Pendidikan	656.941.506
112	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	519.110.000	1 Satuan Pendidikan	513.113.606
113	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	153.600.000	1 Satuan Pendidikan	143.827.900
	SDN 01 Manisrejo			451.030.000		
XXXXVI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	451.030.000	100 %	446.180.918
54	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	451.030.000	1 Satuan Pendidikan	446.180.918
114	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	323.730.000	1 Satuan Pendidikan	330.659.918
115	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	127.300.000	1 Satuan Pendidikan	115.521.000
	SDN 02 Manisrejo			405.720.000		
XXXXVII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	405.720.000	100 %	401.891.555
55	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	405.720.000	1 Satuan Pendidikan	401.891.555
116	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	304.920.000	1 Satuan Pendidikan	303.924.935
117	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	100.800.000	1 Satuan Pendidikan	97.966.620
	SDN 03 Manisrejo			211.200.000		
XXXXVIII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	211.200.000	100 %	205.705.176

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
56	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	211.200.000	1 Satuan Pendidikan	205.705.176
118	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	158.400.000	1 Satuan Pendidikan	153.422.776
119	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	52.800.000	1 Satuan Pendidikan	52.282.400
	SDN 04 Manisrejo			280.560.000		
XXXXIX	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	280.560.000	100 %	274.652.930
57	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	280.560.000	1 Satuan Pendidikan	274.652.930
120	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	182.160.000	1 Satuan Pendidikan	177.169.630
121	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	98.400.000	1 Satuan Pendidikan	97.483.300
	SDN 01 Demangan			221.730.000		
XXXXX	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	221.730.000	100 %	214.675.054
58	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	221.730.000	1 Satuan Pendidikan	214.675.054
122	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	125.730.000	1 Satuan Pendidikan	118.795.054
123	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	96.000.000	1 Satuan Pendidikan	95.880.000
	SDN 02 Demangan			231.990.000		
XXXXXII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	231.990.000	100 %	227.397.283

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
59	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	231.990.000	1 Satuan Pendidikan	227.397.283
124	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	171.990.000	1 Satuan Pendidikan	169.020.000
125	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	60.000.000	1 Satuan Pendidikan	58.377.283
	SDN 01 Josenan			268.950.000		
XXXXXIII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	268.950.000	100 %	264.243.606
60	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	268.950.000	1 Satuan Pendidikan	264.243.606
126	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	163.350.000	1 Satuan Pendidikan	165.291.806
127	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	105.600.000	1 Satuan Pendidikan	98.951.800
	SDN 02 Josenan			236.550.000		
XXXXXIV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	236.550.000	100 %	231.669.139
61	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	236.550.000	1 Satuan Pendidikan	231.669.139
128	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	195.750.000	1 Satuan Pendidikan	192.427.639
129	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	40.800.000	1 Satuan Pendidikan	39.241.500
	SDN 03 Josenan			150.480.000		
XXXXXV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	150.480.000	100 %	140.807.325

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
62	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	150.480.000	1 Satuan Pendidikan	140.807.325
130	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	71.280.000	1 Satuan Pendidikan	71.279.485
131	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	79.200.000	1 Satuan Pendidikan	69.527.840
	SDN Kejuron			129.240.000		
XXXXXVI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	129.240.000	100 %	129.551.636
63	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	129.240.000	1 Satuan Pendidikan	129.551.636
132	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	35.640.000	1 Satuan Pendidikan	36.622.288
133	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	93.600.000	1 Satuan Pendidikan	92.929.348
	SDN Kuncen			178.020.000		
XXXXXVII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	178.020.000	100 %	178.052.781
64	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	178.020.000	1 Satuan Pendidikan	178.052.781
134	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	77.220.000	1 Satuan Pendidikan	77.252.781
135	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	100.800.000	1 Satuan Pendidikan	100.800.000
	SMPN 1			1.127.210.000		
XXXXXVIII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.127.210.000	100 %	1.125.974.824

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
65	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.127.210.000	1 Satuan Pendidikan	1.125.974.824
136	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	920.810.000	1 Satuan Pendidikan	919.597.824
137	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	206.400.000	1 Satuan Pendidikan	206.377.000
	SMPN 2			1.254.060.000		
XXXXXIX	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.254.060.000	100 %	1.241.927.417
66	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.254.060.000	1 Satuan Pendidikan	1.241.927.417
138	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	927.660.000	1 Satuan Pendidikan	925.863.617
139	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	326.400.000	1 Satuan Pendidikan	316.063.800
	SMPN 3			884.200.000		
XXXXXX	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	884.200.000	100 %	848.102.500
67	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	884.200.000	1 Satuan Pendidikan	848.102.500
140	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	712.600.000	1 Satuan Pendidikan	676.874.300
141	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	171.600.000	1 Satuan Pendidikan	171.228.200
	SMPN 4			1.174.170.000		
XXXXXXI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.174.170.000	100 %	1.181.164.100

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
68	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.174.170.000	1 Satuan Pendidikan	1.181.164.100
142	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.012.770.000	1 Satuan Pendidikan	1.021.240.000
143	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	161.400.000	1 Satuan Pendidikan	159.924.100
	SMPN 5			682.730.000		
XXXXXXII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	682.730.000	100 %	698.363.457
69	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	682.730.000	1 Satuan Pendidikan	698.363.457
144	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	499.730.000	1 Satuan Pendidikan	515.460.000
145	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	183.000.000	1 Satuan Pendidikan	182.903.457
	SMPN 6			922.220.000		
XXXXXXIII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	922.220.000	100 %	911.735.261
70	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	922.220.000	1 Satuan Pendidikan	911.735.261
146	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	728.420.000	1 Satuan Pendidikan	727.205.261
147	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	193.800.000	1 Satuan Pendidikan	184.530.000
	SMPN 7			1.156.660.000		
XXXXXXIV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.156.660.000	100 %	1.149.985.639

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
71	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.156.660.000	1 Satuan Pendidikan	1.149.985.639
148	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	854.260.000	1 Satuan Pendidikan	851.839.999
149	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	302.400.000	1 Satuan Pendidikan	298.145.640
	SMPN 8			722.770.000		
XXXXXXV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	722.770.000	100 %	709.246.825
72	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	722.770.000	1 Satuan Pendidikan	709.246.825
150	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	636.370.000	1 Satuan Pendidikan	623.044.825
151	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	86.400.000	1 Satuan Pendidikan	86.202.000
	SMPN 9			738.370.000		
XXXXXXVI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	738.370.000	100 %	711.019.175
73	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	738.370.000	1 Satuan Pendidikan	711.019.175
152	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	574.570.000	1 Satuan Pendidikan	549.250.675
153	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	163.800.000	1 Satuan Pendidikan	161.768.500
	SMPN 10			841.780.000		
XXXXXXVII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	841.780.000	100 %	863.433.800

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
74	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	841.780.000	1 Satuan Pendidikan	863.433.800
154	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	578.380.000	1 Satuan Pendidikan	600.160.000
155	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	263.400.000	1 Satuan Pendidikan	263.273.800
	SMPN 11			987.360.000		
XXXXXXVIII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	987.360.000	100 %	954.690.000
75	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	987.360.000	1 Satuan Pendidikan	954.690.000
156	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	769.560.000	1 Satuan Pendidikan	736.890.000
157	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	217.800.000	1 Satuan Pendidikan	217.800.000
	SMPN 12			821.410.000		
XXXXXXIX	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	821.410.000		842.639.665
76	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	821.410.000	1 Satuan Pendidikan	842.639.665
158	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	654.610.000	1 Satuan Pendidikan	681.229.485
159	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	166.800.000	1 Satuan Pendidikan	161.410.180
	SMPN 13			987.760.000		
XXXXXXX	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	987.760.000	100 %	1.015.103.461

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
77	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	987.760.000	1 Satuan Pendidikan	1.015.103.461
160	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	817.960.000	1 Satuan Pendidikan	856.174.650
161	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	169.800.000	1 Satuan Pendidikan	158.928.811
	SMPN 14			395.560.000		
XXXXXXXXI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	395.560.000	100 %	405.520.887
78	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	395.560.000	1 Satuan Pendidikan	405.520.887
162	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	309.760.000	1 Satuan Pendidikan	320.598.188
163	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	85.800.000	1 Satuan Pendidikan	84.922.699

16. DINAS PERDAGANGAN

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
I	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Perusahaan yang memperbarui perijinan	100 %	86.160.400	100 %	86.078.900
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100 %	86.160.400	100 %	86.078.900
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75 Dokumen	86.160.400	75 Dokumen	86.078.900
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	5.643.298.691	100 %	5.534.825.504
2	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	17 pasar	1.307.139.091	17 pasar	1.223.167.404
2	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	492.513.313	3 Unit	486.553.604,91
3	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	814.625.778	17 Unit	736.613.799
3	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	100 %	4.336.159.600	100 %	4.311.658.100
4	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	258.922.000	2 Dokumen	247.348.000
5	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	4.077.237.600	2 Dokumen	4.064.310.100

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
III	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	300.254.200	100 %	291.153.235
4	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	100 %	279.621.200	100 %	270.891.735
6	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	111.443.600	3 Laporan	103.251.285
7	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	168.177.600	2 Laporan	167.640.450
5	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tersalurannya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	100 %	20.633.000	100 %	20.261.500
8	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 Laporan	20.633.000	2 Laporan	20.261.500
IV	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTTP dan BDKT yang telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100 %	224.674.843	100 %	221.500.900
6	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	12 bulan	224.674.843	12 bulan	221.500.900
9	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8186 Unit	217.342.843	8186 Unit	214.208.900
10	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	7.332.000	150 Orang	7.292.000
V	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100 %	337.278.650	100 %	335.563.110

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
7	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	4 kali	337.278.650	4 kali	335.563.110
11	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	8 UMKM	337.278.650	8 UMKM	335.563.110
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	80,01	10.264.246.844	84,34	9.768.876.778
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	129.036.500	100 %	125.927.000
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	129.036.500	6 Laporan	125.927.000
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	8.652.173.876	100 %	8.211.581.531
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	8.652.173.876	68 Orang/bulan	8.211.581.531
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	125.824.200	100 %	124.899.800
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	125.824.200	1 Paket	124.899.800
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	249.696.266	100 %	249.061.991
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	249.696.266	12 Laporan	249.061.991
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %	65.986.550	100 %	58.922.400

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.661.550	1 Unit	35.750.000
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.325.000	3 Unit	23.172.400
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	726.468.958	100 %	709.110.480
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	726.468.958	12 Laporan	709.110.480
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	315.060.494	100 %	289.373.576
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	227.780.606	44 Unit	203.114.576
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	27.045.688	3 Unit	26.985.800
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	122 Unit	60.234.200	122 Unit	59.273.200

17. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			16.866.562.545		16.494.363.592

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas	100 %	6.817.887.490	100 %	6.624.754.667
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan	100 %	2.618.264.263	100 %	2.612.873.339
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	150.000.000	2 Unit	148.441.700
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit	969.662.263	200 Unit	968.719.100
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	1.498.602.000	5 Unit	1.495.712.539
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik	100 %	150.000.000	100 %	148.075.000
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	150.000.000	2 Unit	148.075.000
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Fasilitas Terselenggaranya Pelayanan Parkir	100 %	1.026.700.000	100 %	882.625.690
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.026.700.000	1 Laporan	882.625.690
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan lulus ijin	100 %	615.830.000	100 %	600.796.700
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	106.510.000	2 Unit	106.031.715
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	509.320.000	12 Unit	494.764.985
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah MRLL	160 MRLL	333.214.800	160 MRLL	330.572.380

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
8	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	6 Laporan	333.214.800	6 Laporan	330.572.380
6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kegiatan keselamatan	100 %	913.360.628	100 %	903.718.368
9	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan	913.360.628	4 Laporan	903.718.368
7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja angkutan	70 %	1.160.517.799	70 %	1.146.093.190
10	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit	1.160.517.799	33 Unit	1.146.093.190
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.5 nilai	10.048.676.055	80.5 nilai	9.869.608.925
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	53.920.000	100 %	53.184.570
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	53.920.000	6 Dokumen	53.184.570
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	6.365.607.025	100 %	6.231.157.431
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	6.365.607.025	125 Orang/bulan	6.231.157.431
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN Yng Tercapai	100 %	100.000.000	100 %	95.152.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	125 Paket	100.000.000	125 Paket	95.152.000
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	300.202.000	100 %	95.152.000
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	300.202.000	60 Laporan	299.802.320
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Peralatan Kantor	100 %	191.516.030	100 %	299.802.320
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	26.000.000	1 Unit	25.034.000
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	165.516.030	10 Unit	145.917.800
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Kantor	100 %	1.885.000.000	100 %	1.870.806.771
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Laporan	1.885.000.000	23 Laporan	1.870.806.771
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Baramg Milik Daerah Yang Layak Digunakan	100 %	1.152.430.000	100 %	1.148.553.533
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	59 Unit	695.550.000	59 Unit	695.233.141
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	320.880.000	2 Unit	317.665.558
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	136.000.000	10 Unit	135.654.834

18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.793.531.519		5.543.572.686
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 Skor	4.784.695.320	85,94 Skor	4.548.935.822
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	30.000.000	100%	27.280.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	27.280.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	3.934.318.155	92%	3.778.129.518
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.934.318.155	23 orang/bulan	3.778.129.518
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	72.121.000	133%	68.567.404
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	72.121.000	40 Laporan	68.567.404
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	570.340.165	100%	521.796.000
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	570.340.165	12 Laporan	521.796.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	177.916.000	100%	153.162.900
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	77.644.000	22 Unit	65.525.700

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	51.000.000	4 Unit	44.658.400
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72 Unit	49.272.000	72 Unit	42.978.800
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.95 %	928.836.199	35%	919.063.864
6	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	4.9 %	365.000.000	8,30%	363.934.514
8	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	74 Layanan	295.000.000	74 Layanan	294.642.164
9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	650 Eksemplar	70.000.000	1363 Eksemplar	69.292.350
7	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca	20 kali	563.836.199	20 Kali	555.129.350
10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	212 Lokus	474.463.699	212 Lokus	466.887.950
11	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	89.372.500	5 Perpustakaan	88.241.400
III	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	37 %	80.000.000	132%	75.573.000
8	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	178 eksemplar	80.000.000	235 Eksemplar	75.573.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
12	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	50.000.000	3 Orang	46.775.000
13	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Eksemplar	30.000.000	13 Eksemplar	28.798.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			773.386.636		765.469.350
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	90 %	619.386.636	91%	613.398.650
9	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	369.052.936	101%	363.999.900
14	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	60000 Berkas	369.052.936	60300 Berkas	363.999.900
10	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip	100 %	250.333.700	117,4%%	249.398.750
15	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	270 Arsip	250.333.700	317 Arsip	249.398.750
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	8.8 Nilai	154.000.000	8,8 Nilai	152.070.700

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
11	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100 %	154.000.000	125%	152.070.700
16	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1100 Arsip	85.000.000	1375 Arsip	84.747.700
17	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1100 Berkas	69.000.000	1375 Berkas	67.323.000

19. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			46.310.729.638		43.422.032.828
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.30 skor	10.207.724.111	81,14 skor	9.818.198.979
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	22.673.400	100%	20.905.300
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	22.673.400	20 Laporan	20.905.300
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5.243.232.695	100%	5.016.539.499

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5.175.232.695	36 Orang/bulan	4.948.725.249
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	68.000.000	13 Laporan	67.814.250
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	132.429.000	100%	129.500.050
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	122.429.000	1 Paket	120.075.000
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	10.000.000	36 Orang	9.425.050
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	233.880.000	100%	233.581.929
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	233.880.000	20 Laporan	233.581.929
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	216.738.171	100%	214.488.200
7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	0	0
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	216.738.171	33 Unit	214.488.200
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	2.179.289.095	100 %	2.136.617.861

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.179.289.095	12 Laporan	2.136.617.861
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	2.179.481.750	100%	2.066.566.140
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	1.690.986.550	65 Unit	1.612.826.790
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	1 Unit	99.839.500
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	106 Unit	388.495.200	106 Unit	353.899.850
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	1.922.750.000	100%	1.884.597.240
8	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dihasilkan	1 dokumen	118.950.000	1 Dokumen	111.239.000
13	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	118.950.000	1 Dokumen	111.239.000
9	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	1 lokasi	1.657.900.000	1 lokasi	1.632.969.340
14	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	3 Unit Rumah	1.657.900.000	3 Unit Rumah	1.632.969.340

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
10	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 %	145.900.000	100%	140.388.900
15	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	145.900.000	1 Laporan	140.388.900
III	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	100 %	17.433.326.000	100%	15.421.221.816
11	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.50 %	220.000.000	0.50%	216.899.700
16	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	216.899.700
12	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.50 %	17.213.326.000	0.50%	15.204.322.116
17	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	190 Unit Rumah	2.708.700.000	192 Unit Rumah	2.706.230.600
18	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	16,41 Ha	14.504.626.000	16,41 Ha	12.498.091.516
IV	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	16.746.929.527	100%	16.298.014.793
13	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	100 %	16.746.929.527	100%	16.298.014.793
19	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	16.746.929.527	3 Lokasi	16.298.014.793
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			805.792.250		677.527.064
V	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	32.413.750	100%	28.762.650

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
14	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah	100 %	32.413.750	100%	28.762.650
20	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	32.413.750	1 Dokumen	28.762.650
VI	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase penatagunaan tanah	100 %	773.378.500	100%	648.764.414
15	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah	100 %	773.378.500	100%	648.764.414
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	773.378.500	10 Laporan	648.764.414

20. DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	8.118.231.537	A nilai	7.368.807.781
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	159.401.840	100 persen	150.089.158
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	127.979.400	4 Dokumen	120.901.840
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 Laporan	22.082.310	4 Laporan	19.919.112

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	9.340.130	2 Laporan	9.268.206
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persenatase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100 persen	5.773.528.377	100 persen	5.284.452.049
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	5.670.118.024	26 Orang/bulan	5.181.962.296
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	103.410.353	13 Laporan	102.489.753
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 persen	292.817.000	100 persen	229.310.650
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	244.928.000	68 Orang	182.070.650
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang	47.889.000	68 Orang	47.240.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	311.237.000	100 persen	260.315.444
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 laporan	311.237.000	85 laporan	260.315.444
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	100 persen	18.380.000	100 persen	18.314.000
9	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	110 Unit	18.380.000	2 Unit	18.314.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 persen	1.090.748.200	100 persen	1.012.561.490
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	591.528.200	12 Laporan	550.621.490
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	499.220.000	12 laporan	461.940.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 persen	472.119.120	100 persen	413.764.990
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	200.187.000	6 unit	149.845.880
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	181.014.120	2 unit	177.200.135
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	110 unit	90.918.000	71 unit	86.718.975
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	66 persen	3.265.196.184	100 persen	3.085.368.687
8	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	66 persen	3.265.196.184	100 persen	3.085.368.687
16	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	214 Orang	386.354.400	214 Orang	376.272.200

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
17	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	47.564.704	3 Orang	47.298.382
18	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Keluarga	119.188.280	9 Keluarga	116.628.305
19	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Lembaga	2.712.088.800	14 Lembaga	2.545.169.800
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	3.931.608.371	100 persen	3.434.476.373
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	3.308.251.936	100 persen	2.884.205.883
20	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	170 Orang	393.436.600	390 orang	264.039.700
21	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Orang	313.326.936	105 Orang	262.234.682
22	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	26.269.000	5 Orang	22.877.000
23	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	18.128.000	29 Orang	8.981.161

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
24	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	9.500.000	93 Orang	7.900.000
25	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	2.144.307.800	342 Orang	1.964.701.740
26	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	403.283.600	45 Orang	353.471.600
10	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	623.356.435	100 persen	550.270.490
27	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	272.075.800	49 Orang	215.030.000
28	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	89.906.700	207 Orang	89.906.700
29	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	9.284.800	70 Orang	9.284.800
30	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20.134.000	4 Orang	9.742.000
31	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan	85 Orang	25.309.635	210 Orang	25.189.990

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				
32	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	79.150.000	207 Orang	79.150.000
33	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	118.431.500	210 Orang	118.431.500
34	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	9.064.000	20 orang	3.535.500
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91 %	13.120.631.330	94,87%	12.129.604.359
11	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	95 persen	4.183.000	125%	1.250.000
35	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	2.100.000	10 Orang	900.000
36	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	1.883.000	1 Orang	300.000
37	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	200.000	3 Orang	50.000
12	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	13.116.448.330	100 persen	12.128.354.359
38	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	24685 Orang	1.105.190.422	21870 Orang	1.069.841.500
39	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	4000 Keluarga	278.544.300	4.111 Keluarga	272.102.600

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
40	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	4000 keluarga	10.747.233.693	4.111 Keluarga	9.828.164.645
41	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	985.479.915	220 Orang	958.245.614
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 persen	447.562.100	100 persen	325.239.800
13	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	100 persen	52.095.100	100 persen	42.515.800
42	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	27.937.500	1276 Orang	27.358.200
43	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	15.157.600	0 Orang	15.157.600
44	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	9.000.000	0 Orang	0
14	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	100 persen	395.467.000	100 persen	282.724.000
45	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	18.182.000	1 Kampung	18.182.000

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
46	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	377.285.000	23 Orang	264.542.000
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	100 persen	170.200.600	100 persen	155.170.600
15	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	170.200.600	100 persen	155.170.600
47	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	966 Makam	170.200.600	966 Makam	155.170.600
VII	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	743.859.274	100 persen	720.391.636
16	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	100 persen	121.083.555	100 persen	118.137.515
48	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Dokumen	29.500.900	34 Dokumen	29.500.900
49	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Dokumen	49.018.755	34 Dokumen	48.742.715
50	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	32.647.405	34 Perangkat Daerah	29.977.405

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
51	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	9.916.495	34 Perangkat Daerah	9.916.495
17	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	32,5 persen	9.445.955	32,7 persen	9.445.955
52	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.445.955	1 Dokumen	9.445.955
18	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	60 persen	613.329.764	75 persen	592.808.166
53	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	580 Orang	592.817.178	629 Orang	572.315.580
54	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	20.512.586	1 Dokumen	20.492.586
VIII	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 persen	299.929.753	100 persen	296.284.203

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
19	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	100 persen	83.789.640	100 persen	83.499.100
55	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.710.060	1 Dokumen	49.549.500
56	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	34.079.580	34 Perangkat Daerah	33.949.600
20	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	95 persen	196.956.199	100 persen	195.094.919
57	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	196.956.199	23 Layanan	195.094.919
21	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	100 persen	19.183.914	100 persen	17.690.184
58	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	12 Orang	12.388.114	8 Orang	11.023.984

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
59	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.795.800	1 Dokumen	6.666.200
IX	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	30 persen	210.271.527	55,3 persen	200.019.527
22	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami Kesenjangan Gender dan Hak Anak	100 persen	148.802.727	100 persen	138.550.727
60	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	57.905.727	3 Perangkat Daerah	57.905.727
61	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	90.897.000	1 Dokumen	80.645.000
23	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	100 persen	61.468.800	100 persen	61.468.800
62	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	61.468.800	280 Orang	61.468.800
X	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	1 dokumen	67.627.961	1 dokumen	66.562.961

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
24	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan data gender dan anak	100 persen	67.627.961	100 persen	66.562.961
63	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	67.627.961	1 Dokumen	66.562.961
XI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	42,20 persen	326.795.688	42,2 persen	264.517.051
25	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	38 persen	59.474.369	42,2 persen	56.268.269
64	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	59.474.369	1 Dokumen	56.268.269
26	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	27 persen	267.321.319	42,2 persen	208.248.782
65	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	16.983.948	100 Orang	16.976.532
66	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	138.169.750	1 Dokumen	94.287.950
67	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	71.964.700	1 Dokumen	62.580.200

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
68	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.202.921	1 Dokumen	34.404.100
XII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04 persen	73.268.687	0,04 persen	69.188.500
27	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	69,50 persen	21.183.822	100 persen	20.806.500
69	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1 Kegiatan	21.183.822	1 Kegiatan	20.806.500
28	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	100 persen	28.754.485	100 persen	26.683.000
70	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	15.016.000	54 Orang	14.290.000
71	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Orang	13.738.485	54 Orang	12.393.000
29	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	100 persen	23.330.380	100 persen	21.699.000
72	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	23.330.380	1 Kegiatan	21.699.000

21. DINAS TENAGA KERJA DAN KUKM

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			13.005.755.397		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,04 skor	6.489.338.267	81,20 skor	6.020.709.298
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	71.280.000	100 %	71.192.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	71.280.000	6 Dokumen	71.192.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5.067.780.088	100 %	4.633.736.934
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5.067.780.088	36 Orang/bulan	4.633.736.934
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi Kepegawaian	100 %	0	-	0
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	0	-	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	924.261.297	100 %	894.313.424
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	584.953.026	9 Paket	555.149.692
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	339.308.271	75 Laporan	339.163.732
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah	100 %	210.429.000	100 %	208.340.940
6	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	13.209.000	1 Unit	11.700.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	-	0
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	197.220.000	1 Unit	196.640.940
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	215.587.882	100 %	213.126.000
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	89.388.400	19 Unit	87.242.900
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	75.124.482	3 Unit	75.043.100
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	47 Unit	51.075.000	47 Unit	50840000
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	50 %	2.596.000.000	98 %	2.493.302.095
7	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi	112 Orang	2.571.900.000	269 Orang	2.473.838.095
12	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	150 Orang	2.571.900.000	274 Orang	2.473.838.095
8	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPKS yang berijin	50 %	10.480.000	65%	9.678.100
13	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	40 Lembaga	10.480.000	40 Lembaga	9.678.100
9	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30 Perusahaan	13.620.000	30 Perusahaan	9.785.900

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
14	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	13.620.000	1 Dokumen	9.785.900
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	15 %	253.256.682	44,55%	247.342.951
10	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	235 Orang	253.256.682	270 Orang	247.342.951
15	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	123.645.220	1 Dokumen	117.862.725
16	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 Orang	72.325.380	727	72.207.426
17	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	57.286.082	57 Orang	57.272.800
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	3.667.160.448	100 %	3.174.578.080
11	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB	50 Perusahaan	154.223.800	50 Perusahaan	152.072.800
18	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	123.973.800	20 Perusahaan	121.852.800
19	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang	1 Laporan	30.250.000	1 Laporan	30.220.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				
12	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	75 %	3.512.936.648	80 %	3.022.505.280
20	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	75.931.500	12 Perkara	75.931.500
21	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10000 Orang	3.437.005.148	16803 Orang	2.946.573.780
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			855.447.782		
V	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	75 %	444.174.500	100 %	433.721.500
13	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK	40 koperasi	444.174.500	67 koperasi	433.721.500
22	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 Orang	444.174.500	135 Orang	433.721.500
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	2,5 %	150.586.523	2,5 %	149.427.400
14	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	5 koperasi	150.586.523	5 koperasi	149.427.400

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
23	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	60 Unit Usaha	150.586.523	60 Unit Usaha	149.427.400
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	8 %	260.686.759	39%	208.818.605
15	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik	12 Orang	260.686.759	12 orang	208.921.105
24	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	260.686.759	252 unit usaha	208.921.105
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.772.787.748		
VIII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5 %	1.607.187.748	22%	1.264.939.669
16	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan	15 IKM	1.607.187.748	48	1.264.939.669
25	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	366.792.000	4 dokumen	364.953.570
26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	60.000.000	2 dokumen	56.627.000
27	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1.180.395.748	2 dokumen	843.359.099
IX	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	10 %	165.600.000	13%	165.272.784
17	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI,	Jumlah IKM yang mengikuti publikasi	20 IKM	165.600.000	96	165.272.784

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					
28	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5 Dokumen	165.600.000	3 Dokumen	165.272.784

22. INSPEKTORAT

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			10.881.257.781		10.718.450.179
	INSPEKTORAT DAERAH			10.881.257.781		10.718.450.179
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.00 Nilai	9.251.101.781	81,45 Nilai	9.178.007.284
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal kategori baik	100 %	3.000.000	100 %	2.954.900
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	3.000.000	10 Laporan	2.954.900
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	7.516.857.781	100 %	7.451.210.586
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	7.516.857.781	43 Orang/bulan	7.451.210.586
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	86,6	1.244.064.000	86,67	1.239.583.569

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	544.064.000	2 Paket	540.296.951
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	700.000.000	87 Laporan	699.286.618
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	204.000.000	100 %	203.020.450
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	204.000.000	3 Unit	203.020.450
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	283.180.000	100 %	281.237.779
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	38.180.000	28 Unit	37.840.921
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	225.000.000	1 Unit	223.631.458
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	20.000.000	25 Unit	19.765.400
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang Maturitas SPInya Level 3	45 %	721.400.000	80%	644.268.870
6	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat Kota Madiun	29 Dokumen	612.400.000	29 Dokumen	559.659.370
9	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	57.400.000	3 Laporan	52.965.500
10	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	390.000.000	15 Laporan	364.078.500
11	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	24.776.500
12	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	120.000.000	3 Laporan	98.024.370
13	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	19.814.500

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				
7	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	109.000.000	100 %	84.609.500
14	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	74.000.000	2 Laporan	56.484.500
15	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	28.125.000
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	100 %	908.756.000	100 %	896.174.025
8	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	6.910.500
16	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	7.000.000	2 Rekomendasi	6.910.500
9	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	6 Dokumen	901.756.000	6 Dokumen	889.263.525
17	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4 perangkat daerah	250.000.000	5 perangkat daerah	242.758.800
18	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	651.756.000	2 Kegiatan	646.504.725
19	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20 perangkat daerah	0	0	0

23. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	14.023.972.562	A Skor	12.697.430.698
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan, Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	186.567.000	100%	177.197.700
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	186.567.000	12 laporan	177.197.700
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	7.091.974.275	100%	6.476.757.959
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	7.091.974.275	44 Orang/bulan	6.476.757.959
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 %	675.200.000	100%	669.976.500
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	675.200.000	1 Paket	669.976.500
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	312.576.400	100%	291.864.929
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	312.576.400	43 laporan	291.864.929
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100% %	1.584.856.000	100%	1.574.251.182
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.136.946.700	2 unit	1.134.410.000
5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	205.600.000	1 Unit	203.684.082

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	242.309.300	45 Unit	236.157.100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% %	2.926.854.590	100%	2.698.192.916
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	2.947.854.590	6 Laporan	2.698.192.916
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.245.944.297	100%	809.189.512
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	895.418.387	22 Unit	483.580.510
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	230.662.410	1 Unit	229.528.001
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68 Unit	119.863.500	38 Unit	96.081.000
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97 %	6.161.805.425	99%	5.431.227.360
8	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97 %	4.426.395.113	99%	4.069.469.900
11	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	102.716.000	8 Dokumen	80.728.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
12	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	3.030.068.913	6 Dokumen	2.788.680.700
13	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	78 Orang	383.500.200	102 orang	360.076.700
14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	395.939.000	12 laporan	341.713.000
15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	514.171.000	12 laporan	498.271.500
9	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100 %	1.665.758.700	100%	1.334.925.460
16	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	1.133.741.100	4 Laporan	1.051.917.760
17	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	532.017.600	12 laporan	283.007.700
10	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	80 %	69.651.612	80%	26.832.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
18	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	69.651.612	12 laporan	26.832.000
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	1.386.141.000	100%	1.059.160.740
11	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.384.773.000	100%	1.057.880.740
19	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	6 Dokumen	1.084.545.000	6 dokumen	867.745.540
20	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	300.228.000	6 laporan	190.135.200
12	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	90 %	1.368.000	90%	1.280.000
21	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	6 Dokumen	1.368.000	6 dokumen	1.280.000

24. SEKRETARIAT DPRD

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	86 Indeks	11.991.428.825	90,93 Indeks	10.579.668.369
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	100 %	3.819.600.000	100 %	3.454.280.730
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11 Dokumen	2.675.100.000	11 Dokumen	2.496.808.480
2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen	1.144.500.000	4 Dokumen	957.472.250
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	100 %	1.255.434.000	100 %	1.177.114.554
3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	1.255.434.000	5 Dokumen	1.177.114.554
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Program-program Pemerintah Daerah	100 %	791.429.919	100 %	687.855.315
4	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	361.757.460	1 Dokumen	309.220.160
5	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	429.672.459	1 Dokumen	378.635.155
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	100 %	5.299.860.059	100 %	4.516.712.770
6	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.488.950.000	6 Dokumen	1.810.412.940
7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	1.416.738.836	2 Dokumen	1.384.697.800
8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	120 Dokumen	1.394.171.223	120 Dokumen	1.321.600.030
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD	100 %	825.104.847	98%	743.705.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
9	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	58 Dokumen	825.104.847	57 Dokumen	743.705.000
	SEKRETARIAT DPRD			52.167.269.149		
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81,50 (A) Skor	40.175.840.324	87.26 Skor	33.122.248.505
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	118.509.254	100 %	68.638.010
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	118.509.254	6 Dokumen	68.638.010
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	3.146.893.865	100 %	2.865.035.402
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	3.146.893.865	18 Orang/bulan	2.865.035.402
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100 %	170.898.500	97%	150.050.000
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45.898.500	1 Paket	29.050.000
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	125.000.000	18 Orang	121.000.000
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi ASN	100 %	3.340.372.000	100 %	1.753.765.046
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	3.340.372.000	26 Laporan	1.753.765.046
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	100 %	179.487.000	100 %	110.000.000
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	179.487.000	2 Unit	110.000.000
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	100 %	2.526.715.082	100 %	2.351.076.833

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	2.526.715.082	24 Laporan	2.351.076.833
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan atau Aset Kantor yang Dipelihara	100 %	1.066.022.671	100 %	760.874.785
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	334.109.871	26 Unit	297.902.362
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	179 Unit	258.274.900	176 Unit	163.042.061
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	473.637.900	6 Unit	299.930.362
13	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	100 %	16.277.591.077	100 %	15.422.692.422
20	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	15.896.772.217	30 Orang/Bulan	15.144.314.790
21	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	275.818.860	2 Paket	202.250.000
22	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	105.000.000	30 Orang	76.127.632
14	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 %	13.349.350.875	100 %	9.640.116.007
22	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	37.895.345	8 Laporan	32.054.800

25. KECAMATAN KARTOHARJO

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	KECAMATAN KARTOHARJO			13.468.862.798		28.507.061.706
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	80.15 Nilai	12.712.128.398	82,84	12.369.698.215
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	4.000.000	100 %	3.997.800
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	3.997.800
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	10.981.927.331	100 %	10.669.589.647
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	10.981.927.331	70 Orang/bulan	10.667.591.447
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	2.000.000	13 Laporan	1.998.200
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	25.000.000	100 %	24.916.200
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	25.000.000	70 Orang	24.916.200
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	87.8 indeks	216.008.000	87.8 indeks	216.008.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	216.008.000	12 Laporan	216.008.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	199.413.453	100 %	196.795.200
6	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	1 Unit	98.772.700

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	99.413.453	12 Unit	98.022.500
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	1.036.254.614	100 %	1.013.785.603
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.036.254.614	12 Laporan	1.013.785.603
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	249.525.000	100 %	244.605.765
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	60.000.000	15 Unit	59.940.405
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18.990.000	1 Unit	18.845.270
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	135.535.000	1 Unit	130.910.200
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	35.000.000	60 Unit	34.909.890
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87.85 indeks	4.988.247.269	92,62 indeks	4.920.645.697
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	4.925.370.769	100%	4.857.769.197

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
13	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	605.469.100	12 Laporan	602.655.582
14	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukosari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	498.314.926	12 Laporan	477.358.096
15	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Klegen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	614.156.343	12 Laporan	612.732.180
16	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Rejomulyo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	573.885.100	12 Laporan	570.254.860
17	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pilangbango)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	524.753.500	12 Laporan	513.462.896
18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tawangrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	476.304.300	12 Laporan	471.926.250
19	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kanigoro)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	605.494.700	12 Laporan	592.092.806
20	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kartoharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	528.489.200	12 Laporan	521.233.929
21	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelun)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	498.503.600	12 Laporan	496.052.598
22	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100 %	62.876.500	100 %	62.876.500
23	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 Dokumen	62.876.500	3 Dokumen	62.876.500

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	10.769.851.670	100%	10.658.261.794
9	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100%	10.725.940.270	100%	10.614.999.694
24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	72.831.600	7 Lembaga	70.961.000
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	396.590.630	4 Unit	393.739.600
26	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukosari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	614.386.230	4 Unit	582.763.884
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Klegen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	929.919.430	4 Unit	929.919.430
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Rejomulyo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	925.421.230	4 Unit	922.693.918
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pilangbango)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	602.415.630	4 Unit	602.245.214
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tawangrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	884.675.030	4 Unit	884.225.030
31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanigoro)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1.022.998.230	4 Unit	965.230.926
32	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kartoharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	715.221.630	4 Unit	705.435.440
33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelun)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	647.894.630	4 Unit	646.652.630
34	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	524.704.000	5 Pokmas	524.150.622
35	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukosari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	250.104.000	5 Pokmas	250.004.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
36	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Klegun)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	591.204.000	5 Pokmas	591.204.000
37	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Rejomulyo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	480.404.000	5 Pokmas	480.254.000
38	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pilangbango)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	293.704.000	5 Pokmas	293.604.000
39	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawangrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	317.604.000	5 Pokmas	316.354.000
40	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigoro)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	638.404.000	5 Pokmas	638.254.000
41	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kartoharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	478.004.000	5 Pokmas	478.004.000
42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelun)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas	339.454.000	5 Pokmas	339.304.000
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	43.911.400	100%	43.262.100
43	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	43.911.400	12 Laporan	43.262.100
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	418.809.300	100 %	404.788.500
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100 %	94.670.100	100 %	92.861.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
44	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 Laporan	94.670.100	16 Laporan	92.861.000
12	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	324.139.200	100 %	311.927.500
45	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11 Laporan	324.139.200	11 Laporan	311.927.500
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %	158.305.600	100 %	153.667.500
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	158.305.600	100 %	153.667.500
46	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	125 Orang	66.120.000	125 Orang	65.283.600
47	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	79.157.600	4 Laporan	75.384.000
48	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	13.028.000	3 Dokumen	12.999.900

26. KECAMATAN MANGUHARJO

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	KECAMATAN			14.434.577.584		13.498.555.312
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	83,35 Nilai	13.664.086.634	83,66 Nilai	12.756.461.855
1	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	21.882.926	100%	21.862.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	21.882.926	20 Dokumen	21.862.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	11.486.312.659	100%	10.694.597.394
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	11.484.380.659	70 orang	10.692.665.394
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	26 Laporan	1.932.000	26 Laporan	1.932.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100%	40.450.000	100%	38.412.600
4	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	40.450.000	100 orang	38.412.600
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	126.206.000	100%	124.977.267
5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Orang	126.206.000	12 Orang	124.977.267
5	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	379.089.720	100%	364.425.344

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	64.420.000	9 Unit	64.114.000
7	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	122.999.800	1 Unit	112.216.344
8	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit Komputer PC	191.669.920	10 Unit Komputer PC	188.095.000
6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100%	1.011.320.082	100%	979.912.478
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.011.320.082	12 Laporan	979.912.478
7	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	598.825.247	100%	532.274.773
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	98.832.400	16 Unit	96.019.985
11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	439.171.600	6 Unit	375.462.788
12	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	60.821.247	60 Unit	60.792.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Nilai	55.010.800	92,71 Nilai	54.960.700
8	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100%	55.010.800	100%	54.960.700
13	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	1 Laporan	55.010.800	1 Laporan	54.960.700

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	127.352.450	100%	121.984.657
9	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	65.715.050	100%	61.013.507
14	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	65.715.050	7 Lembaga	61.013.507
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Forum	61.637.400	2 Forum	60.971.150
15	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	61.637.400	1 Laporan	60.971.150
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	513.293.700	100%	491.597.100
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100%	106.534.600	100%	101.426.000
16	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	106.534.600	1 Laporan	101.426.000
12	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Prosentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	406.759.100	100%	390.171.100
17	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	1 Laporan	406.759.100	1 Laporan	390.171.100

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	74.834.000	100%	73.551.000
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	100%	74.834.000	100%	73.551.000
18	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang	16.480.000	350 Orang	16.473.400
19	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	1 Laporan	45.184.000	1 Laporan	43.934.000
20	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pmerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	13.170.000	2 Dokumen	13.143.600
	KELURAHAN			16.969.161.463		16.859.177.285
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Nilai	5.525.038.546	92,71 Nilai	5.465.073.962
14	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	5.525.038.546	100%	5.465.073.962

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
21	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.525.038.546		5.465.073.962
22	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Manguharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	614.446.300	12 Laporan	609.207.290
23	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Sogaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	581.406.900	12 Laporan	579.756.226
24	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Patihan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	544.357.852	12 Laporan	537.238.605
25	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Ngegong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	526.766.094	12 Laporan	520.934.712
26	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Winongo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	604.644.300	12 Laporan	599.075.017
27	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Madiun Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	614.237.000	12 Laporan	607.342.810
28	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Pangongangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	550.421.200	12 Laporan	536.251.328
29	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Nambangan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	842.106.000	12 Laporan	839.618.361
30	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Nambangan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	646.652.900	12 Laporan	635.649.613
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	11.444.122.917	100%	11.394.103.323

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
15	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	11.444.122.917	100%	11.394.103.323
31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			7.592.121.548		7.542.192.423
32	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manguharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.662.377.032	2 Unit	1.654.377.000
33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	555.100.000	2 Unit	547.476.201
34	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patihan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	257.703.000	2 Unit	257.702.500
35	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngegong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.318.139.000	2 Unit	1.318.124.200
36	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Winongo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1.306.331.542	2 Unit	1.277.221.500
37	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madiun Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	592.764.538	2 Unit	592.758.538
38	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangongangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	513.439.046	2 Unit	513.429.046
39	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	705.350.000	2 Unit	703.766.138
40	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	680.917.390	2 Unit	677.337.300
16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.852.001.369		3.851.910.900
41	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manguharjo	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manguharjo	1 Unit	415.500.000	1 Unit	415.500.000
42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sogaten	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Unit	343.400.000	1 Unit	343.376.800
43	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patihan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Unit	270.892.369	1 Unit	270.843.400

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
44	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngegong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Unit	209.947.600	1 Unit	209.947.600
45	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Winongo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Unit	435.098.000	1 Unit	435.097.000
46	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Madiun Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Unit	494.162.300	1 Unit	494.160.200
47	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pangongangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Unit	307.584.100	1 Unit	307.584.100
48	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nambangan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Unit	828.528.000	1 Unit	828.528.000
49	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nambangan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Unit	546.889.000	1 Unit	546.873.800

27. KECAMATAN TAMAN

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	KECAMATAN TAMAN			13.855.163.190		13.385.079.579
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80,90 Nilai	12.993.984.992	83,82 Nilai	12.572.626.204
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah	100 %	720.000	100 %	719.800
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	720.000	12 Dokumen	719.800

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	11.609.750.471	100 %	11.226.709.029
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	11.609.750.471	75 Orang/bulan	11.226.709.029
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administasi kepegawaian	100 %	47.633.400	100 %	46.596.400
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	47.633.400	100 Orang	46.596.400
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	98.000.000	100 %	97.930.214
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	98.000.000	10 Laporan	97.930.214
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang layak	100 %	195.996.680	100 %	192.400.000
5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	0 Unit	0
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	195.996.680	4 Unit	192.400.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	766.759.391	100 %	735.408.883
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	766.759.391	12 Laporan	735.408.883
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	275.125.050	100 %	272.861.878
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	88.901.550	16 Unit	86.896.735

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000	2 Unit	149.759.443
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	36.223.500	6 Unit	36.205.700
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 Indeks	18.766.000	89,72 Indeks	17.904.600
8	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100 %	18.766.000	100 %	17.904.600
11	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	18.766.000	4 Dokumen	17.904.600
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase hasil pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	100 %	495.722.585	100 %	483.213.300
9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100 %	122.835.285	100 %	118.822.200
12	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	122.835.285	4 Laporan	118.822.200
10	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	372.887.300	100 %	364.391.100
13	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	7 Laporan	372.887.300	7 Laporan	364.391.100

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan PD lain)	100 %	119.067.313	100 %	111.289.500
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti	100 %	119.067.313	100 %	111.289.500
14	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang	36.447.613	120 Orang	33.531.600
15	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	61.652.000	4 Laporan	56.847.000
16	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	20.967.700	3 Dokumen	20.910.900
	KECAMATAN TAMAN					
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	227.622.300	100 %	200.045.975
12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	101.574.950	100 %	97.248.625

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	101.574.950	7 Lembaga Kemasyarakatan	97.248.625
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Lembaga	126.047.350	2 Lembaga	102.797.350
18	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	126.047.350	3 Laporan	102.797.350
	KELURAHAN					
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 Indeks	5.202.542.502	89,72 Indeks	5.091.905.840
14	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	5.202.542.502	100%	5.091.905.840
19	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mojorejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	541.859.200	12 Laporan	535.727.506
20	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pandean)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	678.198.200	12 Laporan	665.444.737
21	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjarejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	612.715.970	12 Laporan	594.144.879
22	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kuncen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	331.714.804	12 Laporan	325.009.075

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
23	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Manisrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	677.425.600	12 Laporan	668.737.193
24	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kejuron)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	582.100.088	12 Laporan	539.482.415
25	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Josenan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	674.869.440	12 Laporan	668.477.025
26	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Demangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	569.918.000	12 Laporan	566.239.581
27	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Taman)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	533.741.200	12 Laporan	528.643.429
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	12.546.275.023	100 %	12.463.144.261
15	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.793.242.465		7.717.724.561
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	501.411.408	2	498.571.603
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandean	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	385.833.250	2	384.644.424
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjarejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	1.368.279.860	2	1.367.462.500
31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuncen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	193.905.600	2	193.544.556

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
32	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manisrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	2.164.033.104	2	2.143.478.142
33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejuron	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	1.099.069.250	2	1.096.812.973
34	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Josenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	331.455.500	2	331.455.400
35	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	1.376.751.671	2	1.329.361.963
36	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	372.502.822	2	372.393.000
37	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4.753.032.558		4.745.419.700
38	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	784.321.600	2	784.302.000
39	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandean	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	564.000.000	2	561.137.400
40	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjarejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	441.500.000	2	437.485.000
41	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kuncen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	136.230.000	2	136.115.500
42	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manisrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	725.100.000	2	725.055.400
43	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kejuron	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	616.700.000	2	616.496.700
44	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Josenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	398.521.400	2	398.521.100

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
45	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Demangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	449.760.000	2	449.410.000
46	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Taman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	636.899.558	2	636.896.600

28. BAGIAN HUKUM

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	84 Skor	1.591.559.631,00	84,86 Skor	1.475.930.215,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	500.000,00	100%	500.000,00
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	500.000,00	6 Laporan	500.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	904.221.390,00	100%	824.503.410,00
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	904.221.390,00	10 Orang/bulan	824.503.410,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	85,75 Skor	231.923.941,00	87,44 Skor	231.923.941,00
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	231.923.941,00	58 Laporan	231.923.941,00

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	369.523.500,00	100%	352.930.224,00
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Laporan	369.523.500,00	169 Laporan	352.930.224,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	85.390.800,00	100%	66.072.640,00
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	44.640.800,00	7 Unit	38.131.340,00
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.500.000,00	1 Unit	4.421.500,00
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	36.250.000,00	22 Unit	23.519.800,00
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	1.005.640.010,00	100%	980.542.176,00
7	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang tersusun	100 %	1.005.640.010,00	100%	980.542.176,00
10	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	8 Dokumen	271.186.476,00	8 Dokumen	258.463.676,00
11	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	25 Kasus	244.187.334,00	26 Kasus	234.155.700,00

No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
12	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen	490.266.200,00	325 Dokumen	487.922.800,00

29. BAGIAN ORGANISASI

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	83 skor	15.000.000	84.37	14.600.750
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	15.000.000	100%	14.600.750
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000	6 Laporan	14.600.750
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	835.922.668	100%	802.514.807
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	835.922.668	9 Orang/Bulan	802.514.807
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	83.20 indeks	167.326.280	91.20 Indeks	167.326.280
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	167.326.280	12 Laporan	167.326.280
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100.000.000	100%	100.000.000
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	154.577.108	100%	152.936.947
5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	154.577.108	12 Laporan	152.936.947
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	46.873.000	100%	46.373.456
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	31.963.000	6 Unit	31.859.576
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000	1 Unit	2.495.000
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	12.410.000	21 Unit	12.018.880
7	Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	46.12	1.340.151.331	46.12	1.303.460.145
9	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	339.871.000	2 Dokumen	338.648.940
10	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	662.366.630	2 Laporan	657.622.105
11	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	337.913.701	2 Dokumen	307.189.100

30. BAGIAN PBJ ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	83 skor	2.658.053.521	83 skor	2.578.098.594
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	5.000.000	100 %	4.958.099
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	4.958.099
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	1.518.611.430	100 %	1.439.811.373
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.518.611.430	17 Orang/bulan	1.439.811.373
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	225.000.000	100 %	224.456.198
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	225.000.000	12 Laporan	224.456.198
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	272.463.091	100 %	272.306.000
4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	96.406.000	3 Unit	96.406.000
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	176.057.091	8 Unit	175.900.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	240.000.000	100 %	239.754.477

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240.000.000	12 Laporan	239.754.477
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	100 %	396.979.000	100 %	396.812.447
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	27.000.000	7 Unit	26.834.153
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	349.979.000	1 Unit	349.978.294
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	20.000.000	40 Unit	20.000.000
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	463.368.000	100 %	456.859.019
7	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Realisasi Fisik Keuangannya >79% dari Target	100 %	105.000.000	100 %	104.993.500
10	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
11	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	79.993.500
8	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa >79% dari Target	100 %	358.368.000	100 %	351.865.519
12	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	265.000.000	12 Dokumen	258.827.585
13	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	93.368.000	12 Dokumen	93.037.934

31. BAGIAN PEMERINTAHAN

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			3.612.376.220		
	SEKRETARIAT DAERAH			3.612.376.220		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Setda	83 Skor	1.466.410.000	84,52 Skor	1.466.410.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.000.000	100%	7.942.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	8.000.000	6 Laporan	7.942.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	898.410.000	100%	708.486.262
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	898.410.000	12 Orang/ Bulan	708.486.262
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	250.000.000	100%	248.788.719
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	250.000.000	24 Laporan	248.788.719
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	15.000.000	100%	14.985.000
4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.000.000	3 Unit	14.985.000

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	250.000.000	100%	243.561.342
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	243.561.342
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	45.000.000	100%	44.439.000
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	20.000.000	4 Unit	19.576.000
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	1 Unit	14.980.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	10.000.000	17 Unit	9.883.000
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	2.145.966.220	100%	1.928.266.430
7	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Laporan Administrasi Pemerintahan Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	1.801.566.220	100%	1.592.415.230
10	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	1.007.424.012	10 Dokumen	940.979.780
11	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	794.142.208	6 Dokumen	651.435.450
8	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Yang Difasilitasi	100 %	344.400.000	100%	335.851.200
12	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	344.400.000	5 Dokumen	335.851.200

32. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Setda	83 skor	2.357.386.764	83,74 skor	1.876.042.930
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perangkat Daerah	6 dokumen	18.000.000	6 dokumen	13.804.998
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	18.000.000	6 Laporan	13.804.998
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	1.081.294.810	100 %	850.117.200
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.081.294.810	13 Orang/bulan	850.117.200
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	250.000.000	100 persen	234.986.705
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	250.000.000	25 Laporan	234.986.705
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	123.726.250	100 %	113.396.000
4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	123.726.250	10 Unit	113.396.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100 %	484.719.636	100 %	295.469.105

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	484.719.636	12 Laporan	295.469.105
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	399.646.068	100 %	395.943.922
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	30.842.468	9 Unit	24.037.582
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.000.000	1 Unit	333.080.340
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	18.803.600	10 Unit	11.151.000
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	1.989.287.654	100 %	1.854.103.200
7	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat	80,08 persen	1.989.287.654	80,08 persen	1.854.103.200
10	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15 Dokumen	1.989.287.654	15 Dokumen	1.854.103.200
III	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	1.064.581.504	100 %	844.509.303
11	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase kepuasan masyarakat di bidang Perekonomian dan Pembangunan	80,98 %	622.150.724	83,73 %	570.180.688
8	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	300.984.960	2 Laporan	275.016.500
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	3 Dokumen	321.165.764	3 Dokumen	295.164.188
9	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	100 %	442.430.780	100 %	274.328.615

NO.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen	442.430.780	3 Dokumen	274.328.615

33. BAGIAN UMUM

NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85,50 skor	34.697.738.928	85,69 Skor	30.569.035.869
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	5.000.000	100 %	5,000,000.00
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5.000.000	6 Laporan	5,000,000.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	12.472.827.103	100 %	10,251,344,169
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	12.472.827.103	100 Orang/bulan	10,251,344,169
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	2.327.960.000	100 %	2,313,934,637
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	2.327.960.000	4 paket	2,313,934,637
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	3.564.908.569	100 %	3,105,631,877

NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.736.900	1 paket	91,378,766
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324 Laporan	3.472.171.669	320 laporan	3,014,253,111
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan pengadaan barang miik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.159.333.000	100 %	3,688,290,420
6	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	2.330.973.000	3 unit	1,895,540,000
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	790.600.000	16 uit	758,630,420
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.037.760.000	1 unit	1,034,120,000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100 %	5.541.121.924	100 %	5,168,683,431
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.541.121.924	12 laporan	5,168,683,431
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	2.138.278.400	100 %	2,046,799,193
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	110 Unit	1.000.000.000	110 unit	937,176,155
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	899.423.600	1 unit	894,684,528
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	129 Unit	238.854.800	129 unit	214,938,510

NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET		REALISASI	
			Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 %	824.160.732	100 %	646,966,408
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	194.160.732	2 Orang/Bulan	70,386,408
14	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	630.000.000	2 Orang/Bulan	576,580,000
15	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persentase rumah tangga pimpinan dan sekretariat daerah dalam kondisi baik	100 %	1.796.442.800	100 %	1,597,366,033
16	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.234.042.800	1 Paket	1,150,072,196
17	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	237.400.000	1 Paket	217,091,042
18	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	325.000.000	1 Paket	230,202,795
9	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan	100 %	1.867.706.400	100 %	1,745,019,700
19	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	500 Laporan	1.867.706.400	500 Laporan	1,745,019,700

3.3.1.3. Permasalahan dan Solusi

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Masalah	Solusi
1	Data Kinerja masih belum tersusun dengan baik	Pengembangan aplikasi M-SKP
2	Penerapan SPBE belum secara Optimal	Pelaksanaan SPBE sesuai perwal
3	Pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi (SIMPEG) belum optimal	Aplikasi SIMPEG untuk mengampu semua layanan kepegawaian
4	Kuantitas, Distribusi dan Penempatan ASN berdasarkan Peta Jabatan belum sesuai	Pelaksanaan Penerimaan ASN
5	Politik balas budi, kedekatan	Perlu komitmen pimpinan
6	Masih tingginya angka pelanggaran disiplin ASN	Perlu adanya pembinaan bagi ASN
7	Masih kurangnya penegakan disiplin ASN	Adanya sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan pelanggaran disiplin
8	Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan semua jenjang jabatan	Penerapan sistem sesuai peta jabatan
9	Obyektifitas penilaian kinerja masih rendah	Melakukan pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi

No	Masalah	Solusi
10	Masih banyak jenis diklat pengembangan kompetensi akibat munculnya jabatan Fungsional baru yang belum dilaksanakan	Dilaksanakan diklat fungsional secara bertahap
11	Usulan diklat/ peningkatan kompetensi ASN banyak yang belum bisa diakomodir karena anggaran terbatas	Penambahan anggaran untuk kegiatan diklat
12	Partisipasi ASN untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi masih kurang	Diadakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi ASN ikut diklat kompetensi

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Masalah	Solusi
1.	Tidak terlaksananya Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental dikarenakan Adanya perubahan peraturan dari pusat yang mengatur tentang pelaksanaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan	Tidak terlaksananya Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental dikarenakan Adanya perubahan peraturan dari pusat yang mengatur tentang pelaksanaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan

NO	Masalah	Solusi
2.	Menyesuaikan rencana kerja dan penganggaran agar linear dengan ketentuan dan peraturan dari pemerintah pusat, memperkuat koordinasi dengan tingkat provinsi dalam pelaksanaan kegiatan	Menyesuaikan rencana kerja dan penganggaran agar linear dengan ketentuan dan peraturan dari pemerintah pusat, memperkuat koordinasi dengan tingkat provinsi dalam pelaksanaan kegiatan

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Masalah	Solusi
1	Penyerapan anggaran kurang optimal	Koordinasi dengan OPD agar penguatan pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD dapat berjalan optimal
2	Penerapan E-BMD pada tahun 2024 terkait saldo awal mutasi selama tahun 2024 dan menjadi saldo akhir harus selesai pada akhir Bulan Desember agar LKPD tahun 2024 terselesaikan tepat waktu	Penerbitan SP2D sebelum akhir tahun anggaran 2024 dapat terselesaikan. Data yang di hasilkan dari aplikasi E-BMD dipergunakan untuk menyusun kertas kerja aset tetap tahun 2024 yang di sajikan dalam neraca LKPD

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Masalah	Solusi
1	Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana	Pelatihan Penanggulangan Bencana yang bersertifikat

No	Masalah	Solusi
2	Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial	Pengadaan Sarana dan Prasana Evakuasi Korban Bencana serta Alat Peringatan Dini Bencana (EWS)
3	Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Sosialisasi dan Pelatihan Penanggulangan Bencana kepada Masyarakat dan Anak Sekolah serta Mahasiswa
4	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait, Swasta dan Masyarakat saat tanggap darurat bencana	Rapat Koordinasi dan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) serta Intensifikasi tugas Instansi terhadap bencana dan Swasta / Relawan Bencana
5	Masih terdapatnya potensi bencana di Kota Madiun	Koordinasi dengan BMKG, Instansi Pemerintah / Swasta dan Masyarakat / Relawan
6	Kurangnya tenaga teknis penghitungan dan kaji cepat pasca bencana bangunan dan infrastruktur akibat bencana alam	Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan yang berbasis kompetensi untuk menghitung cepat kebutuhan bangunan dan infrastruktur yang rusak / terdampak bencana alam.

5. Badan Pendapatan Daerah

No	Masalah	Solusi
1	Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan	Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan
2	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat selaku wajib pajak	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat selaku wajib pajak
3	Belum optimalnya penggalan potensi terhadap pajak daerah	Belum optimalnya penggalan potensi terhadap pajak daerah

6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Masalah	Solusi
1	Keterbatasan petugas pelayanan yang sesuai kompetensi	Optimalisasi kinerja ASN yang dimiliki dan usul tambahan petugas pelayanan
2	Penjaringan inovasi masih belum optimal	Pengembangan aplikasi untuk mendukung pengelolaan inovasi dari ASN maupun masyarakat dalam penjaringan inovasi
3	Dalam proses persiapan evaluasi	Menyiapkan data kinerja, BAPPPEDA bertugas dalam penyusunan pohon kinerja kota dan pohon kinerja Perangkat Daerah yang sinkron dengan Perjanjian Kinerja/SKP serta Draft Matriks Renstra

No	Masalah	Solusi
4	Proses manajemen penanganan perencanaan tematik (smart city, SPBE) belum optimal, karena volume pekerjaan yang semakin bertambah di Lingkungan Perangkat Daerah, sedangkan pegawai semakin berkurang	Usulan penambahan kebutuhan pegawai

7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

No	Masalah	Solusi
1	Belum maksimalnya pemeliharaan gedung olahraga dan wisma haji yang dikelola	1. Membuat prioritas pemeliharaan gedung olahraga dan wisma haji 2. Melaksanakan pemeliharaan gedung olahraga dan wisma haji sesuai anggaran yang ada
2	Sumber daya buatan yang dibutuhkan oleh wisatawan karena tidak adanya sumber daya alam untuk peningkatan pariwisata	Memaksimalkan Sumber daya buatan yang ada dengan meningkatkan promosi pariwisata melalui beberapa pelaksanaan event pada hari hari besar tertentu
3	Menjadikan cagar budaya sebagai salah satu aspek peningkatan perekonomian	Memberikan sosialisasi kepada pemilik cagar budaya perorangan ataupun yang dimiliki daerah untuk memaksimalkan pemanfaatannya dalam peningkatan perekonomian.

No	Masalah	Solusi
4	Mengoptimalkan pelaporan kunjungan wisatawan dari pelaku wisata di Kota Madiun	Melaksanakan monev ke pelaku usaha pariwisata secara periodik

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Masalah	Solusi
1.	Sebagian besar data wajib KTP Elektronik yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik tidak berdomisili sesuai dengan alamat Kartu Keluarganya	Melaksanakan sosialisasi dengan jangkauan yang lebih luas baik sosialisasi langsung, atau melalui media sosial/ elektronik
2.	Kurangnya sosialisasi bahwa perekaman KTP Elektronik bisa dilakukan di seluruh layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memasukkan sosialisasi sebagai rencana kinerja individu
3.	Kurangnya kerjasama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA)	meningkatkan kerjasama pemanfaatan Kartu Identitas Anak
4.	Masih ada data penduduk yang sudah memiliki akte kelahiran tetapi belum masuk hitungan memiliki akte kelahiran dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	melaporkan kondisi tersebut kepada pengelola data pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

9. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Masalah	Solusi
1.	Sehubungan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/140/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025 pada 2 Februari 2024, terdapat perubahan jumlah sasaran cukup signifikan (sasaran terlalu tinggi) dibanding sasaran Tahun 2023.	Melakukan perhitungan sasaran sesuai jumlah penduduk pada Kepmenkes, melakukan monitoring dan evaluasi progres capaian setiap triwulan, menetapkan SK Walikota tentang sasaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 untuk data yang tidak diambil dari Kepmenkes, serta memaksimalkan pencatatan dan pelaporan capaian dari klinik dan Rumah Sakit agar mencapai target yang ditetapkan.
2.	Perubahan kebijakan terkait SPM Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang mulai berlaku di 3 April 2024. Adanya perubahan definisi operasional pelayanan kesehatan usia produktif, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 tahun 2024 dengan perhitungan capaian berasal dari data komposit yang berasal dari lintas program sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang maksimal dengan lintas program terkait. Belum ada metode perhitungan	Merevisi data terinput pada aplikasi e-SPM Bangda sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan terbaru, sehingga mulai pengisian SPM TW II terdapat perubahan angka untuk sasaran maupun mutu layanan mengikuti hasil konsultasi dengan Kemendagri melalui zoom. Melakukan konsultasi dengan pengelola program di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan melalui hasil pembahasan pengampu bidang kesehatan di Bangda, diputuskan untuk kegiatan deteksi dini tetap dilakukan sebagaimana Peraturan SPM terbaru, akan tetapi untuk

No	Masalah	Solusi
	capaian yang seragam dari pengelola program di level Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, pelaporan SPM pada aplikasi e-SPM Bangda belum memfasilitasi perhitungan komposit sesuai Permenkes terbaru.	perhitungan capaian masih menggunakan konsep SPM lama

10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Masalah	Solusi
1	Kurangnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya kemandirian pangan	Perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan edukasi terkait kemandirian pangan. Selain itu, memanfaatkan pertanian lokal dan praktik pertanian berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan Strategi Edukasi Masyarakat
2	Kurangnya edukasi masyarakat terkait B2SA dan gerakan stop boros pangan	Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjelaskan pentingnya pola makan beragam dan bergizi seimbang serta dampak dari pemborosan pangan terhadap lingkungan dan masyarakat.
3	Terdapat beberapa produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang mengandung residu pestisida	Meningkatkan frekuensi pengujian residu pestisida di pasar dan tempat distribusi.

No	Masalah	Solusi
4	Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan mengalami beberapa kerusakan sehingga produksi benih ikan kurang maksimal	Melakukan Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan, termasuk perbaikan kolam, sistem aerasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
5	Masih terbatasnya SDM pelaku usaha perikanan tangkap yang mendapatkan penyuluhan/pelatihan	Mengadakan Penyuluhan secara berkala dan berkelanjutan, untuk memastikan bahwa pelaku usaha perikanan selalu mendapatkan Informasi dan Edukasi yang diperlukan.
6	Masih kurangnya edukasi untuk pengolah dan pemasar produk hasil perikanan	Mengadakan program pelatihan yang terstruktur untuk pengolah dan pemasar produk perikanan, mencakup teknik pengolahan yang baik, manajemen kualitas, dan pemasaran produk
7	Kurangnya pemeliharaan pasar ikan sebagai salah satu tempat promosi produk perikanan	Mengalokasikan anggaran untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan pasar ikan serta Melibatkan komunitas lokal dan pelaku usaha dalam pengelolaan pasar ikan, sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan pasar.
8	Banyaknya lahan tidur dikota madiun yang masih bisa dimanfaatkan.	Melakukan pengadaan benih dan bibit tanaman untuk dapat mendukung pemanfaatan lahan.

No	Masalah	Solusi
9	Terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu sehingga menimbulkan kerugian bagi petani	Memberikan pelatihan tentang teknik pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, seperti penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap cuaca ekstrem.
10	Masih terbatasnya akses irigasi di beberapa wilayah	Melakukan Perbaikan, Pemeliharaan dan Pembangunan pada Jaringan Irigasi Usaha Tani (JIUT) yang sudah ada dan beberapa titik lokasi yang memerlukan pembangunan baru.
11	Masih adanya produk asal hewan yang belum ASUH	Memperkuat pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penjualan produk asal hewan melalui inspeksi rutin di tempat pemotongan hewan, pabrik pengolahan, dan pasar
12	Kurangnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi	Mengadakan program pelatihan yang terstruktur untuk petani mengenai teknik pertanian modern, manajemen usaha tani, dan praktik pertanian berkelanjutan.

11. Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Masalah	Solusi
1.	Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Terbatas	a. Mengusulkan anggaran khusus untuk peningkatan infrastruktur melalui APBD

No	Masalah	Solusi
		b. Bekerja sama dengan penyedia layanan internet dalam memperluas jangkauan jaringan c. Menyusun peta kebutuhan TIK untuk prioritas pengadaan perangkat
2.	Kurangnya Pemahaman dan Kapasitas PPID	a. Pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin bagi petugas PPID dan PPID Pembantu b. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk pengembangan dan pemeliharaan website PPID c. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik
3.	Keamanan Data yang Rentan	a. Mengimplementasikan standar keamanan data seperti ISO 27001 b. Meningkatkan kapasitas firewall, sistem deteksi intrusi, dan enkripsi data c. Memberikan pelatihan keamanan siber untuk ASN dan staf teknis

12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Masalah	Solusi
1.	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tupoksi menjalankan kegiatan untuk mengurangi potensi banjir/genangan wilayah kota. Wilayah Kota Madiun dilintasi oleh sungai-sungai yang mana menjadi kewenangannya merupakan kewenangan Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo. Pemeliharaan dan pembangunan saluran yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo dikarenakan keterbatasan anggaran dan luasan wilayah maka pemeliharaan dan pembangunan saluran dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. Untuk pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 2 perencanaan dan pelaksanaan teknis harus mendapatkan rekomendasi teknis ke BBWS Bengawan Solo. Sementara untuk pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 3 dan	Pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 2 dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari BBWS Bengawan Solo dan Dirjen SDA Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Koordinasi dengan pihak terkait harus dilakukan secara bertahap.

No	Masalah	Solusi
	4, perencanaan dan pelaksanaan teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
2.	Bidang Cipta Karya untuk Sie Penataan Bangunan Gedung apabila tolok ukur kinerja berdasarkan jumlah Bangunan Gedung milik Pemerintah Kota Madiun, maka permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut: 1. Bidang Cipta Karya belum memiliki data total jumlah bangunan gedung milik Pemerintah Kota Madiun; 2. Bidang Cipta Karya tidak hanya mengerjakan pembangunan/rehab bangunan milik Pemerintah Kota Madiun saja, akan tetapi juga melaksanakan pembangunan/rehab bangunan milik instansi vertikal yang nantinya akan diserahterimakan melalui mekanisme hibah. Apakah ketika ini dilakukan, maka tidak dianggap sebagai suatu capaian kinerja, mengingat aset yang dibangun/direhab bukan aset milik Pemerintah Kota Madiun. Pembangunan/rehab bangunan milik Pemerintah Kota Madiun bukan hanya dilakukan oleh Dinas PUPR saja, akan	1. Target jumlah bangunan gedung tahun ini bersumber dari data realisasi tahun yang kemarin. Pada tahun 2024 dianggarkan untuk dilaksanakan kegiatan pendataan bangunan gedung pemerintah. 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap melaksanakan pembangunan/rehab bangunan walaupun bukan aset Kota Madiun.

No	Masalah	Solusi
	tetapi juga kewenangan masing-masing OPD yang memiliki aset bangunan gedung. Sehingga untuk bangunan gedung yang bukan merupakan kewenangan Dinas PUPR akan kesulitan melakukan pemantauan/pendataan peningkatan kondisi bangunan gedungnya mengingat tenaga teknis yang terbatas.	
3.	Bidang Cipta Karya untuk Sie Pengembangan Jasa Konstruksi 1. Perkembangan Jasa Konstruksi yang ada di Kota Madiun mengalami kondisi yang dinamis sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan agar keberadaannya tetap memberikan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di Kota Madiun. Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun sudah maksimal namun perlu ditingkatkan lagi terutama dalam hal penyampaian regulasi terbaru terkait perkembangan Jasa Konstruksi pada skala nasional.	1. Pada setiap tahun telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jasa konstruksi agar pembangunan dapat dihasilkan dengan yang baik 2. DPUPR secara bertahap melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi pjt bersertifikat SKK jenjang 6

No	Masalah	Solusi
	2. Adanya perubahan regulasi bentuk perpanjangan Ijin BUJK terkait PJT/ penanggung jawab teknis pada BUJK, awalnya bisa untuk BUJK type sederhana bisa menggunakan PJT jenjang 5 menjadi PJT jenjang 6, sedangkan BUJK level sederhana masih minim mempunyai PJT bersertifikat SKK jenjang 6	
4.	Bidang Cipta Karya untuk Sie Penataan Bangunan dan Lingkungan apabila tolok ukur kinerja berdasarkan jumlah Saluran Lingkungan di wilayah Kota Madiun, maka permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut: 1. Belum adanya database saluran lingkungan di wilayah Kota Madiun sehingga parameter pelaksanaan kegiatan belum ada; 2. Pelaksanaan manajemen pengolahan limbah domestik yang masih tumpang tindih dengan OPD lain sehingga penentuan sasaran menjadi kendala. 3. Penyediaan kebutuhan air minum sudah mencakup seluruh wilayah Kota Madiun dan kegiatan fisik sudah diserahkan pada PDAM sehingga tidak banyak kegiatan.	1. Dasar penentuan lokasi pembangunan saluran mengakomodir dari usulan masyarakat dan pokir dewan 2. Awalnya penyediaan kebutuhan air minum diampu oleh PDAM dan limbah domestik oleh Dinas Perkim untuk Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang hanya melaksanakan monitoring kegiatan dan menyusun rencana kebijakan saja. 3. Pada Tahap pemenuhan dan permintaan pelaporan SPM ada beberapa data yang mengakomodir data dari Tim Kota Dinas Perkim.

No	Masalah	Solusi
	4. Untuk penyusunan pelaporan SPM masih simpang siur dalam penggunaan data karena pelaksana SPM adalah dari PDAM dan Dinas Perkim sedangkan Dinkes juga mengeluarkan data terkait dat rumah sehat.	4. Pada tahun anggaran 2024 DPUPR melaksanakan kegiatan pengumpulan data terkait pelayanan dasar sehingga mampu mencukupi data secara mandiri
5.	Bidang Tata Kota untuk Sie Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, Belum adanya tim pengendalian untuk Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PMP UMK) yang telah terbit, sedangkan pernyataan mandiri yang telah terbit sudah mencapai lebih dari 1000 pernyataan mandiri.	Untuk tahun 2024, proses Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PMP UMK) akan dilaksanakan dengan pihak ketiga, yaitu dengan menggunakan jasa konsultan.
6.	Bidang Tata Kota untuk Sie Perencanaan Tata Ruang, 1. Proses bisnis penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kota Madiun yang dinamis dan rinci 2. Banyaknya permohonan perijinan terkait pemanfaatan ruang yang memerlukan koordinasi dengan stakeholder terkait	1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk proses bisnis persetujuan substansi dalam rangka penetapan RDTR Kota Madiun 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait penyelenggaraan ruang melalui Forum Penataan Ruang (FPR)

13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Masalah	Solusi
1.	Perubahan dan kebijakan dan regulasi yang berubah cepat	Perubahan dan kebijakan dan regulasi yang berubah cepat
2.	Mengadakan pendampingan, penyuluhan dan penguatan koordinasi dengan OPD Teknis	Mengadakan pendampingan, penyuluhan dan penguatan koordinasi dengan OPD Teknis
3.	Mall Pelayanan Publik masih dalam proses Pembangunan	Mall Pelayanan Publik masih dalam proses Pembangunan
4.	Penguatan koordinasi dengan OPD Teknis terkait, agar memudahkan Masyarakat dalam melakukan proses perizinan	Penguatan koordinasi dengan OPD Teknis terkait, agar memudahkan Masyarakat dalam melakukan proses perizinan
5.	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Terintegrasi dengan OPD Teknis dikarenakan belum semua OPD Teknis mengirimkan SOP nya ke DPMPTSP untuk disandingkan/ diolah dalam pembuatan SOP terintegrasi .	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Terintegrasi dengan OPD Teknis dikarenakan belum semua OPD Teknis mengirimkan SOP nya ke DPMPTSP untuk disandingkan/ diolah dalam pembuatan SOP terintegrasi .
6.	Pembinaan/Pendampingan yang lebih intensif terhadap para pelaku usaha/perusahaan tentang Sistem OSS RBA dan LKPM	1. Melaksanakan Pembinaan/pendampingan terutama pelaku usaha yang belum pernah/baru melaporkan LKPM. 2. Melaksanakan bimbingan teknis/klinik investasi.

14. Dinas Pendidikan

No	Masalah	Solusi
1.	Kegiatan update laptop HP (pengadaan tahun 2020) ke chrome flex tidak dilaksanakan dikarenakan laptop laptop HP (pengadaan tahun 2020) belum bersertifikat google dan saat ini masih proses pengusulan sertifikat di Amerika	Pengalihan anggaran untuk mendukung pembelajaran digital (pengadaan papan interaktif)
2.	kegiatan perencanaan rehab (DAK Fisik) tahun 2025 yang tidak terlaksana karena adanya perubahan kebijakan penggunaan DAK Fisik Tahun 2025	Berkoordinasi dengan pusat dan mengembalikan anggaran ke kas daerah
3.	Tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran kurang kreatif	a. Memberikan pendampingan komunitas belajar bagi pendidik b. Memberi motivasi pemanfaatan pembelajaran c. Memberi evaluasi penilaian terhadap kemampuan pendidik
4.	Keterbatasan waktu untuk mengerjakan administrasi keuangan dan membagi waktu antara tugas bendahara dan tugas sebagai tenaga pendidik (guru) di sekolah.	Meminta bantuan tenaga upahan / tenaga kependidikan untuk membantu administrasi keuangan

15. Dinas Perdagangan

No	Masalah	Solusi
1.	Sarana prasarana pasar rakyat masih perlu ditingkatkan	Pemenuhan sarana prasarana pasar rakyat sesuai standard secara bertahap disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
2.	Belum stabilnya harga bahan kebutuhan pokok dan penting	Penambahan anggaran dan pelaksanaan kegiatan untuk Warung Tekan Inflasi (Wartek) yang diharapkan bisa mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok

16. Dinas Perhubungan

No	Masalah	Solusi
1	Sektor pelayanan parkir tepi jalan umum yang seharusnya dikelola oleh penyedia akan tetapi telah dilakukan 3 kali lelang pengelola selalu gagal.	Sektor pelayanan parkir tepi jalan umum yang seharusnya dikelola oleh penyedia akan tetapi telah dilakukan 3 kali lelang pengelola selalu gagal.

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Masalah	Solusi
1.	Pada Bidang Kearsipan : Depo Arsip di Lembaga Kearsipan belum sesuai standart kearsipan dan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagian besar belum memiliki Record Center/tempat penyimpanan Arsip In Aktif .	1. Pada Tahun 2025 sudah diupayakan untuk menempati Gedung Kesenian sebagai Depo Arsip dan direncanakan rehab setelah perubahan anggaran tahun 2025 sesuai standar kearsipan. 2. Melaksanakan sosialisasi dan lomba kearsipan sebagai upaya memotivasi Organisasi Perangkat Daerah untuk memaksimalkan ruangan yang ada sebagai record center
2.	Pada Bidang Perpustakaan : ruang layanan perpustakaan pada Perpustakaan Umum Daerah belum cukup menampung kapasitas jumlah pengunjung perpustakaan.	Direncanakan pada tahun 2026 akan dilaksanakan perluasan gedung layanan perpustakaan melalui dana DAK yang saat ini dalam proses pengajuan Perpustakaan Nasional.

19. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Masalah	Solusi
1.	Masih ada Keluarga Penerima Manfaat usia produktif	Meningkatkan sumber daya manusia yang melakukan monitoring dan evaluasi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat daerah
2.	Masih ada Keluarga Penerima Manfaat yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan	Meningkatkan sumber daya manusia yang melakukan monitoring dan evaluasi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat daerah
3.	Kurangnya sinergitas dengan pihak terkait dalam peningkatan dan pemberdayaan sosial kepada PMKS secara intens dan berkelanjutan	Meningkatkan sinergitas dengan pihak terkait dalam peningkatan dan pemberdayaan sosial kepada PMKS
4.	Masih ada korban kekerasan terhadap perempuan atau anak yang tidak melaporkan kasusnya	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak

20. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Masalah	Solusi
1	2	3
	Bidang Perindustrian	
1.	Pelaku Industri kurang taat dalam memenuhi persyaratan wajib SIINas untuk pengajuan NIB-RBA	Sosialisasi secara masif dan pendampingan SIINas dalam pengisian data dan pelaporan semester
2.	Pelaku industri belum memenuhi legalitas usaha	Fasilitasi legalitas usaha dan klinik konsultasi
3.	Kemasan produk IKM yang belum memenuhi standar dan desain kurang menarik	Fasilitasi pembuatan desain dan cetak kemasan
4.	Produk IKM belum terpetakan potensial pangsa pasarnya	Fasilitasi Kurasi Produk
5.	Pelaku Industri kurang terampil dalam menciptakan inovasi produk yang berdaya saing	Pelatihan diversifikasi produk
	Bidang Tenaga Kerja	
1.	Masalah utama bidang ketenagakerjaan adalah pengangguran, berikut kami uraikan penyebab dan solusinya.	
	a. Pola pikir pencari kerja yang masih memandang sebelah mata suatu pekerjaan/jabatan tertentu	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja fresh graduate

No	Masalah	Solusi
	b. Ketidakselarasan antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha Dunia Industri dan Kerja (DUDIKA)	Fasilitasi Penguatan kerja sama antara Bursa Kerja Khusus (BKK) Sekolah/LPKS/Perguruan Tinggi dengan DUDIKA
	c. Kompetensi atau keahlian pencari kerja yang masih kurang	Pelatihan berbasis kompetensi
	d. keterbatasan informasi pasar kerja dan minimnya ketersediaan lapangan kerja di Kota Madiun	Pengembangan Aplikasi Informasi Pasar Kerja online (Si Caker) yang dapat diakses oleh perusahaan secara nasional dan penyelenggaraan Job Fair
2.	Perusahaan di Wilayah Kota Madiun kurang taat dalam melaporkan informasi lowongan pekerjaan / kebutuhan tenaga kerja maupun informasi ketenagakerjaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sosialisasi secara masif dan monitoring secara langsung ke masing-masing perusahaan
	Bidang KUKM	
1	Para pelaku usaha kurang mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjalankan bisnis mereka sehingga mereka belum bekerja secara optimal untuk bisa naik kelas.	Pelatihan pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi untuk para pelaku usaha
2	Pelaku usaha mikro belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB)	Fasilitasi pendampingan penerbitan legalitas usaha

No	Masalah	Solusi
3	Pelaku usaha mikro belum terampil dalam melakukan pemasaran online/offline produk	Fasilitasi pendampingan / pelatihan pemasaran online/offline produk UMKM
4	Kurangnya wawasan serta keahlian pengurus, pengawas dan anggota koperasi dalam pengembangan usaha dan perkoperasian	Mengembangkan pengetahuan dan motivasi kepada pengurus, pengawas dan anggota koperasi melalui berbagai macam pelatihan baik tentang perkoperasian maupun pengembangan usaha yang berbasis teknologi, praktikal dan berkelanjutan
5	Regenerasi kepengurusan koperasi kurang berjalan dengan baik terutama terhadap minat generasi muda untuk menjadi bagian dari kepengurusan koperasi	<i>Rebranding</i> koperasi melalui <i>campaign</i> atau <i>tagline</i> dalam membentuk citra koperasi yang lebih modern untuk menarik masyarakat luas terutama generasi muda agar berminat menjadi bagian dari koperasi sehingga diharapkan tercipta berbagai inovasi dalam pengembangan usaha koperasi melalui kepengurusan generasi muda
6	Tata kelola koperasi yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku masih perlu ditingkatkan	Sosialisasi peraturan perkoperasian yang berlaku dan pengawasan secara berkala

21. Inspektorat

No	Masalah	Solusi
1.	Bahwa titik berat pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat tidak hanya melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD serta memperbaiki kesalahan kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Namun juga sebagai quality anssurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.	Bahwa titik berat pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat tidak hanya melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD serta memperbaiki kesalahan kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Namun juga sebagai quality anssurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.

22. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Masalah	Solusi
1	Sekretariat	Sekretariat
a.	Kurangnya sumber daya manusia yang memadai	Usulan Pegawai melalui E Formasi

No	Masalah	Solusi
b.	Koordinasi dan sinergi yang belum optimal	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi
c.	Tantangan Pemanfaatan teknologi	Mengikuti bimtek dan pelatihan
d.	Kurangnya SOP yang terpadu	Menyusun SOP
2	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
a.	Adanya Konflik Sosial di masyarakat	Mitigasi Konflik Sosial di masyarakat
b.	Adanya ketidaktertiban aktivitas masyarakat di ruang publik	Deteksi dini dan pengawasan ketidak tertiban aktivitas masyarakat di ruang publik
c.	Adanya keterbatasan sarana dan prasarana keamanan	Mengusulkan usulan sarana dan prasarana keamanan
d.	kurangnya partisipasi masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan Siskamling
e.	Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas personil Satpol PP dan Damkar	Usulan Pegawai melalui E Formasi dan bimtek/ diklat/ pelatihan untuk meningkatkan kualitas personil Satpol PP dan Damkar

No	Masalah	Solusi
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
a.	Kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundang undangan daerah yang masih kurang	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan agar masyarakat patuh terhadap Peraturan Perundang undangan daerah
b.	Koordinasi antar perangkat daerah dan instansi lain yang belum optimal	Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan instansi lain
c.	Kapasitas aparatur yang terbatas	Usulan Pegawai melalui E Formasi
d.	Kurangnya sosialisasi peraturan perundang undangan daerah.	Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan daerah.
4.	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
a.	Kurangnya tenaga/ personil yang terlatih	Usulan Pegawai melalui E Formasi dan Pengembangan Kapasitas SDM Damkar melalui Bimtek/ Diklat/ Pelatihan
b.	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat

No	Masalah	Solusi
c.	Belum optimalnya upaya pencegahan melalui inspeksi, edukasi/sosialisasi dan pengawasan terhadap bangunan untuk proteksi kebakaran.	Melaksanakan upaya pencegahan melalui inspeksi, edukasi/sosialisasi dan pengawasan terhadap bangunan untuk proteksi kebakaran.
d.	Kurangnya sarana dan prasarana	Mengusulkan usulan sarana dan prasarana

23. Sekretariat DPRD

No	Masalah	Solusi
1.	Terlambatnya dokumen atau data dari eksekutif untuk diproses sebelum dibahas di DPRD, misalnya pembahasan APBD	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan semua pihak terkait;
2.	Perubahan peraturan yang sangat dinamis seringkali menyulitkan pelaksana di lapangan	a. Menyesuaikan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengampu aturan terkait
3.	Pencapaian target penyelesaian raperda terkendala waktu yang tidak dapat diprediksi	Melaksanakan koordinasi dgn Biro Hukum Prov Jatim agar hasil fasilitasi dapat segera diverifikasi, dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.

No	Masalah	Solusi
4.	Terlambatnya penyusunan Renja DPRD, karena seharusnya disusun lebih dahulu dibanding Renja Sekretariat DPRD	Mendorong penyusunan Renja DPRD Tahun n+1 pada bulan Januari tahun n, sehingga bisa menjadi acuan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun n+1.
5.	Fungsi pengendalian dan pengamanan barang sulit dilakukan karena jumlah barang inventaris kantor yang beragam, banyak, serta area kantor yang luas	Melaksanakan inventarisasi barang dan rekonsiliasi aset secara berkala

24. Kecamatan Kartoharjo

No	Masalah	Solusi
	NIHIL	NIHIL

25. Kecamatan Manguharjo

No	Masalah	Solusi
1	Kualitas dan kuantitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang layanan serta mengadakan kegiatan pelatihan / bimtek pelayanan publik
2	Menurunnya semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan sebagai akibat berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan	Meningkatkan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral bersama Tiga Pilar dengan mengundang Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Pencak silat, Masyarakat Kurang beruntung dan lain-lain
3	Kurangnya koordinasi dalam penyusunan jadwal kegiatan dengan instansi terkait yang berpengaruh terhadap serapan anggaran	Penetapan jadwal ulang pada saat perubahan anggaran
4	Adanya aturan baru terkait kebutuhan belanja barang yang berpengaruh terhadap serapan anggaran	Pengadaan barang disesuaikan spek yang telah diatur oleh pemerintah

26. Kecamatan Taman

No	Masalah	Solusi
1.	Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik belum sepenuhnya representatif	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
2.	Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya	Meningkatkan kualitas dan pemahaman SDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya
3.	Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan	Meningkatkan kualitas penyimpanan dan pengolahan data
4.	Masih terdapatnya aparatur di Kelurahan yang belum siap dalam menghadapi era teknologi dan digitalisasi baik dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat, dimana pada saat ini banyak menggunakan aplikasi	Meningkatkan kualitas SDM
5.	Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan dan konektivitas antar kelurahan terkait pengembangan kawasan wisata	Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tata kelola di wilayah Kecamatan Taman

27. Bagian Hukum

No	Masalah	Solusi
1.	Kurangnya sumber informasi dalam penyusunan dokumen penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Kurangnya sumber informasi dalam penyusunan dokumen penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

28. Bagian Organisasi

No	Masalah	Solusi
1.	Adanya regulasi baru yang mengatur nomenklatur jabatan pelaksana	Dilaksanakan desk penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana dan anjab abk pada masing-masing perangkat daerah
2.	Adanya kebijakan baru berupa Perwal 76 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas yang mengakibatkan penyesuaian tata naskah dinas pada Perangkat Daerah dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Dilakukannya sosialisasi dan layanan konsultasi tata naskah dinas secara terus menerus
3.	Masih adanya beberapa UPP yang belum konsisten mencatat data penerima layanan sehingga menyebabkan kurang tepatnya perhitungan jumlah responden survei	Dilakukannya sosialisasi survei kepuasan masyarakat secara berkala

No	Masalah	Solusi
4.	Kemungkinan adanya rotasi pegawai yang menangani pelayanan publik pada masing-masing UPP	koordinasi dan memberikan layanan konsultasi pelayanan publik ke seluruh UPP
5.	Masih kurangnya pemahaman ASN tentang implementasi Core Values ASN BerAKHLAK dan turunan nilainya sehingga penerapannya belum maksimal	Melakukan pendampingan dengan Kemenpan RB Menyelenggarakan forum komunikasi BerAKHLAK Meningkatkan sosialisasi implementasi Core Values ASN BerAKHLAK
6.	Keterlambatan pengisian data kinerja oleh perangkat daerah karena data kinerja belum rilis	Monev data kinerja secara berkala Pendampingan penyusunan LKjIP Update informasi data kinerja dan pelaporan kinerja

29. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan

No	Masalah	Solusi
1	Jumlah personil Fungsional PBJ yang belum memenuhi kriteria kebutuhan LKPP dan MCP KPK.	Mengoptimalkan pegawai untuk ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan UKPBJ dan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk pemenuhan kebutuhan pegawai.

30. Bagian Pemerintahan

No	Masalah	Solusi
1	Data Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan belum dimutakhirkan, karena belum ada pendetailan.	Melakukan proses pendetailan

31. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

No	Masalah	Solusi
1	Belum adanya Standarisasi kewenangan Fasilitas kegiatan terkait Organisasi/Lembaga Keagamaan atau Lembaga Kemasyarakatan, sehingga banyak Penggunaan Anggaran tidak linear dari Dokumen Perencanaan sebelumnya	a. Menyusun Jenis Pelayanan baru pada Standar Pelayanan pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. b. Melakukan sosialisasi Standar Pelayanan tersebut kepada Masyarakat baik secara langsung maupun melalui <i>website</i> atau media sosial.

32. Bagian Umum

No	Masalah	Solusi
1	Jangka waktu penyelesaian surat masuk adalah 1 (satu) hari, tetapi karena agenda pimpinan, penyelesaian surat masuk bisa lebih dari 1 (satu) hari	Memberi tanda untuk surat masuk yang segera untuk mendapatkan disposisi
2	OPD/instansi/masyarakat memasukkan surat hari ini untuk keperluan besok hari	OPD/instansi/masyarakat bisa melacak surat melalui nomor whatsapp
3	Aplikasi SRIKANDI sering mengalami kendala server dari pusat	Menggunakan aplikasi SIKD atau e-Surat dalam pelaksanaan tugas surat menyurat (bersifat sementara), jika SRIKANDI sudah stabil kembali ke aplikasi SRIKANDI

3.3.2 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan evaluasi kinerja berpedoman pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tujuan evaluasi dengan skala pengukuran ordinal untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

No	Interval	Kategori	Interpretasi
1	86 – 100%	Sangat Tinggi	Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
2	71 – 85%	Tinggi	Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
3	56 – 70%	Cukup atau Sedang	Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
4	41 - 55%	Rendah	Akuntabilitas kerjanya kurang baik, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan dan perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
5	< 40	Sangat Rendah	Akuntabilitas kerjanya kurang dan kinerja rendah

No	SKPD	CAPAIAN KINERJA							
		PERJANJIAN KINERJA		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
		Jumlah	Rerata Capaian	Jumlah	Rerata Capaian	Jumlah	Rerata Capaian	Jumlah	Rerata Capaian
1	Dinas Pendidikan	2	103,64%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Pendidikan			4	101,87%	12	100,62%	163	107,09%
2	Disbudparpora	4	106,81%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Kebudayaan			3	210,67%	3	301,01%	4	465,34%
	Urusan Pemuda Olah Raga			2	322,65%	5	470,65%	5	115,20%
	Urusan Pariwisata			4	191,58%	10	121,30%	13	102,56%
3	Dinas Kesehatan & KB	12	102,78%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Kesehatan			19	108,80%	35	102,25%	168	108,73%
	Urusan PPKB			3	111,16%	8	100,00%	25	100,00%
4	Dinsos, PP & PA	7	104,17%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Sosial			6	109,29%	15	105,54%	48	281,13%
	Urusan PP dan PA			6	114,06%	14	110,15%	25	149,07%
5	Dispendukcapil	2	101,97%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil			4	105,57%	9	100%	21	108,25%
6	DPM PTSP	3	106,66%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Penanaman Modal			6	106,89%	11	114,45%	18	115,68%
7	Dinas Perdagangan	4	104,16%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Perdagangan			6	100%	14	100%	21	100%
8	Dinas Tenaga Kerja KUM	6	168,2%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Tenaga Kerja			4	304,78%	12	107,64%	21	104,26%
	Urusan KUKM			3	240,28%	3	122,50%	3	119,33%
	Urusan Industri			2	285%	2	400%	4	140%

No	SKPD	CAPAIAN KINERJA							
		PERJANJIAN KINERJA		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
		Jumlah	Rerata Capaian	Jumlah	Rerata Capaian	Jumlah	Rerata Capaian	Jumlah	Rerata Capaian
9	Diskominfo	5	105,20%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Kominfo			3	105,28%	9	100,00%	24	103,75%
	Urusan Statistik			1	100,00%	1	100,00%	1	100%
	Urusan Persandian			1	100,00%	1	100,00%	2	100%
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	101,49%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Pekerjaan Umum			9	101,06%	17	211,74%	34	200,87%
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	106,53%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Perkim			4	100,26%	13	100,00%	19	105,29%
	Urusan Pertanahan			2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%
12	Dinas Perhubungan	2	102%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Perhubungan			2	100%	14	100%	20	100%
13	DLH	3	113,35%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Lingkungan Hidup			9	107,97%	18	105,21%	30	108,81%
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5	102,02%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Pangan			4	104,20%	10	103,89%	21	146,56%
	Urusan Kelautan dan Perikanan			3	110,71%	4	140,10%	6	283,73%
	Urusan Pertanian			6	113,67%	10	108,50%	15	102,52%
15	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	3	174%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Perpustakaan			3	349,93%	8	115,80%	12	109,14%
	Urusan Kearsipan			2	100,56%	2	113,00%	4	115,36%

No	SKPD	CAPAIAN KINERJA							
		PERJANJIAN KINERJA		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
		Jumlah	Rerata Capaian	Jumlah	Rerata Capaian	Jumlah	Rerata Capaian	Jumlah	Rerata Capaian
16	Satpol PP	3	103%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Trantibum Linmas			3	100,69%	12	100,17%	22	108,78%
17	BPBD	3	109,99%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Trantibum Linmas			2	102,36%	11	100%	17	129,08%
18	BKPSDM	4	106,63%	Kategori Sangat Tinggi					
	Unsur Penunjang Kepegawaian			1	100,13%	11	100,00%	16	116,07%
	Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan			2	100,00%	2	115,07%	2	184,93%
19	BKAD	2	104,5%	Kategori Sangat Tinggi					
	Unsur Penunjang Keuangan			3	100,00%	12	100,00%	24	120,86%
20	Bapenda	2	339,75%	Kategori Sangat Tinggi					
	Unsur Penunjang Keuangan			2	100,00%	7	100,00%	19	100,00%
21	Bappelitbangda	4	100%	Kategori Sangat Tinggi					
	Unsur Penunjang Perencanaan			4	100,28%	13	100,00%	32	100,00%
22	Inspektorat	2	100%	Kategori Sangat Tinggi					
	Unsur Penunjang Pengawasan			3	124,91%	8	112,51%	19	102,86%
23	Kecamatan Kartoharjo	3	101,51%	Kategori Sangat Tinggi					
	Unsur Penunjang Kecamatan			5	101,76%	10	125,41%	47	100,00%
24	Kecamatan Manguharjo	3	100,21%	Kategori Sangat Tinggi					
	Unsur Penunjang Kecamatan			7	100,13%	15	100,00%	47	100,00%
25	Kecamatan Taman	3	100,37%	Kategori Sangat Tinggi					
	Unsur Penunjang Kecamatan			7	100,94%	15	100,00%	45	100,00%
26	Bagian Pemerintahan	3	108,02%	Kategori Sangat Tinggi					

No	SKPD	CAPAIAN KINERJA							
		PERJANJIAN KINERJA		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
		Jumlah	Rerata Capaian	Jumlah	Rerata Capaian	Jumlah	Rerata Capaian	Jumlah	Rerata Capaian
	Unsur Staf			2	100,00%	9	100,00%	12	100,00%
27	Bagian PBJ Adbang	3	101,56%	Kategori Sangat Tinggi					
	Unsur Staf			2	100,00%	8	100,00%	13	100,00%
28	Bagian Umum	3	99,86%	Kategori Sangat Tinggi					
	Unsur Staf			1	103,24%	9	100,00%	19	109,41%
29	Bagian Hukum	5	101,27%	Kategori Sangat Tinggi					
	Unsur Staf			2	100,51%	6	100,33%	10	104,10%
30	Bagian Organisasi	9	104,59%	Kategori Sangat Tinggi					
	Unsur Staf			1	100%	7	101,37%	11	127,27%
31	Bagian Perekonomian Kesra	2	99,13%	Kategori Sangat Tinggi					
	Unsur Staf			3	100,30%	9	100,38%	11	100,00%
32	Sekretariat DPRD	1	105,73%	Kategori Sangat Tinggi					
	Unsur Layanan DPRD			2	105,86%	14	99,64%	23	99,85%
33	Bakesbangpol	4	101%	Kategori Sangat Tinggi					
	Urusan Pemerintahan Umum			6	100,00%	11	100,00%	21	100,00%
	Jumlah	124	114,85%	179	180,22%	451	172,61	1139	181,69%

3.4. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
1.	Pembangunan dan Penganggaran-Perencanaan	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah	Mengakomodir perubahan ketentuan terkait prosedur perencanaan daerah untuk perencanaan daerah jangka panjang, perencanaan daerah jangka menengah, dan perencanaan daerah tahunan
2.	Pelestarian Cagar Budaya	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cagar Budaya	Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat daerah, masyarakat nasional, dan masyarakat internasional
3.	Penanggulangan Penyakit Menular	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular	Melindungi masyarakat dari penularan penyakit Menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit nmenular Mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga dan masyarakat

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
4.	Penataan Badan Usaha Milik Daerah	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun	Memuat perubahan terhadap ketentuan yang mengatur maksud dan tujuan Perumda, kegiatan Perumda, modal dasar, sumber modal, KPM, Anggota Dewan Pengawas dan lain-lain.
5.	Pengelolaan Lapak	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lapak	Memberikan payung hukum pengelolaan kegiatan kewirasahaan yang memanfaatkan lapak oleh masyarakat untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha masyarakat secara efektif, efisien, dan berdaya guna.
6.	Akuntabilitas APBD	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Tertib akuntabilitas dalam penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2023
7.	Pengakuan Hak Penyandang Disabilitas	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan,

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
			dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat
8.	Penanaman Modal	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penanaman Modal	Memuat perubahan ketentuan pada maksud, bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kriteria modal usaha, dan penghapusan pasal-pasal.
9.	Pengelolaan Rumah Susun Umum	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Rumah Susun Umum	Mewujudkan rumah susun yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta pengelolaan rumah susun yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat berpenghasilan rendah
10.	Perubahan APBD	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Perubahan DPA APBD Tahun Anggaran 2024

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
11.	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif Memberikan kemudahan dan fasilitas kepada Pelaku Ekonomi Kreatif agar dapat meningkatkan pendapatannya mewujudkan tersedianya prasarana ruang kreatif sebagai ruang ekspresi, promosi bagi masyarakat kreatif Daerah mendorong terwujudnya kota kreatif sebagai kota yang memfasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif
12.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Obat-obatan terlarang	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	Memperkuat pelaksanaan upaya P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan Melindungi masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan,

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
			bahaya penyalahgunaan, maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
13.	Rencana Pembangunan Industri	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun Tahun 2024-2044	Menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi Pembangunan Industri Daerah Mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan Mewujudkan pemerataan Pembangunan Industri guna memperkuat ekonomi Daerah
14.	Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD
15.	Penetapan APBD	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2025
16.	Rencana Pembangunan Daerah	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026	Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
			Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
17.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026	Sebagai acuan dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah tiap tahun
18.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada ASN	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Memuat beberapa ketentuan yang diubah terkait pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja
19.	Akuntabilitas Keuangan	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengesahan Atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2023	Sebagai bentuk Pengesahan atas Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Tahun 2023
20.	Penciptaan Kondusifitas Kamtibmas selama Ramadhan dan Hari Raya	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci	Menciptakan suasana kondusif selama bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
		Ramadan Dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024	
21.	Pengelolaan Lapak	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lapak	Mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan lapak Memberikan kepastian hukum bagi pelapak, pengelola lapak, dan kelurahan
22.	Pemberian Tunjangan bagi ASN dan Pensiunan	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Sebagai Pedoman Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas kepada ASN, pensiunan dan penerima tunjangan Tahun 2024
23.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara	Memberikan tambahan penghasilan bagi ASN yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun minimal 1 (satu) tahun
22.	Pelaksanaan Bantuan Air Bersih	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2020 Tentang	Untuk memberikan penjelasan terkait penerima bantuan yang memenuhi persyaratan, penentuan besaran bantuan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
		Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Air Bersih	sosial air bersih, jumlah penerima dan lokasi bantuan sosial
23.	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kota Madiun	Untuk memberikan penjelasan terkait besaran bantuan yang diberikan kepada penerima BLT-DBHCHT per bulannya selama 12 (dua belas) bulan
24.	Peningkatan Keterampilan Kerja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Sektor Pertanian, Peternakan Dan Perikanan	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Keterampilan Kerja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Sektor Pertanian, Peternakan Dan Perikanan	Sebagai pedoman pelaksanaan bagi penerima bantuan peningkatan keterampilan
25.	Pola Karier Pegawai Negeri Sipil	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Memberikan penerangan terkait perubahan pada persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
26.	Penerimaan Peserta Didik Baru	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2024/2025	Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan Memberikan pedoman bagi Kepala Dinas Pendidikan dan kepala sekolah untuk pelaksanaan PPDB sesuai kewenangan
27.	Penghapusan sanksi administratif	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Hari Jadi Kota Madiun Ke-106	Memberikan keringanan beban bagi masyarakat sebagai wajib pajak
28.	Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Untuk menginformasikan jenis perizinan berusaha dan perizinan non berusaha yang didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
29.	Perubahan Tarif Air Minum	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun	Memberikan informasi terkait tarif air minum menurut kelompok pelanggan, dan struktur serta besarnya tarif air minum didasarkan pada klasifikasi kelompok pelanggan
30.	Pembangunan Kependudukan	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2024 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2047	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi Penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta Persebaran Penduduk mengendalikan pertumbuhan dan Persebaran Penduduk sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
31.	Manajemen Risiko Pembangunan Daerah	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2024 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Daerah	meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan daerah meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik
32.	Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Shelter Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Shelter bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
33.	Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	Sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan Penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses Penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi Penelitian
34.	Pemberian Bantuan Sosial	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 Tentang	Memuat ketentuan yang diubah terkait penerima Bantuan Sosial PPKS

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
		Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	
35.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025	Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume, dan unit kegiatan
36.	Rencana Bisnis BUMD	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2022-2026	Memuat ketentuan yang diubah terkait muatan rencana bisnis dan lampirannya
37.	Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran	Untuk mengakomodir perubahan rencana kerja dan anggaran pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
		Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024	
38.	APBD Kota Madiun	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
39.	Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Madiun	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025	Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2025.
40.	Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024	Sebagai perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
41.	Akuntailitas Kinerja Keuangan	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Penjabaran atas pertanggungjawaban APBD Tahun 2023
42.	Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2024 secara detail setiap program dan kegiatan
43.	Penghapusan Pajak Bagi Kategori Tertentu	Peraturan Wali Kota Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Memberikan keringanan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah
44.	Penghapusan Retribusi Bagi Kategori Tertentu	Peraturan Wali Kota Kota Madiun Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Memberikan keringanan retribusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah

3.5. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

A. Rekomendasi Atas Capaian Kinerja Sasaran Misi Daerah

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
1	Tidak seluruh tujuan dari misi daerah targetnya dapat dicapai, dari 7 indikator tujuan 5 tercapai targetnya (dari sisi tujuan kinerjanya 71,4%) sisanya 2 indikator tidak tercapai targetnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketercapaian memenuhi/melampaui target indikator kinerja misi daerah dari indikator tujuan dalam RPJMD, maka untuk tahun keempat implementasi RPJMD yaitu LKPJ Tahun 2023 bahwa: Pemerintahan Kota Madiun pada Tahun 2023 berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja tujuan misi pertama, ke dua dan ke tiga dengan prestasi yang membanggakan (100% target indikator tujuan tercapai). Tidak dapat mencapai/melampaui target	Tujuan Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif: 1. Meningkatkan Akses Pendidikan dan Pelatihan - Menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dengan program pembagian laptop untuk SD dan SMP serta Beasiswa untuk mahasiswa - Mengembangkan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas. - Meningkatkan literasi digital dan keuangan agar masyarakat	Tujuan Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif: 1. Mengurangi Ketimpangan Ekonomi - Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga oleh masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat - Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	indikator kinerja tujuan misi empat dengan prestasi rendah (33 % target indikator tujuan tercapai). Kedua indikator yang menyebabkan misi ke empat capaian kinerjanya rendah adalah: Pada tujuan Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif gagal mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 6,87 dari target 6,89. Capaian Tahun 2023 kondisinya stagnan dibanding Tahun 2022 pada angka 6,87 (<i>angka sangat sementara</i>). Pada tujuan Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat untuk indikator Indeks gini gagal mencapai target dari capaian Tahun 2023 sebesar 0,416 dari target 0,329, jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022	siap menghadapi perkembangan teknologi. • Meningkatkan branding, pemasaran atau Promosi • Meningkatkan Kualitas Produksi 2. Memperluas Akses terhadap Peluang Ekonomi • Mendorong kewirausahaan dengan memberikan akses modal dan tempat bagi UMKM. • Meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas layanan perbankan untuk UMKM. • Mendorong partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam dunia kerja dan bisnis.	terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. • Memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. 3. Memperluas Kesempatan Kerja dan Kewirausahaan • Menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan bagi semua kelompok masyarakat. • Mendukung perkembangan UMKM agar lebih berdaya saing.

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	(yang sebesar 0,398), artinya pada Tahun 2023 ketimpangan semakin lebar, kesejahteraan semakin tidak merata. Progress capaian secara keseluruhan indikator tujuan selama 4 tahun implementasi RPJMD yaitu tahun LKPJ 2020 dari total indikator tujuan sebesar 69%nya indikator tujuan tercapai/terlampau targetnya dan LKPJ Tahun 2021 sebesar 71,40%nya, LKPJ 2022 sebesar 100%nya dan LKPJ 2023 sebesar 71,40%nya indikator tujuan yang tercapai/melampaui targetnya. Artinya untuk tahun keempat implementasi RPJMD prestasi kerjanya Kembali mengalami penurunan, setelah Tahun 2022 cukup membanggakan bahwa 100% target indikator tujuan tercapai/terlampau targetnya.	3. Mendorong Investasi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan • Mengembangkan kebijakan ekonomi yang mendukung investasi di sektor yang menciptakan lapangan kerja luas. • Mempromosikan investasi hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. • Mendorong sektor industri kreatif dan ekonomi digital sebagai motor pertumbuhan baru. 4. Memperkuat Kebijakan Perlindungan Sosial	• Memperluas jaringan pemasaran produk lokal, baik melalui digitalisasi maupun pembinaan atau pelatihan dengan memanfaatkan teknologi (TIK) 4. Meningkatkan Inklusi Keuangan • Memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan seperti perbankan, kredit, dan asuransi. 5. Meningkatkan Keadilan Sosial dan Ekonomi

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
		• Memberikan bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran untuk kelompok miskin dan rentan berupa JKK dan JKM. 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik • Mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran negara dengan digitalisasi perencanaan dan penganggaran. • Melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan ekonomi. • Mengendalikan angka inflasi Kota Madiun • Menjaga stabilitas harga	• Memastikan adanya perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti pekerja informal, perempuan, dan penyandang disabilitas. 6. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan • Mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. 7. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
		Tujuan Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat: Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan ukuran statistik yang menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Indeks gini berkisar antara 0 hingga , yang artinya semakin mendekati 1 maka tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah semakin tinggi, tetapi sebaliknya semakin mendekati 0 maka distribusi pendapatan semakin merata. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Jawa Timur, terdapat peningkatan gini ratio Kota Madiun dari tahun 2022 hingga 2023 yaitu dari	Melibatkan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Tujuan Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat: Agar tercapai pemerataan distribusi pendapatan antar kelompok penduduk , sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Madiun

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
		0,398 menjadi 0,416. Artinya adalah terdapat ketimpangan pendapatan yang semakin melebar antara kelompok teratas dengan kelompok menengah kebawah. Kebijakan membuka peluang investasi secara luas dan kemudahan akses melalui kemajuan teknologi tentunya membawa dampak positif dan negatif ke masyarakat. Adanya pergeseran kultur di masyarakat yang menyebabkan perubahan gaya hidup juga berpengaruh pada ketimpangan ini. Dengan masuknya investasi di bidang jasa dan perdagangan yang menawarkan konsep “One stop shooping” , serta kemajuan teknologi dengan berbagai aplikasi online,	

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
		menyebabkan “kue ekonomi” yang ada di Kota Madiun lebih banyak dinikmati oleh kelompok atas, dibandingkan kelompok menengah dan kelompok terbawah yang kemampuannya terbatas. Oleh karena itu untuk mengatasi persoalan indeks gini, maka: - perlu dukungan untuk meningkatkan kegiatan padat karya, sehingga membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan. - Diperlukan juga kebijakan serta komitmen yang jelas dalam pengaturan investasi di Kota Madiun, sehingga investasi tidak hanya memberikan keuntungan	

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
		pada kelompok atas (pemilik modal), tetapi kelompok menengah kebawah juga merasakan manfaat dari investasi c. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu agar ekonominya tetap stabil d. Peningkatan softskill pada siswa sekolah menengah untuk dapat meningkatkan kualitas SDM e. Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur sarana prasarana umum dan kesehatan sehingga seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses fasilitas umum dan kesehatan yang merata. f. Memberikan bantuan akses perbankan kepada para UMKM	

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
		sehingga dapat meningkatkan skala usaha yang nantinya juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.	
2	Hasil olah data antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran daerah menunjukkan bahwa dari total 17 jenis indikator sasaran yang harus dipertanggungjawabkan capaiannya dalam LKPJ: Terdapat 15 indikator sasaran yang realisasinya mencapai/melampaui targetnya (kinerja sasaran capaiannya 88,2%) sedangkan 2 indikator sasaran yang realisasinya tidak mencapai targetnya (11,8%). Dua indikator sasaran yang tidak mencapai target adalah : Indeks Inovasi Daerah Persentase pertumbuhan PDRB sektor	1. Penguatan UMKM dan Pedagang Lokal • Pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). • Kemudahan perizinan usaha untuk mendorong lebih banyak pedagang masuk ke sektor formal. • Pelatihan digital marketing untuk meningkatkan daya saing dan penjualan. • Akses pembiayaan yang lebih luas melalui kredit mikro atau dana bergulir.	1. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Madiun 2. Adanya perbaikan terhadap kualitas produk sehingga meningkatkan daya saing 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas harga sehingga tidak terjadi kemunduran minat beli masyarakat 4. Multiplier effect dari peningkatan kapasitas produksi berupa peningkatan

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	perdagangan Kesimpulannya: Untuk Misi pertama pada sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk indikator sasaran Inovasi daerah tidak mencapai targetnya, capaian indeks Tahun 2023 sebesar 52,62 dari target 58,4, jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 53,96 terjadi penurunan indeks, artinya kualitas pelayanan public menurun bukan meningkat sebagaimana amanat sasaran yaitu: meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk misi ke empat pada sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi untuk indikator sasaran Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tidak mencapai	2. Peningkatan Infrastruktur Perdagangan • Revitalisasi pasar tradisional agar lebih bersih, modern, dan nyaman bagi konsumen. • Pengembangan kawasan perdagangan baru seperti lapak kelurahan dan area perdagangan tematis • Peningkatan akses transportasi yaitu rute wisata kota. 3. Promosi dan Event Perdagangan • Mengadakan festival atau bazar perdagangan secara rutin untuk menarik pembeli.	pendapatan per kapita dan pengurangan angka pengangguran

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	targetnya, capaian persentasenya Tahun 2023 sebesar 5,60 dari target 10,16 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 7,98 terjadi penurunan, artinya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan menurun bukan meningkat sebagaimana amanat sasaran, yaitu Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi. Jika dibanding dengan kinerja indikator sasaran tahun sebelumnya untuk Tahun 2023 nampaknya mengalami peningkatan, dari total indikator sasaran sebanyak 17 jenis pada Tahun 2020 (awal RPJMD) capaiannya 70,80% indikator sasaran tercapai targetnya, Tahun 2021 meningkat sebanyak 82,40% target tercapai/terlampau sedangkan Tahun 2022 hanya 68,4% indikator sasaran yang tercapai/terlampau targetnya sedangkan Tahun 2023 sebanyak 88,20% indikator	- Promosi produk unggulan kota melalui etalase kota yakni PBC, PSC dan PRC. - Meningkatkan branding kota sebagai kota wisata dan kuliner 4. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung - Penyederhanaan birokrasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha. - Pemberian insentif investasi bagi pelaku usaha besar yang ingin berinvestasi di sektor perdagangan. - Mengendalikan angka inflasi sehingga melindungi dan menjaga daya beli masyarakat	

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	sasaran yang tercapai/terlampaui targetnya.	Meningkatkan koordinasi antarinstansi agar kebijakan perdagangan lebih efektif.	
3	Rekomendasi: Untuk indikator tujuan dan sasaran yang targetnya tidak tercapai (sebagaimana dalam tabel diatas) direkomendasikan agar OPD melakukan analisis guna mencari penyebab mengapa berbagai indikator sasaran tersebut pada Tahun 2023 tidak mencapai targetnya. Selanjutnya penyebab tersebut menjadi dasar arah kebijakan OPD pada perencanaan dan anggaran tahun perubahan RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025. Dengan demikian hal yang sama tidak terulang pada Tahun 2024. Sedangkan Untuk berbagai indikator sasaran yang telah mencapai/melampaui target, tentu DPRD mengapresiasi sebagai		

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	prestasi yang membanggakan maka di rekomendasikan agar program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target kinerja tersebut pada Tahun Anggaran 2024 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui perumusan arah kebijakan yang lebih fokus dan terukur serta di dukung alokasi anggaran yang cukup dan memadai.		

B. Rekomendasi Atas Capaian Keuangan Daerah

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
1	Proporsi silpa Tahun 2023 sebesar 8,7% dari realisasi dana tersedia, secara nominal mengalami penurunan dibanding silpa Tahun 2022, demikian juga proporsinya terhadap dana tersedia juga menurun sebagaimana yang nampak dalam grafik diatas. Ditengah problem keterbatasan fiskal daerah,	Penurunan SiLPA menunjukkan bahwa dalam pengelolaan belanja menunjukkan efisiensi dan efektifitas yang terus mengalami perbaikan. Dengan adanya kebijakan penyusunan SPD (surat penyediaan dana) sebelum menyusun DPA maka OPD menyusun	Meningkatkan realisasi belanja, berarti SiLPA semakin berkurang menunjukkan efisiensi dan efektifitas belanja berjalan dengan baik.

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	Silpa sebesar Rp.113.953.605.152 M atau senilai 8,7% dari dana tersedia tersebut secara nominal dirasa masih belum ideal, namun demikian atas terus penurunannya nilai silpa selama dua Tahun terakhir sampai dengan Tahun 2023 tentu patut diapresiasi. Dari data dalam grafik tren silpa tahun berjalan diatas, nampaknya permasalahan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun sampai pada Tahun 2023 sudah menemukan jalan keluar artinya kebijakan keuangan daerah di Tahun 2023 setelah direalisasikan mampu meningkatkan pendapatan dan serapan belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran sudah semakin akurat. Untuk itu direkomendasikan agar Pemerintah Daerah tetap mempertahankan kebijakan yang bertujuan	rencana pencairan dana dengan efektif dan efisien. Disamping itu besaran realisasi serapan juga dijadikan instrument dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, sehingga OPD berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyerapan anggaran belanjanya.	

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	untuk akurasi perencanaan dan kebijakan anggaran dengan tujuan meningkatnya pendapatan dan serapan belanja daerah sehingga untuk tahun yang akan datang (realisasi APBD Tahun 2024) lebih baik dan lebih akurat lagi dibanding Tahun 2023, sehingga SiLPA tahun berjalan semakin dapat ditekan dalam batas yang wajar ($\pm$ 5% dari dana tersedia).		
2	Agar tahun 2024 silpa tahun berjalan lebih kecil nilainya lagi maka DPRD merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : Dari sisi Perencanaan terus melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2024 agar realisasi anggaran Tahun 2024 lebih maksimal; Dari sisi pelaksanaan APBD melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi yang lebih ketat per	Pelaksanaan Perubahan APBD sudah dilakukan dengan tepat waktu bahkan lebih awal, Perubahan APBD disusun pada saat DPRD lama. Monitoring dan evaluasi per triwulan sudah dilakukan bahkan menjadi instrument <i>punishment</i> dan <i>reward</i> untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Dengan melakukan manajemen kas yang efektif dan efisien apabila ada idle	Meningkatan realisasi belanja dan manajemen kasda untuk meningkatkan pendapatan daerah.

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi SKPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah dan reward bagi yang tinggi serapannya; Terus melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (<i>idle cash</i>) atas Silpa tahun 2023 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar.	kas maka dimasukkan deposito, sehingga dalam Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah ada posting pendapatan deposito	
3	Dari sisi Pendapatan Untuk maksud peningkatan kapasitas fiskal daerah, patut disesalkan pada komponen pendapatan Dana Insentif Fiskal atau IF (dulu DID) Tahun 2024 Kota Madiun alokasinya dibanding Tahun 2023 turun, Tahun 2024 memperoleh alokasi Insentif Fiskal (IF) dari APBN 2024 sebesar Rp.32.597.699.000,- (dibanding daerah yang lain memang cukup tinggi) namun jumlah tersebut lebih rendah dibanding perolehan	Sebenarnya pendapatan yang berasal dari insentif fiskal kita tidak bisa dengan pasti menentukan bahwa bidang ini yang akan dinilai oleh Kemenkeu agar mendapatkan insentif Fiskal. Bahkan besaran pagu total insentif fiskal juga berubah bahkan mengalami penurunan, sehingga secara keseluruhan daerah yang mendapatkan insentif fiskalnya juga	Mempertahankan pendapatan Insentif Fiskal karena ini bersifat reward maka harus berusaha meningkatkan kinerja bidang yang menjadi penilaian untuk mendapatkannya, termasuk bidang bidang yang lainnya jika dasar penilaian berubah tidak kehilangan untuk mendapatkannya.

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	Insentif Fiskal (IF) Tahun 2023, pada Tahun 2023 alokasi Insentif Fiskal (IF) Kota Madiun total sebesar Rp.74.714.922.000 baik Insentif Fiskal (IF) awal maupun dari Insentif Fiskal (IF) tambahan pada semester pertama dan kedua (dari kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting dan serapan belanja Tahun 2023 dan inflasi). Khusus Insentif Fiskal (IF) Tahun 2024 Tahun berjalan sekarang ini, seharusnya Kota Madiun dapat mengejar Insentif Fiskal (IF) tambahan atas kinerja tahun berjalan, karena sejak Tahun 2022 kesempatan memperoleh Insentif Fiskal (IF) sebanyak 3 kali dalam satu Tahun, yaitu Insentif Fiskal (IF) atas kinerja tahun sebelumnya dan IF tambahan atas kinerja (q 1 s/d q 3 pada semester pertama dan Insentif Fiskal (IF) atas kinerja semester kedua tahun	mengalami penurunan. Kota Madiun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan insentif fiskal agar maksimal. Di Tahun 2023 Kota Madiun mendapatkan Rp 32.597.669.00,- pada saat informasi resmi pendapatan transfer.	

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	berjalan), sebagaimana Kota Madiun memperoleh Insentif Fiskal (IF) tambahan pada Tahun 2023. Dari data web kemenkeu nampaknya yang perlu dibenahi dalam indikator DID agar perolehannya maksimal di Tahun 2024 ini adalah: Pengendalian inflasi (utamanya harga pangan) pada kuartal pertama, kedua dan ketiga Tahun 2024 Percepatan (serapan) belanja daerah Tahun 2024 Penggunaan PDN dalam APBD 2024 Dukungan Belanja Daerah yang lebih besar terhadap kegiatan Penurunan Kemiskinan, Pengangguran, dan Stunting dalam APBD 2023, dan lain-lain Untuk itu DPRD akan mendorong Pemerintah Daerah agar segera menyusun rencana aksi	Untuk Insentif Fiskal Kinerja Tahun berjalan Kota Madiun mendapatkan 3 dari 4 kriteria yang ada sebesar Rp. 16.770.826.000,- sehingga total pendapatan insentif fiskal untuk tahun 2024 sebesar Rp. 49.368.525.000,-. Dari 4 kriteria yang Kota Madiun tidak mendapatkan adalah untuk kriteria pengendalian inflasi.	Tetap mendapatkan Insentif Fiskal, meningkatkan kinerja semua bidang baik yg menjadi penilaian Insentif Fiskal maupun bukan. Sehingga ketika penilaian insentif fiskal berubah karena semua bidang kinerja sudah ditingkatkan, maka peluang mendapatkannya besar.

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	merebut Insentif Fiskal (IF) tambahan pada semester pertama dan kedua di Tahun Anggaran 2024 ini pada ke empat indikator diatas. Tentu diperlukan <i>roadmap</i> yang jelas dan terukur berupa RENCANA AKSI untuk merebut Kembali Insentif Fiskal (IF) ini dari Kemenkeu lebih besar setiap tahunnya.		

C. Rekomendasi Atas Arah Kebijakan Daerah

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
1	Secara umum Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Madiun di bidang keuangan daerah pada tahun perubahan 2024 (sebagai tahun terakhir RPJMD) harus tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2019 - 2024 tentu dengan revisi revisi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan kinerja keuangan daerah. Kebijakan keuangan difokuskan dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan daerah.	Kemampuan anggaran yang ada pada Tahun 2024 digunakan untuk secara maksimal dalam pencapaian visi dan misi yang tertuang di RPJMD yang merupakan Tahun terakhir. Sekaligus dalam rangka mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah.	Meningkatkan tingkat akurasi dalam penggunaan anggaran secara maksimal untuk mencapai visi misi yang tertuang dalam RPJMD khususnya pada tahun terakhir, guna mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah.
2	Bekerja lebih keras untuk peningkatan perolehan pendapatan daerah agar derajat Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) - Kota Madiun meningkat dengan fokus kebijakan intensifikasi perpajakan dan retribusi dan penerimaan PAD lainnya melalui:	Optimalisasi penerimaan keuangan daerah yang berasal dari PAD, ini yang bisa diintervensi. Intervensi dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, tentu saja dalam pelaksanaannya tetpa memperhatikan agar jangan sampai	Meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya PAD. Meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya PAD, terutama dari Pajak Daerah dan Retribusi.

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	Kebijakan Optimalisasi penerimaan daerah agar tetap diarahkan untuk mendukung daya saing daerah dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. Disamping itu juga Peningkatan belanja daerah yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar. Terus melakukan upaya pembenahan dan penyempurnaan (update) digitalisasi seluruh penerimaan daerah (seluruh penerimaan perpajakan daerah dan retibusi dan pungutan lainnya). System digitalisasi lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas dan kemudahan dalam berbagai urusan.	memberatkan bagi masyarakat. Dan secara data bahwa penerimaan PAD Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada saat ini seluruh penerimaan daerah khususnya PAD sudah dilakukan secara digital dan bersifat non tunai, dengan melalui aplikasi baik platfon dari Kota Madiun, maupun paltfon dari bank yang menjadi mitra maupun paltfon digital yang lainnya. Manajemen kas di Kota Madiun sudah memanfaatkan idle cash dengan masuk di deposito. Sistem pengawasan sudah dilakukan baik dengan system yang bersifat digital, maupun pengawasan rutin yang dilakukan oleh lembaga pengawas dalam hal ini adalah inspektorat.	Meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya PAD. Terutama di Pendapatan Giro dan Deposito. Meningkatkan perolehan pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal. Meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya PAD. Khususnya menghindari kebocoran. Meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya PAD. Khususnya asset daerah termanfaatkan secara optimal. Meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya PAD. Meningkatkan kinerja BUMD

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	Memanfaatkan <i>idle cash</i> (kas yang belum dimanfaatkan) agar memberikan kontribusi berupa jasa giro maupun jasa deposito yang lebih maksimal. Memperkuat system pengawasan dari sisi administrasi untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan retribusi daerah. Kemudian, retribusi yang diberikan mampu memberikan kualitas peningkatan pelayanan publik secara optimal. Eksistensi retribusi jangan dipandang sebagai sumber pendapatan semata namun perlu dioptimalkan dari sisi regulasi guna mendukung agenda penguatan daya saing dan ekosistem investasi daerah. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha. Terus Melakukan upaya yang lebih keras lagi untuk peningkatan penerimaan dari deviden	Dalam rangka memperkuat sistem pengawasan dan menghindari kebocoran potensi pendapatan daerah, Inspektorat melaksanakan pengawasan melalui reviu optimalisasi pajak daerah, dengan sasaran objek reviu optimalisasi pajak daerah yaitu OPD penghasil pajak daerah. Pelaksanaan pengawasan tersebut guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa pendapatan retribusi daerah yang diberikan mampu memberikan kualitas pelayanan publik secara optimal, yang akan dan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat dalam rangka mendukung	sehingga akan meningkatkan kontribusi ke PAD. Meningkatkan tata kelola perusahaan secara periodik.

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	atas penyertaan modal saham pada BUMD baik milik Provinsi dan penyehatan BUMD milik Pemerintah Kota Madiun melalui Optimalisasi BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.	agenda penguatan daya saing dan ekosistem investasi daerah. Berkaitan dengan aset-aset yang dimiliki Kota Madiun sudah dioptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dengan system sewa, maupun bangun guna serah (BGS), maupun pemanfaatan yang lainnya. Untuk pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk penyertaan modal di BUMD, maka sudah dilakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap BUMD, agar bisa berkinerja dengan baik dan mampu memberikan kontribusi kepada PAD. Pengawasan maupun evaluasi terus dilakukan baik oleh eksekutif maupun legislatif.	

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
		Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas (pelaporan) kinerja BUMD.	
3	Mengupayakan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dengan menyusun Langkah-langkah strategis (Rencana Aksi Daerah) dalam upaya meningkatkan peluang mendapatkan reward dari pemerintah pusat dalam bentuk Insentif fiskal dari pemerintah pusat (dulu Dana Insentif Daerah).	Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Kota Madiun dalam rangka untuk bersaing mendapatkan insentif fiskal adalah dengan melakukan kinerja yang terbaik dalam semua bidang yang menjadi isu dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Karena kriteria penilaian yang menjadi dasar pemberian Insentif Fiskal setiap tahun tidak sama, sehingga ketika berpedoman pada tahun sebelumnya maka bisa menjadi tidak cocok dengan kriteria penilaian tahun berjalan.	Meningkatkan peluang untuk mendapatkan insentif fiskal sesuai dasar pemberian setiap tahunnya.
4	Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat melalui DAK, hibah dan bantuan sosial, maka Pemerintah Kota Madiun	Dalam rangka mendapatkan dana DAK khususnya DAK fisik (DAK Non Fisik bersifat given tidak melalui usulan)	Meningkatkan pendapatan transfer khususnya pendapatan

No	Rekomendasi DPRD	Upaya Tindak Lanjut	Tujuan Masalah diselesaikan
	menyusun program- program yang <i>in line</i> dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK. Juga Pemerintah Kota Madiun dapat secara aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan.	Kota Madiun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dengan membuat usulan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dari pusat. Disamping itu komunikasi dan koordinasi dengan kementerian yang membidangi DAK fisik, sehingga bisa mendapatkan pagu DAK fisik.	DAK Fisik yang bersifat dari usulan daerah.



3.6. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, adalah sebagai berikut :

- Pendidikan anak usia dini
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan kesetaraan

2. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100%	100%	100%
3.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%

Perhitungan :

- Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD tahun 2024

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah siswa PAUD usia 5-6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 5-6 tahun}} \times 100 \% \\ \frac{5.162}{5.162} \times 100\% = 100 \%$$

Target sesuai jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2024 Semester 1.



2. Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah Siswa usia 7-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-15 tahun}} \times 100 \%$$

$$\frac{25.902}{25.902} \times 100\% = 100 \%$$

Target sesuai jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2024 Semester 1.

3. Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah peserta pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar}} \times 100 \%$$

$$\frac{545}{545} \times 100\% = 100 \%$$

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Bidang Pendidikan pada Tahun 2024 sebesar Rp 68.029.409.791 dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran
1	APBN	-
2	APBD Prop	-
3	APBD Kota	Rp 68.029.409.791
Jumlah		Rp 68.029.409.791

5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

- 1) Masih tingginya cluster sekolah oleh masyarakat.
- 2) Kurangnya tenaga pendidik yang bersertifikasi profesi guru dan kualifikasi pendidikan S2.
- 3) Kurangnya diferensiasi pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam penggunaan teknologi.
- 4) Kurangnya pembelajaran yang bersifat joyfull learning.



- 5) Anak tidak sekolah karena faktor sosial di keluarga dan masyarakat seperti keluarga yang bermasalah;

b. Solusi :

- 1) Peningkatan pemerataan sarana prasarana di Satuan Pendidikan.
- 2) Bantuan Beasiswa S2 untuk guru yang berprestasi.
- 3) Pelatihan-pelatihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.
- 4) Pembelajaran Joyfull Learning dengan Outdoor Learning (ODL).
- 5) Pemberian BOP pada PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

BIDANG KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).



2. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,49%	100,49%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,14%	100,14%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	101,08%	101,08%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,69%	100,69%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	108,29%	108,29%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	104,59%	104,59%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,16%	100,16%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Capaian
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	102,39%	102,39%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	105,22%	105,22%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	101,32%	101,32%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	120,13%	120,13%

Perhitungan :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.

Tingkat capaiannya adalah:

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun

x 100%

Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama



$$= \frac{2.861}{2.847} \times 100\% = 100,49\%$$

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Tingkat capaiannya adalah:

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun

Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

x 100%

$$= \frac{2.851}{2.847} \times 100\% = 100,38\%$$

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Tingkat capaiannya adalah:

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun

Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

x 100%

$$= \frac{2.719}{2.690} \times 100\% = 101,08\%$$

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Tingkat capaiannya adalah:

Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (1) + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (2) + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar (3)

Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama

x 100%

$$= \frac{10.684}{10.611} \times 100\% = 100,69\%$$



e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Tingkat capaiannya adalah:

Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yg mendapat Pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar

----- x 100%

Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yg ada Di wilayah kerja di wil. Kab/kota tersebut dalam kurun waktu Satu satu ajaran

$$\frac{31.650}{31.650} \times 100\% = 100\%$$

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Tingkat capaiannya adalah:

Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

----- x 100%

Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama

$$= \frac{140.124}{129.392} \times 100\% = 108,29\%$$

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Tingkat capaiannya adalah:

Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun

----- x 100%

Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama

$$= \frac{34.940}{33.407} \times 100\% = 104,59\%$$

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tingkat capaiannya adalah:

Jumlah penderita hipertensi usia >15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

----- x 100%



Jumlah estimasi penderita hipertensi usia >15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

$$= \frac{12.752}{12.731} \times 100\% = 100,16\%$$

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Tingkat capaiannya adalah:

Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

$$= \frac{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}}{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama

$$= \frac{11.012}{10.755} \times 100\% = 102,39\%$$

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.

Tingkat capaiannya adalah:

Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

$$= \frac{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama

$$= \frac{403}{383} \times 100\% = 105,22\%$$

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tingkat capaiannya adalah:

Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.

$$= \frac{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

$$= \frac{6.684}{6.597} \times 100\% = 101,32\%$$



- I. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

Tingkat capaiannya adalah:

Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

----- x 100%

Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama

$$= \frac{7.496}{6.240} \times 100\% = 120,13\%$$

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Tahun 2024 sebesar Rp 2.627.389.300,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	SUMBER ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN
1.	APBN (DAK)	1,512,319,800
2.	APBN (DANA BAGI HASIL)	614,688,000
3.	APBD Prop	-
4.	APBD Kota	500,381,500
JUMLAH		2.627.389.300

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Sehubungan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/140/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025 pada 2 Februari 2024, terdapat perubahan jumlah sasaran cukup signifikan (sasaran terlalu tinggi) dibanding sasaran Tahun 2023.
- Adanya perubahan peraturan terkait SPM Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis



Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang mulai berlaku di 3 April 2024.

3. Adanya perubahan definisi operasional pelayanan kesehatan usia produktif, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 tahun 2024 dengan perhitungan capaian berasal dari data komposit yang berasal dari lintas program sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang maksimal dengan lintas program terkait. Belum ada metode perhitungan capaian yang seragam dari pengelola program di level Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, pelaporan SPM pada aplikasi e-SPM Bangda belum memfasilitasi perhitungan komposit sesuai Permenkes terbaru.

b. Solusi

1. Melakukan perhitungan sasaran sesuai jumlah penduduk pada Kepmenkes, melakukan monitoring dan evaluasi progres capaian setiap triwulan, menetapkan SK Walikota tentang sasaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 untuk data yang tidak diambil dari Kepmenkes, serta memaksimalkan pencatatan dan pelaporan capaian dari klinik dan Rumah Sakit agar mencapai target yang ditetapkan.
2. Melakukan revisi input data pada aplikasi e-SPM Bangda sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan terbaru, sehingga mulai pengisian SPM TW II terdapat perubahan angka untuk sasaran maupun mutu layanan mengikuti hasil konsultasi dengan Kemendagri melalui zoom.
3. Melakukan konsultasi dengan pengelola program di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan melalui hasil pembahasan pengampu bidang kesehatan di Bangda, diputuskan untuk kegiatan deteksi dini tetap dilakukan sebagaimana Peraturan SPM terbaru, akan tetapi untuk perhitungan capaian masih menggunakan konsep SPM lama.

BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebagai berikut :



- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

2. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (Jaringan perpipaan dan Non Perpipaan)	100 %	100%	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	99,81%	99,81%

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Rumah tangga terlayani

$$\text{SPM Kab/Kota} = \frac{\text{Rumah tangga terlayani}}{\text{Rumah tangga di Kota Madiun}} \times 100 \%$$

$$= \frac{46.340}{46.340} \times 100 \% = 100 \%$$

- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Rumah tangga Bersanitasi

$$\text{SPM Kab/Kota} = \frac{\text{Rumah tangga Bersanitasi}}{\text{Rumah tangga di Kota Madiun}} \times 100 \%$$

$$= \frac{47.612}{47.702} \times 100 \% = 99,81 \%$$

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum pada Tahun 2024 sebesar Rp 1.905.323.500,00 dengan rincian sebagai berikut :



No	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran
	APBN	-
	APBD Prop	-
	APBD Kota	Rp. 408.662.001,00
	DAK	Rp. 1.496.661.499,00
JUMLAH		Rp 1.905.323.500,00

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pengumpulan Data :

- Pada saat ini Kota Madiun dalam tahap Pembangunan IPLT belum ada operasional dan belum mempunyai data volume pengolahan limbah tinja setiap bulannya;
- Jumlah rumah tangga di Kota Madiun belum mempunyai data yang sama antara Dinas Kesehatan dan DPUPR.

Perhitungan Kebutuhan :

1. Adanya keterbatasan taraf hidup masyarakat yang menyebabkan beberapa masyarakat ekonomi lemah tidak mampu membayar abunemen berlangganan PDAM sehingga masih ada pemutusan jaringan PDAM
2. Pertumbuhan penduduk dari kebutuhan pemenuhan jaringan perpipaan bersifat dinamis sehingga updating data perlu dilaksanakan secara berkala.

Perencanaan dan Penganggaran :

1. Pada saat perencanaan sudah dilakukan identifikasi masyarakat yang belum memenuhi jaringan perpipaan, tetapi pada saat melaksanakan dilapangan terjadi penolakan sedangkan sudah dianggarkan, sehingga menyebabkan realisasi anggaran tidak maksimal ;
2. Anggaran yang terbatas sehingga perlu dilaksanakan perencanaan secara bertahap.

Pelaksanaan :

1. Pada saat melaksanakan fisik dilapangan penambahan jaringan perlu dilaksanakan perencanaan secara bertahap;



2. Pada tw 4 terjadi perubahan target karena adanya hasil dari pelaksanaan kegiatan DAK program Sistem Penyediaan Air (SPAM) tematik dan stunting sesuai SK Walikota Madiun Nomor ; 400-401.110/284/2024 tentang Penerimaan Bantuan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Program Sistem Penyediaan Minum TA 2024.
3. Sesuai permen PU No. 29/PRT/M/2018 tentang standart teknis Standart Pelayanan Minimal cakupan pelayanan air limbah domestik yang berasal dari pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Di kota Madiun air limbah permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, limbah usaha oleh Dinas Lingkungan Hidup. DPUPR sebagai pengampu laporan SPM harus koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehingga memerlukan waktu dalam kecukupan data SPM.

b. Solusi

1. Diperlukan koordinasi dengan perangkat daerah Terkait perihal Penerapan dan Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga menghasilkan Data yang akurat dan tepat. Untuk kedepannnya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang direncanakan akan melakukan survey pendataan penduduk terkait data-data yang dibutuhkan;
2. Diperlukan koordinasi antara perangkat daerah pelaksana pelayanan air limbah domestik sehingga menghasilkan Data yang akurat dan tepat.

BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota ; dan



- b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100 %
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 %	100 %	100 %

Keterangan :

Capaian Indikator SPM :

1. Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota

Capaian SPM =

$$= \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$$



$$= \frac{0}{0} \times 100 \% \text{ (Tidak terjadi bencana)}$$

$$= 100 \%$$

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota

Capaian SPM =

$$\frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan+Rumah Tangga penerima subsidi uang sewa+Rumah tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan}} \times 100\%$$

Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan

$$= \frac{140}{140} \times 100\% = 100\%$$

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2024 sebesar Rp 1.922.750.000 dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran
1	APBN	-
2	APBD Prop	-
3	APBD Kota	Rp 1.922.750.000
JUMLAH		Rp 1.922.750.000

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Untuk permasalahan yang dihadapi oleh Kota Madiun terkait korban yang terkena bencana adalah warga atau korban relokasi tidak bersedia pindah dikarenakan lokasi rumah susun yang disediakan untuk korban bencana lokasinya terlalu jauh dengan mereka tinggal, dan ada anaknya yang masih sekolah dan tempat sekolahnya terlalu jauh dengan lokasi rumah susun yang disediakan oleh Pemerintah;



2. Untuk penyediaan rumah layak huni terkendala terkait ketersediaan lahan yang semakin menipis khususnya di kawasan perkotaan.

Solusi

1. Perencanaan pembangunan penyediaan rumah layak huni akan dilakukan pemerataan di tiap kecamatan yang ada di Kota Madiun;
2. Untuk lahan yang semakin terbatas bisa dilakukan pembangunan hunian vertikal guna penghematan lahan.

BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota, adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%	100%	100 %



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Capaian
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	100 %
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	100 %
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	100 %
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	100 %

Keterangan :

- 1) Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada

Rumus perhitungan capaian SPM :

Jumlah Warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada

X 100 %

Jumlah pelayanan yang telah diberikan kepada Warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :

- Pelayanan kerugian materiil
- Pelayanan pengobatan



$$= \frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \% \quad (\text{Tidak ada Korban yang ditangani})$$

2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Rumus perhitungan capaian SPM :

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah sasaran yang seharusnya menerima informasi rawan bencana}} \times 100 \%$$

$$= \frac{400}{400} \times 100 \% = 100 \%$$

3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Rumus perhitungan capaian SPM :

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang meminta layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}} \times 100 \%$$

$$= \frac{261}{261} \times 100 \% = 100 \%$$

1)

4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Rumus perhitungan capaian SPM :

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang meminta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}} \times 100 \%$$

$$= \frac{826}{826} \times 100 \% = 100 \%$$

5) Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Rumus perhitungan capaian SPM :

$$\frac{\text{Jumlah Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh}}{\text{Jumlah Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh}} \times 100 \%$$



Pemadam Kebakaran dan Relawan serta Penyelamatan di Perangkat Daerah

Jumlah kejadian kebakaran kota pada Tahun X X 100 %

$$= \frac{40}{40} \times 100 \% = 100 \%$$

4. Alokasi Anggaran

- a. Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2024 sebesar Rp 4.988.935.012 dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran
1	APBN	0
2	APBD Prop	0
3	APBD Kota	Rp 4.988.935.012
Jumlah		Rp 4.988.935.012

- b. Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp 327.975.000 dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran
1	APBN	0
2	APBD Prop	0
3	APBD Kota	Rp 327.975.000
Jumlah		Rp 327.975.000

- c. Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2024 sebesar Rp 1.386.141.000 dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran
1	APBN	0
2	APBD Prop	0
3	APBD Kota	Rp 1.386.141.000
Jumlah		Rp 1.386.141.000



5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Sekretariat
 - a. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai
 - b. Koordinasi dan sinergi yang belum optimal
 - c. Tantangan Pemanfaatan teknologi
 - d. Kurangnya SOP yang terpadu
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - a. Adanya Konflik Sosial di masyarakat
 - b. Adanya ketidaktertiban aktivitas masyarakat di ruang publik
 - c. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana keamanan
 - d. kurangnya partisipasi masyarakat
 - e. Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas personil Satpol PP dan Damkar
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
 - a. Kapatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundang undangan daerah yang masih kurang
 - b. Koordinasi antar perangkat daerah dan instansi lain yang belum optimal
 - c. Kapasitas aparatur yang terbatas
 - d. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang undangan daerah.
4. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - a. Kurangnya tenaga/ personil yang terlatih
 - b. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat
 - c. Belum optimalnya upaya pencegahan melalui inspeksi, edukasi/sosialisasi dan pengawasan terhadap bangunan untuk proteksi kebakaran.
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana
5. Minimnya Sarana dan Prasarana / Peralatan Penanggulangan Bencana;
6. Kurangnya Logistik dalam pemenuhan penanggulangan bencana

**b. Solusi**

1. Sekretariat
 - a. Usulan Pegawai melalui E Formasi
 - b. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi
 - c. Mengikuti bimtek dan pelatihan
 - d. Menyusun SOP
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - a. Mitigasi Konflik Sosial di masyarakat
 - b. Deteksi dini dan pengawasan ketidak tertiban aktivitas masyarakat di ruang publik
 - c. Mengusulkan usulan sarana dan prasarana keamanan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan Siskamling
 - e. Usulan Pegawai melalui E Formasi dan bimtek/ diklat/ pelatihan untuk meningkatkan kualitas personil Satpol PP dan Damkar
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
 - a. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan agar masyarakat agar patuh terhadap Peraturan Perundang undangan daerah
 - b. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan instansi lain
 - c. Usulan Pegawai melalui E Formasi
 - d. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan daerah.
4. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - a. Usulan Pegawai melalui E Formasi dan Pengembangan Kapasitas SDM Damkar melalui Bimtek/ Diklat/ Pelatihan
 - b. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat
 - c. Melaksanakan upaya pencegahan melalui inspeksi, edukasi/sosialisasi dan pengawasan terhadap bangunan untuk proteksi kebakaran.
 - d. Mengusulkan usulan sarana dan prasarana
5. Pemanfaatan peralatan dan logistik yang ada secara maksimal serta penggunaan yang efisien dan efektif;



BIDANG SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia telantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar Panti;
5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota.

2. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh	100%	100%	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Capaian
	dan pengemis di luar panti	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%

Keterangan :

- Standar pelayanan minimal pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target di Tahun 2024 sebanyak 198 orang dan realisasi yang dicapai sebanyak 110 orang yaitu anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Madiun (PPDKM), 75 Penyandang Disabilitas yang mendapatkan layanan Posyandu Disabilitas dan 13 Klien Shelter Dinsos PPPA dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{198}{198} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga untuk Tahun 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menangani warga Kota Madiun penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sebanyak 204 orang dengan persentase mencapai 100 %.

- Standar pelayanan minimal pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti dengan indikator pencapaian Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target di Tahun 2024 sebanyak 470 orang, realisasi yang dicapai sebanyak 470 orang terdiri dari :



- a. 15 anak Klien Shelter ; dan
- b. 455 anak pada 12 Lembaga Kesejahteraan Sosial.

dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{470}{470} \times 100 \% = 100 \%$$

layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, salah satunya adalah pemberian permakanan untuk panti asuhan yang diberikan kepada 12 Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Sehingga untuk Tahun 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menangani Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sebanyak 605 orang dengan persentase mencapai 100 %.

3. Standar pelayanan minimal pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan indikator pencapaian Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target di Tahun 2024 sebanyak 253 orang, realisasi yang dicapai sebanyak 253 orang terdiri dari :

- a. 191 orang Lanjut Usia Non Potensial ; dan
- b. 62 orang Klien Shelter dan Penghuni Pondok Lansia

dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{253}{253} \times 100 \% = 100,00 \%$$

Layanan yang diberikan salah satunya adalah pemberian bantuan kepada lansia non potensial sebesar Rp. 8.000.000,- per orang per tahun.

Sehingga untuk Tahun 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menangani warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sebanyak 296 orang dengan persentase mencapai 100%.

4. Standar pelayanan minimal pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti dengan target di



Tahun 2024 sebanyak 96 orang, realisasi yang dicapai sebanyak 96 orang terdiri dari:

- a. 87 Orang Terlantar ; dan
- b. 9 orang Gelandangan Pengemis.

dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{96}{96} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga untuk Tahun 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menangani gelandangan dan pengemis di luar panti berjumlah 96 orang dengan persentase mencapai 100%.

5. Standar pelayanan minimal pelayanan dasar Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dengan target di Tahun 2024 sebanyak 49 orang, realisasi yang dicapai adalah 49 orang pada kejadian bencana pada Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 8 orang pada kejadian Rumah Roboh;
2. 7 orang pada kejadian Rumah Kebakaran; dan
3. 34 orang pada kejadian Rumah tergenang Banjir

$$\frac{49}{49} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga untuk Tahun 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menangani Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial mencapai 49 orang dengan persentase mencapai 100 %.

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Tahun 2024 sebesar Rp 3.478.778.536 dengan rincian sebagai berikut :



No	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran
1	APBN	-
2	APBD Provinsi	-
3	APBD Kota	Rp 3.478.778.536
JUMLAH		Rp 3.478.778.536

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. pengumpulan data dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan tidak bisa merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya insidentil ketika terjadi kasus;
2. perhitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan tidak bisa merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya insidentil ketika terjadi kasus;
3. perencanaan dan penganggaran dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan tidak bisa merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya insidentil ketika terjadi kasus; dan
4. Sumber Daya Manusia yang jumlahnya terbatas sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

b. Solusi

1. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien).
2. Perhitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien).
3. Perencanaan dan penganggaran dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien)



4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Diperlukan penambahan anggaran terkait dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis; dan
6. Perlunya pelatihan teknis terhadap Aparatur Sipil Negara untuk peningkatan Sumber Daya Manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3.7. INOVASI YANG DILAKUKAN

Dalam masa pemerintahan tahun 2024 terdapat inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun:

1. Sistem Aplikasi E-KAK. Yaitu sistem aplikasi kinerja yang digunakan dalam hal perencanaan dan penganggaran, yang dimulai dengan penyusunan pohon kinerja. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh ASN Kota Madiun dan terintegrasi dengan Sasaran Kinerja Pegawai serta Pemberian Remunerasi. Aplikasi ini digunakan dalam mendukung proses evaluasi SAKIP Tahun 2024.
2. BROKOHAN. Bayi Lahir Otomatis Entuk Dokumen Kependudukan dan Jaminan Kesehatan. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan bidan-bidan dan rumah sakit untuk segera melaporkan peristiwa bayi yang baru lahir melalui BROKOHAN untuk mendapatkan NIK di KK, Akte Kelahiran dan KIA.
3. DOPARI SAKATU (Dongeng Pagi hari Selasa, Kamis, Sabtu)

SDN 02 Mojorejo Kota Madiun memiliki siswa berjumlah 564 yang terdistribusi dalam 18 kelas. Data tahun 2014 nilai rata-rata kenaikan kelas siswa rendah, data kedisiplinan siswa menunjukkan yang terlambat datang ke sekolah rata-rata mencapai 15 sampai dengan 20 siswa per kelas tiap bulannya. Data



kenakalan siswa juga menunjukkan 3 sampai dengan 4 kasus anak setiap harinya. Tanggung jawab siswa terhadap tugas sekolah kurang. Data yang di himpun dari buku catatan wali kelas masing-masing terdapat 4-5 siswa di masing-masing kelas tidak mengerjakan tugas sekolah. Melalui Dopari sakatu, nilai rata-rata siswa di bawah KKM menurun menjadi 5%. Siswa terlambat datang sekolah berkurang 2 sampai 0 siswa per hari. Kasus kenakalan berkurang menjadi 8 kasus. Minat baca siswa meningkat.

4. LIK PAKAR (Layanan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran) LIK PAKAR merupakan nama aplikasi mobile dengan menggunakan nama kearifan local sebagai sarana untuk memangkas atau meyederhanakan dan mempercepat prosedur pelayanan penanggulangan kebakaran sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi, pelaporan kejadian kebakaran secara cepat (menggunakan panic button), edukasi, pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran dan inspeksi alat pemadam kebakaran secara efektif dan efisien untuk menyusun aplikasi, maka perlu penetapan Penggunaan Aplikasi LIK PAKAR.
5. "WSS (Warung Stop Stunting)" Inovasi Warung Stop Stunting bertujuan menurunkan angka stunting di Kota Madiun dengan sasaran ibu hamil dan balita stunting dengan menyediakan makanan tambahan dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji. Kegiatan dilakukan seminggu sekali di lapak UMKM setiap kelurahan selama 9 minggu berupa : pengambilan bahan mentah, makan bersama, pemberian voucher belanja, pembinaan dari PKK Kelurahan
6. "KARAMEL GULA" (KenAli CaRA MeMELihara Kesehatan Gigi dan MULut Anak Balita). Inovasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada ibu balita untuk meningkatkan kesadaran dalam mendampingi dan membiasakan anak memelihara kesehatan gigi dan mulutnya. Harapannya dapat menjadi sarana tambahan informasi kesehatan bagi ibu balita mengenai cara merawat kesehatan gigi dan mulut anak balita sejak dini, serta meningkatnya pengetahuan ibu balita tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak balita.
7. "PAPEDA ODGJ" PAPEDA ODGJ "Paguyuban Peduli pada Orang dengan Gangguan Jiwa". Merupakan wadah masyarakat yang peduli terhadap orang



dengan gangguan jiwa yang melibatkan petugas kesehatan puskesmas, kader kesehatan jiwa dan lintas sektor yang berperan.

8. WARTEK (WARung TEKan Inflasi)

Wartek merupakan sarana atau tempat menjual barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Bekerjasama dengan Perumda Aneka Usaha, PT. PPI dan BULOG, menyediakan barang kebutuhan pokok untuk masyarakat umum. Wartek sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dan terjangkau dibanding harga pasar. Lebih murah karena dijual dengan menggunakan subsidi harga dan subsidi angkut.

9. WISUDA SITI DIMANJA (Wisata Edukasi Outdoor Learning Berbasis Teknologi Informasi Lejitkan Kemampuan Discovery, Kemandirian dan Kerjasama) Menumbuhkan kemampuan discovery (menemukan konsep/pengetahuan baru) dengan memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan sekitar yang tidak tersedia di dalam menumbuhkan sikap kemandirian (dapat meregulasi diri sendiri), serta meningkatkan sikap kerjasama (mampu berkolaborasi efektif untuk mencapai tujuan)

10. "KAWAN DISKA" Inovasi "KAWAN DISKA" yang memiliki akronim KAWAN DINAS KESEHATAN merupakan salah satu upaya dalam rangka penyebarluasan informasi kesehatan ataupun informasi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Madiun pada masa Pandemi yang dikemas dalam bentuk video menarik berupa video animasi, video sederhana, podcast, poster serta repost infokes dari Platform Kesehatan lainnya.

11. "TERANG BULAN MAS BARJO" TERANG BULAN MAS BARJO (TEman RiANG iBU saat kehamiLAN di puskesMAS BANjaReJO. Inovasi mengenai edukasi Kesehatan terbaru pada ibu hamil melalui Leaflet dan video animasi di sosial media, berkaitan dengan tanda dan bahaya saat kehamilan serta pencegahan agar ibu hamil terhindar dari penyulit kehamilan. Tujuan inovasi ini adalah mencegah dan meminimalisir terjadinya komplikasi hingga kematian pada ibu hamil dan bayi baru lahir.

12. "KENALI WATAK MAS BARJO" KENALI WATAK MAS BARJO (KENALI kegaWATAn anaK balita di puskesMAS BANjaReJO) bertujuan untuk menjadi sarana informasi dan edukasi kepada orang tua maupun pengasuh agar dapat



- melakukan perawatan balita sakit di rumah dan mengetahui apa saja tanda kegawatannya sehingga tidak terlambat untuk di bawa ke fasilitas kesehatan.
13. "PITA SIKUMBANG DUREN" PITA SI KUMBANG DUREN (PIJAT BADUTA STIMULASI UNTUK TUMBUH KEMBANG TIDUR NYENYAK). Merupakan pelayanan pijat bayi dibawah dua tahun, guna menstimulasi untuk tumbuh kembang, dan tidur nyenyak. Bertempat di Pustu Josenan, pelayanan Pita Si Kumbang Duren dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yang terampil dan berpengalaman
 14. "PINOKIA" PINOKIA (Pojok INformasi Obat Khusus lansIA). Untuk mengoptimalisasi pelayanan informasi obat bagi pasien lansia serta meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga pasien terkait informasi obat khususnya pada lansia.
 15. "LINTANG NDARU" LINTANG NDARU (LAYANAN POLI PETANG DAN GAWAT DARURAT). Inovasi dilatar belakangi kepatuhan pasien dengan penyakit degeneratif (hipertensi dan diabetes mellitus) control ke puskesmas pada saat jam pelayanan. Oleh karena itu mengakomodir masyarakat akan control rutin dan Layanan Gawat Darurat maka Puskesmas Tawangrejo memiliki inovasi LINTANG NDARU (Layanan poli petang dan gawat darurat). Pelayanan poli petang mulai jam 16.00 sampai jam 20.00. Layanan Gawat darurat mulai 07.00 sampai jam 20.00.
 16. "GESIT" GESIT MASTARJO (GERAKAN SADAR IMUNISASI PUSKESMAS TAWANGREJO). Kegiatan pelayanan imunisasi yaitu adanya Gerakan sadar imunisasi di puskesmas twangrejo melalui group WhatsApp yang terdiri bidan wilayah, ibu bayi dan balita, kader kesehatan, promkes wilayah dan dokter.
 17. PENDEKAR BELI CETING (Pendampingan Konsumsi Bersama Peduli Cegah Stunting) Pendekar Beli Ceting (Pendampingan Konsumsi Bersama Peduli Cegah Stunting) merupakan pelayanan gizi yang berorientasi pada balita *stunted* dan *wasted* dengan memberikan modifikasi formula WHO F-100 serta pendampingan konsumsi balita melalui *food record* selama 2 x 24 jam setelah balita dinyatakan bisa pulang dari rumah sakit. Balita yang mengalami *stunted* dan *wasted* pada ruang rawat inap mendapatkan tambahan makanan berupa Puding Sedot sebagai modifikasi Formula WHO sebanyak 2 x 200 ml per hari. Balita yang pulang dari rumah sakit, dilakukan monitoring selama 2 hari secara



online melalui *WhatsApp* menggunakan formulir *food record* untuk melihat pola pemberian makanan balita secara kualitas maupun kuantitas. Saat kontrol di Poli Anak dan Poli Gizi, balita dan keluarga dilakukan evaluasi terkait pengetahuan dan pemahaman keluarga balita dalam pemberian makanan yang tepat melalui hasil *food record* secara kualitatif maupun kuantitatif. Harapannya, terdapat perubahan pola makan balita ke arah yang tepat sehingga dapat mengejar tumbuh kembang sesuai usianya.

18. MBANGUN SWARGA (Madiun Membangun, Sejahtera Bersama Warga). Sebuah aplikasi untuk penanganan sosial kemasyarakatan dimana aplikasi tersebut bertujuan mendapatkan data keseluruhan secara terintegrasi, tanpa mengganggu operasional aplikasi yang berjalan di PD pelayanan
19. IKAN MAS TARJO, (suvei Kepuasan MASYarakat puskesmas TAwangReJO) adalah inovasi berupa survei kepuasan masyarakat sekaligus penyampaian saran atau keluhan kualitas pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tawangrejo, yang pengisiannya dilakukan secara mandiri menggunakan media elektronik. Kegiatan IKAN MAS TARJO diantaranya yaitu masyarakat mengisi kuisioner survei kepuasan masyarakat secara elektronik sesuai respon yang dirasakan, selanjutnya mengisi identitas yang telah terjamin privasinya untuk menyampaikan saran atau keluhan terkait kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Tawangrejo. Masyarakat dapat memantau respon Puskesmas Tawangrejo terhadap saran atau keluhannya melalui laporan tindak lanjut yang dipublikasikan pada media sosial, website, dan papan forum komunikasi publik maksimal dalam waktu 3 hari.
20. GERCEP (GERakan Cek skrening dan Pemeriksaan terpadu penyakit tidak menular) Puskesmas Tawangrejo. Inovasi GERCEP merupakan inovasi baru di bidang kesehatan yaitu tentang masyarakat diberikan fasilitas dan bimbingan untuk ikut berpartisipasi dalam pengendalian faktor risiko PTM (Penyakit Tidak Menular) dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan deteksi dini, monitoring faktor risiko PTM serta tindak lanjutnya. Tidak hanya itu kegiatan ini dilaksanakan pada Arisan RT yang dapat menjangkau sasaran yang lebih banyak, karena pelaksanaannya pada sore atau malam hari serta dilingkungan tempat tinggal, sehingga seluruh masyarakat (usia 15th keatas) bisa ikut berpartisipasi.



21. ELENG KB LIN (Edukasi, konseLing, dan monitoriNG) KB Pasca Persalinan. ELENG KB LIN (Edukasi, konseLing dan monitoriNG KB pasca persaLINan) adalah merupakan inovasi baru di bidang kesehatan Keluarga Berencana (KB). Inovasi ELENG KB LIN bertujuan untuk meningkatkan capaian KBPP secara berkesinambungan dengan memperkenalkan manfaat dan pentingnya KBPP pada ibu dan suami sejak masa kehamilan hingga mengawal ibu nifas sampai menggunakan KBPP yang dipilihnya. Upaya pengaturan kelahiran dapat dilakukan dengan mencegah kehamilan menggunakan metode atau alat kontrasepsi. Hambatan terbesar di bidang KB yaitu masih tingginya angka unmet need di Indonesia. Unmet need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, dimana perempuan usia subur yang telah kawin memiliki keinginan untuk menjarangkan kehamilan atau tidak ingin memiliki anak lagi tetapi tidak memakai alat kontrasepsi. Untuk menurunkan unmet need melalui peningkatan capaian KB pasca persalinan, maka dibutuhkan terobosan baru yang berkesinambungan seperti ELENG KB LIN.
22. GARAM BU MUKIDI (Program Ibu Membaca Buku KIA dan Deteksi Dini). merupakan sesuatu yang segar dan unik dalam penerapannya ke masyarakat. Masalah Kesehatan ibu hamil dan balita yang multifaktor membuat tenaga kesehatan dituntut terus berinovasi dalam memecahkan masalah. Pada pelaksanaannya inovasi ini akan menugaskan dokter umum sebagai narasumber yang akan memberikan edukasi bersumber dari buku KIA yang bertujuan mempromosikan buku KIA kepada ibu hamil bahwa konten buku tersebut mudah dan informatif, selain itu dokter akan melakukan deteksi dini dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik dilanjutkan dengan sesi konsultasi psikologis ibu hamil. Inovasi GARAM BU MUKIDI bertujuan agar Puskesmas Sukosari dapat berperan serta mendukung tercapainya target SDGs dan Misi Presiden Republik Indonesia dan Misi Walikota Madiun dalam bidang kesehatan dengan memberikan pelayanan optimal kepada ibu hamil berupa edukasi yang komprehensif dan deteksi dini sehingga AKI, AKB dan Stunting bisa diturunkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.



23. PECEL SIP DOK " (Pelayanan Cepat dengan Elektronik Surat Ijin Praktek Dokter). Yaitu suatu pelayanan penerbitan SIP berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Keberadaan inovasi penerbitan SIP ini akan mentransformasikan sistem manual menjadi digital sehingga kondisi yang semula masih menggunakan kertas (paper) menjadi berbasis digital (paperless). Dengan inovasi ini, berkas permohonan dapat dikirimkan secara elektronik tanpa batasan tempat dan waktu sehingga memudahkan pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi dan mendapatkan SIP lebih cepat dan tepat waktu. Dengan adanya Aplikasi PECEL SIP DOK ini diharapkan mengubah yang awalnya menggunakan kertas dan dikerjakan secara manual bisa menjadi pelayanan yang digital dan papperless tanpa mengurangi keabsahan dari hasil inovasi tersebut.
24. SI BUTAR ASIX (EDUKASI IBU PINTAR SUKSES ASI EKSKLUSIF). inovasi SI BUTAR ASIX yang merupakan inovasi baru di bidang kesehatan hadir untuk meningkatkan capaian pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukosari melalui kegiatan edukasi pada ibu hamil dalam rangka persiapan menyusui ketika bayinya lahir kelak. Keunikan atau kebaruan dari inovasi SI BUTAR ASIX ini adalah penyampaian edukasi melalui berbagai metode, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui peningkatan pengetahuan ibu hamil mengenai ASI eksklusif, inovasi ini berkontribusi dalam menurunkan risiko stunting pada anak.
25. APRESIASI SI ANDRO (Aplikasi Presensi Digital Berbasis Website dan Android). Inovasi ini mengubah sistem presensi manual menjadi digital, memungkinkan siswa untuk melakukan absensi secara online melalui aplikasi, yang meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Selama handphone terkoneksi internet, pemberitahuan akan masuk. Hal ini memudahkan orang tua/walimurid untuk memantau keberadaan anaknya di sekolah. Sistem ini memberikan kemudahan bagi guru dan pihak sekolah dalam memantau tingkat kehadiran siswa, serta meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Dengan sistem presensi digital, data kehadiran siswa dicatat secara *real-time* dan disimpan dengan aman, mengurangi risiko manipulasi dan kehilangan data.



26. KOLAK BAPER (KOmpetisi administrasi ketataLAKsanaan BAgi PERangkat daerah). KOLAK BAPER berhasil meningkatkan kualitas administrasi ketatalaksanaan di Pemerintah Kota Madiun. Melalui kompetisi ini, perangkat daerah termotivasi untuk memperbaiki dan mematuhi SOP, yang berkontribusi pada disiplin pegawai dalam berpakaian dinas dan mematuhi jam kerja, Inovasi ini melibatkan berbagai instansi, seperti Bagian Organisasi, BKD, dan Inspektorat, sehingga layanan dapat berjalan optimal tanpa tumpang tindih kewenangan. Evaluasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk memastikan keberhasilan implementasi dan peningkatan kualitas administrasi, dengan hasil yang menunjukkan skor evaluasi internal yang baik. KOLAK BAPER memberikan kontribusi signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.
27. EMPOK REMEN (kElomPOK REmaja MENulis). Inovasi ini berhasil meningkatkan budaya literasi di kalangan remaja di Kota Madiun, mengajak mereka untuk aktif menulis dan mendokumentasikan potensi serta kekayaan lokal. Selain meningkatkan keterampilan menulis, program ini juga memberikan pelatihan berorganisasi, menjadikan peserta sebagai Duta Literasi yang mempromosikan literasi di lingkungan mereka. Inovasi ini sejalan dengan peraturan perpustakaan nasional, dimana peningkatan koleksi konten lokal menjadi fokus utama, membantu perpustakaan memenuhi standar yang ditetapkan.
28. LIDI GUNUNG JATI (Literasi Digital Gunung Jati). adalah program inovasi baru dari sekolah untuk menjawab permasalahan yang berkembang yaitu untuk mewujudkan budaya literasi di SDN Pangongangan. Inovasi ini berhasil meningkatkan minat baca siswa di SDN Pangongangan melalui pengenalan literasi digital yang menarik dan interaktif, menggunakan platform berbasis TIK. Dengan memanfaatkan aplikasi Google Sites, LIDI GUNUNG JATI menyediakan akses ke berbagai sumber belajar, termasuk buku digital dan materi edukatif, yang mendukung pembelajaran siswa.
29. Ecodrain Mesi (Eco-Drainase Multifungsi). Ecodrain Mesi (Eco-Drainase Multifungsi) bukan hanya sebagai penataan saluran drainase agar tidak terjadi genangan air, tetapi juga mencangkup dalam hal estetika kota melalui penataan



kabel udara ke dalam saluran dengan menggunakan box cuvert. Dengan system saluran drainase tertutup dan ditambah pembangunan area pedestrian diatas saluran drainase ini. Ecodrain Mesi (Eco-Drainase Multifungsi) merupakan inovasi pembangunan saluran drainase dengan menggunakan sistem saluran drainase tertutup yang tetap mempertahankan nilai unsur estetika dan kemanfaatan ekonomi. Tujuan dari program inovasi ini untuk mengatasi permasalahan terjadinya genangan air bahkan banjir akibat berkurangnya areal resapan ketika musim penghujan di Kota Madiun. Selain berfungsi sebagai penanganan genangan air dan banjir, inovasi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pencemaran air yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, penumpukan sampah akibat membuang sampah sembarangan di area saluran drainase dan mengatasi kondisi lingkungan yang terlihat kumuh dan tidak memiliki nilai estetika dengan pembangunan area pedestrian di atas saluran drainase.

30. Sistem Informasi Operasi Pasar Kota Madiun (SIOPA OMA). Tujuan SIOPA OMA adalah meningkatkan transparansi dengan memudahkan sistem pencatatan dan pengecekan setiap transaksi sehingga terdistribusi secara merata. SIOPA OMA membantu warga Kota Madiun membeli bahan pokok dengan lebih mudah dan teratur, mengurangi antrian panjang. Dengan sistem ini, semua transaksi pembelian tercatat dengan baik, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan menghindari pembelian berulang. Inovasi ini berkontribusi menurunkan inflasi di Kota Madiun, sehingga harga barang tetap stabil.
31. IDOLA@madiunpintar.co.id (Information, Documentation on Learning Administration with madiunpintar.id), adalah inovasi pelayanan publik yang dirancang untuk mengoptimalkan manajemen informasi dan dokumentasi di bidang pendidikan. Inovasi ini memungkinkan siswa dan guru mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, menggunakan berbagai perangkat seperti laptop dan smartphone. Semua data dan informasi terkait pembelajaran dapat diakses oleh siswa dan orang tua, meningkatkan transparansi dan kolaborasi antara guru dan siswa.
32. RUMAH IBU, LAYANAN PERUNDUNGAN DAN INKLUSI BERBASIS SMILE. Inovasi ini dirancang untuk mengatasi masalah perundungan di SMPN 11 Madiun, dengan memberikan dukungan psikologis dan pendampingan kepada



korban dan pelaku. Rumah Ibu tidak hanya fokus pada siswa, tetapi juga melibatkan orang tua dan guru dalam upaya mengurangi perundungan dan menciptakan lingkungan yang aman. Dengan teknik coaching dan konseling, siswa diajak untuk mengolah perasaan dan mencari solusi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka.

33. BERKAH KITA (BERSama Kita Ajukan Hasil Karya Intelektual tertaTA). BERKAH KITA berkontribusi pada perlindungan hak cipta dan pengembangan kreativitas di Kota Madiun, serta mendorong inovasi di kalangan masyarakat. Inovasi ini menyediakan layanan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara gratis bagi inovator dan kreator, membantu mereka melindungi karya cipta mereka.
34. SUPER TEKTONIK (Solusi Cepat, Efektif, dan Berintegritas dengan Tanda Tangan Elektronik) adalah layanan keamanan informasi berupa tanda tangan elektronik (TTE) untuk mengesahkan surat atau dokumen di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Inovasi ini menghilangkan kebutuhan akan proses manual yang lama, seperti penggunaan nota dinas dan tatap muka untuk penandatanganan, sehingga mempercepat penerbitan surat menjadi tidak lebih dari 1x24 jam.
35. Market Place Kota Madiun (e-Pasar Kota Madiun). Inovasi ini menciptakan platform digital yang mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Madiun, memudahkan mereka untuk mempromosikan dan menjual produk secara online. Masyarakat dapat mengakses berbagai produk dengan mudah melalui aplikasi, yang meningkatkan kenyamanan dalam berbelanja dan memperluas jangkauan pasar bagi pelaku UMKM. Dengan memudahkan transaksi yang lebih efisien, e-Pasar berkontribusi pada pergerakan ekonomi daerah, membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
36. AWAK SIGAP (Aduan WArga Kami Slap seGera tanggAP). Tujuan program AWAK SIGAP adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menyampaikan laporan/permohonan pelayanan publik, khususnya di wilayah Kota Madiun. Bantuan diberikan dengan segera, responsif dan aspiratif demi terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat. Selain mendukung peningkatan pelayanan publik, dapat menjadi referensi dan masukan yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kuantitas dan



- kualitas layanan publik yang lebih baik. Dengan memanfaatkan aplikasi Wappin (salah satu WhatsApp Business Platform), dapat memberikan layanan kegawatdaruratan, layanan ini menampung segala macam pengaduan, baik internal Pemerintah Kota Madiun maupun untuk masyarakat umum.
37. TALI JIWO (Taman peduli Jiwa Warga Odgji). TALI JIWO merupakan program inovatif yang mengintegrasikan berbagai sektor untuk menangani masalah kesehatan jiwa, khususnya bagi penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kelurahan Taman. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, untuk mendukung ODGJ agar dapat hidup mandiri dan diterima di masyarakat. TALI JIWO bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup ODGJ, memberikan pelatihan, dan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan serta bantuan sosial.
38. Si Anak Mass Juna (Sistem Analisa Media Massa Maju Mendunia). Dengan platform digital yang dikembangkan, masyarakat dan unit organisasi lain dapat dengan mudah mengakses informasi terkait berita dan isu publik, meningkatkan transparansi dalam komunikasi pemerintah. Si Anak Mass Juna memberikan data dan rekomendasi bagi pengambilan keputusan pemerintah, membantu dalam penentuan agenda dan pengelolaan isu. Inovasi ini memperkuat sinergi antara pemerintah dan media massa, penting untuk menyampaikan informasi yang akurat dan membangun opini publik yang positif.
39. JEBOL KIPER (Jemput Bola Komunikasi Informasi Publik dan Evaluasi LAPOR!) adalah sebuah program dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Program ini melibatkan berbagai pihak, seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan organisasi sosial, untuk berperan sebagai penghubung informasi dan membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta pengaduan.
40. KITA STEPA (KELAS BERSIH KARAKTER DIRAIH) dalah inovasi yang dikembangkan oleh SMP Negeri 4 Madiun untuk meningkatkan kesadaran dan karakter peduli lingkungan di kalangan siswa. Program ini berfokus pada kebersihan kelas sebagai langkah awal dalam membentuk karakter peserta didik. Melalui aplikasi digital untuk monitoring kebersihan, siswa diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan belajar mereka. Proses penilaian



kebersihan dilakukan secara digital, memudahkan pengumpulan dan pengolahan data. Semua pihak, termasuk siswa dan wali kelas, dapat mengakses penilaian kebersihan secara transparan.

41. BANK BESTI - Bank Best Practice adalah inovasi dari SMP Negeri 4 Madiun yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas guru melalui pengembangan dan berbagi praktik terbaik dalam pembelajaran. Dengan platform digital, BANK BESTI memfasilitasi guru dalam menyusun dan menyimpan praktik baik, serta memotivasi mereka untuk menciptakan metode pengajaran yang inovatif. Inovasi ini membantu memulihkan proses belajar setelah kehilangan pembelajaran (loss learning) dan telah berhasil direplikasi di daerah lain, meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. BANK BESTI merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan profesionalisme guru dan penerapan praktik pembelajaran yang inovatif.
42. GEN KEHATI (Green Entrepreneur Keanekaragaman Hayati) Inovasi ini bertujuan memaksimalkan potensi pemanfaatan lingkungan yang ada di sekolah menjadi suatu program unggulan yang bernilai ekonomi. Dengan demikian, isu-isu kurang pedulinya seluruh warga sekolah dalam pemanfaatan potensi lingkungan yang ada dapat terhindar dengan adanya inovasi ini. GEN KEHATI berhasil memanfaatkan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah, seperti pohon trembesi, daun cincau, dan kelor, untuk menciptakan produk olahan bernilai ekonomi.
43. OM IRENG (Omong Inggris Bareng) adalah program yang diluncurkan oleh SMPN 5 Madiun untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris di kalangan guru dan staf tata usaha. Inovasi ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi dalam bahasa Inggris, meningkatkan literasi bahasa, dan mendukung penguasaan teknologi yang diperlukan dalam pembelajaran. Keberhasilan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris guru, memfasilitasi penggunaan bahasa dalam kegiatan sehari-hari, dan membantu mereka dalam mengakses informasi yang lebih berkualitas.
44. D'ARTIS (Digitalisasi Arsip Statis). D'ARTIS berperan penting dalam modernisasi sistem kearsipan di Kota Madiun, meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung efisiensi pemerintahan. D'ARTIS merupakan langkah signifikan dalam mengubah cara pengelolaan arsip statis menjadi sistem digital,



- memungkinkan penyimpanan dan akses yang lebih efisien. Melalui digitalisasi, pengelolaan arsip menjadi lebih simpel, cepat, dan hemat ruang. Ini mengurangi hambatan konvensional dalam pengelolaan arsip fisik.
45. PECEL PAK KASTAN (Pelayanan Cepat dan Langsung, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Pertanian) Inovasi PECELPAKKASTAN adalah inovasi baru, dimana pelayanan SKKH melalui aplikasi PECELPAKKASTAN adalah aplikasi SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) yang diciptakan sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi dan kemudahan dalam proses penerbitan surat keterangan kesehatan hewan. Proses pembuatan SKKH menjadi lebih cepat karena langsung di tandatangani secara elektronik oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV). PECEL PAK KASTAN menunjukkan inovasi yang signifikan dalam pelayanan kesehatan hewan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi.
46. PARTNER MATARAM (Pahlawan Street Center Madiun Kota Ramah dan Aman). yaitu mengubah PSC dari kawasan yang sering banjir dan kumuh menjadi kawasan yang ikonik dan instagramable dengan memadukan kekhasan Kota Madiun dan ikon dunia internasional seperti Patung Merlion Singapura, Kereta Cepat Shinkansen Jepang, Galeri 6 Negara, Ka'bah, Kampung Eropa, Jembatan, Menara Eiffel dan Replika 6 Agama dalam 1 kawasan terpadu.
47. Be Smart Madiun (Beasiswa Mahasiswa Rakyat Kota Madiun) merupakan bantuan Beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu, Sehingga harapan Pemkot Madiun agar memiliki SDM yang berkualitas. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan berupaya untuk terus melanjutkan Program Bantuan Be Smart Beasiswa Mahasiswa. Harapannya Program Bantuan Be Smart Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun dapat membantu dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan dapat bermanfaat kepada mahasiswa yang memang terkendala biaya kuliahnya, terutama bagi mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa yatim piatu.
48. Edukasi Outdoor Learning untuk Pelajar adalah merupakan inovasi baru yang sebelumnya belum ada, Inovasi ini dalam memperkenalkan dunia pertanian dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu outclass dan inclass. Pada sesi outclass siswa akan dipandu untuk dikenalkan mulai cara budidaya beberapa jenis hewan peliharaan beserta cara merawatnya juga praktik memperbanyak tanaman



sederhana. Sedangkan pada sesi inclass akan ditayangkan beberapa video yang mengenalkan siswa pada jenis tanaman, proses perkembangbiakan tanaman, jenis hewan peliharaan, bahan makanan sehat yang berasal dari hewan, ikan dan tanaman.

49. "SIKAP SeBeNingMaS" Sistem Informasi Komunikasi dan Administrasi Pembelajaran Sekolah Berbasis Learning. SIKAP SeBeNingMaS merupakan Inovasi Layanan dalam bidang Pendidikan yang mengutamakan kepada pelayanan terhadap warga masyarakat ditingkat Pendidikan Dasar (SD-SMP). Layanan ini berjalan secara Daring (Dalam Jaringan/Online) melalui seperangkat Tool dan Model yang disesuaikan dengan menggunakan Domain @madiunpintar.id.
50. LAPIS INKLUWINDU (Pola Terapi Siswa Inklusi Winongo Dua). merupakan inovasi baru dengan solusi untuk membantu siswa kebutuhan khusus. Tujuan dari terapi yaitu membantu anak dengan gangguan belajar, perkembangan, dan perilaku untuk bisa menumbuhkan perilaku kemandirian anak. Terapi untuk anak berkebutuhan khusus sebenarnya sangat banyak jenisnya. Pemilihan terapi perlu disesuaikan dengan kondisi setiap anak. Adapun macam terapi yang dilakukan yaitu terapi motorik, terapi Konsentrasi, terapi Bina Diri atau Terapi sesuai kebutuhan anak. APIS INKLUWINDU berfokus pada inklusi dan pengembangan siswa berkebutuhan khusus dalam lingkungan sekolah reguler.
51. DAPUR UMUM GAS METHAN adalah program yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun untuk memanfaatkan gas metana sebagai sumber energi alternatif dalam memasak. Program ini bertujuan untuk menyediakan dapur umum gratis bagi masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu dan pelaku UMKM. Inovasi ini tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
52. KIAT (Kompetisi InovAsi Kota) Madiun dalah sebuah program yang diluncurkan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun untuk mendorong inovasi di tingkat daerah. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendukung, dan memberikan penghargaan kepada berbagai inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat, ASN, dan perangkat daerah. KIAT berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi di Kota



Madiun, menjadikannya sebagai salah satu langkah penting dalam memajukan daerah melalui inovasi.

53. SILAPLING (Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan) adalah sebuah sistem informasi yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun untuk mempermudah pelaku usaha dalam melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. SILAPLING menggunakan metode TAPISAN Mc. Namara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan, serta mengacu pada dokumen lingkungan induk UKL UPL. SILAPLING, diharapkan pelaporan lingkungan menjadi lebih sistematis, transparan, dan akuntabel, mendukung tujuan smart city di Kota Madiun.
54. “PECEL TUMPANG” (PElayanan CEpat, Langsung, hemat wakTU dan gaMPANG) adalah sistem layanan administrasi berbasis digital yang dikembangkan oleh Kelurahan Taman, Kota Madiun. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.
55. SITEBAS (Sistem Informasi Terpadu Bank Sampah) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun untuk mempermudah pengumpulan data dan pemantauan aktivitas Bank Sampah di daerah tersebut. Mempermudah pengumpulan data dari Bank Sampah dan menghemat waktu serta tenaga dalam pengolahan informasi. SITEBAS, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Madiun menjadi lebih efisien dan terorganisir.



3.8. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Selain pencapaian kinerja Pemerintah Kota Madiun telah mendapatkan penghargaan pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

No.	Tanggal	Penghargaan dan Prestasi
1.	6 Januari	Penghargaan kepada Wali Kota Madiun, Dr. Maidi sebagai Pelopor Inovasi Daerah diberikan atas capaian alumni Unesa yang berkontribusi besar pada bidang Inovasi Daerah pada kegiatan Unesa Alumni Award 2023.
2.	11 Januari	Penghargaan Kepada Wali Kota Madiun, Dr. Maidi sebagai Pembina Terbaik VIII Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2023 Provinsi Jawa Timur.
3.	11 Januari	Penghargaan Zero Accident Kepada 22 Perusahaan di Kota Madiun.
4.	20 Januari	Penghargaan Muslimah Preneur tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Septyana Luckyta Sari dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI).
5.	24 Januari	Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) 2023 Kepada Pemerintah Kota Madiun dari Ombudsman RI dengan nilai 93,59, kategori A, Opini Kualitas Tertinggi, Zona Hijau.
6.	24 Januari	Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) 2023 Kepada Dinas Pendidikan Kota Madiun dari Ombudsman RI dengan nilai 93,53, kategori A, Opini Kualitas Tertinggi, Zona Hijau.
7.	24 Januari	Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) 2023 Kepada Dinas Sosial PPPA Kota Madiun dari Ombudsman RI dengan nilai 92,03, kategori A, Opini Kualitas Tertinggi, Zona Hijau.



No.	Tanggal	Penghargaan dan Prestasi
8.	24 Januari	Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) 2023 Kepada Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun dari Ombudsman RI dengan nilai 89,72, kategori A, Opini Kualitas Tertinggi, Zona Hijau.
9.	24 Januari	Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) 2023 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dari Ombudsman RI dengan nilai 93,12, kategori A, Opini Kualitas Tertinggi, Zona Hijau.
10.	24 Januari	Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) 2023 Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dari Ombudsman RI dengan nilai 95,20, kategori A, Opini Kualitas Tertinggi, Zona Hijau.
11.	24 Januari	Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) 2023 Kepada Puskesmas Banjarejo Kota Madiun dari Ombudsman RI dengan nilai 93,35, kategori A, Opini Kualitas Tertinggi, Zona Hijau.
12.	24 Januari	Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) 2023 Kepada Puskesmas Sukosari Kota Madiun dari Ombudsman RI dengan nilai 96,20, kategori A, Opini Kualitas Tertinggi, Zona Hijau.
13.	28 Februari	Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritran Award 2023 Provinsi Jawa Timur Peringkat 1 kategori Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Kota Madiun.



No.	Tanggal	Penghargaan dan Prestasi
14.	28 Februari	Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award 2023 Provinsi Jawa Timur Peringkat 1 kategori Perusahaan Besar Sektor Perdagangan dan Jasa untuk Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
15.	5 Maret	Penghargaan Kabupaten/Kota (Indonesia Barat) Terbaik (Peringkat I) Kontribusi Konten Audio Visual untuk Dinas Kominfo Kota Madiun dalam Anugerah Media Center (AMC) 2024 Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
16.	20 Maret	Penghargaan Top Pembina BUMD 2024 kepada Wali Kota Madiun, Dr. Maidi.
17.	20 Maret	Penghargaan Top BUMD Award 2024 kategori BUMD Perumdam Bintang 5 diraih untuk Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun.
18.	20 Maret	Penghargaan Top CEO BUMD 2024 kepada Dirut PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, Suyoto.
19.	28 Maret	Predikat WTP untuk LKPD 2023 oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur
20.	20 April	Rekor MURI Peragaan Busana Kebaya Kartini dengan Catwalk Terpanjang (1.009 meter).
21.	3 Mei	Penghargaan Peringkat II Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional dari Provinsi Jawa Timur.
22.	7 Mei	Penghargaan Tiga Besar Pemerintah Daerah dengan Transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Tertinggi Provinsi Jawa Timur.
23.	19 Mei	Juara 2 Pemerintah Daerah dengan Adoption Rate dan Pemanfaatan PMM Tinggi Versi Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei Provinsi Jawa Timur tahun 2024 oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
24.	27 Mei	Penghargaan Digital Government Award 2024 dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Predikat Terbaik Kategori Pemerintah Kota.
25.	11 Juni	Penghargaan Kepada Kelurahan Manisrejo sebagai Terbaik Ketiga Lomba Pelaksana Gotong Royong tingkat Jawa Timur



No.	Tanggal	Penghargaan dan Prestasi
		dalam puncak peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM XXI dan HKG PKK ke-52 Provinsi Jawa Timur tahun 2024.
26.	14 Juni	Penghargaan Kepada Kota Madiun sebagai TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa-Bali terkait Ekosistem Pengendalian Inflasi Terintegrasi Menjaga Ketersediaan Stok dan Keterjangkauan Harga Pangan.
27.	23 Juni	Pemecahan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dribble bola basket terbanyak dengan 1.223 bola basket.
28.	26 Juni	Penghargaan Pemerintah Kabupaten/Kota Atas Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31.
29.	28 Juni	Penghargaan Dharma Karya Kencana kepada Supriyadi (Ketua Pokja RDK Kampung KB Kapendis Kota Madiun) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
30.	28 Juni	Penghargaan Dharma Karya Kencana kepada Sugiharti (Ketua Pokja Kampung KB Sejahtera Kota Madiun) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
31.	29 Juni	Penghargaan Top 5 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Award 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
32.	10 Juli	Penghargaan iBangga Award atas prestasi dan komitmen serta peran aktif dalam program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta percepatan penurunan stunting 2024 dari Provinsi Jawa Timur.
33.	10 Juli	Juara satu grand desain pembangunan kependudukan award tingkat Provinsi Jawa Timur 2024.
34.	11 Juli	Penghargaan Kepada PPID Dinas Kominfo Kota Madiun sebagai 10 Instansi Terbaik Program Pariwara Antikorupsi 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.



No.	Tanggal	Penghargaan dan Prestasi
35.	30 Juli	Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan kepada Wali Kota Madiun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI.
36.	30 Juli	Penghargaan Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Kelurahan Taman oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI.
37.	30 Juli	Penghargaan Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Kelurahan Kelun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI.
38.	30 Juli	Penghargaan Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Kelurahan Oro-Oro Ombo oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI.
39.	6 Agustus	Juara I cabang vokal dalam Pekan Olahraga Antar Perusahaan Air Minum Nasional (PORPAMNAS) ke-VII untuk Kartika Candra Kumara (Kasubag Akuntansi Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun).
40.	7 Agustus	Penghargaan Innovative Government untuk Pemerintah Kota Madiun dalam Jawa Pos Radar Madiun Award 2024.
41.	7 Agustus	Penghargaan Innovative Hospital untuk RSUD Kota Madiun dalam Jawa Pos Radar Madiun Award 2024.
42.	7 Agustus	Penghargaan Innovative Corporate untuk PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dalam Jawa Pos Radar Madiun Award 2024.
43.	8 Agustus	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards dengan cakupan 100 persen.
44.	9 Agustus	Runner up Kota Paling Berkelanjutan dalam UI Green City Metric.
45.	9 Agustus	Kota Paling Berkelanjutan dalam Bidang Tata Pamong dalam UI Green City Metric.
46.	9 Agustus	Penghargaan Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional Kepada Wali Kota Madiun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
47.	9 Agustus	Penghargaan Trophy Proklim Kategori Lestari untuk Rw 08 Kelurahan Rejomulyo.



No.	Tanggal	Penghargaan dan Prestasi
48.	9 Agustus	Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 04 Kelurahan Kartoharjo
49.	9 Agustus	Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 08 Kelurahan Demangan.
50.	9 Agustus	Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 03 Kelurahan Patihan.
51.	9 Agustus	Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 02 Kelurahan Madiun Lor.
52.	9 Agustus	Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 10 Kelurahan Winongo.
53.	9 Agustus	Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 11 Kelurahan Nambangan Lor.
54.	9 Agustus	Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 02 Kelurahan Kelun.
55.	9 Agustus	Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 01 Kelurahan Pilangbango.
56.	9 Agustus	Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 06 Kelurahan Tawangrejo.
57.	9 Agustus	Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 03 Kelurahan Ngegong.
58.	23 Agustus	Medali Emas Kepada Ghaizka Agli Al Fattah Pelajar SMPN 4 Kota Madiun pada Ajang O2SN Nasional Cabor Atletik Trilomba.
59.	28 Agustus	Juara I Best Performance Water Company Kategori Kecil dalam PERPAMSI AWARDS 2024 untuk Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
60.	4 September	Medali emas oleh Surya Adi Putra dan Heru Iswanto Cabor Barongsai nomor halang rintang di PON XXI Sumut-Aceh.
61.	4 September	Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Kepada Perumda Tirta Taman Sari Kota Madiun atas partisipasi aktif dalam program Gerakan Nasional (GN).
62.	5 September	Anugrah Pandu Negeri 2024 kategori Gold oleh Indonesia Institute Publik Governance (IIPG) Kepada Pemerintah Kota



No.	Tanggal	Penghargaan dan Prestasi
		Madiun sebagai Pemda dengan kinerja dan governansi sangat memuaskan.
63.	7 September	Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia.
64.	8 September	Medali perak oleh Surya Adi Putra dan Heru Iswanto Cabor Barongsai nomor Ketangkasan Zou Tou di PON XXI Sumut-Aceh.
65.	8 September	Medali emas oleh Kurniawan Tjandraa Wijaya dan Rizky Fadillah Saputra Cabor Barongsai nomor Kecepatan di PON XXI Sumut-Aceh.
66.	8 September	Medali perunggu oleh Surya Adi Putra dan Heru Iswanto bersama tim Cabor Barongsai nomor tradisional di PON XXI Sumut-Aceh.
67.	10 September	Medali Perunggu oleh Mochamad Amin Rais cabor Kabbadi kategori National Style di PON XXI Sumut-Aceh.
68.	11 September	Medali Perak oleh Rasyid Trio Rizky Rafilullah dan tim regu putra cabor Sepak Takraw di PON XXI Sumut-Aceh.
69.	12 September	Penganugerahan Paritrana Tahun 2024 tingkat nasional kepada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun kategori Badan Usaha Terbaik sektor Perdagangan.
70.	12 September	Medali Emas oleh Savira Diah Fitri Rizkianti Cabor Kurash kelas -48 Kg di PON XXI Sumut-Aceh.
71.	17 September	Medali Perunggu oleh Tarisha Tristania Putri dari Cabor Atletik Nomor Lari Estafet 4x400 Meter Mix di PON XXI Sumut-Aceh.
72.	18 September	Medali Emas oleh Rizky Dwi Nugraha Asyari Cabor Sepak Bola di PON XXI Sumut-Aceh.
73.	24 September	Penghargaan kepada Pemerintah Kota Madiun terkait Pencapaian Pemenuhan Kelengkapan Atribut Pada Sembilan Variabel (9/9) untuk Mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Level 3 (Proaktif) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
74.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk SDN 01 Winongo



No.	Tanggal	Penghargaan dan Prestasi
75.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk SDN Oro-Oro Ombo
76.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk SDN 02 Nambangan Kidul
77.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk SDN 02 Kanigoro
78.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk SDN 02 Pandean
79.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk SDN 02 Mojorejo
80.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk SDN 02 Klegen
81.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk SDN 03 Madiun Lor
82.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk SMPN 8 Kota Madiun
83.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk SDN 01 Pandean
84.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk SDN 02 Demangan
85.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk SDN 02 Josenan
86.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk SDN 02 Kartoharjo
87.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk SDN 02 Tawangrejo
88.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk SDN 03 Taman
89.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk SDN 04 Klegen
90.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk SDN 04 Manisrejo
91.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk SDN Kejuron
92.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk SDN Kelun
93.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk SDN Rejomulyo
94.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk SD Advent Imanuel
95.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk MIS Islamiyah 01



No.	Tanggal	Penghargaan dan Prestasi
96.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk MIS Islamiyah 02
97.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk MIS Islamiyah 03
98.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk MIS Terpadu Bakti Ibu
99.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk MIN 2 Kota Madiun
100.	2 Oktober	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk MTSN Kota Madiun
101.	8 Oktober	Penghargaan Top 5 Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) Pelayanan Publik 2024 KemenPAN-RB untuk Inovasi Profit M-Tech Dinas Kominfo Kota Madiun sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Berkelanjutan.
102.	8 Oktober	Penghargaan Top 5 Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) Pelayanan Publik 2024 KemenPAN-RB untuk Inovasi Pendekar Berkumis SMPN 11 Kota Madiun sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replikasi.
103.	9 Oktober	Penghargaan Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) Kategori Pratama Tingkat Jawa Timur untuk Kelurahan Kanigoro.
104.	9 Oktober	Penghargaan Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) Kategori Pratama Tingkat Jawa Timur untuk Kelurahan Mojorejo.
105.	9 Oktober	Penghargaan Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) Kategori Pratama Tingkat Jawa Timur untuk Kelurahan Patihan.
106.	9 Oktober	Penghargaan Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) Kategori Madya Tingkat Jawa Timur untuk Kelurahan Nambangan Lor.
107.	9 Oktober	Penghargaan Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) Kategori Mandiri Tingkat Jawa Timur untuk Kelurahan Rejomulyo.
108.	9 Oktober	Penghargaan Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) Kategori Mandiri Tingkat Jawa Timur untuk Kelurahan Taman.
109.	10 Oktober	Penghargaan Anugerah Media Humas Terbaik I kategori Kabupaten/Kota tingkat Nasional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.



No.	Tanggal	Penghargaan dan Prestasi
110.	12 Oktober	Medali Perak oleh Pipit Dwichandra Sari dari cabang Boccia di Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Solo.
111.	17 Oktober	Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur untuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun sebagai Tiga Besar Daerah dengan kategori TPID kabupaten/kota pantauan IHK Berkinerja terbaik di wilayah Jawa Timur.
112.	23 Oktober	Penghargaan Terbaik Ketiga kategori Kota/Kabupaten dalam SATA Jatim Award 2024.
113.	31 Oktober	Penghargaan Terbaik Ketiga Hasil Capaian Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode Pelaporan 2023.
114.	6 November	Penghargaan Syariah Award 2024 Kepada Kota Madiun sebagai Juara II Kategori Keuangan Sosial Syariah dari Gubernur Jawa Timur.
115.	6 November	Penghargaan Syariah Award 2024 Kepada Kota Madiun sebagai Juara III Kategori Inovasi di Sektor Ekonomi Syariah dari Gubernur Jawa Timur.
116.	7 November	Penghargaan Kepada Perpustakaan Cerdas Arum Kelurahan Pangongangan sebagai Inovasi Promosi Layanan Perpustakaan Terbaik Tingkat Nasional dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
117.	7 November	Penghargaan Kepada Perpustakaan Cerdas Arum Kelurahan Pangongangan sebagai Inovasi dan Kreasi Pelibatan Masyarakat Terbaik Tingkat Nasional dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
118.	9 November	Peringkat I Pemeringkatan Profil Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2024 dari Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.
119.	13 November	Penghargaan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif Terbaik Ketiga dengan nilai 97,42 dalam Komisi Informasi (KI) Award 2024.
120.	7 November	Penghargaan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Predikat Baik dari Provinsi Jawa Timur.



No.	Tanggal	Penghargaan dan Prestasi
121.	10 November	Medali Perunggu Cabor Panahan Nomor Beregu Putra POPDA XIV Jatim oleh Miracle Adam Tirta Laksana - Khairan Nafi' Burhanudin - Parama Maheswara Putra Prasetyo.
122.	10 November	Medali Perunggu Cabor Bola Basket Putra POPDA XIV Jatim oleh Eryno Surya B dkk.
123.	10 November	Medali Perunggu Cabor Karate Nomor Kata Perorangan Putri POPDA XIV Jatim oleh Indrafata Nur.
124.	10 November	Medali Perunggu Cabor Karate Nomor Kumite -50 Kg Putra POPDA XIV Jatim oleh Rafael Ziki Arjuna.
125.	10 November	Medali Perunggu Cabor Karate Nomor Kumite -68 Kg Putra POPDA XIV Jatim oleh Prana Prasidya W.
126.	10 November	Medali Emas Cabor Karate Nomor Kumite -76 Kg Putra POPDA XIV Jatim oleh Fajar Eka Saputra.
127.	10 November	Medali Perunggu Cabor Karate Nomor Kumite -42 Kg Putri POPDA XIV Jatim oleh Maria Imalaculata.
128.	10 November	Medali Perunggu Cabor Karate Nomor Kumite -53 Kg Putri POPDA XIV Jatim oleh Uyiya Ainan A.
129.	10 November	Medali Perak Cabor Senam Nomor Artisitik Jamur Putra oleh POPDA XIV Jatim Apriliano Setiawan Rizqo Saputra.
130.	10 November	Medali Perunggu Cabor Senam Nomor Aerobik Putra POPDA XIV Jatim oleh Fahri Adly Fauzan.
131.	10 November	Medali Perak Cabor Senam Nomor Ritmik Pita Putri POPDA XIV Jatim oleh Glorie Christabell Y.
132.	10 November	Medali Perak Cabor Tennis Lapangan Nomor Ganda Putri POPDA XIV Jatim oleh Bianicha Balqis Ramadhani - Yasmin Adinda Lesti.
133.	10 November	Medali Perunggu Cabor Balap Sepeda Nomor ITT 2.000 Meter POPDA XIV Jatim oleh Rizky Herdika Febriansyah.
134.	10 November	Medali Perunggu Cabor Balap Sepeda Nomor ITT 2.000 Meter POPDA XIV Jatim oleh Janeeta Najla Fatma Wijaya.
135.	10 November	Medali Emas Cabor Balap Sepeda Nomor ITT 500 Meter POPDA XIV Jatim oleh Janeeta Najla Fatma Wijaya.
136.	10 November	Medali Perunggu Cabor Pencak Silat Nomor Tanding Kelas B Putra POPDA XIV Jatim oleh Nanda Cahya Saputra.



No.	Tanggal	Penghargaan dan Prestasi
137.	10 November	Medali Perunggu Cabor Pencak Silat Nomor Ganda Putri POPDA XIV Jatim oleh Bunga Maharani – Rafa Anggita Afifah.
138.	10 November	Medali Perunggu Cabor Judo Nomor Kelas -40 Kg Putri POPDA XIV Jatim oleh Anggun Margaretha Cahya Lestari.
139.	10 November	Medali Perunggu Cabor Judo Nomor Kelas -44 Kg Putri POPDA XIV Jatim oleh Evania Erda Afifah.
140.	10 November	Medali Emas Cabor Judo Nomor Kelas -48 Kg Putri POPDA XIV Jatim oleh Seqha Taqiyyah Syahlaa Hariyanto.
141.	10 November	Medali Perak Cabor Judo Nomor Kelas -52 Kg Putri POPDA XIV Jatim oleh Hindy Reyka Putri.
142.	10 November	Medali Perunggu Cabor Judo Nomor Kelas -63 Kg Putri POPDA XIV Jatim oleh Intan Putri Ayu Wandira.
143.	10 November	Medali Perak Cabor Judo Nomor Kelas -60 Kg Putra POPDA XIV Jatim oleh muhammad Afgan Putra Prasetyo.
144.	10 November	Medali Perunggu Cabor Judo Nomor Kelas -73 Kg Putra POPDA XIV Jatim oleh Arief Chandra Widjaya.
145.	10 November	Medali Perunggu Cabor Judo Nomor Kelas -81 Kg Putra POPDA XIV Jatim oleh Fadhal Nawauddin.
146.	21 November	Penghargaan kepada Kota Madiun kategori Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2024 tingkat Jawa Timur.
147.	21 November	Penghargaan Juara 3 Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur kepada Posyandu Dahlia Kelurahan Kejuron.
148.	21 November	Penghargaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) tingkat Provinsi Jawa Timur kepada PT INKA Madiun (atas binaan Dinkes PPKB Kota Madiun).
149.	23 November	Penghargaan Anugerah Guru Prima Terbaik 1 Tingkat Jawa Timur Kepada Ema Rochmawati Guru TK Negeri Pembina.
150.	13 November	Penghargaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Madiun atas Pencapaian sebagai Forum Peningkatan Konsumsi Ikan yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Gizi Balita Melalui Kegiatan Gemarikan tingkat Jawa Timur.



No.	Tanggal	Penghargaan dan Prestasi
151.	3 Desember	Anugerah Daerah Pelopor Transformasi Digital Pembelajaran kategori Unggul dari Kemendikdasmen.
152.	5 Desember	Predikat Kota Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2024.
153.	5 Desember	Penghargaan TOP Digital Awards 2024 kategori Top Digital Implementation 2024 Level 5 Stars.
154.	5 Desember	Penghargaan TOP Digital Awards 2024 kategori Top Leader on Digital Implementation 2024 Kepada Pj. Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto.
155.	5 Desember	Penghargaan TOP Digital Awards 2024 kategori Top CIO Digital Implementation 2024 untuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun, Noor Aflah.
156.	10 Desember	Penghargaan Juara Harapan 1 Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Timur kepada Camat Kartoharjo beserta jajaran.
157.	11 Desember	Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (Inotek Award) kategori Kepala Perangkat Daerah Inovatif Terinovatif VI untuk Kadin Bapelitbangda Kota Madiun.
158.	11 Desember	Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
159.	12 Desember	Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Kategori Daya Saing Daerah Tingkat Kota Fiskal Rendah Wilayah Barat dari Kementerian Dalam Negeri bersama Tempo.co.



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pasal 5 Ayat 4, bahwa Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui asas desentralisasi, sedangkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pemerintah pusat menjadi milik Pemerintah Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau Desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas Pembantuan yang diberikan diantaranya dalam bidang Pemerintahan yang bersifat lintas Kota/Kabupaten, sebagian tugas Pemerintahan di bidang tertentu lainnya, serta tugas Pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Kota/Kabupaten. Dalam hal ini, upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah dan untuk mengatasi keterbatasan



anggaran di Pemerintah Kota Madiun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dan dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah melalui Kementerian/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Madiun tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga Tahun 2024 laporan pertanggungjawaban hanya fokus pada capaian dan target atas kinerja program, kegiatan, sub kegiatan, dan pengelolaan APBD Kota Madiun Tahun 2024.



BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 disusun dengan sistematika dan muatan substansi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta ditambahkan dengan menampilkan capaian kinerja makro Kota Madiun Tahun 2024 untuk dapat menjadi rekomendasi perumusan kebijakan tahun selanjutnya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Akhir Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menjadi evaluasi penting terhadap pelaksanaan tahun selanjutnya agar pencapaian sasaran daerah menjadi lebih optimal. Kinerja pembangunan daerah yang sudah dijalankan diharapkan dapat menjadi sebuah prestasi sekaligus catatan kritis untuk merefleksikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terus dituntut untuk senantiasa lebih baik, bermanfaat, inovatif, dan memiliki tingkat keberlanjutan serta berkualitas.

Dengan diraihnya 155 penghargaan tingkat regional, nasional hingga internasional sepanjang periode Tahun 2024 adalah bukti nyata keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga saat ini berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen yaitu Pemerintah Daerah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kota Madiun memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Madiun yang telah mendukung agenda pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Akhir Tahun Anggaran 2024, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki dampak manfaat yang luas bagi segenap masyarakat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan Kota Madiun yang semakin "MAJU MENDUNIA".

